

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografi

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Luas dan Batas Administrasi

Secara umum, wilayah Provinsi Jawa Timur dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bagian besar, yaitu Jawa Timur daratan dan Pulau Madura. Luas wilayah Jawa Timur daratan hampir mencakup 90 persen dari seluruh luas wilayah Jawa Timur, sedangkan luas Pulau Madura hanya sekitar 10 persen. Luas wilayah Provinsi Jawa Timur yang mencapai 4.779.975 ha (sesuai dengan permendagri no 66 tahun 2011 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan) habis terbagi menjadi 38 Kabupaten/Kota (29 Kabupaten dan 9 Kota) yang terbagi ke dalam empat badan koordinasi wilayah (Bakorwil) dan 664 Kecamatan, 783 Kelurahan, serta 7.722 Desa (SUMBER DATA: Biro Adm. Pemerintahan Umum Setda Prov. Jatim) .

Dalam konstelasi wilayah yang lebih besar, provinsi Jawa Timur terletak di wilayah Timur pulau Jawa. Batas wilayah Provinsi Jawa Timur di sebelah utara, Provinsi Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa. Di sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali. Di sebelah selatan berbatasan dengan perairan terbuka, Samudera Indonesia, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.

2. Letak dan Kondisi Geografis

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Jawa (selain DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta). Provinsi Jawa Timur secara geografis terletak pada 111° 0' hingga 114°4' Bujur Timur dan 7°12' hingga 8°48' Lintang Selatan. Jawa Timur dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura.

Panjang bentangan barat-timur sekitar 400 kilometer. Lebar bentangan utara-selatan di bagian barat sekitar 200

kilometer, sedangkan di bagian timur lebih sempit, hanya sekitar 60 kilometer. Madura adalah pulau terbesar di Jawa Timur, dipisahkan dengan daratan Jawa oleh Selat Madura. Pulau Bawean berada sekitar 150 kilometer sebelah utara Jawa. Di sebelah timur Madura terdapat gugusan pulau, paling timur adalah Kepulauan Kangean, dan paling utara adalah Kepulauan Masalembu. Di bagian selatan terdapat dua pulau kecil, Nusa Barung dan Pulau Sempu.

Kondisi kawasan pada Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 4 aspek antara lain kondisi kawasan tertinggal, kondisi kawasan pesisir, kondisi kawasan pegunungan dan kondisi kawasan kepulauan.

a. Kondisi Daerah Tertinggal

Daerah Tertinggal adalah Daerah Kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Penentuan daerah tertinggal menggunakan 6 (enam) kriteria dasar, yaitu: Perekonomian masyarakat, Sumberdaya manusia, Infrastruktur, Kemampuan keuangan lokal, Aksesibilitas, dan Karakteristik daerah.

Meskipun daerah tertinggal identik dengan kemiskinan, namun pada hakekatnya pembangunan daerah tertinggal berbeda dengan penanggulangan kemiskinan. Hal utama yang membedakannya adalah pada upaya pembangunan, dimana pada pembangunan daerah tertinggal sebagai daerah yang lekat dengan permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik harus ada upaya terencana untuk mengubah wilayah tersebut menjadi daerah yang maju dengan kualitas hidup yang sama atau tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat lainnya.

Lima Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yaitu; Kab. Pamekasan (59 desa), Sampang (86 desa), Bangkalan (90 desa), Situbondo (17 desa) dan Bondowoso (62 desa) merupakan bagian dari 183 Kabupaten yang diidentifikasi mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan wilayah lainnya yang ditetapkan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 393/KEP/PEM/M-PDT/XII/2011 tentang Penetapan Desa Tertinggal di Daerah Tertinggal dan Daerah Tertinggal yang Telah Terentaskan, yang rata-rata mempunyai keterbatasan infrastruktur dan komunikasi,

rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, serta banyaknya sumberdaya yang belum dikelola secara optimal.

b. Kondisi Kawasan Pesisir

Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut. Ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut, seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut, wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat, seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat, seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

Pesisir bagian utara, selatan dan laut di wilayah Provinsi Jawa Timur mempunyai hamparan hutan mangrove, padang lamun dan ekosistem terumbu karang yang mengelilinginya yang harus dilestarikan. Ketiga ekosistem tersebut memiliki ciri, sifat dan karakter yang berbeda – beda akan tetapi saling terkait satu sama lainnya. Hubungan ketiga ekosistem tersebut adalah mutualistik yaitu di antaranya: mangrove menyediakan makanan/hara bagi padang lamun sedangkan padang lamun memecah/meredam gelombang dari lautan sehingga mangrove tumbuh dengan baik karena mangrove tidak tahan terhadap gelombang yang cukup besar.

Berdasarkan kondisi geografis, wilayah pesisir dan laut Jawa Timur ke arah daratan sebagian besar merupakan pegunungan dan perbukitan sehingga kemiringan wilayah pesisirnya relatif tinggi. Kemiringan rendah (datar) dijumpai pada sebagian kecil wilayah teluk dan lembah. Ke arah laut wilayah pesisir tersusun oleh pasir, tanah padas, batu dan karang dengan kemiringan yang relatif tajam.

c. Kondisi Kawasan Pegunungan

Secara umum wilayah Provinsi Jawa Timur merupakan kawasan subur dengan berbagai jenis tanah seperti Halosen, Pleistosen, Pliosen, Miosen, dan Kwarter yang dipengaruhi adanya gunung berapi dan salah satunya adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa yaitu Gunung Semeru. Jajaran pegunungan di Provinsi Jawa Timur tersebar mulai dari perbatasan di timur dengan adanya

Gunung Lawu, Gunung Kelud, Gunung Semeru, Gunung Bromo, Gunung Argopuro, Gunung Ijen.

d. Kondisi Kawasan Kepulauan

Pulau-pulau kecil di Jawa Timur berada dalam wilayah administratif terdiri dari 445 buah pulau yang tersebar di Kabupaten Pacitan (31 pulau), Kabupaten Tulungagung (19 pulau), Kabupaten Blitar (28 pulau), Kabupaten Malang (100 pulau), Kabupaten Situbondo (5 pulau), Kabupaten Sumenep (121 pulau), Kabupaten Gresik (13 pulau), Kabupaten Sampang (1 pulau), Kabupaten Trenggalek (57 pulau), Kabupaten Sidoarjo (4 pulau), Kabupaten Banyuwangi (15 pulau), Kabupaten Jember (50 pulau), dan Kabupaten Probolinggo (1 pulau). Dari beberapa wilayah tersebut kawasan yang memiliki pulau terbanyak adalah Kabupaten Sumenep.

3. Kondisi Topografi

Kondisi topografi Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 2 aspek antara lain :

a. Kemiringan Lahan

Tingkat kemiringan lahan didapatkan dari perbandingan ketinggian dari tiap dataran yang ada pada Provinsi Jawa Timur yang disajikan pada gambar 2.1.

Gambar 2.1 Peta Kemiringan Lahan



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur

b. Ketinggian Lahan

Secara topografi wilayah daratan Jawa Timur dibedakan menjadi beberapa wilayah ketinggian berdasarkan kesesuaian peruntukan lahan, yaitu :

- 1) Ketinggian 0 – 100 meter dpl : meliputi 41,39 % dari seluruh luas wilayah dengan topografi relatif datar dan bergelombang.
- 2) Ketinggian 100 – 500 meter dpl : meliputi 36,58 % dari luas wilayah dengan topografi bergelombang dan bergunung.
- 3) Ketinggian 500 – 1000 meter dpl : meliputi 9,49 % dari luas wilayah dengan kondisi berbukit.
- 4) Ketinggian lebih dari 1.000 meter dpl : meliputi 12,55 % dari seluruh luas wilayah dengan topografi bergunung dan terjal.

4. Kondisi Geologi

Secara umum wilayah Provinsi Jawa Timur merupakan kawasan subur dengan berbagai jenis tanah seperti Halosen, Pleistosen, Pliosen, Miosen, dan Kwartir yang dipengaruhi adanya gunung berapi, sekitar 20,60 % luas wilayah yaitu wilayah puncak gunung api dan perbukitan gamping yang mempunyai sifat erosif, sehingga tidak baik untuk dibudidayakan sebagai lahan pertanian. Sebagian besar wilayah Jawa Timur mempunyai kemiringan tanah 0-15 %, sekitar 65,49 % dari luas wilayah yaitu wilayah dataran aluvial antar gunung api sampai delta sungai dan wilayah pesisir yang mempunyai tingkat kesuburan tinggi dan dataran aluvial di lajur Kendeng yang subur, sedang dataran aluvial di daerah gamping lajur Rembang dan lajur Pegunungan Selatan cukup subur.

Kondisi geologi Jawa Timur yang cukup kaya akan potensi sumberdaya mineral, memiliki sekitar 20 jenis bahan galian yang mendukung sektor industri maupun konstruksi, yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi empat lajur, yaitu: pertama lajur Rembang terbentuk oleh batu lempung napalan dan batu gamping merupakan cekungan tempat terakumulasinya minyak dan gas bumi; kedua lajur Kendeng terbentuk batu lempung dan batupasir, potensi lempung,

bentonit, gamping; ketiga lajur Gunung Api Tengah terbentuk oleh endapan material gunung api kuartar, potensi bahan galian konstruksi berupa batu pecah (bom), krakal, krikil, pasir, tuf; keempat lajur Pegunungan Selatan terbentuk oleh batu gamping dengan intrusi batuan beku dan aliran lava yang mengalami tekanan, potensi mineral logam, marmer, onyx, batu gamping, bentonit, pospat.

5. Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 3 aspek antara lain : Daerah aliran sungai, sungai danau dan rawa, debit air.

a. Wilayah Sungai

Wilayah Jawa Timur memiliki sumber daya air yang cukup besar yang terdiri dari air permukaan, air tanah dan mata air. Secara luas Wilayah Jawa Timur terbagi dalam 7 (tujuh) Wilayah Sungai (WS) yaitu:

- 1) WS.Bengawan Solo**, memiliki luas catchment area 32.952,30 km, yang meliputi Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten/Kota Madiun, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Gresik terdiri dari Daerah Aliran Sungai (DAS) sebanyak 94 DAS.
- 2) WS.Brantas**, dengan luas catchment area 348.723,73 km² memiliki sungai utama terpanjang di Jawa Timur sepanjang 130,02 km, WS Brantas meliputi Kabupaten/Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten/Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten/Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten/Kota Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Surabaya terdiri dari Daerah Aliran Sungai (DAS) sebanyak 220 DAS.
- 3) WS.Welang-Rejoso**, dengan luas catchment area 2.601,00 km², meliputi Kabupaten/Kota Probolinggo, dan Kabupaten/Kota Pasuruan terdiri dari Daerah Aliran Sungai (DAS) sebanyak 36 DAS

- 4) **WS.Pekalen-Sampean**, dengan luas catchment area 3.953,00 km², meliputi Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Probolinggo terdiri dari Daerah Aliran Sungai (DAS) sebanyak 56 DAS.
- 5) **WS.Baru-Bajulmati**, dengan luas catchment area 3.675,00 km², meliputi Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Bondowoso terdiri dari Daerah Aliran Sungai (DAS) sebanyak 60 DAS.
- 6) **WS.Bondoyudo-Bedadung**, dengan catchment area 5.364,00 km², meliputi Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Jember terdiri dari Daerah Aliran Sungai (DAS) sebanyak 47 DAS.
- 7) **WS. Kepulauan Madura**, dengan catchment area 4.575,00 km², meliputi Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep terdiri dari Daerah Aliran Sungai (DAS) sebanyak 173 DAS.

b. Danau dan Rawa

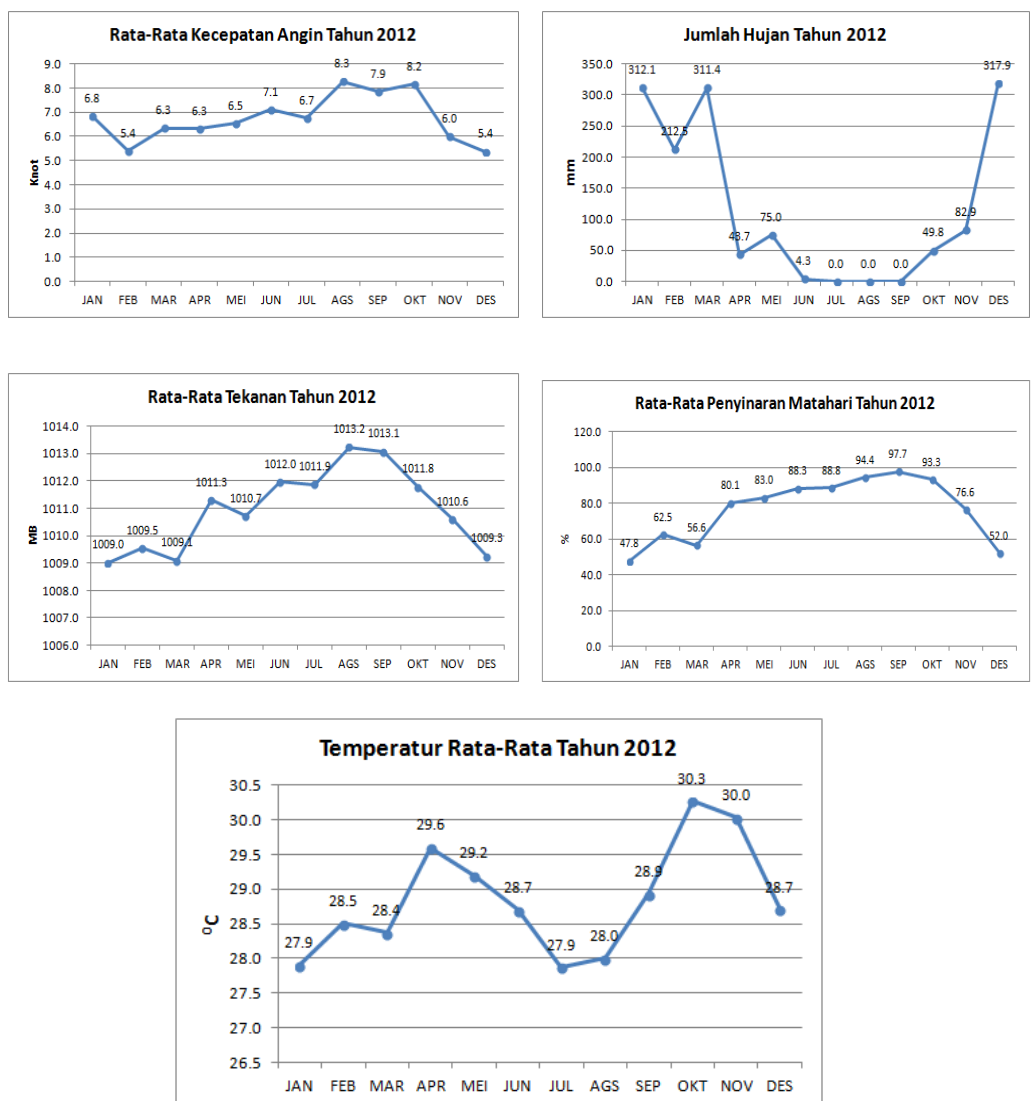
Danau dan rawa yang terdapat di Jawa Timur seluas 9.483,90 Ha dan tersebar di seluruh wilayah sungai. Danau dan rawa yang termasuk dalam Wilayah Sungai Brantas lebih tertata dalam pemanfaatan sumber air dibandingkan wilayah sungai lainnya, yang digunakan untuk keperluan penampungan air baku yang dipergunakan untuk air irigasi, air bersih, industri, pembangkit listrik (PLTA) maupun pengelak banjir.

6. Kondisi Klimatologi

Klimatologi merupakan penjelasan mengenai peredaran cuaca dalam jangka pendek dan jangka panjang serta penyebaran dari hasil proses cuaca (misalnya penyebaran suhu udara, curah hujan dan sebagainya) baik harian, bulanan maupun tahunan, hasil akhir dari klimatologi dapat digunakan untuk kepentingan penentuan awal musim hujan dan musim kemarau pada suatu daerah tertentu. Berdasarkan Data Klimatologi Tanjung Perak 2012 – Surabaya, dengan lokasi Observasi di Stasiun Meteorologi Maritim Perak, Koordinat /elevasi : 07° 12' 20" LS 112° 44' 08" BT / 3 meter, didapatkan data Klimatologi Provinsi

Jawa Timur pada tahun 2012 yang meliputi : suhu tertinggi terjadi pada Oktober dan November (30,3°C), dan terendah pada bulan Januari dan Juli (27,9°C). Tekanan udara tertinggi di bulan Agustus sebesar 1.013,2 Milibar. Jumlah curah hujan terbanyak terjadi di bulan Desember. Rata-rata penyinaran matahari terlama di bulan September, sedangkan terendah di bulan Januari. Kecepatan angin tertinggi terjadi di bulan Agustus, dan terendah di bulan Februari dan Desember.

Gambar 2.2
Kondisi Klimatologi Jawa Timur 2012



Sumber : Data Klimatologi Tanjung Perak 2012 – Surabaya,
dengan lokasi Observasi di Stasiun Meteorologi Maritim Perak,
Koordinat /elevasi : 07° 12' 20" LS 112° 44' 08" BT / 3 meter

7. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan pada Provinsi Jawa Timur terdiri dari penggunaan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan

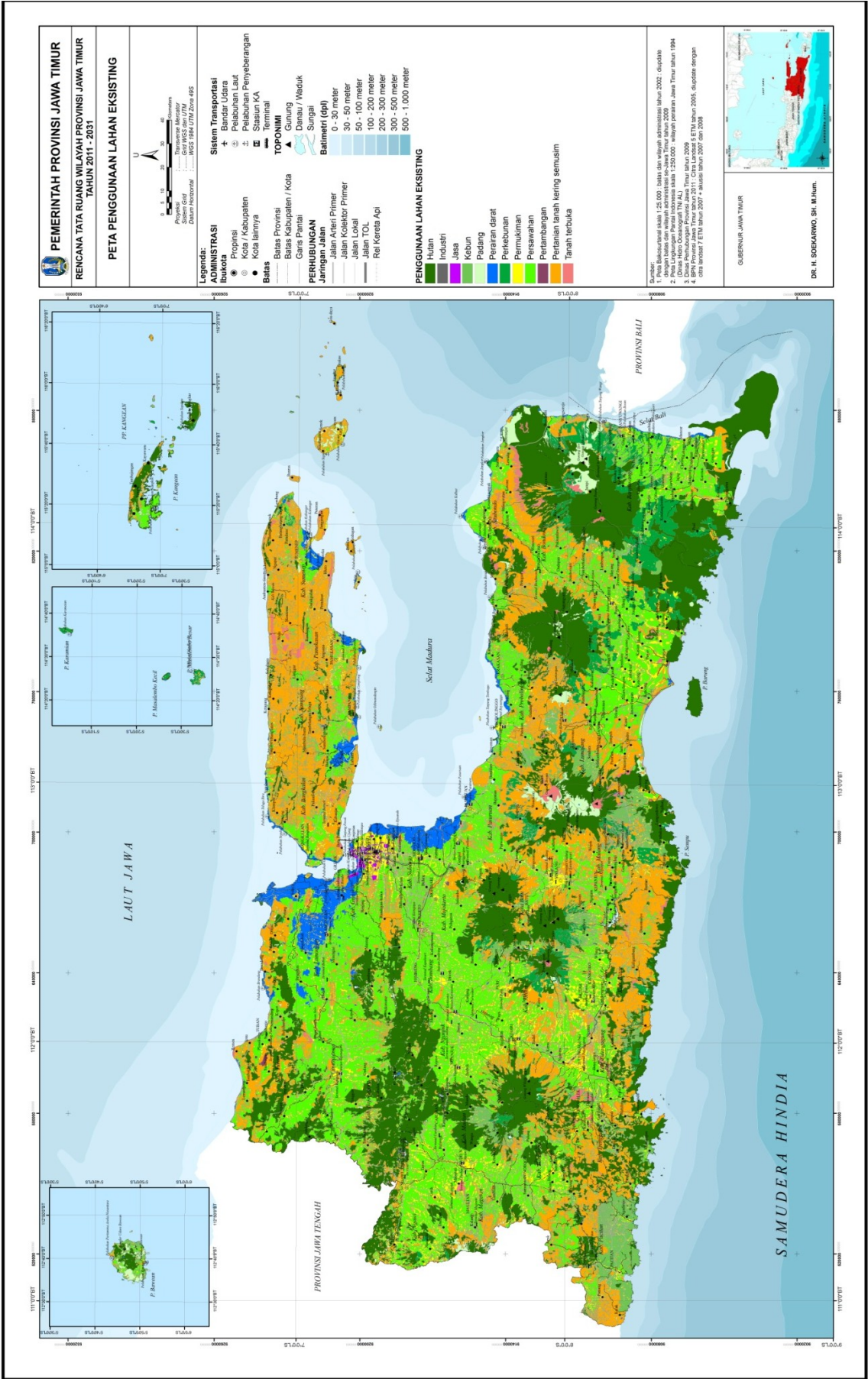
perlindungan setempat, kawasan cagar alam, suaka alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi. Kawasan budidaya terdiri dari kawasan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan industri, kawasan permukiman, kawasan pariwisata, kawasan pertambangan, kawasan perkebunan, kawasan peternakan sebagaimana yang disajikan luasannya pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Penggunaan Lahan Provinsi Jawa Timur

No.	Penggunaan Lahan	Eksisting (Ha)	No.	Penggunaan Lahan	Eksisting (Ha)
A.	KAWASAN LINDUNG		B.	KAWASAN BUDIDAYA	
1	Hutan Lindung	314.720	1	Kawasan Hutan Produksi	815.851
2	Rawa/ Danau/Waduk	10.447	2	Kawasan Hutan Rakyat	361.570
3	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam		3	Kawasan Pertanian	
	1) Suaka Margasatwa	18.009		1) Pertanian Lahan Basah	911.863
	2) Cagar Alam	10.958		2) Pertanian lahan kering/ tegalan/kebun campur	1.108.627
	3) Taman Nasional	176.696	4	Kawasan Perkebunan	359.481
	4) Taman Hutan Raya	27.868	5	Kawasan Perikanan	60.928
	5) Taman Wisata Alam	298	6	Kawasan Industri	7.404
			7	Kawasan Pemukiman	595.255
				T O T A L	4.779.975

Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur 2011-2031

Gambar 2.3
Peta Penggunaan Lahan



Sumber: RTRW Prov Jatim 2011-2031

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

1. Pertanian

Potensi pengembangan Provinsi Jawa Timur untuk lahan pertanian di Jawa Timur meliputi pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan hortikultura. Perbedaan mendasar dari pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering adalah pertanian lahan basah sepanjang tahun dapat ditanami padi karena adanya cukup air, baik dari sawah beririgasi teknis, sawah beririgasi semi teknis, sawah beririgasi sederhana, sawah pedesaan dan termasuk di dalamnya lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut. Sedangkan pertanian lahan kering biasanya tanamannya beragam, saat musim hujan ditanami padi dan saat kemarau ditanami padi gogo atau palawija, misal : kacang hijau, kedelai, kacang tanah, ubi kayu. Yang termasuk dalam pertanian lahan kering adalah tegalan, kebun campur, dan lahan pertanian yang tidak mendapat layanan irigasi. Lokasi dari potensi pengembangan wilayah untuk pertanian di Provinsi Jawa Timur disesuaikan dengan wilayah kondisi geografis dari masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan peran Provinsi Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional dan amanah Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta proyeksi lahan pertanian hingga tahun 2031 yang dilakukan dengan memperhatikan kecenderungan tingkat konsumsi penduduk terhadap komoditas padi (kebutuhan beras), tingkat produksi padi, serta kecukupan kebutuhan pangan dengan membandingkan tingkat produksi dan konsumsi maka perlu ditetapkan luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Untuk itu, seluas kurang lebih 802.357,9 Ha ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Jawa Timur. Rencana pengembangan pertanian lahan kering di wilayah Provinsi Jawa Timur ditetapkan dengan luas sekurang-kurangnya 849.033 Ha atau 17,76% dari luas Jawa Timur yang dilaksanakan di daerah-daerah yang belum terlayani oleh jaringan irigasi, kawasan pertanian lahan kering juga digunakan untuk pengembangan hutan rakyat dan tanaman perkebunan. Dan seluas sekurang-kurangnya 215,191.83 Ha ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.

Rincian rencana peruntukan lahan pertanian lahan basah dan lahan kering per kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Luas dan Sebaran Lahan Pertanian Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur

NO	KABUPATEN/KOTA	Rencana LP2B Lahan Basah	Rencana LP2B Lahan Kering	TOTAL LP2B
1	Pacitan	4.979,00	3.786,00	8.765,00
2	Ponorogo	33.050,00	1.750,00	34.800,00
3	Trenggalek	8.639,00	4.146,00	12.785,00
4	Tulungagung	20.000,00	6.000,00	26.000,00
5	Blitar	27.598,57	804,75	28.403,32
6	Kediri	40.865,00	1.426,00	42.291,00
7	Malang	33.110,30	12.777,93	45.888,23
8	Lumajang	32.144,40	178,50	32.322,90
9	Jember	81.081,00	20.522,00	101.603,00
10	Banyuwangi	61.376,00	465,00	61.841,00
11	Bondowoso	29.937,60	17.355,50	47.293,10
12	Situbondo	28.820,70	1.212,00	30.032,70
13	Probolinggo	36.789,00	1.903,00	38.692,00
14	Pasuruan	26.471,89	19.946,63	46.418,52
15	Sidoarjo	12.205,82	-	12.205,82
16	Mojokerto	27.535,00	-	27.535,00
17	Jombang	39.876,00	800,00	40.676,00
18	Nganjuk	34.776,90	16.854,00	51.630,90
19	Madiun	20.034,00	1.544,40	21.578,40
20	Magetan	19.084,00	-	19.084,00
21	Ngawi	41.523,00	-	41.523,00
22	Bojonegoro	32.430,40	33.333,57	65.763,97
23	Tuban	17.832,45	5.167,55	23.000,00
24	Lamongan	45.841,00	-	45.841,00
25	Gresik	10.346,00	-	10.346,00
26	Bangkalan	12.161,00	17.841,00	30.002,00
27	Sampang	4.714,00	28.731,00	33.445,00
28	Pamekasan	6.232,00	6.074,00	12.306,00
29	Sumenep	8.287,20	12.573,00	20.860,20
30	Kota Kediri	500,00	-	500,00
31	Kota Blitar	677,00	-	677,00
32	Kota Malang	-	-	-
33	Kota Probolinggo	1.034,67	-	1.034,67
34	Kota Pasuruan	605,00	-	605,00
35	Kota Mojokerto	104,00	-	104,00
36	Kota Madiun	444,00	-	444,00
37	Kota Surabaya	-	-	-
38	Kota Batu	1.252,00	-	1.252,00
TOTAL JATIM		802.357,90	215.191,83	1.017.549,73

Sumber : - BPS Prov Jatim, Pemerintah Kab/Kota se-Jawa Timur
Perda No. 5 Tahun 2012 ttg RTRWP Jatim 2011 - 2031

2. Perikanan

Potensi pengembangan wilayah untuk kawasan perikanan berupa kawasan minapolitan lebih dititik beratkan pada perikanan tangkap, budidaya perikanan serta pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan. Kawasan minapolitan berdasarkan turunan kawasan agropolitan merupakan kawasan yang terdiri atas satu

atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi perikanan dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem minabisnis.

Dalam menunjang pengembangan ekspor komoditi, pengembangan perikanan perlu didukung dengan pengembangan pengelolaan pasca panennya berserta fasilitas penunjangnya yang menunjang kualitas. Kawasan peruntukan perikanan secara umum tersebar mengikuti kawasan pertanian khususnya di lahan basah, danau/waduk dan sungai, serta di wilayah pesisir.

Pengembangan kawasan perikanan laut di Jawa Timur memiliki prospek yang bagus, dimana pengembangan kawasan perikanan laut ini didukung oleh pengembangan pelabuhan perikanan Brondong yang terletak di pantai Utara Jawa Timur, pengembangan pelabuhan perikanan Muncar di Kabupaten Banyuwangi, dan Prigi di Kabupaten Trenggalek.

Sedangkan potensi pengembangan budidaya perikanan di Jawa Timur dibedakan menjadi perikanan budidaya air payau, budidaya air tawar, dan budidaya air laut. Sektor perikanan budidaya air payau di Provinsi Jawa Timur sudah berkembang di kawasan Ujung Pangkah, Panceng Kabupaten Gresik, dan Sedati di Kabupaten Sidoarjo yang didominasi oleh budidaya ikan bandeng, sedangkan wilayah lain yang memiliki budidaya perikanan tambak benur/udang di Situbondo. Selain itu Budi daya air payau juga menghasilkan komoditas garam selain hasil perikanan, dimana kawasan tambak garam di wilayah Provinsi Jawa Timur meliputi : Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Tuban, Kota Pasuruan, dan Kota Surabaya.

Untuk perikanan air tawar di Provinsi Jawa Timur tersebar di berbagai wilayah dengan potensi sumber daya air cukup, seperti di Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi. Pengembangan perikanan darat dibagi menjadi perikanan kolam, mina padi dan perairan umum. Kawasan perikanan budi daya air tawar termasuk pengembangan budi daya ikan konsumsi dan ikan hias. Untuk komoditi ikan konsumsi dikembangkan diseluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur, sedangkan untuk komoditi ikan hias dikembangkan di Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung dan Kota Kediri.

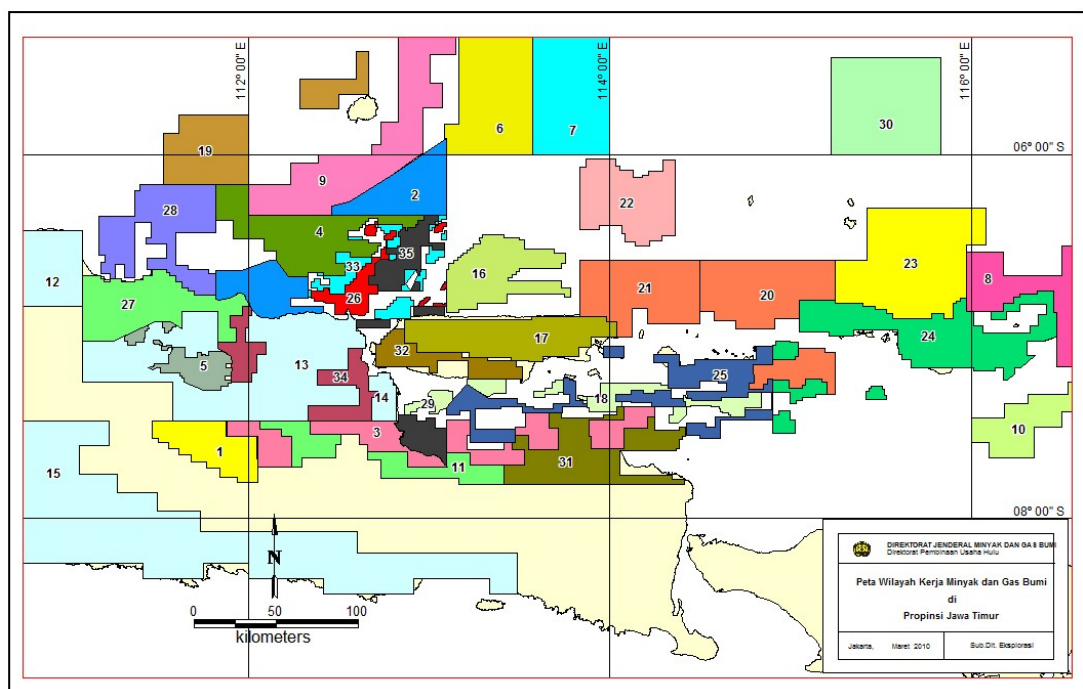
Perikanan budidaya air laut merupakan potensi dasar Provinsi Jawa Timur yang dapat dikembangkan sebagai penunjang perikanan tangkap, prospek tersebut dapat memberikan motivasi terhadap

nelayan untuk memberdayakan potensi kelautan di Jawa Timur. Pengembangan kawasan perikanan laut di Jawa Timur memiliki prospek yang dapat diunggulkan, seperti adanya sentra pengembangan ikan laut di bagian pantai utara Jawa Timur. Pelabuhan perikanan Brondong yang terletak di pantai utara Jawa Timur memiliki lokasi yang strategis yang dapat dijadikan sebagai pilot project pengembangan PPI lainnya terutama di bagian selatan sebab kawasan yang layak/fleksibel adalah Pantai Selatan Jawa Timur (eksploitasi masih kurang dari 10% dari potensi lestari) padahal perairan laut di bagian selatan memiliki potensi yang cukup besar.

3. Pertambangan

Kawasan pertambangan di wilayah Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi pertambangan mineral, pertambangan minyak dan gas bumi serta potensi panas bumi. Pertambangan mineral meliputi pertambangan mineral logam, pertambangan mineral non logam dan pertambangan batuan, dengan penyebaran pertambangan mineral logam di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar; Kabupaten Jember; Kabupaten Lumajang; Kabupaten Malang; Kabupaten Pacitan; Kabupaten Trenggalek; dan Kabupaten Tulungagung. Sedangkan pertambangan mineral non logam dan pertambangan batuan tersebar di seluruh wilayah kabupaten di Jawa Timur. Adapun potensi pertambangan mineral logam yang ada di Jawa Timur, diantaranya adalah Pasir Besi, Emas dan Mineral Pengikutnya, dan Mangan. Potensi pengembangan kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi berlokasi pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas, sedangkan untuk potensi panas bumi terdapat pada lokasi-lokasi yang berada didaerah pegunungan di Jawa Timur, sebagaimana terlihat pada peta dan keterangan berikut.

Gambar 2.4
Peta Wilayah Kerja Minyak Bumi dan Gas



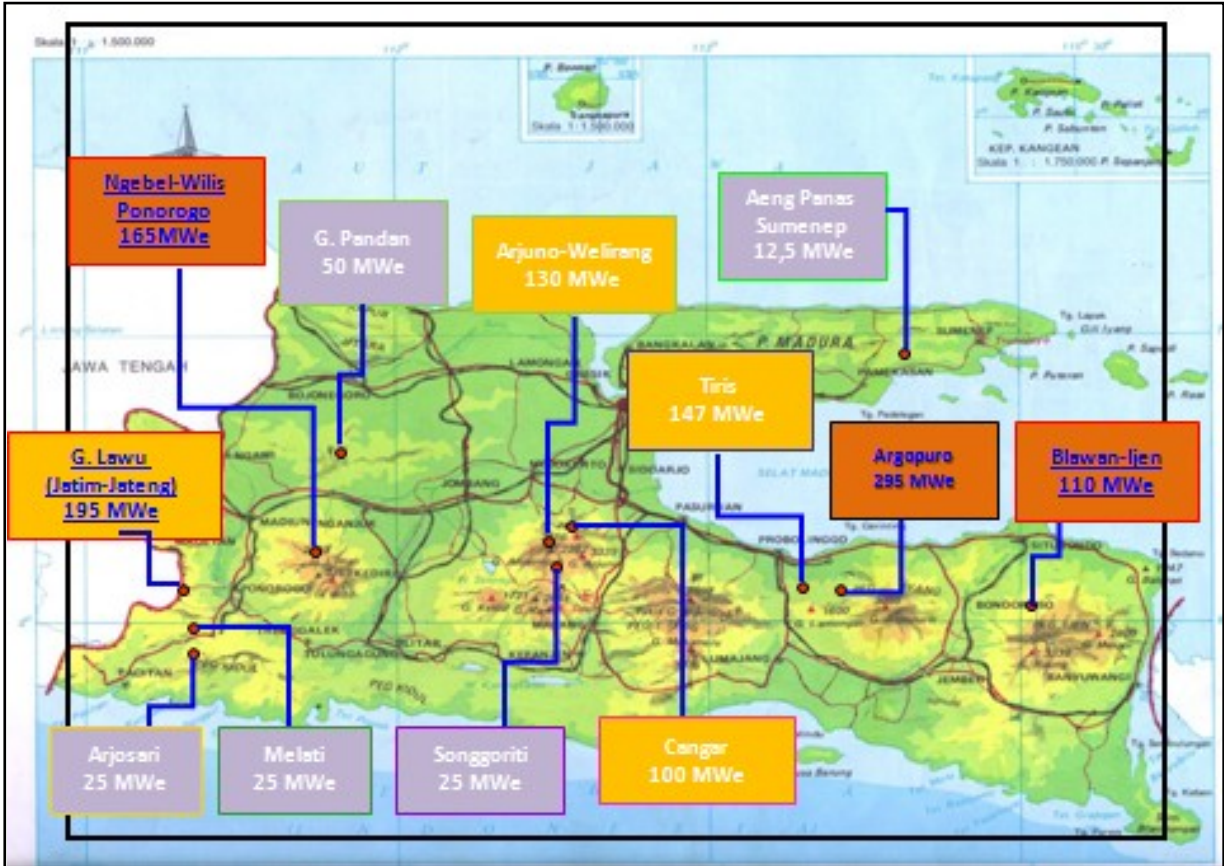
Sumber: Data dan Informasi ESDM Tahun 2008

Keterangan:

No.	Nama Blok	Operator	Status
1	ALAS JATI BLOCK	PT. INSANI BINA PERKASA	EKSPLORASI
2	BAWEAN	CAMAR RESOURCES CANADA INC.	PRODUKSI
3	BRANTAS	LAPINDO BRANTAS INC.	PRODUKSI
4	BULU	PEARLOIL (SATRIA) LTD.	EKSPLORASI
5	CEPU BLOCK	MOBIL CEPU LTD.	PEMBANGUNAN
6	EAST BAWEAN I	EAST BAWEAN LTD.	EKSPLORASI
7	EAST BAWEAN II	HUSHY OIL BAWEAN LTD.	EKSPLORASI
8	EAST KANGEAN	GREENSTAR ASSET LIMITED	EKSPLORASI
9	EAST MURIAH	PEARL OIL (EAST MURIAH) LIMITED	EKSPLORASI
10	EAST SEPANJANG	PT EASCO EAST SEPANJANG	EKSPLORASI
11	GUNTING	EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION INDONESIA (GUNTING) LIMITED.	EKSPLORASI
12	JAWA BAGIAN TIMUR AREA-2	PERTAMINA EP	PRODUKSI
13	JAWA BAGIAN TIMUR AREA-3	PERTAMINA EP	PRODUKSI
14	JAWA BAGIAN TIMUR AREA-6	PERTAMINA EP	PRODUKSI
15	JAWA BAGIAN TIMUR AREA-7	PERTAMINA EP	PRODUKSI
16	KETAPANG BLOCK	PC KETAPANG II LTD.	PEMBANGUNAN
17	MADURA	SPE PETROLEUM LTD	EKSPLORASI
18	MADURA OFFSHORE BLOCK	SANTOS (MADURA OFFSHORE) PTY. LTD.	PRODUKSI
19	MURIAH	PC MURIAH LTD.	PEMBANGUNAN
20	NORTH EAST MADURA-I	KNOC NEMONE LTD.	EKSPLORASI
21	NORTH EAST MADURA-II	KNOC NEMTWO LTD.	EKSPLORASI
22	NORTH EAST MADURA-III	ANADARKO INDONESIA COMPANY	EKSPLORASI
23	NORTH KANGEAN	PETROJAVA NORTH KANGEAN INC	EKSPLORASI
24	ONSHORE & OFFSHORE KANGEAN	KANGEAN ENERGY INDONESIA LTD.	PRODUKSI
25	ONSHORE AND OFFSHORE MADURA STRAIT AREA	HUSKY OIL (MADURA) LTD.	PEMBANGUNAN
26	PANGKAH	AMERADA HESS (INDONESIA-PANGKAH) LTD.	PRODUKSI
27	RANDUGUNTING BLOCK	PERTAMINA EP RANDUGUNTING	EKSPLORASI
28	REMBANG	ORNA INTERNATIONAL LTD.	EKSPLORASI
29	SAMPANG	SANTOS (SAMPANG) PTY LTD.	PRODUKSI
30	SIBARU	MITRA ENERGY (INDONESIA SIBARU) LTD.	EKSPLORASI
31	SOUTH EAST MADURA	PT. ENERGI MINERAL LANGGENG	EKSPLORASI
32	SOUTH MADURA	SOUTH MADURA EXPLORATION COMPANY PTE.LTD.	EKSPLORASI
33	TERUMBU	AWE (TERUMBU) NZ LIMITED	EKSPLORASI
34	TUBAN	PT PERTAMINA HULU ENERGI TUBAN.	PRODUKSI
35	WEST MADURA	PERTAMINA	PRODUKSI

Sumber: Data dan Informasi ESDM

Gambar 2.5
Peta Lokasi Wilayah Panas Bumi di Jawa Timur



Keterangan:

No.	LOKASI	POTENSI (MWe)	KAB/KOTA	KETERANGAN
1	Ngebel-Wilis	165	Ponorogo dan Madiun	Sudah berIUP PT. Bakrie Power
2	Blawan-ljen	110	Bondowoso, Banyuwangi dan Situbondo	Sudah berIUP PT. Medco Cahaya Geothermal
3	Iyang-Argopuro	295	Probolinggo dan Lumajang	Sudah berIUP PT.PGE
4	Gunung Pandan	50	Madiun dan Bojonegoro	Sudah disurvei Diusulkan menjadi WKP
5	Songgoriti-Kawi	25	Batu dan Malang	Sudah disurvei Diusulkan menjadi WKP
6	Gunung Arjuno-Welirang	265	Mojokerto dan Malang	Sudah disurvei Diusulkan menjadi WKP
7	Tiris-Mount Lamongan	147	Probolinggo dan Lumajang	Mendapat PSP
8	Bromo-Tengger			Mendapat PSP
9	Wilis II		Ngawi	Diusulkan mendapat PSP
10	Gunung Lawu	195	Ngawi	Diusulkan mendapat PSP
11	Melati	25	Pacitan	
12	Rejosari	25	Pacitan	

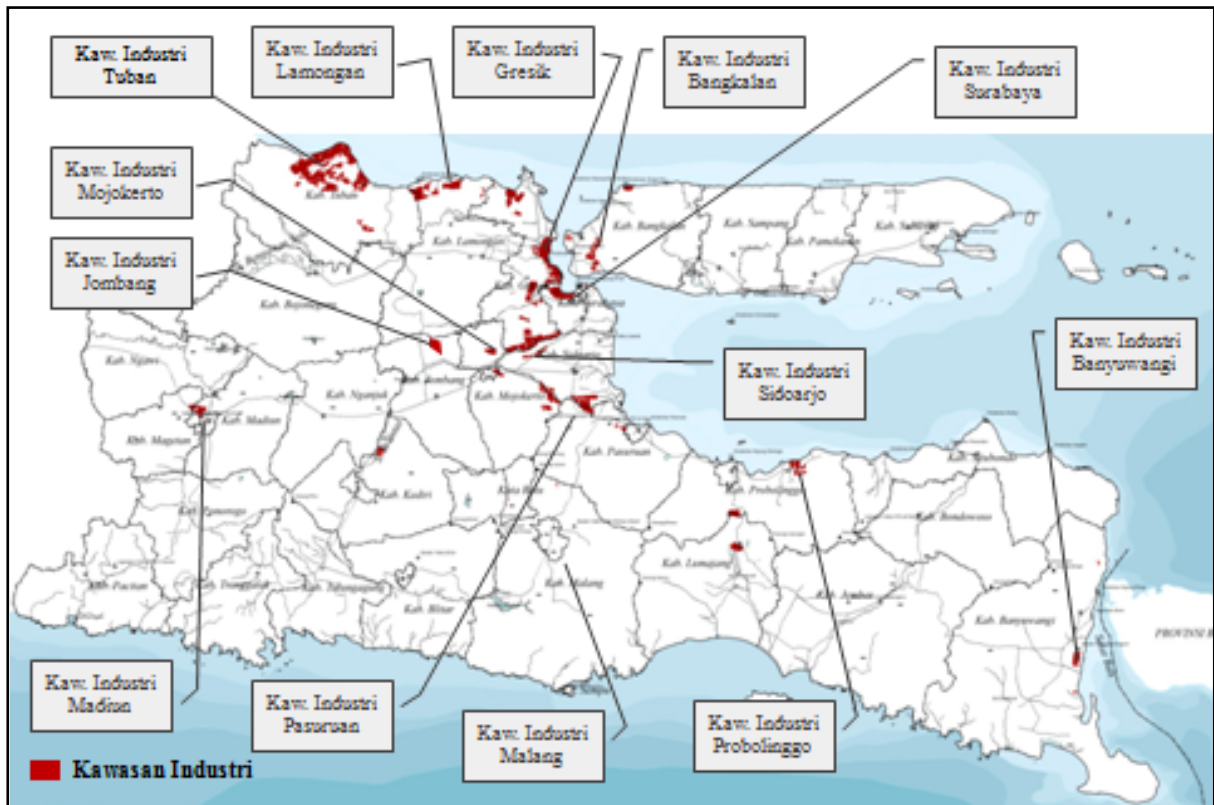
Keterangan : IUP (Ijin Usaha Pertambangan); WKP (Wilayah Kerja Pertambangan); PSP (Penugasan Survei Pendahuluan).

4. Industri

Kawasan peruntukan industri di Provinsi Jawa Timur meliputi: Kawasan industri, Kawasan peruntukan industri di luar kawasan industri, dan sentra industri. Untuk mendorong pertumbuhan wilayah Provinsi Jawa Timur, maka pada dasarnya setiap daerah akan dikembangkan kawasan industri. Area industrialisasi di Jawa Timur masih terbuka bagi investor, kondisi tersebut dapat ditunjukkan adanya kawasan industri yang berkembang di wilayah pantura dan wilayah selatan Jawa Timur. Sektor industri yang berpotensi untuk dikembangkan adalah industri perikanan, industri manufaktur, industri pertambangan.

Potensi pengembangan kawasan industri baru di Jawa Timur sangat besar terutama di wilayah pantura serta sekitar Surabaya. Meskipun demikian beberapa wilayah lain juga potensial untuk mengembangkan kawasan industri terutama wilayah yang memiliki aksesibilitas laut dan udara besar. Berbagai industri pengolah hasil alam lebih cenderung kewilayah utara Jawa Timur, diantaranya pengembangan kawasan industri Tuban, diarahkan pengembangan di wilayah utara dan selatan sebagai pengembangan industri semen, dan petrochemical dengan ditunjang oleh adanya pelabuhan, pengembangan kawasan industri Lamongan, diarahkan pengembangan di wilayah utara sebagai pengembangan industri manufaktur, pengalengan ikan, kawasan penunjang kegiatan dilepas pantai (Shorebase), pengembangan kawasan industri Banyuwangi, diarahkan pengembangan di wilayah timur selatan, sebagai pengembangan industri perikanan, pengembangan kawasan industri wilayah selatan, diarahkan di wilayah Kabupaten Jember tepatnya di Puger dan di wilayah Kabupaten Trenggalek tepatnya di Prigi sebagai pengembangan kawasan industri perikanan, pengembangan kawasan industri Madiun, diarahkan sebagai pengembangan industri perkeretaapian dengan melibatkan masyarakat pengrajin, pergudangan, pengembangan kawasan industri Bangkalan, diarahkan sebagai kawasan industri pengolahan, pergudangan. Adapun prioritas pengembangan Kawasan Industri di Jawa Timur dapat dilihat pada gambar 2.6.

Gambar 2.6
Peta Persebaran Kawasan Industri di Jawa Timur



Sumber: Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 2011-2031

Pengembangan kawasan industri di Jawa Timur didasarkan pada kecenderungan perkembangan lokasi kawasan industri di Jawa Timur saat ini dan potensi kawasan. Pengembangan kawasan industri skala besar yang berdampak penting terhadap perkembangan wilayah dalam arti berhubungan dengan pangsa pasar ekspor saat ini dikonsentrasikan di sekitar pantai utara Jawa, mulai dari Surabaya, Mojokerto, Gresik, Sidoarjo pada kawasan gerbangkertosusila. Industri kimia dasar berdampak penting terhadap pembangunan dan perkembangan wilayah, seperti industri semen, farmasi, bahan makanan, serta petro kimia dapat dikonsentrasikan di wilayah Surabaya, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Tuban, dan Lamongan. Adapun peta persebaran Kawasan Peruntukan Industri di Kawasan Gerbangkertosusila dapat dilihat pada Gambar 2.7 berikut

Gambar 2.7
Peta Persebaran Kawasan Peruntukan Industri di Gerbangkertosusila



Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Timur & Identifikasi Lapangan (Tahun 2012)

5. Pariwisata

Wilayah Jawa Timur memiliki potensi pariwisata cukup besar yang tersebar hampir di seluruh kabupaten/kota. Kawasan peruntukan pariwisata di Provinsi Jawa timur dibagi dalam: daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata hasil buatan manusia.

Daya tarik wisata alam antara lain meliputi: Air Terjun Sedudo di Kabupaten Nganjuk, Api Abadi di Kabupaten Pamekasan, Gua Gong, dan Pantai Teleng Ria di Kabupaten Pacitan, Pantai Pasir Putih di Kabupaten Situbondo, Pantai Balekambang di Kabupaten Malang, Pantai Plengkung, Pantai Sukamade, dan Kawah Ijen di Kabupaten Banyuwangi, Gua Lowo dan Pantai Prigi di Kabupaten Trenggalek, Gua Maharani dan Pantai Tanjung Kodok di Kabupaten Lamongan, Kawah ijen di Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso, Pantai Lombang dan Pantai Slopeng di Kabupaten Sumenep, Pantai Popoh di Kabupaten Tulungagung, Pemandian Air Panas Cangar Tahura R. Soerjo di Kota Batu dan sekitarnya, Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru (BTS) di Probolinggo dan sekitarnya dan Telaga Sarangan di Kabupaten Magetan.

Adapun daya tarik wisata budaya antara lain meliputi: Asta Tinggi dan Keraton di Kabupaten Sumenep, Candi Penataran di Kabupaten Blitar; Gua Akbar, Makam Sunan Bonang di Kabupaten Tuban; Kompleks Makam Gus Dur, di Kabupaten Jombang, Makam Aer Mata Ebu di Kabupaten Bangkalan, Makam Proklamator Bung Karno di Kota Blitar, Makam Sunan Ampel di Kota Surabaya, Makam Sunan Drajat di Kabupaten Lamongan, Makam Sunan Giri, Makam Maulana Malik Ibrahim, di Kabupaten Gresik, Situs Peninggalan Budaya Majapahit di Kabupaten Mojokerto.

Sedangkan daya tarik wisata hasil buatan manusia antara lain meliputi Kebun Binatang Surabaya di Kota Surabaya, Kebun Raya Purwodadi di Kabupaten Pasuruan, Taman Safari di Kabupaten Pasuruan, Jatim Park dan Batu Night Spectacular di Kota Batu, Taman Sengkaling dan Waduk Selorejo di Kabupaten Malang, Wisata Bahari Lamongan (WBL) di Kabupaten Lamongan.

6. Kehutanan

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.395/Menhut-II/2011 tentang penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, kawasan hutan Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 3 antara lain : kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi, dan kawasan suaka alam.

Hutan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna pembangunan berkelanjutan. Hutan lindung merupakan kawasan dengan sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kawasan sekitar dan bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah erosi dan banjir yang mutlak fungsinya sebagai penyangga kehidupan.

Oleh karena itu kawasan ini sangat terbatas untuk dimanfaatkan. Luasan hutan lindung di provinsi Jawa Timur seluas 344.742 Ha.

Kawasan suaka alam merupakan kawasan yang memiliki ekosistem khas yang merupakan habitat alam yang memberikan perlindungan bagi flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam, dan kawasan ini terdiri dari suaka margasatwa, cagar alam, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Luasan kawasan Suaka Alam/Pelestarian Alam daratan di Jawa Timur seluas 230.126 Ha, sedangkan untuk luasan kawasan suaka alam/pelestarian alam perairan seluas 3.506 Ha.

Hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali. Luasan hutan produksi untuk provinsi Jawa Timur seluas 782.772 Ha.

Rincian rencana peruntukan kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi dan kawasan suaka alam per kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3
Luas kawasan hutan per kabupaten/kota se Jawa Timur

NO	KABUPATEN/KOTA	HUTAN PRODUKSI	HUTAN LINDUNG	SUAKA ALAM/PELESTARIAN ALAM		TOTAL
				DARATAN	PERAIRAN	
1	BANYUWANGI	3.218	600	0	0	3.818
2	BANGKALAN	56.890	57.079	63.115	0	177.084
3	BLITAR	23.706	12.754	0	0	36.460
4	BOJONEGORO	94.343	1.457	0	0	95.800
5	BONDOWOSO	28.286	30.757	1.538	0	60.581
6	GRESIK	993	0	4.548	0	5.541
7	JEMBER	29.079	45.139	47.694	0	121.912
8	JOMBANG	22.698	620	2.765	0	26.083
9	KEDIRI	13.832	8.153	477	0	22.462
10	LAMONGAN	31.201	225	0	0	31.426
11	LUMAJANG	23.515	12.652	23.295	0	59.462
12	MADIUN	40.456	5.828	19	0	46.303
13	MAGETAN	3.390	3.987	0	0	7.377

NO	KABUPATEN/KOTA	HUTAN PRODUKSI	HUTAN LINDUNG	SUAKA ALAM/PELESTARIAN ALAM		TOTAL
				DARATAN	PERAIRAN	
14	MALANG	45.058	41.492	22.031	0	108.581
15	MOJOKERTO	10.812	4.254	11.276	0	26.342
16	NGANJUK	42.324	7.554	0	0	49.878
17	NGAWI	42.003	2.992	0	0	44.995
18	PACITAN	2.216	265	0	0	2.481
19	PAMEKASAN	592	373	0	0	965
20	PASURUAN	14.286	6.966	9.937	0	31.189
21	PONOROGO	31.743	16.389	210	0	48.342
22	PROBOLINGGO	23.434	23.176	9.961	0	56.571
23	SAMPANG	797	0	0	0	797
24	SIDOARJO	0	0	0	0	0
25	SITUBONDO	36.385	19.716	27.732	3.506	87.339
26	SUMENEP	29.420	11.925	513	0	41.858
27	TRENGGALEK	44.169	17.620	0	0	61.789
28	TUBAN	52.986	336	2	0	53.324
29	TULUNGAGUNG	31.738	9.081	0	0	40.819
30	KOTA BATU	2.985	3.340	5.013	0	11.338
31	KOTA BLITAR	0	0	0	0	0
32	KOTA KEDIRI	217	12	0	0	229
33	KOTA MADIUN	0	0	0	0	0
34	KOTA MALANG	0	0	0	0	0
35	KOTA MOJOKERTO	0	0	0	0	0
36	KOTA PASURUAN	0	0	0	0	0
37	KOTA PROBOLINGGO	0	0	0	0	0
38	KOTA SURABAYA	0	0	0	0	0
JUMLAH		782.772	344.742	230.126	3.506	1.361.146
		782.772	344.742	233.632		

Sumber : SK.395/Menhut-II/2011

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana merupakan kawasan atau wilayah yang memiliki ancaman atau gangguan baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam dan faktor sosial yang mana semua itu mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan,kehilangan harta benda serta dampak psikologis.

Di wilayah Provinsi Jawa Timur, kawasan rawan bencana alam dikelompokkan dalam kawasan rawan bencana tanah longsor, kawasan rawan bencana gelombang pasang, kawasan rawan bencana banjir, kawasan rawan bencana kebakaran hutan, kawasan rawan angin kencang dan puting beliung, kawasan rawan bencana gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tsunami, dan kawasan luapan lumpur. Dengan adanya bencana ini dapat berakibat rusaknya lingkungan secara

menyeluruh. Dengan demikian harus melakukan antisipasi terhadap bencana yang setiap saat dapat terjadi, melalui pembentukan suatu tatanan baik upaya melestarikan kawasan lindung dan kegiatan penanggulangan bencana secara dini.

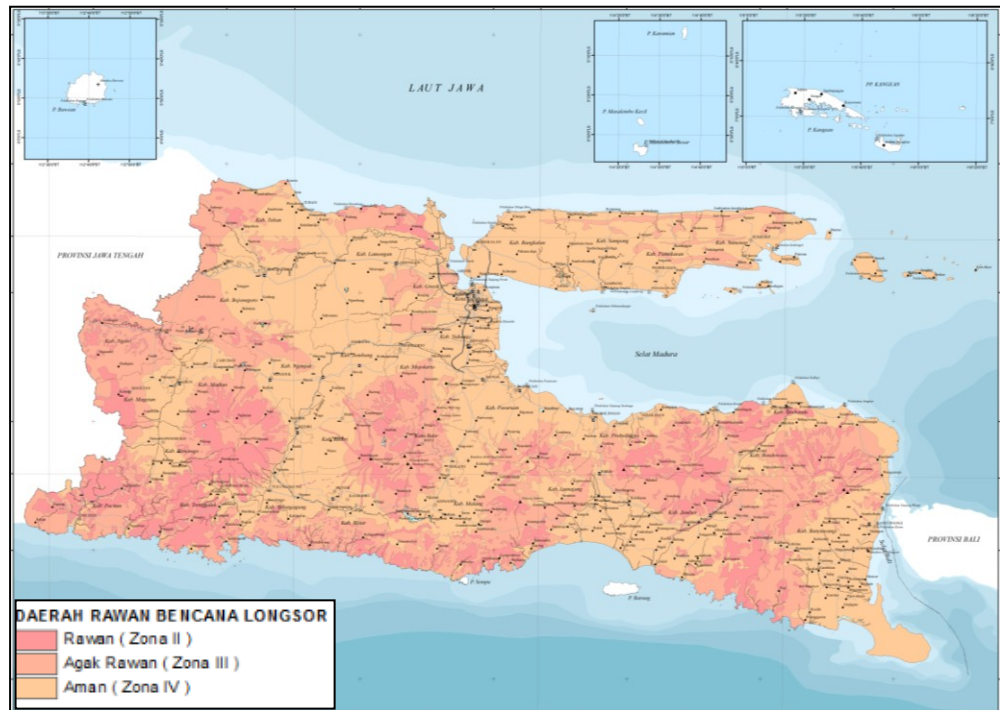
1. Kawasan Rawan Bencana Longsor

Secara geografis sebagian besar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan rawan bencana alam, dan salah satu bencana alam yang sering terjadi adalah bencana longsor. Sejalan dengan proses pembangunan berkelanjutan perlu diupayakan pengaturan dan pengarahan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan prioritas utama pada penciptaan keseimbangan lingkungan.

Salah satu upaya yang diambil adalah melalui pelaksanaan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana alam agar dapat ditingkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan masyarakat terutama di kawasan rawan bencana longsor. Kriteria penetapan kawasan rawan tanah longsor menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran. Ada 6 (enam) jenis tanah longsor, yakni: longsor translasi, longsor rotasi, pergerakan blok, runtuh batu, rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan. Jenis longsor translasi dan rotasi paling banyak terjadi di Indonesia. Sedangkan longsor yang paling banyak memakan korban jiwa manusia adalah aliran bahan rombakan.

Kawasan rawan bencana longsor pada Provinsi Jawa Timur adalah kawasan sekitar lereng pegunungan dengan kemiringan 25%-40%.

Gambar 2.8
Peta Rawan Bencana Longsor



2. Kawasan Rawan Gelombang Pasang

Gelombang pasang merupakan gelombang yang ditimbulkan oleh gaya tarik menarik antara bumi dengan planet-planet lain terutama dengan bulan dan matahari, gelombang ini mempunyai periode sekitar 12,4 jam dan 24 jam. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional kriteria kawasan rawan gelombang pasang adalah kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari.

Kawasan rawan gelombang pasang di Provinsi Jawa Timur berada di kawasan sepanjang pantai di wilayah Jawa Timur baik yang berbatasan dengan Laut Jawa, Selat Bali, Selat Madura, Samudera Hindia dan di kawasan kepulauan.

3. Kawasan Rawan Banjir

Banjir adalah suatu keadaan sungai, dimana aliran sungai tidak tertampung oleh palung sungai, sehingga terjadi limpasan dan atau genangan pada lahan yang semestinya kering. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kriteria kawasan rawan banjir adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau

berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir. Lokasi dengan potensi banjir yang paling tinggi terdapat pada Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan terutama pada wilayah yang dilewati oleh sungai Bengawan Solo.

4. Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Angin Kencang

Kebakaran hutan merupakan peristiwa dimana terbakarnya hutan atau adanya titik-titik api/panas yang rentan terbakar. Kebakaran hutan secara alami umumnya disebabkan oleh faktor cuaca dan iklim, aliran magma/lava/lahar dari letusan gunungberapi, maupun pada lahan gambut. Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan angin kencang di Jawa Timur meliputi kawasan di Gunung Arjuno, Gunung Kawi, Gunung Welirang dan Gunung Kelud dan kawasan-kawasan dengan potensi angin puting beliung.

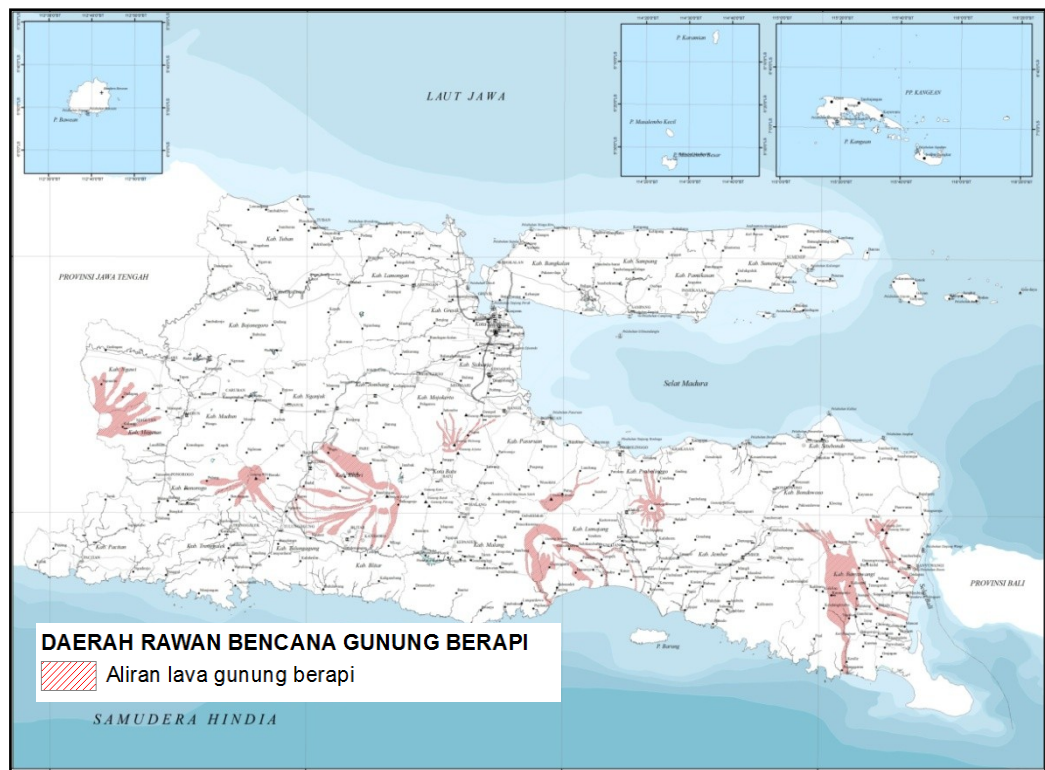
5. Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi

Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi merupakan kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana letusan gunung berapi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kriteria penetapan kawasan rawan letusan gunung berapi meliputi:

- a. wilayah di sekitar kawah atau kaldera; dan/atau
- b. wilayah yang sering terlanda awan panas, aliran lava, aliran lahar lontaran atau guguran batu pijar dan/atau aliran gas beracun.

Kawasan rawan letusan gunung berapi merupakan kawasan yang sering dan atau mempunyai potensi terancam bahaya letusan gunung api baik secara langsung maupun tidak langsung yang meliputi daerah terlarang, daerah bahaya I, dan daerah bahaya II. Kawasan rawan letusan gunung berapi di Jawa Timur berada pada lereng gunung berapi yang masih aktif.

Gambar 2.9
Peta Rawan Bencana Gunung Berapi



Sumber : Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 2011-2031

6. Kawasan Rawan Gempa Bumi

Kawasan Rawan Gempa bumi merupakan kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana gempa bumi yang mengakibatkan berguncangnya bumi disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif aktivitas gunung api atau runtuh batuan. Kekuatan gempa bumi akibat aktivitas gunung api dan runtuh batuan relatif kecil sehingga kita akan memusatkan pembahasan pada gempa bumi akibat tumbukan antar lempeng bumi dan patahan aktif.

Gempa bumi berlaku setiap hari di bumi, tetapi umumnya berskala kecil, sehingga tidak menyebabkan kerusakan. Gempa bumi yang kuat mampu menyebabkan kerusakan dan kehilangan nyawa yang besar melalui beberapa cara termasuk retakan pecah (fault rupture), getaran bumi (gegaran) banjir disebabkan oleh tsunami, lempengan pecah, berbagai jenis kerusakan muka bumi kekal seperti tanah runtuh, tanah lembik, dan kebakaran atau perlepasan bahan beracun. Kriteria kawasan rawan gempa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami

gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII Modified Mercally Intensity (MMI).

Di Provinsi Jawa Timur Lokasi Gempa berdasarkan Skala MMI adalah wilayah bagian Selatan yakni Kabupaten Tulungagung, KabupatenTrenggalek, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi bagian selatan.

7. Kawasan Rawan Tsunami

Penetapan wilayah rawan tsunami didasarkan pada angka kejadian di masa lalu serta keberadaan lempeng tektonik. Berdasarkan kondisi geologi, selain kaya akan sumberdaya alam wilayah selatan Jawa juga merupakan daerah dengan tingkat kerawanan yang tinggi terhadap bencana alam, seperti rawan gempa tektonik dan vulkanik disepanjang “ring of fire” dari Sumatra – Jawa – Bali – Nusa Tenggara – Banda – Maluku yang berdampak terhadap adanya bencana tsunami.

Di wilayah Jawa Timur wilayah rawan tsunami utamanya pada pantai selatan Jawa Timur, yaitu:

- a. Resiko besar tsunami, meliputi : Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kabupaten Pacitan , Kabupaten Trenggalek.
- b. Resiko sedang tsunami, meliputi : Kabupaten Malang bagian selatan, Kabupaten Blitar selatan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Tulungagung.

8. Kawasan Luapan Lumpur

Kawasan luapan lumpur meliputi area terdampak dari bahaya luapan lumpur, polusi gas beracun, dan penurunan permukaan tanah (land subsidence) di wilayah Kabupaten Sidoarjo

2.1.1.4 Kondisi Demografi

Berdasarkan data sementara Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2012 jumlah penduduk Jawa Timur adalah 38.052.950 jiwa.Terdiri dari laki-laki sebanyak 18.740.054 jiwa dan perempuan sebanyak 19.312.896. Mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Jawa Timur tahun 2011 dimana jumlah penduduk sebesar 37.781.599 jiwa. Terdiri dari Laki-laki sebanyak 18.599.308 jiwa dan perempuan sebanyak 19.182.291 jiwa. Sedangkan berdasarkan data sementara BPS

Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan struktur umur, penduduk Jawa Timur terbanyak adalah penduduk Usia 15-64 tahun.

Jumlah Penduduk berdasarkan struktur umur 15-64 tahun merupakan modal dasar pembangunan yang baik bila ditunjang dengan kualitas Sumber daya manusia yang berkualitas. Struktur umur berdasarkan usia produktif sangat potensial dikembangkan menjadi faktor penggerak ekonomi Jawa Timur.

Berdasarkan data sementara BPS Provinsi Jawa Timur, distribusi penduduk di Jawa Timur bervariasi antara satu Kabupaten/Kota. Pada tahun 2012 distribusi penduduk terbesar berada di Kota Surabaya dengan jumlah penduduk sebesar 2.801.409 jiwa. Sedangkan Kota Mojokerto menjadi daerah dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu sebesar 122.550 jiwa. Jumlah penduduk Jawa Timur merupakan yang terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Jumlah Penduduk yang terus meningkat disebabkan oleh tiga hal yaitu kelahiran hidup yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun, jumlah kematian yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun serta migrasi penduduk antar Provinsi.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang terus positif membawa dampak yang baik pada penyerapan tenaga kerja baik pada sektor formal maupun informal. Penyerapan tenaga kerja memungkinkan terjadinya migrasi penduduk dari luar Jawa Timur untuk menjadi penduduk di Jawa Timur. Selain migrasi antar Provinsi juga terjadi migrasi intra Provinsi. Migrasi intra Provinsi ini terjadi pada Kabupaten/Kota yang memiliki perkembangan ekonomi baik serta memiliki banyak industri seperti Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Malang dan Kabupaten Jember. Migrasi penduduk ini paling banyak disebabkan daya tarik ekonomi daerah yang menjadi tujuan migrasi.

Angka harapan hidup dan Indeks kesehatan yang semakin meningkat membawa konsekuensi pada angka kelangsungan hidup masyarakat Jawa Timur. Angka kematian Balita (AKB) dan AKB yang mampu ditekan juga membawa dampak yang positif baik pada pertambahan jumlah penduduk. Program pengendalian jumlah penduduk dilakukan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur. Kegiatan KB juga membantu dalam hal pengendalian jumlah penduduk, melalui manajemen kelahiran bayi, berupa jumlah anak maupun

promosi pentingnya dua anak cukup bagi tiap keluarga. Dengan berbagai program ini diharapkan laju pertumbuhan penduduk di Jawa Timur mampu ditekan.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi 2008-2012

Pembangunan di segala bidang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Jawa Timur bersama masyarakat, utamanya bidang ekonomi semakin meningkat seiring dengan dinamika pembangunan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari besaran angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2000. Apabila dihitung atas dasar harga berlaku, total nilai PDRB Jawa Timur tahun 2008 sebesar Rp. 621,39 triliun, meningkat menjadi Rp. 686,85 triliun pada tahun 2009, Rp. 778,56 triliun pada tahun 2010, Rp. 884,50 triliun pada tahun 2011, dan Rp. 1.001,72 triliun pada tahun 2012. Sedangkan apabila dihitung atas dasar harga konstan tahun 2000, total nilai PDRB Jawa Timur tahun 2008 sebesar Rp. 305,54 triliun meningkat menjadi Rp. 320,86 triliun pada tahun 2009, Rp. 342,28 triliun pada tahun 2010, Rp. 366,98 triliun pada tahun 2011, dan Rp. 393,67 triliun pada tahun 2012. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dapat dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan, karena pertumbuhan ekonomi ini benar-benar diakibatkan oleh perubahan jumlah barang dan jasa yang sudah bebas dari pengaruh harga (pertumbuhan riil).

Pada tahun 2008 perekonomian Jawa Timur mampu tumbuh 5,94 persen, kemudian melambat pertumbuhannya menjadi 5,01 persen pada tahun 2009. Kemudian pada tahun 2010 dan tahun 2011 pertumbuhannya meningkat lagi masing-masing sebesar 6,68 persen dan 7,22 persen.

Tabel 2.4
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur
Tahun 2008 – 2012

Keterangan	2008	2009	2010	2011 ^{*)}	2012 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	621.392	686.848	778.564	884.503	1.001.721
2. PDRB ADHK 2000 (Miliar Rupiah)	305.539	320.861	342.281	366.984	393.666
3. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,94	5,01	6,68	7,22	7,27

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Keterangan : *) Angka Diperbaiki

**) Angka Sementara

Dari tabel di atas tampak bahwa, perekonomian Jawa Timur tahun 2009 melambat, hal ini lebih disebabkan karena dampak dari naiknya harga minyak dunia pada akhir tahun 2007 hingga kuartal kedua tahun 2008, kenaikan harga minyak dunia meningkat hingga mencapai 147 dollar AS per barrel. Secara perlahan, kenaikan itu juga berdampak pada kenaikan harga BBM di dalam negeri yang pada akhirnya mendorong naiknya harga barang dan jasa. Kondisi ini terus berlanjut dengan terjadinya krisis finansial yang dimulai dari kasus subprime mortgage di Amerika Serikat, hingga meluas di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia.

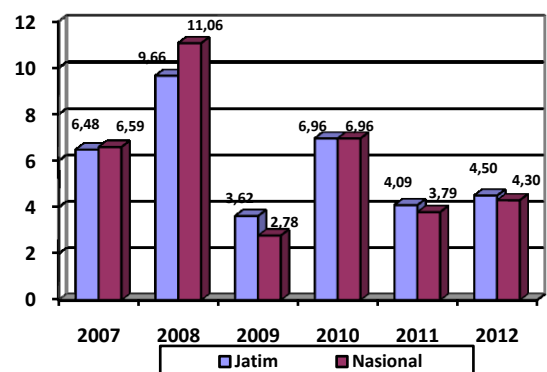
Dampak Krisis Keuangan Global yang terjadi pada akhir tahun 2008 terus berlanjut hingga tahun 2009, ekspor beberapa komoditi unggulan Jawa Timur khususnya ke negara-negara Amerika dan Eropa ikut merosot, dan berakibat pada melambatnya pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2009 yaitu sebesar 5,01 persen.

Pada tahun 2010 kondisi perekonomian global mulai membaik, khususnya di wilayah Asia sehingga turut membawa angin segar pada perekonomian Jawa Timur. Ekspor Jawa Timur meningkat, baik ekspor ke luar negeri maupun ekspor ke luar daerah sehingga perekonomian Jawa Timur tahun 2010 mengalami pertumbuhan cukup signifikan sebesar 6,68 persen. Dengan kondisi yang kondusif tersebut, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur terus meningkat bahkan tahun 2011 dan 2012 masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 7,22 persen dan 7,27 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional.

2. Laju Inflasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2012

Laju inflasi Jawa Timur selama enam tahun terakhir masih tergolong kategori rendah, karena masih dibawah 2 digit. Inflasi Jawa Timur tahun 2007 dan 2010 berada pada kisaran normal, yaitu sekitar 6 persen, walaupun sedikit

Gambar 2.10
Laju Inflasi Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2007-2012



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

berada diatas target pemerintah yang dipatok 5-6 persen. Sedangkan inflasi tahun 2009, 2011, dan 2012 tergolong sangat rendah dan aman, berada dibawah target pemerintah. Kondisi yang rawan terjadi pada tahun 2008 dengan laju inflasi tinggi hampir menembus dua digit yaitu 9,66 persen, akibat pengaruh multiplier effects kenaikan harga BBM yang tidak terkendali di pasaran dunia.

Perkembangan inflasi Jawa Timur selama tahun 2012 setiap bulannya mengalami inflasi atau mengalami inflasi sebanyak dua belas kali. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Agustus sebesar 1,26 persen dan inflasi terendah bulan September sebesar 0,02 persen. Momentum terjadinya inflasi yang tinggi pada bulan Agustus, karena faktor alamiah yaitu bertepatan dengan hari Raya Idul Fitri 1433 Hijriah, yang umumnya memicu permintaan terhadap barang meningkat, sehingga harga

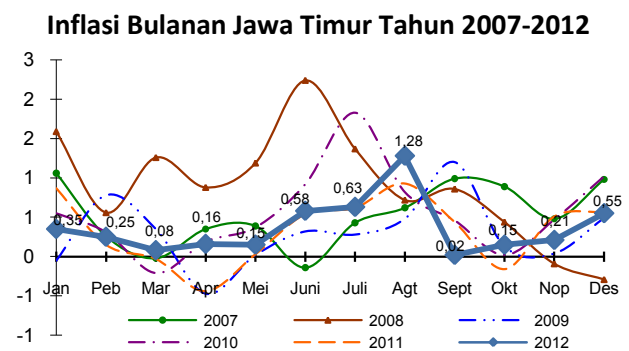
secara umum mengalami kenaikan yang signifikan. Inflasi yang cukup tinggi juga terjadi pada bulan Juni, Juli, dan Desember.

Terjadinya inflasi

yang cukup tinggi pada bulan-bulan tersebut disebabkan oleh adanya momentum tahun ajaran baru, biasanya terjadi kenaikan biaya sekolah, buku pelajaran dan peralatan lainnya yang berkaitan dengan pendidikan, dan kenaikan harga karena adanya momentum Hari Raya Natal dan Tahun Baru pada bulan Desember 2012.

Pada tahun 2012 tercatat beberapa kebijakan pemerintah yang memicu tingginya inflasi, diantaranya pemerintah mengurangi kuota impor sapi potong dan daging sapi, serta diperburuk dengan adanya pemboikotan para importir sapi potong, dan tidak didukung oleh kelancaran distribusi produksi daging sapi lokal. Menurut data hasil Pendataan Sapi Potong dan Kerbau (PSPK) Tahun 2011, bahwa jumlah sapi dan kerbau mencukupi untuk memenuhi kebutuhan daging nasional. Akibat kelangkaan ketersediaan daging sapi di pasaran, pedagang eceran tidak berjualan karena tidak ada pasokan daging sapi di

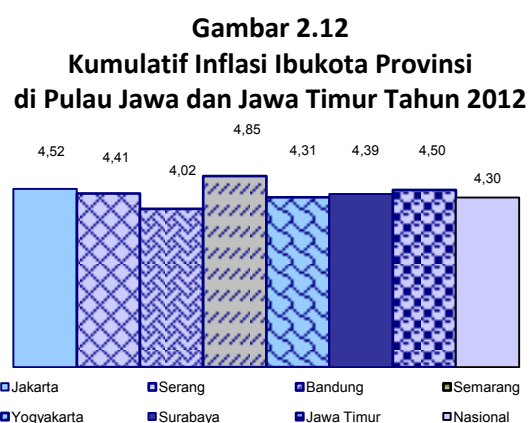
Gambar 2.11



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

pasar selama 3 minggu selama bulan November 2012, menyebabkan kenaikan harga daging sapi di pasaran melambung tinggi menyentuh kisaran harga Rp. 90.000 sampai dengan Rp. 100.000. Inflasi semakin terdorong dengan adanya kenaikan bea cukai rokok, walaupun sudah diberlakukan sejak awal tahun 2011, tetapi dampaknya masih berlangsung selama tahun 2012, karena para pengusaha menaikkan harga rokok secara bertahap sejak tahun 2011 dan masih terus berlangsung sampai dengan tahun 2012, sehingga secara kumulatif inflasi rokok cukup tinggi. Inflasi yang cukup signifikan selama tahun 2012 terjadi juga pada gula pasir, bawang putih dan emas perhiasan. Kumulatif inflasi Jawa Timur tahun 2012 ditutup sebesar 4,50 persen, sedikit lebih tinggi dibanding inflasi Nasional sebesar 4,30 persen.

Keterbandingan inflasi Jawa Timur dengan ibukota provinsi di pulau Jawa, terlihat inflasi Jawa Timur sebesar 4,50 persen sedikit lebih tinggi dibanding inflasi Nasional sebesar 4,30 persen, Serang sebesar 4,41 persen, Yogyakarta sebesar 4,31 persen, Surabaya sebesar 4,39 persen, dan Bandung sebesar 4,02 persen, namun lebih rendah dibanding dengan Semarang sebesar



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

4,85 persen dan Jakarta sebesar 4,52 persen. Dari enam ibukota provinsi di pulau Jawa, inflasi tertinggi terjadi di Semarang sebesar 4,85 persen dan inflasi terendah terjadi di Bandung sebesar 4,02 persen.

Dilihat dari tabel sepuluh komoditas pendorong utama inflasi Jawa Timur Tahun 2007-2012, bahwa tingginya inflasi tahun 2012 sangat dipengaruhi oleh kenaikan harga daging sapi, rokok kretek filter, gula pasir, bawang putih, emas perhiasan, angkutan udara, tempe, tukang bukan mandor, rokok kretek dan tahu mentah. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2012 terdapat komoditas tarif angkutan udara dan tukang bukan mandor yang muncul sebagai penyumbang inflasi sepanjang tahun 2012, sedangkan komoditas beras yang biasanya selalu menyumbang inflasi, pada

tahun 2012 hal tersebut tidak terjadi. Sementara itu, dalam kurun waktu enam tahun terakhir komoditas emas perhiasan selalu memegang peranan penting terhadap inflasi Jawa Timur.

Kenaikan harga emas dunia seiring dengan melemahnya nilai tukar, krisis Negara Eropa dan Amerika, yang mendorong terjadinya inflasi semakin besar.

3. PDRB Per Kapita Jawa Timur Tahun 2008 – 2012

Kondisi perekonomian Jawa Timur menunjukkan perkembangan cukup menggembirakan, hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRBnya dari tahun ke tahun terus meningkat. Peningkatan ini akan lebih berarti jika angka per kapita yang diperoleh dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun juga mengalami peningkatan.

Apabila diikuti perkembangannya selama lima tahun terakhir, PDRB per kapita penduduk Jawa Timur setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 PDRB perkapita Jawa Timur mencapai Rp. 16,75 juta, kemudian meningkat menjadi Rp. 18,42 juta pada tahun 2009. Selanjutnya pada tahun 2010 PDRB per kapita Jawa Timur meningkat sebesar Rp. 20,77 juta. Sedangkan tahun 2011 dan 2012 PDRB per kapita masing-masing mencapai Rp 23,47 juta dan Rp. 26,32 juta, yang merupakan dampak dari semakin membaiknya kondisi perekonomian domestik.

Peningkatan PDRB per kapita tersebut disebabkan karena pertumbuhan PDRB ADHB jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Dengan meningkatnya PDRB per kapita tersebut, maka secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Timur semakin baik.

Tabel 2.5
PDRB Per Kapita Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2008-2012

Uraian		2008	2009	2010	2011 ^{*)}	2012 ^{**)}
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	621.392	686.848	778.566	884.503	1.001.721
2.	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu jiwa)	37.095	37.286	37.476	37.688	38.053
3.	PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah)	16.751	18.421	20.775	23.469	26.324

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Keterangan: *) Angka Diperbaiki

**) Angka Sementara.

4. Indeks Gini Ratio

Koefisien gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang dihitung dengan membandingkan luas antara diagonal dan kurva lorenz (daerah A) dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal, yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna).

Tabel 2.6
Angka Gini Rasio menurut Status Wilayah di Jawa Timur
Tahun 2008-2012

Tahun	Status Wilayah	Gini Rasio Jawa Timur	Gini Rasio Nasional
2008	Kota	0.35	0,35
	Desa	0.26	
	Kota+Desa	0.33	
2009	Kota	0.34	0,37
	Desa	0.26	
	Kota+Desa	0.33	
2010	Kota	0.36	0,38
	Desa	0.26	
	Kota+Desa	0.34	
2011	Kota	0.38	0,41
	Desa	0.30	
	Kota+Desa	0.37	
2012*	Kota	0.37	0,41
	Desa	0.30	
	Kota+Desa	0.36	

Sumber : BPS Prov. Jawa Timur
Keterangan *) Angka Sementara

$G < 0,3$ = Ketimpangan Rendah
 $0,3 \leq G \leq 0,5$ = Ketimpangan Sedang
 $G > 0,5$ = Ketimpangan Tinggi

Bila mengacu pada nilai gini rasio, tingkat ketimpangan rata-rata konsumsi per kapita di Jawa Timur 2008-2012 masih masuk dalam kategori sedang (antara 0,3 – 0,5). Selama tahun 2008-2011 nilai gini rasio di Jawa Timur menunjukkan tren kearah peningkatan. Pada tahun 2008 dan 2009 sebesar 0,33 menjadi 0,34 di tahun 2010 dan meningkat menjadi 0,37 di tahun 2011, namun pada tahun 2012 terjadi penurunan sebesar 0.01 poin menjadi 0,36. Situasi tersebut, masih lebih baik bila dibandingkan angka gini rasio nasional, yang sejak tahun 2008 hingga 2012 terus meningkat. Gini rasio Indonesia selama tahun 2008-2012 berturut-turut adalah 0,35 (2008), 0,37 (2009), 0,38 (2010), 0,41 (2011) dan 0,41 (2012).

Tabel 2.7
Kelompok Pengeluaran dan Proporsi Pengeluaran Penduduk
Di Jawa Timur, tahun 2012

Uraian	Kelompok Pengeluaran (Rp)									
	<247.000	247.000-287.999	288.000-327.999	328.000-372.999	373.000-424.999	425.000-489.999	490.000-576.999	577.000-739.999	740.000-139.999	>1.400.000
Rata-rata pengeluaran kapita per bulan (Rp)	196.744	247.813	288.104	328.874	373.034	425.860	491.198	577.076	741.100	1.409.052
Jumlah penduduk	8.424.681	4.140.040	3.833.465	3.510.158	3.347.767	3.199.562	3.022.601	3.360.330	3.653.626	1.196.899
Total pengeluaran seluruh penduduk sebulan (Juta)	1.040.448	1.107.459	1.180.705	1.230.309	1.335.757	1.463.798	1.612.556	2.212.776	3.909.378	1.555.969
Proporsi penduduk (persen) P_i	22,35	10,98	10,17	9,31	8,88	8,49	8,02	8,92	9,69	3,18
Kumulatif proporsi penduduk	22,35	33,34	43,51	52,82	61,71	70,19	78,21	87,13	96,82	100,00
Proporsi pengeluaran (persen) q_i	6,25	6,65	7,09	7,39	8,02	8,79	9,69	13,29	23,48	9,35
Proporsi kumulatif total pengeluaran (persen) Q_i	6,25	12,90	19,99	27,38	35,41	44,20	53,88	67,17	90,65	100,00
$Q_i + Q_{i-1}$	6,25	19,15	32,89	47,37	62,79	79,60	98,08	121,06	157,83	190,65
$P_i(Q_i + Q_{i-1})$	0,01397	0,02104	0,03346	0,04412	0,05577	0,06758	0,07866	0,10793	0,15300	0,06055
Gini Rasio	0.36									

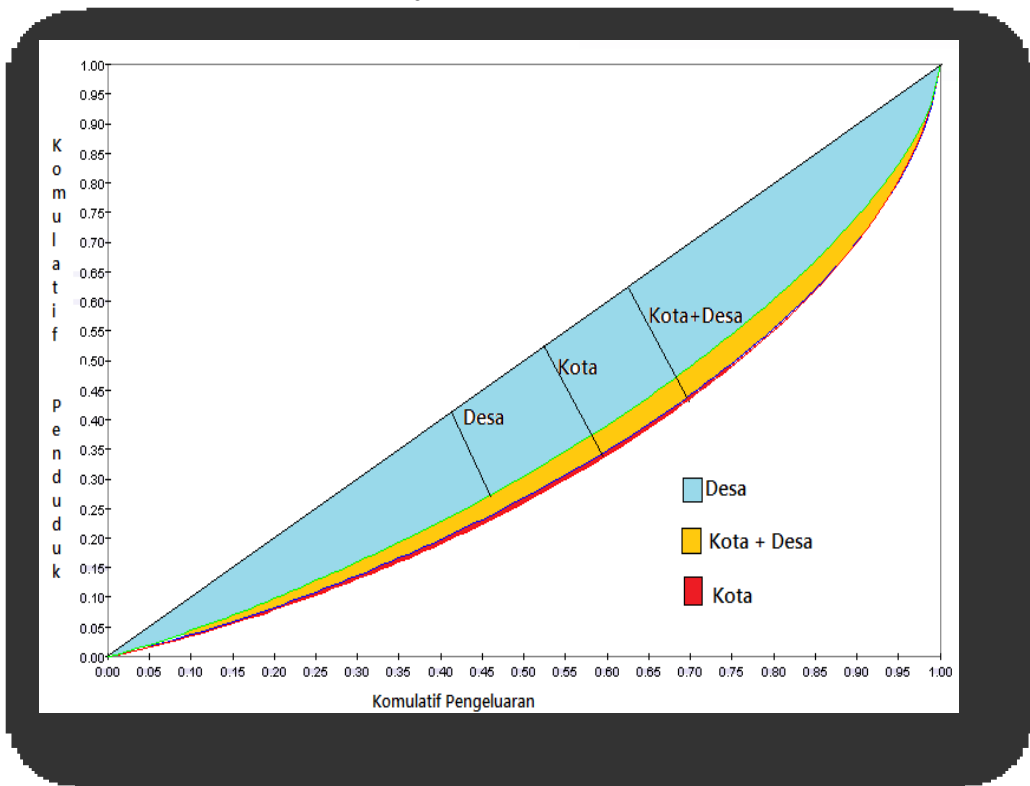
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Keterangan *) : Angka sementara

Dengan demikian, besarnya kenaikan rata-rata konsumsi per kapita selama 2008-2012 serta peningkatan persentase konsumsi non makanan diduga tidak merata pada seluruh penduduk, kondisi ini menjadi sebab terjadinya ketimpangan dalam distribusi konsumsi. Secara umum gini rasio daerah perkotaan mulai tahun 2008-2012 lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan. Dalam kurun lima tahun terakhir gini rasio wilayah perkotaan masuk dalam kategori sedang, sedangkan gini rasio daerah perdesaan masuk dalam kategori rendah.

Nilai gini rasio pada wilayah perkotaan dan perdesaan, memiliki beda sebesar 0,07 pada tahun 2012, lebih rendah jika dibandingkan tahun 2011, yang memiliki beda sebesar 0,08 poin. Kondisi ini mengindikasikan di daerah perdesaan mulai terjadi ketimpangan konsumsi penduduk karena nilai gini rasio mengalami peningkatan.

Gambar 2.13
Kurva Lorenz Kumulatif Penduduk dan Pengeluaran (Persen)
Menurut Wilayah di Jawa Timur 2012



Kurva lorenz pada gambar 2.10, memberikan gambaran perbedaan gini rasio yang cukup tinggi antara daerah perkotaan dan perdesaan. Dearah perdesaan cenderung lebih dekat dengan garis normal dibandingkan daerah perkotaan.

5. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Meskipun suatu wilayah mempunyai pertumbuhan ekonomi yang baik, masih ada yang perlu diketahui yaitu seberapa besar kue ekonomi yang terbentuk bisa dinikmati oleh masyarakat. Bisa jadi kue ekonomi tersebut hanya dikuasai oleh konglomerat yang jumlahnya hanya segelintir orang saja. Bank Dunia mengukur pendistribusian kue ekonomi atau mengukur pemerataan pendapatan dalam masyarakat dengan pendekatan besar persentase distribusi pengeluaran penduduk suatu wilayah berdasarkan kategori pendapatan 40 persen terbawah, 40 persen menengah dan 20 persen teratas.

Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Kategori ketimpangan ditentukan sebagai berikut:

- a. jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.
- b. jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12 - 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah.
- c. jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

Tabel 2.8
Persentase Distribusi Pengeluaran Penduduk
Jawa Timur Tahun 2008-2012

Tahun	40 % bawah	40 % menengah	20 % atas
(1)	(2)	(3)	(4)
2008	19,92	36,86	43,22
2009	19,86	37,59	42,55
2010	20,81	38,52	40,67
2011	21,09	38,57	40,34
2012	20,15	34,38	45,47

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur (September 2012)

Dari pengukuran pemerataan pendapatan berdasarkan versi Bank Dunia seperti tersaji pada tabel persentase distribusi pengeluaran penduduk Jawa Timur Tahun 2012, kelompok yang mempunyai pendapatan berkategori 20 persen

teratas pada tahun 2008 dapat menikmati kue ekonomi sebanyak 43,22 persen, dan selanjutnya mengecil masing-masing 42,55 persen (2009); 40,67 persen (2010) ; 40,34 persen (2011) dan pada tahun 2012 menjadi 45,47 persen. Pada penghitungan pemerataan pendapatan menurut Bank Dunia ini, penduduk yang berpendapatan 40 persen terbawah menjadi fokus penting untuk evaluasi ketimpangan yang terjadi dalam suatu wilayah. Hasil penghitungan di Jawa Timur menunjukkan bahwa penduduk yang berpendapatan 40 persen terbawah pada tahun 2012 sekitar 20,15 persen.

Berdasarkan skala kesenjangan yang telah ditetapkan, karena penduduk yang berpendapatan 40 persen terbawah menikmati hasil kegiatan ekonomi sebesar 20,15 persen, maka ketimpangan pendapatan yang terjadi di Jawa Timur pada tahun 2012 masuk kategori rendah.

6. Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

Salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk adalah dengan memacu kegiatan ekonomi di seluruh sektor. Hasil kegiatan ekonomi tersebut diharapkan nantinya terjadi pertumbuhan ekonomi (atau yang disebut program pro growth), dan selanjutnya dapat menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya kepada masyarakat (pro job). Melalui kesempatan kerja itu diharapkan dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat dengan bertambahnya pendapatan mereka sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, tidak terkecuali bertambahnya pendapatan pada masyarakat yang bergolongan pendapatan rendah (pro poor). Tetapi paradoks muncul, saat dikatakan percepatan pembangunan digalakkan di masing-masing daerah timbul ketimpangan antar daerah akibat perbedaan sumber daya yang mendukung pembangunan tersebut. Diduga perbedaan itu secara tidak langsung juga menciptakan perbedaan kesejahteraan dari sisi kewilayahan. Untuk menyempitkan disparitas antar wilayah ini perlu kerja keras, inisiatif dan kreatifitas Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan segala potensi yang ada untuk meningkatkan ekonominya.

Salah satu indikator yang bisa membaca seberapa jauh tingkat disparitas antar wilayah yaitu Indeks Williamson. Rumus menghitung Indeks ketimpangan Williamson :

$$IW = \frac{\sqrt{(Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

dimana:

- Yi = PDRB perkapita di kab/kota i
- Y = PDRB perkapita rata-rata provinsi
- fi = jumlah penduduk di kab/kota i
- n = jumlah penduduk di provinsi

Tabel 2.9 Indeks Williamson Jawa Timur Tahun 2008-2012		
Tahun	Indeks Williamson	Perubahan
(1)	(2)	(3)
2008	113,93	-0,18398
2009	114,46	0,46520
2010	115,14	0,59409
2011*	112,68	-2,13653
2012**	112,60	-0,07100

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
Keterangan: *) Angka Diperbaiki
**) Angka Sementara

Semakin besar angka yang ditunjukkan oleh Indeks Williamson berarti semakin melebar kesenjangan yang terjadi di wilayah tersebut. Sebaliknya, semakin kecil indeks ini, semakin mengecil kesenjangan antar wilayahnya. Pencapaian Indeks Williamson di Jawa Timur pada lima tahun terakhir relatif berfluktuatif, tetapi ada kecenderungan semakin

membaik dalam kurun dua tahun terakhir. Pada tahun 2008 indeks ini tercatat sebesar 113,93 selanjutnya melebar pada tahun 2009 – 2010. Selanjutnya indeks ini semakin mengecil pada tahun 2011 dan 2012 yang pencapaiannya masing-masing 112,68 dan 112,60. Adanya jembatan Suramadu yang membuat Madura yang dulu seolah-olah masih terpisah dengan pulau Jawa, menjadikan Madura seakan-akan sudah menyatu, sehingga arus perekonomian dan transfer sosial budaya semakin cepat dibanding kondisi sebelum adanya jembatan Suramadu. Selain itu Jalur Lintas Selatan sangat mendukung perekonomian pada wilayah selatan yang dulunya masih terkendala. Demikian pula daerah-daerah yang ekonominya transportasinya bergantung pada Tol Porong yang semula terkendala dengan adanya luapan lumpur Sidoarjo, dengan adanya jalur alteleri Porong perekonomiannya kembali normal. Pada Tahun 2012 Indeks Williamson kembali mengecil -0,071

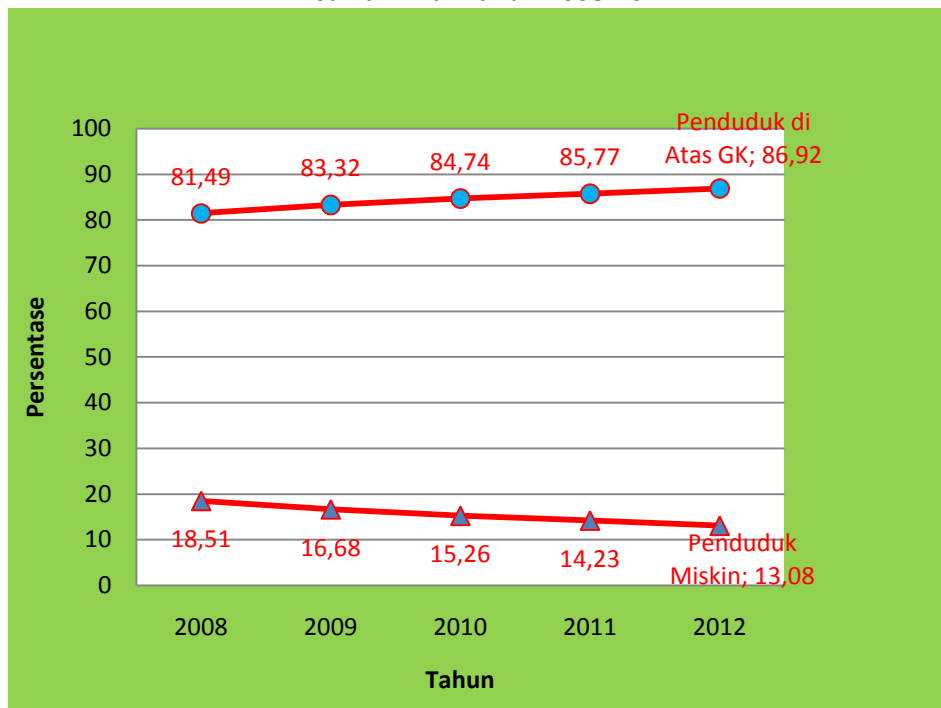
persen dibanding tahun 2011 atau mencapai 112,60. Revitalisasi sarana transportasi terutama jalan tol diduga pendorong menyempitnya disparitas wilayah di Jawa Timur, selain pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dimasing-masing daerah. Pemerintah perlu menjaga kondisi ini agar di tahun mendatang dengan lebih memperhatikan perbaikan sarana dan prasarana daerah-daerah perdesaan sehingga pertumbuhan ekonominya bisa ditingkatkan dan kalau itu terjadi tidak mustahil Indeks Williamson akan mengecil.

7. Presentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan

Perekonomian Jawa Timur dari waktu ke waktu terus tumbuh dan berkembang. Kondisi faktual tersebut dapat ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya dan pengurangan distorsi pembangunan. Pertumbuhan ekonomi mencapai 7,22 persen di tahun 2011 dan menjadi 7,27 persen pada tahun 2012. Distorsi pembangunan dalam hal ini kemiskinan menunjukkan penurunan angka penurunan. Angka kemiskinan di tahun 2011 sebesar 14,23 persen dan turun 1,15 persen poin pada tahun 2012 atau menjadi 13,08 persen.

Penurunan angka kemiskinan memberikan pengaruh pada jumlah penduduk di atas garis kemiskinan. Jumlah penduduk diatas garis kemiskinan selama 5 tahun menunjukkan pertumbuhan diatas 1 persen. Jumlah penduduk diatas garis kemiskinan di tahun 2012 sebesar 86,92 persen atau tumbuh 1,15 persen poin dari tahun sebelumnya. Selama kurun waktu 5 tahun laju pertumbuhan penduduk diatas garis kemiskinan mulai tahun 2008-2012 berturut-turut sebesar 1,47 persen; 1,83 persen; 1,42 persen; 1,03 persen; dan 1,15 persen.

Gambar 2.14
Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin
Di Jawa Timur Tahun 2008-2012



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

8. Angka Kriminalitas yang tertangani

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir.

Kesigapan aparat keamanan dalam mendeteksi dan mengatasi gejala awal gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat akan menjadikan kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif sehingga tidak mengganggu berlangsungnya aktivitas masyarakat. Selain itu penanganan kriminalitas oleh aparat keamanan secara cepat dan tepat sasaran akan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Tabel 2.10
Tindak Kejahatan di Jawa Timur Tahun 2008-2012

Tahun	Jumlah Tindak Kejahatan	Tindak Kejahatan Yang Tertangani	Persentase Tindak Kejahatan Tertangani	Angka Kriminalitas Tertangani
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2008	19.558	8.412	43,01	2,28
2009	20.363	8.976	44,08	2,41
2010	16.879	9.892	58.61	2,64
2011	14.991	7.503	50.05	1,99
2012	15.270	9.216	60.35	2,42

Sumber : Polres Kab/Kota Se Jawa Timur (Th.2008,2009,2012), Polda Jatim (2010-2011)

Berdasarkan data dari Polres Kabupaten/Kota se Jawa Timur, angka kriminalitas yang tertangani pada tahun 2012 adalah 2,42 atau dengan kata lain dalam satu tahun (selama 2012) 2 sampai 3 tindak kejahatan yang terjadi diantara 10.000 penduduk dapat ditangani oleh aparat kepolisian. Apabila diperhatikan selama 3 tahun terakhir tindak kejahatan yang tertangani sudah di atas 50 persen. Hal ini sebagai bukti penanganan kriminalitas oleh aparat keamanan sudah semakin baik.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan daerah bidang kesejahteraan sosial terkait dengan upaya meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Jawa Timur yang tercermin pada angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikanyang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yangbekerja. Komponen-komponen yang penunjang kesejahteraan sosial yang telah dicapai sampai dengan tahun 2012 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendidikan

a. Angka Melek Huruf Umur 15 Tahun Keatas

Spesifik pada elemen pengetahuan, tingkat melek huruf menjadi indikator kunci dasar. Selain menjadi gambaran kasar terhadap akses pendidikan, melek huruf juga menjadi

dasar bagi setiap manusia, agar dapat mempelajari dan mengetahui bagaimana upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Ini yang menjadikan indikator melek huruf, sebagai indikator paling esensial di antara indikator pembangunan manusia yang lain. Demikian pentingnya indikator ini untuk mengukur dimensi pengetahuan, maka dalam formulasi Human Development Index (HDI) indikator pengetahuan yang terdiri dari rata-rata lama sekolah dan melek huruf, tingkat melek huruf memiliki bobot yang lebih tinggi (2/3) dibanding rata-rata lama sekolah.

Tabel 2.11
Perkembangan Angka Melek Huruf Provinsi Jawa Timur
Tahun 2008 – 2012

NO	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	24.290.335	24.492.836	24.984.639	25.077.871	25.773.409
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	27.782.609	27.896.169	28.282.363	28.244.026	28.963.661
3	Angka melek huruf (Persen)	87,43	87,80	88,34	88,79	89,00
4	Angka buta Huruf (Persen)	12,57	12,20	11,66	11,21	11,00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur (Juni 2012)

Perlu diketahui bahwa sasaran pencapaian indikator melek huruf usia 15 tahun ke atas ini menjadi sasaran global dan nasional. Angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas di Jawa Timur, selama kurun waktu 2008-2012 terjadi peningkatan dari 87,43 persen di tahun 2008 menjadi 87,80 di tahun 2009 dan menjadi 88,34 persen di tahun 2010 dan 88,79 persen di tahun 2011. Pada tahun 2012 angka melek huruf 89,00 persen.

Tabel 2.12
Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut
Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012

NO	Kabupaten/kota	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	Angka melek huruf
1.	Kab. Pacitan	373.358	426.801	87,5
2.	Kab. Ponorogo	611.314	674.753	90,6
3.	Kab. Trenggalek	489.933	529.610	92,5
4.	Kab. Tulungagung	720.633	762.829	94,5
5.	Kab. Blitar	785.109	858.810	91,4

NO	Kabupaten/kota	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	Angka melek huruf
6.	Kab. Kediri	1.048.606	1.143.291	91,7
7.	Kab. Malang	1.704.467	1.883.845	90,5
8.	Kab. Lumajang	640.890	777.144	82,5
9.	Kab. Jember	1.463.753	1.778.614	82,3
10.	Kab. Banyuwangi	1.078.207	1.194.979	90,2
11.	Kab. Bondowoso	463.374	577.866	80,2
12.	Kab. Situbondo	394.822	512.577	77,0
13.	Kab. Probolinggo	671.949	840.912	79,9
14.	Kab. Pasuruan	1.058.708	1.164.719	90,9
15.	Kab. Sidoarjo	1.485.632	1.522.964	97,5
16.	Kab. Mojokerto	745.536	794.998	93,8
17.	Kab. Jombang	855.477	912.817	93,7
18.	Kab. Nganjuk	704.909	780.474	90,3
19.	Kab. Madiun	452.852	517.736	87,5
20.	Kab. Magetan	443.620	488.041	90,9
21.	Kab. Ngawi	541.211	637.787	84,9
22.	Kab. Bojonegoro	795.752	943.980	84,3
23.	Kab. Tuban	726.246	873.128	83,2
24.	Kab. Lamongan	810.204	918.933	88,2
25.	Kab. Gresik	869.760	905.259	96,1
26.	Kab. Bangkalan	531.208	665.031	79,9
27.	Kab. Sampang	455.468	644.078	70,7
28.	Kab. Pamekasan	510.660	609.762	83,7
29.	Kab. Sumenep	641.745	824.473	77,8
30.	Kota Kediri	202.103	208.873	96,8
31.	Kota Blitar	98.357	101.662	96,7
32.	Kota Malang	636.712	647.468	98,3
33.	Kota Probolinggo	152.103	165.351	92,0
34.	Kota Pasuruan	135.767	140.026	97,0
35.	Kota Mojokerto	89.507	92.582	96,7
36.	Kota Madiun	129.429	133.681	96,8
37.	Kota Surabaya	2.112.947	2.160.062	97,8
38.	Kota Batu	141.081	147.745	95,5
Provinsi		25.773.409	28.963.661	89,0

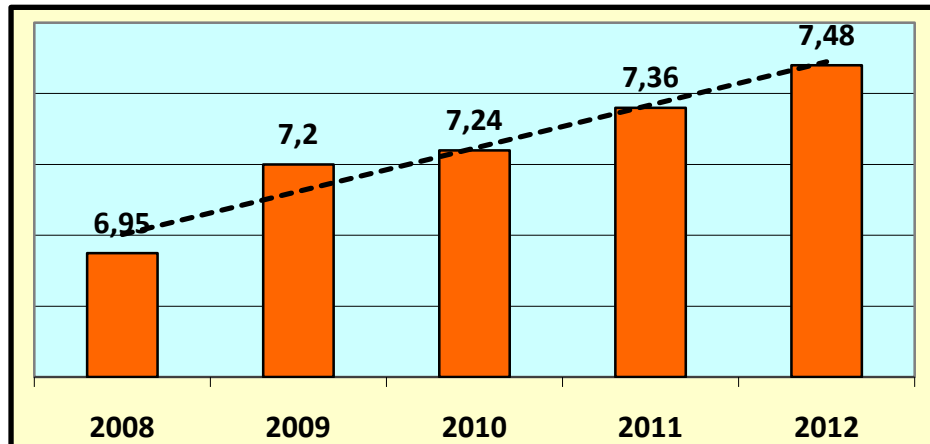
Kalau dilihat dari tabel di atas, antar daerah angka melek huruf tahun 2012 di Jawa Timur yang tertinggi adalah Kota Malang yaitu sebesar 98,3 persen dan terendah adalah Kabupaten Sampang 70,7 persen.

b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya Sekolah atau Years Of Schooling adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir. Angka rata-rata lama sekolah (mean years school/MYS) merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki. dan pendidikan yang ditamatkan. Tetapi, jumlah tahun bersekolah

ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya. Sehingga nilai dari jumlah tahun bersekolah menjadi terlalu tinggi kelebihan estimasi atau bahkan terlalu rendah (underestimate).

Gambar 2.15
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Di Jawa Timur 2008-2012



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Jawa Timur, selama 2008-2012 terjadi peningkatan kualitas penduduk yaitu dari setara lulus tingkat sekolah dasar (6 tahun) ditahun 2008 meningkat menjadi setara kelas satu pada jenjang pendidikan SLTP ditahun 2012. Walaupun terjadi kenaikan, namun kenaikan tersebut relatif lambat, karena selama tahun 2008 - 2012 hanya terjadi peningkatan sebesar 0,53 poin persen atau rata-rata hanya terjadi kenaikan 0,13 poin persen per tahunnya.

Kalau dilihat rata-rata lama sekolah menurut kelompok umur dari sisi jenis kelamin secara umum rata-rata lama sekolah laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Rata-rata lama sekolah penduduk di Jawa Timur tertinggi pada kelompok usia 20-24 tahun mencapai 10,08 tahun atau setara dengan kelas 1 SLTA dan terus menurun hingga pada kelompok umur 65 tahun keatas

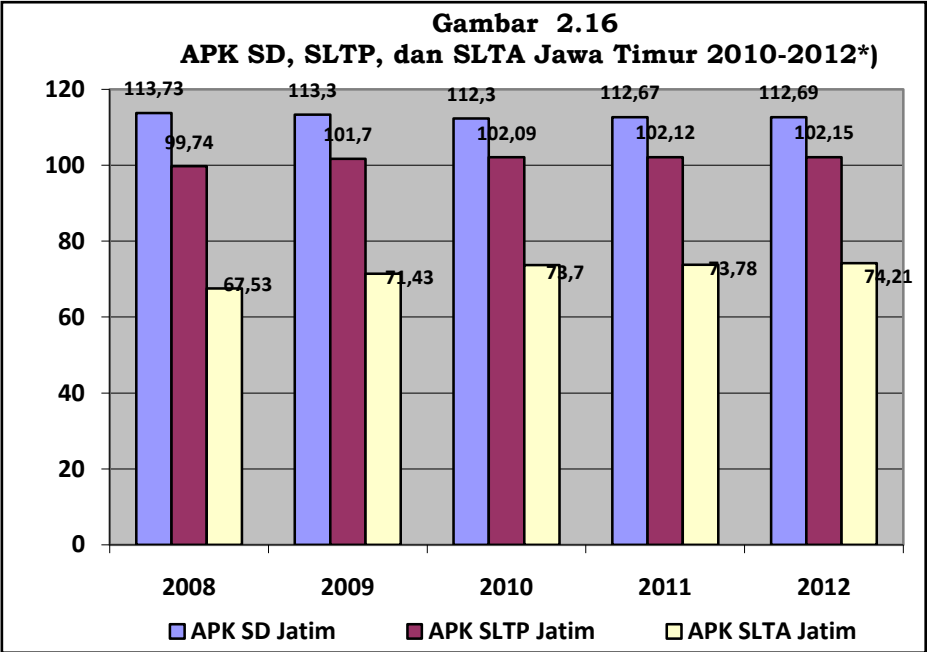
Pembangunan pendidikan di Jawa Timur selama ini, membawa dampak peningkatan capaian pendidikan tertinggi penduduk di kelompok usia 15-34 tahun yang memiliki rata-rata lama sekolah setara lulusan SLTP. Sehingga tepat kiranya salah satu upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur

dalam RPJMD 2009-2014 untuk mengakselerasi situasi ini melalui program Wajar Dikdas 12 tahun (setara SLTA).

Walaupun bobot dalam formulasi IPM rata-rata lama sekolah lebih rendah dibandingkan melek huruf, namun dengan melakukan intervensi pada peningkatan rata-rata lama sekolah, tentunya akan memberi pengaruh pada pencapaian melek huruf. Bisa dipastikan wilayah dengan rata-rata lama sekolah yang tinggi, akan memiliki tingkat melek huruf yang tinggi pula.

c. Angka Partisipasi Kasar

Salah satu indikator kunci keberhasilan (Key Development Milestones) terhadap pemerataan serta perluasan akses pendidikan adalah APK (lihat Renstra Depdiknas 2006-2010).



Sumber : Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur dan BPS Provinsi Jawa Timur

Wujud pemerataan dan perluasan akses pendidikan dilakukan dengan cara memperluas daya tampung satuan pendidikan, memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda secara sosial, ekonomi, gender, geografis wilayah, serta tingkat kemampuan fisik serta intelektual. Kondisi ini dapat tercermin dari APK untuk setiap jenjang pendidikan.

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA sederajat dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun (7-12 untuk SD

sederajat, 13-15 untuk SLTP sederajat dan 16-18 untuk SLTA sederajat, berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Besaran APK SD di Jawa Timur tahun 2012 adalah 112,69 persen, meningkat 0,02 persen poin bila dibandingkan dengan tahun 2011 (112,67 persen).

Tabel 2.13
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Di Jawa Timur 2008-2012

NO	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012*
1	SD sederajat					
1.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	4.501.199	4.451.717	4.426.538	4.569.814	4.488.775
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	3.957.794	3.929.141	3.941.708	4.055.928	3.983.295
1.3.	APK SD/MI	113,73	113,3	112,3	112,67	112,69
2	SMP sederajat					
2.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	1.904.188	1.852.005	1.899.146	1.888.485	1.785.512
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	1.909.152	1.821.047	1.860.266	1.849.280	1.747.931
2.3.	APK SMP/MTs	99,74	101,7	102,09	102,12	102,15
3	SLTA sederajat					
3.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	1.155.409	1.191.452	1.231.707	1.285.830	1.343.928
3.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	1.710.957	1.667.999	1.671.244	1.742.789	1.810.980
3.3.	APK SMA/MA/SMK	67,53	71,43	73,7	73,78	74,21

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan BPS Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan data sebaran APK kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2012, menunjukkan bahwa terdapat kaitan yang erat antara capaian APK pendidikan pada jenjang tertentu dengan jenjang di atasnya. Dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai peningkatan APK pada jenjang yang lebih tinggi, mesti dimulai dengan program lebih nyata untuk peningkatan APK pada jenjang di bawahnya terlebih dahulu. Salah satu agenda program Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2009-2014 adalah Wajar Dikdas 12 tahun, maka diperlukan upaya peningkatan capaian APK SLTP, terutama untuk kabupaten yang masih rendah capaiannya.

Pada tahun 2012 ini seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur APK SD di atas 100 persen. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa banyak anak yang sekolah di SD umurnya diluar 7-12 tahun, dan diduga masih kurang dari 7 tahun. Begitu pula APK SLTP juga diatas 100 persen. Karena banyak kita jumpai anak anak yang usianya belum genap 7 tahun sudah sekolah SD dan imbasnya saat masuk SMP usianya kurang dari 13 tahun kondisi demikian yang menyebabkan APK SD dan SMP diatas 100 persen. Sementara APK SLTA cenderung lebih rendah, hal ini diduga banyak anak tamatan SLTP yang tidak melanjutkan kejenjang SLTA.

Capaian APK di Jawa Timur sekolah setingkat SD tahun 2012 tertinggi adalah Kota Blitar sebesar 159,66 persen dan yang terendah adalah Kabupaten Sidoarjo sebesar 104,64 persen. Untuk APK SMP tertinggi adalah Kota kediri sebesar 137,20 persen dan terendah adalah Kabupaten Probolinggo sebesar 93,97 persen. Sedangkan APK sekolah setingkat SMA yang tertinggi adalah Kota Blitar sebesar 116,43 persen dan terendah Kabupaten Sampang sebesar 44,81 persen.

Tabel 2.14
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kabupaten/Kota
Di Jawa Timur Tahun 2012

No.	Kabupaten/Kota	APK SD		APK SLTP		APK SLTA	
		2011	2012	2011	2012	2011	2012
1.	Kab. Pacitan	108,24	108,25	95,75	96,32	63,53	63,62
2.	Kab. Ponorogo	112,59	112,60	109,75	109,76	76,06	76,19

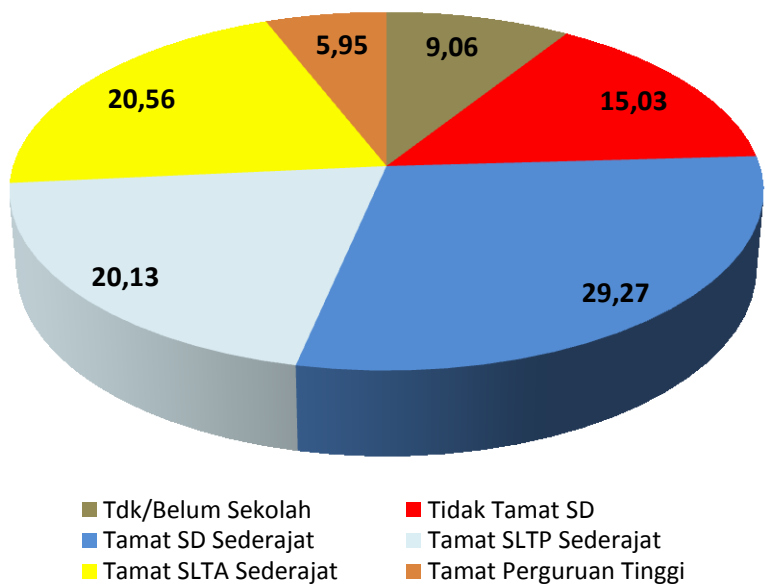
No.	Kabupaten/Kota	APK SD		APK SLTP		APK SLTA	
		2011	2012	2011	2012	2011	2012
3.	Kab. Trenggalek	120,47	120,48	103,42	103,43	69,86	69,89
4.	Kab. Tulungagung	107,68	107,69	105,40	105,41	69,19	69,21
5.	Kab. Blitar	104,94	104,96	99,96	99,97	62,32	62,40
6.	Kab. Kediri	105,06	105,30	103,81	103,82	59,50	59,64
7.	Kab. Malang	108,23	109,67	94,27	94,64	61,58	61,62
8.	Kab. Lumajang	108,80	108,81	98,34	98,70	56,30	56,41
9.	Kab. Jember	107,92	107,93	98,04	98,05	62,29	62,40
10.	Kab. Banyuwangi	107,79	109,72	99,56	99,57	66,86	67,06
11.	Kab. Bondowoso	114,21	114,21	97,97	97,99	76,79	76,81
12.	Kab. Situbondo	115,29	115,29	99,11	99,12	62,76	62,79
13.	Kab. Probolinggo	129,76	129,76	93,96	93,97	58,81	58,84
14.	Kab. Pasuruan	111,39	112,21	97,48	98,20	80,30	80,39
15.	Kab. Sidoarjo	104,63	104,64	99,38	99,39	83,91	83,97
16.	Kab. Mojokerto	115,24	115,25	113,05	113,06	71,32	72,89
17.	Kab. Jombang	105,57	105,59	107,85	107,86	89,38	89,53
18.	Kab. Nganjuk	114,12	115,43	109,13	109,14	71,36	71,39
19.	Kab. Madiun	111,65	111,66	98,08	98,39	65,66	65,86
20.	Kab. Magetan	105,47	105,68	110,96	110,97	86,98	87,13
21.	Kab. Ngawi	118,08	118,10	95,62	96,05	81,21	81,40
22.	Kab. Bojonegoro	118,22	118,23	107,62	107,63	83,70	83,74
23.	Kab. Tuban	108,85	108,86	104,65	104,66	61,36	61,44
24.	Kab. Lamongan	112,30	112,37	103,05	103,06	83,72	84,53
25.	Kab. Gresik	105,56	105,60	96,86	97,03	73,68	75,00
26.	Kab. Bangkalan	128,71	128,72	95,46	95,50	50,33	51,14
27.	Kab. Sampang	107,38	107,38	94,05	94,06	44,61	44,81
28.	Kab. Pamekasan	124,02	124,03	98,81	98,82	61,76	62,07
29.	Kab. Sumenep	127,14	127,14	94,09	94,10	69,87	70,09
30.	Kota Kediri	148,85	148,86	137,19	137,20	109,92	109,95
31.	Kota Blitar	159,65	159,66	137,11	137,13	116,42	116,43
32.	Kota Malang	109,51	109,59	117,54	117,55	98,26	101,19
33.	Kota Probolinggo	112,73	112,74	116,41	116,42	96,13	97,72
34.	Kota Pasuruan	114,29	114,67	125,67	125,68	101,44	101,47
35.	Kota Mojokerto	152,84	152,85	126,47	126,49	102,45	102,46
36.	Kota Madiun	142,91	142,92	121,78	121,79	101,35	101,39
37.	Kota Surabaya	109,51	109,52	110,01	110,02	93,71	100,03
38.	Kota Batu	132,89	132,90	117,30	117,32	85,70	85,77
Provinsi		112,67	112,69	102,12	102,15	73,78	74,21

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

d. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

APT adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah. APT bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah. APT merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan.

Gambar 2.17
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun Keatas di Jawa Timur, Tahun 2012



Sumber : BPS Jawa Timur (Juni 2012)

Penduduk usia 15 tahun ke atas di Jawa Timur tahun 2012 sebagian besar tamatan SD yaitu sebesar 29.27 persen dan yang menamatkan perguruan tinggi sebesar 5.95 persen. Yang menjadi perhatian disini adalah yang tidak punya ijazah sebesar 24.09 persen (Tidak/belum sekolah dan tidak tamat SD), jadi hampir sekitar seperempat penduduk

usia 15 tahun keatas tidak memiliki ijazah. Tentunya hal ini menjadi perhatian yang serius untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada.

Tabel 2.15
Persentase Penduduk Usia 15 tahun Keatas Berdasar Ijazah Yang Dimiliki Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2012

NO	Kabupaten/kota	Tidak/belum sekolah	Tidaktamat SD	SD	SLTP	SLTA	PT	Jumlah	Jumlah Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Kab. Pacitan	10,49	13,39	40,15	21,2	10,7	4,08	100,00	426.801

NO	Kabupaten/kota	Tidak/belum sekolah	Tidaktamat SD	SD	SLTP	SLTA	PT	Jumlah	Jumlah Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.	Kab. Ponorogo	6,6	20,58	29,49	21,07	17,24	5,01	100,00	674.753
3.	Kab. Trenggalek	4,28	15,25	39,02	23,09	13,8	4,56	100,00	529.610
4.	Kab. Tulungagung	4,43	12,41	32,74	24,88	20,41	5,13	100,00	762.829
5.	Kab. Blitar	6,91	16,31	34,41	22,79	15,4	4,19	100,00	858.810
6.	Kab. Kediri	5,54	16,45	29,47	22,84	21,55	4,14	100,00	1.143.291
7.	Kab. Malang	7,39	18,95	32,32	20,16	16,84	4,34	100,00	1.883.845
8.	Kab. Lumajang	12,82	18,02	38,82	15,77	11,25	3,31	100,00	777.144
9.	Kab. Jember	14,66	20,37	31,41	15,56	13,56	4,43	100,00	1.778.614
10.	Kab. Banyuwangi	7,39	20,17	28,42	20,63	17,97	5,43	100,00	1.194.979
11.	Kab. Bondowoso	12,76	27,65	30,39	12,88	11,32	5,01	100,00	577.866
12.	Kab. Situbondo	18,86	22,71	26,72	14,81	12,64	4,26	100,00	512.577
13.	Kab. Probolinggo	12,03	27,21	31,65	14,31	11,23	3,57	100,00	840.912
14.	Kab. Pasuruan	7,62	20,18	33,77	18,21	17,67	2,56	100,00	1.164.719
15.	Kab. Sidoarjo	2,02	6,46	17,8	24,73	38,13	10,87	100,00	1.522.964
16.	Kab. Mojokerto	5,11	15,46	25,58	26,29	23,39	4,18	100,00	794.998
17.	Kab. Jombang	5,88	12,44	27,96	25,51	23,75	4,45	100,00	912.817
18.	Kab. Nganjuk	7,15	14,62	31,98	20,8	19,49	5,95	100,00	780.474
19.	Kab. Madiun	9,17	16,47	28,34	20,81	20,97	4,24	100,00	517.736
20.	Kab. Magetan	6,66	13,67	30,77	19,09	23,66	6,15	100,00	488.041
21.	Kab. Ngawi	14,37	14,9	29,21	23,11	14,22	4,19	100,00	637.787
22.	Kab. Bojonegoro	11,84	14,57	34,14	22,36	14,39	2,7	100,00	943.980
23.	Kab. Tuban	13,93	14,08	34,52	20,22	14,21	3,04	100,00	873.128
24.	Kab. Lamongan	8,94	15,78	26,42	23,17	19,33	6,35	100,00	918.933
25.	Kab. Gresik	4,27	9,9	21,55	24,66	31,97	7,65	100,00	905.259
26.	Kab. Bangkalan	21,85	13,09	39,38	12,26	9,94	3,47	100,00	665.031
27.	Kab. Sampang	30,81	25,75	26,62	9,09	6,1	1,62	100,00	644.078
28.	Kab. Pamekasan	15,68	17,55	33,61	15,81	13,69	3,66	100,00	609.762
29.	Kab. Sumenep	25,47	17,65	31,12	12,78	10,23	2,74	100,00	824.473
30.	Kota Kediri	2,31	8,76	17,83	21,46	37,37	12,27	100,00	208.873
31.	Kota Blitar	2,21	10,36	20,13	23,56	33,06	10,68	100,00	101.662
32.	Kota Malang	2,35	5,89	16,45	18,64	38,8	17,86	100,00	647.468
33.	Kota Probolinggo	5,59	11,66	23,65	19,37	30,55	9,18	100,00	165.351
34.	Kota Pasuruan	3,17	12,04	23,19	21,31	30,02	10,27	100,00	140.026
35.	Kota Mojokerto	2,48	7,3	14,77	21,74	39,28	14,42	100,00	92.582
36.	Kota Madiun	2,23	5,79	16,16	22,02	39,95	13,85	100,00	133.681
37.	Kota Surabaya	2,91	6,44	19,83	20,67	36,37	13,77	100,00	2.160.062
38.	Kota Batu	3,53	14,14	28,3	20,34	26,6	7,09	100,00	147.745
Provinsi		9,25	15,58	29,01	19,97	20,30	5,88	100,00	28.963.661

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur (Juni 2012)

Bila dilihat per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Kota Malang merupakan daerah yang mempunyai persentase tertinggi penduduk yang berijazah perguruan tinggi (17,86 persen) dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Sedangkan Kabupaten Sampang merupakan daerah yang mempunyai persentase tertinggi penduduk yang belum sekolah/ tidak tamat SD (39,81 persen). Tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk akan sangat berpengaruh terhadap angka IPM, karena akan mempengaruhi rata-rata lama sekolah yang merupakan unsur pembentuk IPM.

e. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut.

Tabel 2.16
APM SD, SLTP, dan SLTA Jawa Timur 2008-2012 dan
Sasaran APM dalam Renstra Depdiknas (Persen)

Tahun	SD	SLTP	SLTA
(1)	(2)	(3)	(4)
2008	97,42	82,62	49,69
2009	97,71	85,44	51,96
2010	97,08	85,94	53,37
2011	97,16	85,96	54,97
2012	97,23	86,07	55,94

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Secara umum dalam lima tahun terakhir 2008-2012, terjadi peningkatan APM di Jawa Timur untuk semua jenjang pendidikan. Pada jenjang pendidikan SD, angka APM berfluktuasi pada tahun 2008 hingga 2010 mengalami penurunan, namun sejak tahun 2010 hingga tahun 2012 menunjukkan peningkatan. Sementara APM SLTP Jawa Timur 2008-2012 terus mengalami peningkatan mulai 82,62 persen pada tahun 2008 meningkat menjadi 86,07 persen, setiap tahunnya rata-rata naik sebesar 0,69 persen poin. Demikian halnya untuk jenjang pendidikan SLTA, capaian APM Jawa Timur tahun 2012 sebesar 55,94 persen, meningkat 6,25 persen poin, bila dibandingkan APM tahun 2008 yaitu 49,69 persen.

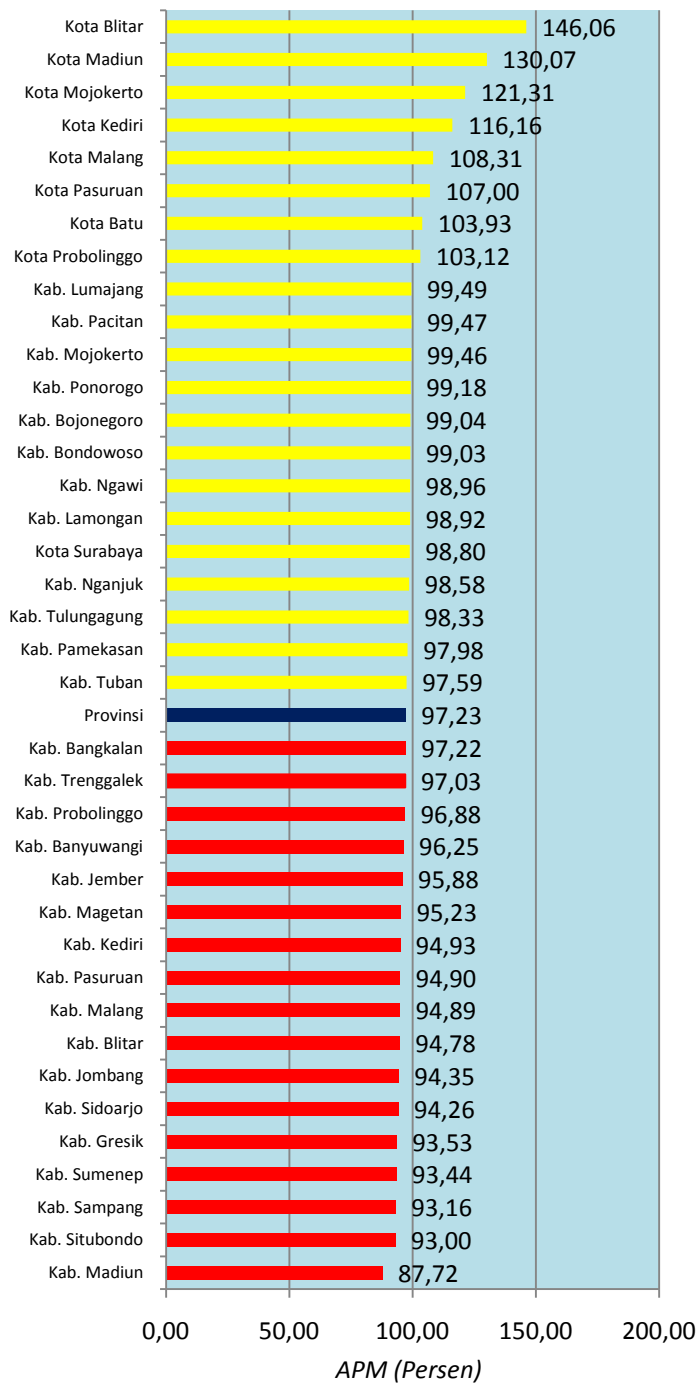
Tabel 2.17
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/PAKET A, SMP/MTs/PAKET B dan SMA/SMK/PAKET
C Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2011-2012

No	Kabupaten/Kota	APM SD/Mi Paket A		APM SMP/Mts/ Paket B		APM SMA/SMK/Paket C	
		2011	2012	2011	2012	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kab. Pacitan	99,46	99,47	88,87	88,88	56,72	56,79
2.	Kab. Ponorogo	99,17	99,18	98,90	98,90	60,16	60,20
3.	Kab. Trenggalek	97,02	97,03	85,55	85,56	54,18	54,28
4.	Kab. Tulungagung	98,32	98,33	90,20	90,21	53,62	53,69

No	Kabupaten/Kota	APM SD/Mi Paket A		APM SMP/Mts/ Paket B		APM SMA/SMK/Paket C	
		2011	2012	2011	2012	2011	2012
5.	Kab. Blitar	94,58	94,78	83,52	83,53	44,84	45,40
6.	Kab. Kediri	94,84	94,93	84,14	84,15	42,88	43,28
7.	Kab. Malang	94,59	94,89	75,25	75,26	44,49	44,64
8.	Kab. Lumajang	99,48	99,49	98,17	98,17	53,63	53,84
9.	Kab. Jember	95,87	95,88	78,44	78,27	47,38	47,69
10.	Kab. Banyuwangi	96,05	96,25	83,71	83,72	49,08	49,25
11.	Kab. Bondowoso	99,02	99,03	87,76	86,60	57,64	57,66
12.	Kab. Situbondo	92,98	93,00	98,65	90,84	48,08	48,44
13.	Kab. Probolinggo	96,87	96,88	73,21	72,50	38,11	38,30
14.	Kab. Pasuruan	94,35	94,90	91,80	91,81	55,56	55,66
15.	Kab. Sidoarjo	94,07	94,26	80,86	80,87	62,54	62,57
16.	Kab. Mojokerto	99,45	99,46	94,69	94,70	56,20	56,23
17.	Kab. Jombang	94,25	94,35	89,36	89,37	66,24	66,25
18.	Kab. Nganjuk	98,57	98,58	88,92	88,93	53,38	53,41
19.	Kab. Madiun	79,12	87,72	79,12	79,13	47,35	47,39
20.	Kab. Magetan	94,38	95,23	91,37	91,38	62,05	62,11
21.	Kab. Ngawi	98,67	98,96	90,77	90,78	64,04	64,09
22.	Kab. Bojonegoro	99,02	99,04	93,85	93,86	69,18	69,21
23.	Kab. Tuban	97,57	97,59	85,93	85,94	44,60	44,83
24.	Kab. Lamongan	98,46	98,92	82,32	82,33	59,49	59,50
25.	Kab. Gresik	92,56	93,53	86,13	86,14	57,26	57,30
26.	Kab. Bangkalan	97,21	97,22	85,25	83,68	42,76	43,29
27.	Kab. Sampang	93,15	93,16	73,88	73,72	21,66	21,99
28.	Kab. Pamekasan	97,97	97,98	83,98	82,02	57,59	58,74
29.	Kab. Sumenep	93,42	93,44	72,48	72,32	50,88	50,91
30.	Kota Kediri	116,15	116,16	115,43	115,43	66,70	77,20
31.	Kota Blitar	146,06	146,06	114,17	114,17	88,57	88,63
32.	Kota Malang	108,30	108,31	94,38	94,39	69,31	74,70
33.	Kota Probolinggo	103,11	103,12	95,04	95,05	70,49	70,52
34.	Kota Pasuruan	106,99	107,00	101,18	101,18	93,57	93,58
35.	Kota Mojokerto	121,30	121,31	103,32	103,32	79,24	79,26
36.	Kota Madiun	130,06	130,07	103,37	103,37	74,24	75,71
37.	Kota Surabaya	98,79	98,80	94,23	94,24	67,65	73,28
38.	Kota Batu	103,92	103,93	94,98	94,99	64,52	64,65
Provinsi		97,16	97,23	85,96	86,07	54,97	55,94

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Gambar 2.18
APM SD Sederajat Menurut Kabupaten/Kota
di Jawa Timur Tahun 2012



Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Capaian APM anak sekolah SD sederajat per kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2012 menunjukkan angka yang bervariasi. Dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, terdapat 17 wilayah yang APM SD nya dibawah capaian provinsi dan 21 wilayah yang capaiannya di atas APM SD provinsi.

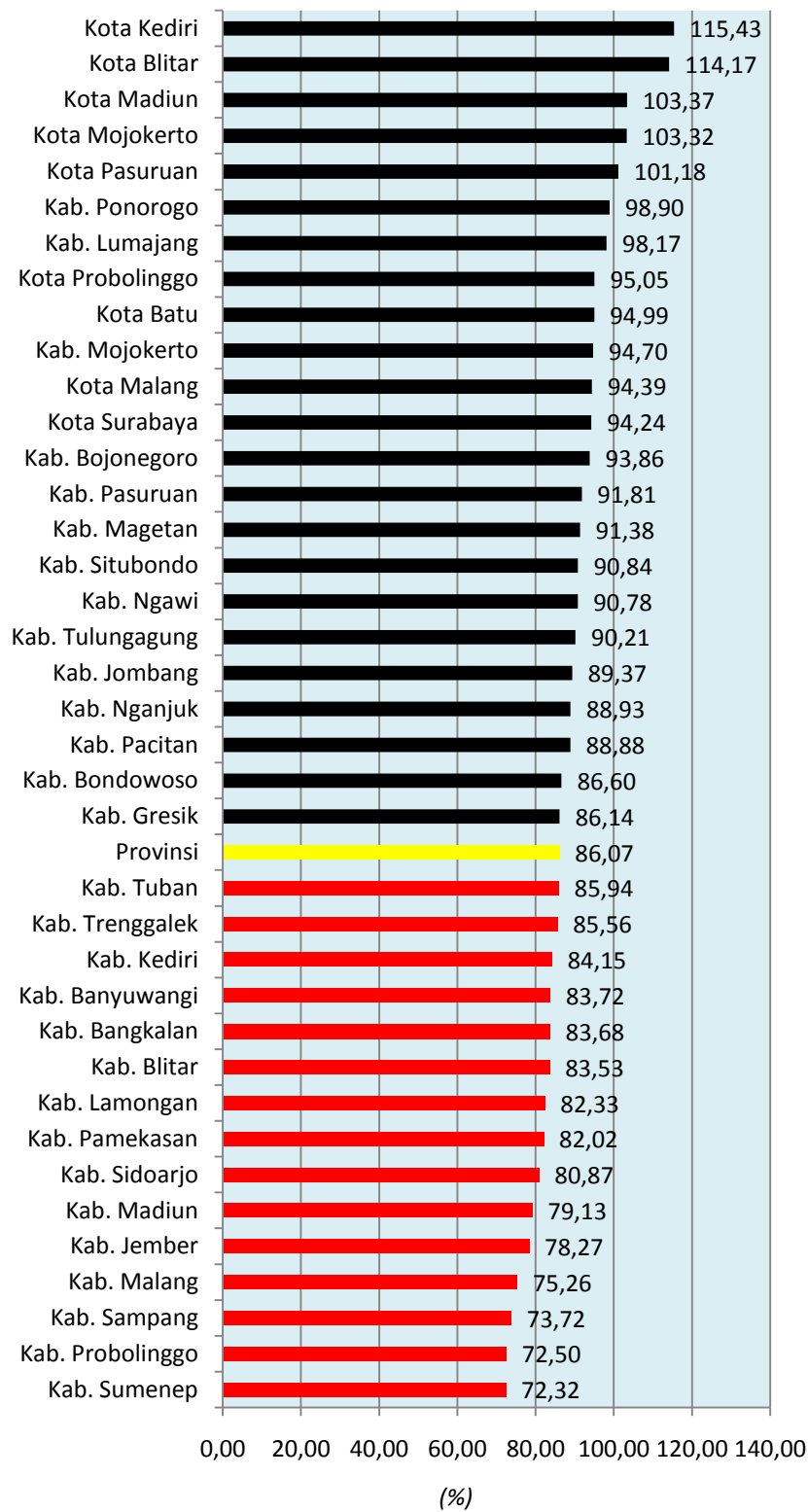
APM SD tertinggi adalah di Kota Blitar sebesar 146,06 persen dan yang terendah di Kabupaten Madiun sebesar

87,72 persen. Tingginya APM SD di Kota Blitar kemungkinan karena banyaknya anak usia 7-12 tahun dari Kabupaten Blitar yang bersekolah pada sekolah-sekolah di Kota Blitar, dan hal ini juga yang menyebabkan Kabupaten Blitar APM SD nya lebih rendah dari Kota Blitar. Hal yang sama juga terjadi pada enam wilayah kota lainnya yaitu Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo dan Kota Kediri. Keenam kota ini APM SD nya di atas 100 persen.

Sedangkan untuk SMP dan sederajat dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, terdapat 15 wilayah yang APM SLTP nya di bawah capaian provinsi dan 23 wilayah yang capaiannya di atas APM SLTP provinsi.

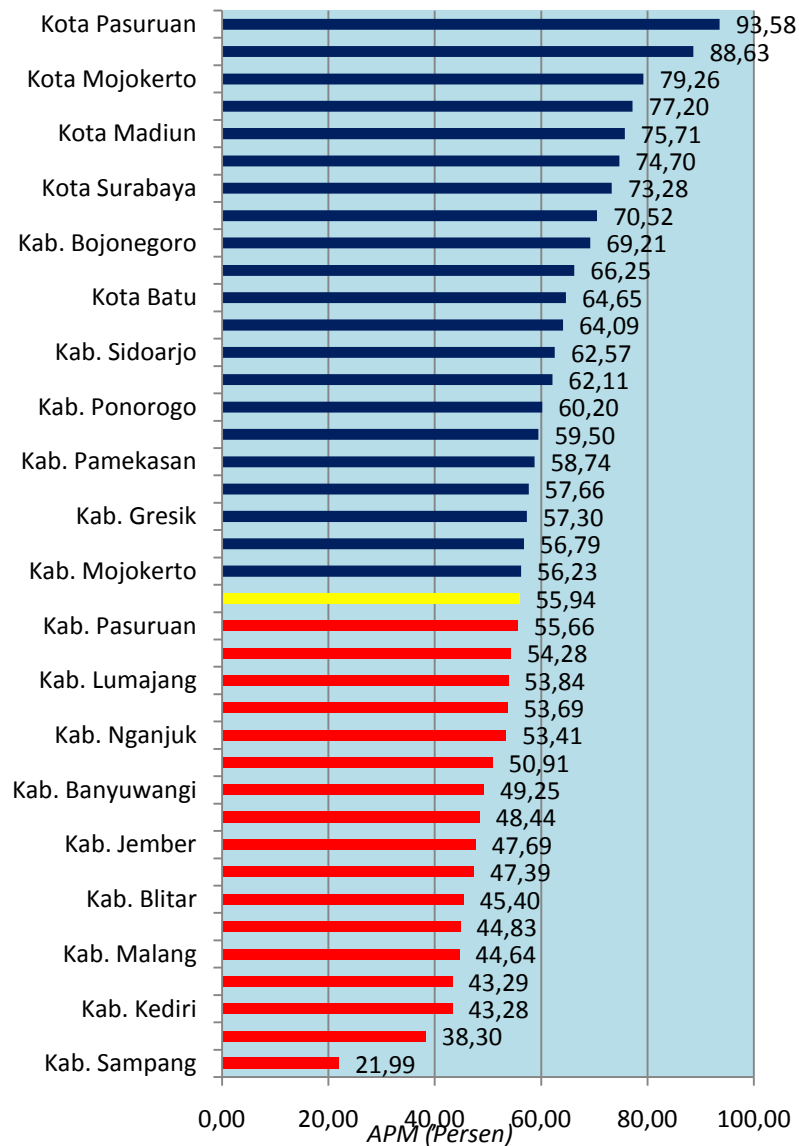
APM SLTP tertinggi adalah di Kota Kediri sebesar 115,43 persen dan yang terendah di Kabupaten Sumenep sebesar 72,32 persen. Ada lima wilayah di Jawa Timur yang APM SLTPnya diatas 100 persen, yaitu Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Mojokerto dan Kota Pasuruan. Tingginya APM SLTP di lima wilayah tersebut diduga karena adanya anak-anak sekolah dari wilayah kabupaten setempat.

Gambar 2.19
APM SLTP Sederajat Menurut Kabupaten/Kota
di Jawa Timur Tahun 2012



Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Gambar 2.20
APM SLTA Sederajat Menurut Kabupaten/Kota
di Jawa Timur Tahun 2012



Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Sedangkan pada tahun 2012 APM SMA Jawa Timur sebesar 55,94 persen capaian ini tentunya masih jauh dari yang diharapkan. Besaran APM SMA Jawa Timur ini memberikan gambaran sekitar lima puluh persen penduduk Jawa Timur yang berusia 16-18 tahun tidak sedang sekolah di bangku SMA.

Dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur 17 wilayah capaian APM SMA nya dibawah capaian Jawa Timur dan 21 wilayah capaian APM SMAnya diatas capaian Jawa Timur. APM SMA tertinggi adalah Kota Pasuruan sebesar 93,58 persen dan yang terendah adalah Kabupaten Sampang

sebesar 21,99 persen. Besarnya selisih capaian APM SMA ini mengindikasikan adanya ketimpangan pendidikan antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

2. Kesehatan

a. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi dilihat dari data kematian Per 1000 kelahiran hidup sekitar 972 pada tahun 2012. Data tersebut memberikan makna bahwa dari 1000 kelahiran hidup terdapat 972 bayi yang mencapai usia 1 tahun. Sementara angka kematian bayi pada tahun 2012 diproyeksikan menurun menjadi 28,31 Per 1000 kelahiran hidup atau 2,8 persen pada tahun 2012. Dengan demikian angka kelangsungan hidup bayi berbanding terbalik dengan angka kematian bayi. Semakin rendah angka kematian bayi, maka semakin besar peluang kelangsungan hidup bayi.

Tabel 2.18
Angka Kematian Bayi (AKB) dan Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)
Di Jawa Timur Tahun 2008 – 2012

No.	Indikator	2008	2009	2010	2011	2012**)
1.	Angka Kematian Bayi (AKB)	31,58	31,41	29,29	29,24	28,31
2.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)	968,42	968,59	970,71	970,76	971,69

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
Keterangan : **) Angka Sementara

Jawa Timur merupakan salah satu dari 5 Provinsi di Indonesia penyumbang hampir 50 persen dari total angka kematian bayi, karena provinsi ini memiliki jumlah penduduk yang besar. Kelima propinsi yang dimaksud adalah : Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Banten.

Sebaran angka kelangsungan hidup bayi per Kabupaten/Kota di Jawa Timur menunjukkan bahwa angka kelangsungan hidup terendah adalah Kota Probolinggo, Sidoarjo, Lumajang, Kota Malang, Kab. Banyuwangi. Jika dikaitkan dengan persentase penolong kelahiran oleh tenaga medis, nampaknya tidak selalu memberikan dampak positif terhadap angka kelangsungan hidup bayi. Dari hasil plot antara kedua variabel tersebut (persentase penolong

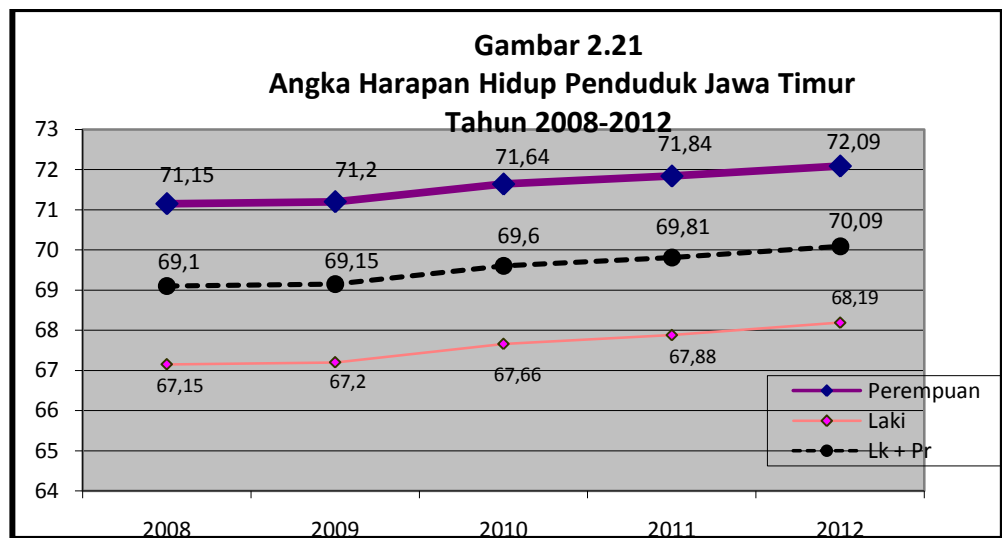
persalinan oleh nakes dan AKHB), menunjukkan bahwa AKHB pada Kabupaten Lumajang, Probolinggo, Tuban, Bangkalan, Banyuwangi, Bojonegoro, Kota Probolinggo dan Kota Pasuruan, lebih rendah dari rata-rata Jawa Timur sementara persentase ibu bersalin yang ditolong Nakes 96 persen ke atas. Sedangkan kab/kota dengan AKHB dan tingkat persalinan oleh tenaga nakes lebih tinggi dari rata-rata Jatim, terdapat pada wilayah Kabupaten Pacitan, Tulungagung, Blitar, Kediri, Mojokerto, Jombang, Magetan, Ngawi, Kota Kediri, Kota Mojokerto dan Kota Madiun.

b. Angka Usia Harapan Hidup

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya

Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat Tabel Kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung Angka Harapan Hidup digunakan cara tidak langsung dengan program Mortpak Lite.

Dari hasil penghitungan yang dilakukan oleh BPS RI dengan metode tidak langsung, rata-rata AHH di Jawa Timur selama 5 tahun terakhir (2008 – 2012) menunjukkan trend meningkat yaitu dari 69,10 (2008) menjadi 70,09 (2012).



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

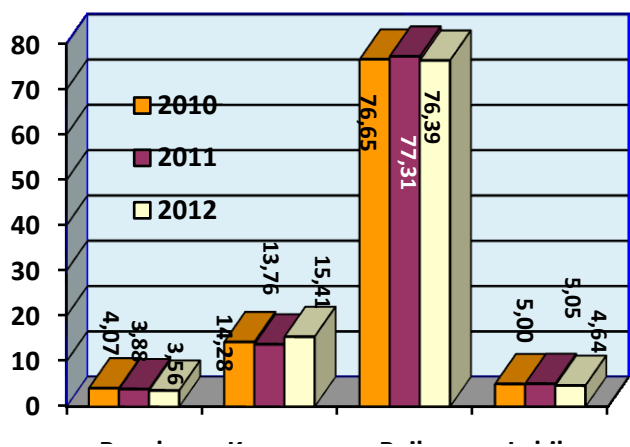
Pada umumnya kabupaten-kabupaten di wilayah “tapal kuda” seperti Kabupaten Sampang, Probolinggo, Bondowoso, Jember, Sumenep, Bangkalan, Pamekasan, Situbondo, dan Pasuruan memiliki usia harapan hidup yang terendah dibandingkan dengan daerah “kulonan” (Jawa Timur bagian barat). AHH pada wilayah “Tapal Kuda” berkisar pada angka 64 hingga 66 tahun untuk perempuan dan 60 hingga 63 tahun untuk laki-laki. Wilayah yang memiliki usia harapan hidup yang cukup tinggi adalah Kabupaten Tulungagung, Kota Mojokerto, Kabupaten Pacitan, Kota Blitar dengan 74 - 75 tahun untuk perempuan dan 71,56 tahun untuk laki-laki.

c. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Kondisi ini dilihat dari keadaan tubuh anak atau bayi berdasarkan berat badan menurut umur. Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk. WHO (1999) mengelompokkan wilayah yaitu kecamatan untuk kabupaten/kota dan kabupaten/kota untuk provinsi berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu :

- | | | |
|------------------|---|----------------------------------|
| a. rendah | = | jika gizi kurang di bawah 10 % |
| b. sedang | = | jika gizi kurang 10-19 % |
| c. tinggi | = | jika gizi kurang 20-29 % |
| d. sangat tinggi | = | jika gizi kurang 30 % atau lebih |

Gambar 2.22
Persentase Status Gizi Balita Tahun 2010 - 2012



Sumber : Survei Prevalensi Gizi 2010-2012

Jawa Timur tahun 2012, persentase balita bergizi buruk menjadi 3,56 persen. Hal ini dimungkinkan karena adanya penancangan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) tahun 2011-2015 oleh Pemprov Jawa Timur yang sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan yang terfokus pada penurunan kemiskinan dan kelaparan.

Kalau kita lihat menurut kabupaten/kota di Jawa Timur, Kabupaten Probolinggo merupakan wilayah yang tertinggi persentase gizi buruknya yaitu sebesar 11,49 persen.

Tabel 2.19
Persentase Status Gizi Balita Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2012

NO	KABUPATEN/KOTA	GIZI BURUK	GIZI KURANG	GIZI BAIK	GIZI LEBIH	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kab. Pacitan	0.00	5.06	87.34	7.59	100,00
2.	Kab. Ponorogo	1.18	7.06	88.24	3.53	100,00
3.	Kab. Trenggalek	1.25	7.50	88.75	2.50	100,00
4.	Kab. Tulungagung	1.27	11.39	84.81	2.53	100,00
5.	Kab. Blitar	3.33	11.11	76.67	8.89	100,00
6.	Kab. Kediri	7.29	16.67	73.96	2.08	100,00
7.	Kab. Malang	0.85	10.26	84.62	4.27	100,00
8.	Kab. Lumajang	3.61	19.28	69.88	7.23	100,00
9.	Kab. Jember	3.54	17.70	71.68	7.08	100,00
10.	Kab. Banyuwangi	5.10	20.41	73.47	1.02	100,00
11.	Kab. Bondowoso	6.25	25.00	65.00	3.75	100,00
12.	Kab. Situbondo	7.79	24.68	62.34	5.19	100,00
13.	Kab. Probolinggo	11.49	25.29	63.22	0.00	100,00
14.	Kab. Pasuruan	8.79	25.27	60.44	5.49	100,00
15.	Kab. Sidoarjo	2.97	9.90	80.20	6.93	100,00
16.	Kab. Mojokerto	2.35	7.06	85.88	4.71	100,00
17.	Kab. Jombang	2.17	18.48	76.09	3.26	100,00

NO	KABUPATEN/KOTA	GIZI BURUK	GIZI KURANG	GIZI BAIK	GIZI LEBIH	JUMLAH
18.	Kab. Nganjuk	4.76	13.10	80.95	1.19	100,00
19.	Kab. Madiun	1.32	18.42	76.32	3.95	100,00
20.	Kab. Magetan	2.35	14.12	74.12	9.41	100,00
21.	Kab. Ngawi	4.60	11.49	77.01	6.90	100,00
22.	Kab. Bojonegoro	4.60	17.24	77.01	1.15	100,00
23.	Kab. Tuban	3.41	19.32	73.86	3.41	100,00
24.	Kab. Lamongan	3.53	20.00	74.12	2.35	100,00
25.	Kab. Gresik	1.22	12.20	78.05	8.54	100,00
26.	Kab. Bangkalan	3.61	27.71	63.86	4.82	100,00
27.	Kab. Sampang	0.00	25.32	72.15	2.53	100,00
28.	Kab. Pamekasan	0.00	15.00	85.00	0.00	100,00
29.	Kab. Sumenep	8.64	23.46	64.20	3.70	100,00
30.	Kota Kediri	4.17	11.11	77.78	6.94	100,00
31.	Kota Blitar	6.76	5.41	82.43	5.41	100,00
32.	Kota Malang	1.25	10.00	85.00	3.75	100,00
33.	Kota Probolinggo	6.85	13.70	76.71	2.74	100,00
34.	Kota Pasuruan	4.00	16.00	77.33	2.67	100,00
35.	Kota Mojokerto	0.00	10.14	84.06	5.80	100,00
36.	Kota Madiun	0.00	7.04	84.51	8.45	100,00
37.	Kota Surabaya	1.63	15.45	71.54	11.38	100,00
38.	Kota Batu	3.33	14.44	80.00	2.22	100,00
Provinsi		3.56	15.41	76.39	4.64	100,00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, Survei Prevalensi Gizi Balita 2012

3. Ketenagakerjaan

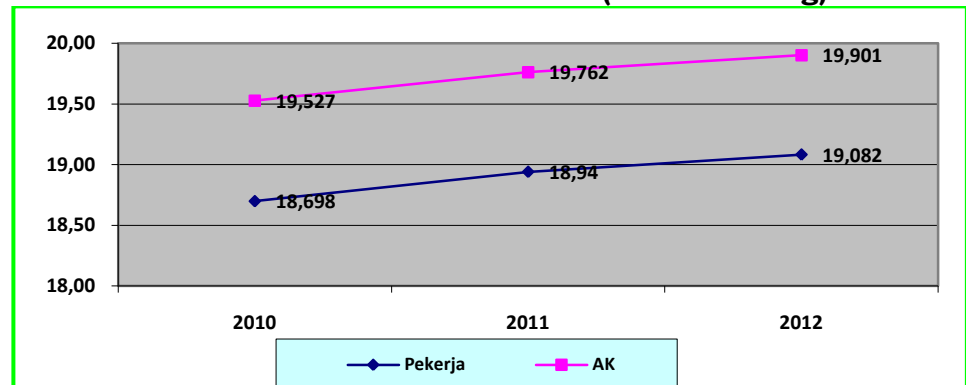
a. Rasio Penduduk Yang Bekerja

Gambaran situasi ketenagakerjaan secara Nasional dapat diperoleh dari Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan secara triwulanan sejak tahun 2011. Data ketenagakerjaan per triwulanan pada umumnya dapat menjelaskan kondisi ketenagakerjaan yang bersifat musiman. Hal ini dikarenakan sebagian besar tenaga kerja di Jawa Timur khususnya dan Indonesia pada umumnya masih bertumpu pada sektor Pertanian yang banyak dipengaruhi oleh perubahan iklim.

Pada triwulan ketiga 2012, situasi ketenagakerjaan di Jawa Timur masih relatif membaik meskipun hubungan industrial antara pengusaha dan buruh belum harmonis, terutama dengan adanya tuntutan buruh yang terkait dengan penentuan upah minimum kabupaten/kota (UMK), upah minimum sektoral (UMS) dan penghapusan sistem outsourcing. Jumlah pekerja di Jawa Timur pada Agustus 2012 tercatat sebanyak 19,081 juta orang atau meningkat 141.655 orang dibandingkan Agustus 2011. Sementara

jumlah angkatan kerja di Jawa Timur mengalami peningkatan 139.672 orang yaitu dari 19,761 juta orang tahun 2011 menjadi 19,901 juta orang pada tahun 2012. Dengan demikian peningkatan jumlah pekerja menjadi tidak signifikan jika dibandingkan dengan peningkatan jumlah angkatan kerja. Hal ini dapat menggambarkan bahwa kompetisi diantara angkatan kerja semakin ketat.

Gambar 2.23
Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja dan dan Pekerja
di Jawa Timur Tahun 2010 – 2012 (Jutaan Orang)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan Kerja (demand for labour) adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2012 sebesar 95,88 persen yang berarti bahwa dari 100 orang jumlah angkatan kerja, terdapat 96 orang diantaranya terserap dalam lapangan pekerjaan yang tersedia. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 0,04 persen poin dibandingkan tahun 2011.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya Dan Olah Raga

1. Jumlah Grup Kesenian

Pelestarian seni budaya tradisi merupakan milik masyarakat dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab masyarakat. Pemerintah harus mampu memfasilitasi serta mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam upaya melestarikan seni budaya tradisi yang tumbuh, berkembang dan menjadi bagian dari masyarakat. Dalam hal ini pemerintah daerah dan masyarakat harus menyediakan ruang, tempat dan waktu bukan hanya untuk seniman dan budayawan dalam melestarikan dan mengembangkan seni budaya tetapi juga pemberdayaan seniman dan budayawan serta masyarakat secara luas.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah adalah lemahnya partisipasi masyarakat dalam mengenal dan mengapresiasi budayanya sendiri. Secara filosofis sebenarnya kebudayaan adalah identitas utama suatu kelompok masyarakat. Kebudayaan timbul dengan tujuan membedakan ciri khas suatu kelompok dengan kelompok lain. Namun, esensi ini sering dilupakan oleh banyak kelompok karena beberapa faktor. Salah satu faktor utamanya adalah kehadiran budaya populer.

Di Jawa Timur secara umum, di beberapa daerah masih banyak masyarakat yang setia memelihara seni budaya daerah meskipun kita akui bersama, di kabupaten/kota besar kehidupan seni budaya daerah semakin berkurang, berikut adalah data-data tentang gorup kesenian yang ada di Jawa Timur:

Tabel 2.20
Jumlah Group Kesenian Di Jawa Timur

NO	JENIS GROUP	JUMLAH
1	2	3
1	Paguyuban Peminat Seni Tradisi di Sekolah	80 Group
2	Seni Musik Tradisi	548 Group
3	Seni Musik Non Tradisi	975 Group
4	Seni Musik Islami	227 Group
5	Jumlah Seniman Tari Musik Teater	1826 Orang
6	Organisasi/Group Teater	251 Group

Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Th 2012

Pelestarian dan pengembangan budaya daerah tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum, namun dilakukan juga melalui sekolah-sekolah dengan tujuan agar generasi muda sejak kecil dibina untuk mencintai seni budaya daerahnya sendiri. Di Jawa Timur sudah banyak sekolah-sekolah yang ikut tergabung dalam Paguyuban Peminat Seni Tradisi di Sekolah (PPST) yang pada tahun 2011 berjumlah 62 group, dan pada tahun 2012 ini meningkat menjadi 80 group. Diharapkan setiap tahun akan terus meningkat sehingga upaya kita untuk melestarikan dan mengembangkan seni budaya daerah semakin meningkat pula.

2. Jumlah Gedung Budaya dan Seni

Gedung budaya dan seni adalah sebuah tempat atau bangunan yang mempunyai fungsi sebagai arena atau ajang pertunjukan kebolehan, bakat dalam bidang seni dan budaya bangsa. Contoh budaya bangsa seperti tari remo, lukisan atau seni – seni yang lainnya. Berdasarkan data dari dinas terkait jumlah gedung/sarana penyelenggara kesenian di Jawa Timur berjumlah 1260 gedung pada tahun 2011 dan tidak mengalami perubahan pada tahun 2012.

3. Jumlah Klub Olah Raga

Pengertian klub olah raga adalah perkumpulan yang menyelenggarakan kegiatan di bidang olahraga bagi para anggotanya guna peningkatan prestasi maupun dengan tujuan lain yaitu menjaga kesehatan. Seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berolahraga baik untuk prestasi maupun menjaga kesehatan, maka klub-klub olahraga pun semakin diminati, terutama di daerah perkotaan. Selain itu, keberadaan klub-klub olahraga memberikan kontribusi peningkatan prestasi olah raga regional dan nasional baik yang bersifat amatir maupun profesional. Oleh karena itu jika prestasi olahraga semakin baik maka semakin harum dan terpandang suatu daerah/negara, hal ini juga menjadi salah satu indikator keberhasilan pimpinan daerah/Negara tersebut. Beberapa klub olahraga yang kini banyak diminati antara lain klub sepak bola, bulu tangkis, bola volley, bola basket, bersepeda, futsal, dan lain-lain.

Berdasarkan data dari Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten/Kota Se Jawa Timur terdapat 7.171 klub olahraga di tahun 2011 yang terdiri dari klub sepak bola, bulu tangkis, bola volley, bola basket dan lainnya. Pada tahun 2012 jumlah klub olah raga meningkat menjadi 7.864 klub. Jumlah klub terbanyak baik tahun 2011 dan 2012 adalah klub bola volley. Sedangkan yang mengalami kenaikan terbesar adalah cabang olah raga sepak bola naik 260 klub.

Disamping pembangunan olahraga, pemerintah memandang penting pada pendidikan jasmani dan olah raga yang diarahkan pada usaha membina kesehatan jasmani dan rohani bagi setiap anggota masyarakat serta usaha memasyarakatkan olah raga, mengolahragakan masyarakat dan meningkatkan prestasi.

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah masih kurangnya fasilitas olahraga yang memenuhi standard sehingga perlu peningkatan. Kekurangan fasilitas olahraga tersebut sangat mempengaruhi prestasi olahraga di Jawa Timur, artinya belum semua daerah terfasilitasi dengan baik sehingga sangat sulit untuk mengembangkan prestasi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2008 telah mencoba memfasilitasi olahraga di daerah guna pembibitan atlit dengan mendirikan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD) yang terdiri dari 7 cabang olahraga bekerjasama dengan 10 kabupaten/kota. PPLPD tersebut diharapkan tiap tahun akan meningkat sehingga pembibitan atlit di daerah akan lebih merata.

Adapun daftar PPLPD saat ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.21
Daftar Pusat Pendidikan Dan Latihan Olahraga
Pelajar Daerah (PPLPD) Jawa Timur

NO	KABUPATEN / KOTA	CABANG OLAHRAGA
1.	Jombang	Atletik
2.	Banyuwangi	Bola Voli
3.	Jember	Bola Voli
4.	Probolinggo	Senam
5.	Nganjuk	Atletik

NO	KABUPATEN / KOTA	CABANG OLAHRAGA
6.	Kediri	Tenis Meja
7.	Lamongan	Panahan
8.	Magetan	Tenis Meja
9.	Blitar	Sepak Takraw
10.	Malang	Gulat

Sumber Data : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur

Selain itu, program pembibitan atlet yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga dilakukan melalui kegiatan (1) Penelusuran Atlet berbakat (Talent Scouting) melalui test pengukuran, (2) Peningkatan kualitas SDM Pelatih. Kegiatan ini merupakan inti/ atlet berbakat yang dipersiapkan untuk menghadapi Kejuaraan Olahraga Pelajar Tingkat Nasional yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali (POPNAS)

Selain pembibitan atlit, pemerintah provinsi Jawa Timur juga melaksanakan pembinaan atlit prestasi melalui KONI,dengan beberapa kegiatan :

- Konsolidasi tentang evaluasi kegiatan dan target medali kepada cabang-cabang olahraga prestasi;
- Melakukan komparasi terhadap hasil yang dicapai dalam kejurnas sepanjang tiga tahun terakhir;
- Meningkatkan kegiatan guna mendukung Program Jatim 100 yaitu target Jawa Timur untuk mencapai 100 medali;
- Melaksanakan Pemusatan Latihan Daerah (PUSLATDA) secara berkelanjutan dengan menerapkan promosi dan degradasi serta penentuan langkah strategis, cerdas, realistis, keseriusan, kesungguhan dan dukungan bagi atlit-atlit Jawa Timur untukmeraih prestasi.
- Memfasilitasi atlet Jawa Timur ke berbagai kejuaraan baik regional, nasional maupun internasional.
- Melibatkan instansi lain yang terkait dalam kegiatan pembinaan prestasi olahraga;

4. Jumlah gedung olah raga

Sekarang ini, kegiatan olahraga bukan saja untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, tetapi juga merupakan salah satu hiburan bagi para peminat olahraga sekaligus mempererat hubungan sosialisasi masyarakat dengan lingkungan

sekitarnya. Dengan berkembangnya dunia olahraga, maka semakin banyak peminat olahraga dan muncul klub-klub olahraga, sehingga memacu diadakannya kompetisi olahraga.

Untuk memenuhi kebutuhan akan sarana latihan dan pertandingan olahraga maka perlu adanya sarana gedung yang dapat dipergunakan untuk berbagai macam jenis olahraga. Walaupun banyak juga olahraga yang bisa dilakukan di luar gedung, akan tetapi keberadaan gedung olahraga jelas-jelas sangat dibutuhkan untuk mendukung berlangsungnya kegiatan olahraga. Gedung olahraga terutama diperuntukkan bagi olahraga yang sudah sangat umum dan digemari oleh masyarakat, seperti badminton, bola basket, bola voli, tenis meja, dan futsal yang saat ini sedang meningkat penggemarnya.

Berdasarkan data yang dihimpun dari dinas/instansi terkait Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2011 jumlah gedung olah raga sebanyak 179, kolam renang 118, stadion 41 dan lapangan sepak bola sebanyak 1.283, sedangkan pada tahun 2012 sebanyak 192 gedung olah raga, kolam renang 135, stadion 41 dan lapangan sepak bola sebanyak 1.598. Dari data diatas dari tahun 2011 ke tahun 2012 yang mengalami kenaikan signifikan adalah lapangan sepak bola naik 315, kenaikan ini sudah biasa karena cabang olah raga sepak bola merupakan ikon masyarakat baik di daerah perdesaan maupun perkotaan, bahkan olah raga terpopuler di dunia.

5. Prestasi Olah raga Jawa Timur

Pada tahun 2012 di bidang olahraga provinsi Jawa Timur telah mengukir beberapa prestasi di tingkat nasional antara lain:

- a. Festival Olahraga Tradisional Tingkat Nasional Tahun 2012 di Maluku Utara Provinsi Jawa Timur menerima 2 (dua) predikat yaitu juara II dan juara favorit.
- b. Lomba SKJ tahun 2012 menjadi juara Harapan I Tingkat Nasional.
- c. Tim POPWIL Jawa Timur menjadi juara umum dengan perolehan medali : 22 Emas, 3 Perak dan 9 Perunggu.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

1. Bidang Urusan Pendidikan

a. Angka Partisipasi Sekolah

1) Pendidikan Dasar

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

APS pendidikan dasar adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar atau sedang sekolah (SD-SLTP) per 1.000 penduduk usia pendidikan dasar.

Angka partisipasi sekolah di Jawa Timur untuk anak usia 7-12 tahun dalam lima tahun terakhir (tahun 2008-2012) menunjukkan nilai yang cenderung stabil pada kisaran angka 980 per 1.000 penduduk usia 7-12 tahun. Ini memberikan gambaran bahwa di Jawa Timur dalam tiap 1.000 anak usia 7-12 tahun sekitar 20 anak diantaranya sedang tidak bersekolah. Kondisi ini tentunya memprihantinkan, meskipun biaya sekolah sudah dibantu oleh pemerintah melalui proram BOS namun ternyata masih banyak anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah.

Sementara itu angka partisipasi sekolah anak usia 13-15 tahun di Jawa Timur dalam lima tahun terakhir (tahun 2008-2012) menunjukkan kecenderungan yang

terus meningkat. Pada tahun 2008 APS usia 13-15 tahun sebesar 863 dan terus meningkat hingga pada tahun 2012 menjadi 916 per 1.000 penduduk usia 13 - 15 tahun. Hal ini tentunya menjadi prestasi tersendiri mengingat pada saat ini sedang gencarnya program wajib belajar 9 tahun. Namun demikian masih perlu diperhatikan mengingat masih ada sekitar 84 anak per 1.000 anak usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah.

Gabungan APS usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun merupakan gambaran APS Pendidikan Dasar. Dalam lima tahun terakhir APS pendidikan dasar di Jawa Timur menunjukkan nilai yang terus meningkat, walaupun peningkatannya tidak tinggi. APS Pendidikan Dasar pada tahun 2008 sebesar 946 per 1.000 anak usia 7-15 tahun sedangkan pada tahun 2012 sebesar 965 per 1.000 anak usia 7-15 tahun. Dengan semakin meningkatnya APS pendidikan dasar maka program wajar 9 tahun akan segera tercapai.

Tabel 2.22
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar
Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 – 2012.

NO	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	SD/MI (7-12 tahun)					
1.1.	Usia 7-12 thn sedang sekolah	3.902.027	3.873.129	3.892.007	3.985.410	3.927.336
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	3.957.794	3.929.141	3.941.708	4.055.928	3.983.295
1.3.	APS SD/MI per 1.000	986	986	987	983	986
2	SMP/MTs (13-15 tahun)					
2.1.	Jumlah murid usia 13-15 thn	1.647.314	1.602.811	1.652.235	1.665.094	1.600.718
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	1.909.152	1.821.047	1.860.266	1.849.280	1.747.931
2.3.	APS SMP/MTs per 1.000	863	880	888	900	916
3	Pendidikan Dasar SD/MI-SMP/MTs (7-15 tahun)					
3.1.	Jumlah murid usia 7-15 thn	5.549.341	5.475.940	5.544.242	5.650.504	5.528.054
3.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-15 tahun	5.866.946	5.750.188	5.801.974	5.905.208	5.731.226
3.3.	APS Pendidikan Dasar per 1.000	946	952	956	957	965

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan BPS Provinsi Jawa Timur (Juni 2012)

Tabel 2.23
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012

NO	Kabupaten/kota	SD/MI Usia 7-12 Thn			SMP/MTs Usia 13-15 Thn			Pendidikan Dasar 7-15 Thn		
		Sedang Sekolah	jumlah Penduduk	APS	Sedang Sekolah	Jumlah Penduduk	APS	Sedang Sekolah	Jumlah Penduduk	APS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Kab. Pacitan	47.343	47.988	987	22.943	25.517	899	70.286	73.505	956
2.	Kab. Ponorogo	78.379	79.295	988	37.452	38.394	975	115.831	117.688	984
3.	Kab. Trenggalek	60.525	62.142	974	26.925	28.470	946	87.450	90.612	965
4.	Kab. Tulungagung	100.779	101.659	991	41.922	43.927	954	142.701	145.586	980
5.	Kab. Blitar	123.143	125.058	985	45.379	48.615	933	168.522	173.673	970
6.	Kab. Kediri	164.468	166.139	990	60.366	65.817	917	224.834	231.956	969
7.	Kab. Malang	260.767	263.719	989	96.449	109.810	878	357.215	373.529	956
8.	Kab. Lumajang	111.278	113.179	983	32.674	40.851	800	143.952	154.030	935
9.	Kab. Jember	261.820	265.403	987	90.279	107.810	837	352.099	373.213	943
10.	Kab. Banyuwangi	170.026	171.573	991	63.693	68.367	932	233.719	239.940	974
11.	Kab. Bondowoso	72.360	75.409	960	26.159	28.476	919	98.519	103.885	948
12.	Kab. Situbondo	64.480	66.425	971	19.053	22.347	853	83.533	88.772	941
13.	Kab. Probolinggo	114.069	116.442	980	50.449	57.499	877	164.518	173.941	946
14.	Kab. Pasuruan	153.126	156.422	979	72.260	80.946	893	225.386	237.368	950
15.	Kab. Sidoarjo	215.082	216.774	992	92.651	96.205	963	307.733	312.979	983
16.	Kab. Mojokerto	100.672	101.821	989	42.498	45.896	926	143.170	147.717	969
17.	Kab. Jombang	130.433	131.830	989	50.011	54.497	918	180.445	186.327	968
18.	Kab. Nganjuk	103.892	106.285	977	47.701	50.544	944	151.593	156.829	967
19.	Kab. Madiun	62.728	62.764	999	29.145	29.398	991	91.874	92.161	997
20.	Kab. Magetan	57.372	57.404	999	29.061	30.342	958	86.433	87.746	985
21.	Kab. Ngawi	75.646	76.341	991	35.070	37.075	946	110.716	113.417	976
22.	Kab. Bojonegoro	122.971	124.048	991	46.213	50.790	910	169.184	174.839	968
23.	Kab. Tuban	108.139	110.070	982	53.686	57.048	941	161.825	167.118	968
24.	Kab. Lamongan	124.450	127.147	979	52.569	53.546	982	177.019	180.693	980
25.	Kab. Gresik	128.069	128.908	993	60.814	62.523	973	188.883	191.431	987
26.	Kab. Bangkalan	123.948	126.673	978	47.115	55.762	845	171.062	182.435	938
27.	Kab. Sampang	119.394	122.530	974	52.894	64.669	818	172.289	187.198	920
28.	Kab. Pamekasan	98.980	100.169	988	42.080	45.466	926	141.060	145.635	969
29.	Kab. Sumenep	100.853	102.963	980	40.037	44.301	904	140.890	147.265	957
30.	Kota Kediri	25.873	26.048	993	12.666	12.682	999	38.539	38.729	995
31.	Kota Blitar	13.607	13.718	992	6.376	6.583	968	19.983	20.301	984
32.	Kota Malang	82.208	82.602	995	32.116	34.702	925	114.323	117.303	975
33.	Kota Probolinggo	23.349	23.765	983	9.306	9.920	938	32.655	33.684	969
34.	Kota Pasuruan	21.479	21.619	994	8.583	9.114	942	30.062	30.733	978
35.	Kota Mojokerto	13.512	13.611	993	4.240	4.432	957	17.752	18.043	984
36.	Kota Madiun	16.340	16.349	999	7.930	8.295	956	24.270	24.644	985
37.	Kota Surabaya	255.205	258.165	989	103.184	108.138	954	358.389	366.303	978
38.	Kota Batu	20.570	20.841	987	8.772	9.156	958	29.342	29.998	978
Provinsi		3.927.336	3.983.295	986	1.600.718	1.747.931	916	5.528.054	5.731.226	965

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur (Juni 2012)

Angka partisipasi sekolah pendidikan dasar (usia 7-15 tahun) tahun 2012 per kabupaten/kota di Jawa Timur semuanya diatas 900 per 1.000. Beberapa kabupaten angka APS pendidikan dasarnya hampir mencapai 1.000 kondisi ini memberikan gambaran capaian APS untuk pendidikan dasar sudah baik.

a) Rasio Ketersediaan sekolah/Penduduk usia Sekolah

Dalam meningkatkan pelayanan pendidikan dasar pemerintah senantiasa menyediakan sarana fasilitas pendidikan. Pembangunan sekolah baru tentunya harus mempertimbangkan keberadaan anak usia sekolah yang berada pada wilayah tersebut. Dalam melihat keterbandingan jumlah sekolah dengan penduduk dapat dilihat angka rasio sekolah terhadap penduduk.

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar.

Tabel 2.24
Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 -2012

NO	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	27.024	26.830	26.279	25.996	26.554
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	3.957.794	3.929.141	3.941.708	4.055.928	3.983.295
1.3.	Rasio (Per 10.000)	68	68	67	64	67
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	5.989	6.025	6.347	6.465	6.996
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	1.909.152	1.821.047	1.860.266	1.849.280	1.747.931
2.3.	Rasio (Per 10.000)	31	33	34	35	40
3	Pendidikan Dasar (SD/MI - SMP/MTs)					
3.1.	Jumlah gedung sekolah	33.013	32.855	32.626	32.461	33.550
3.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-15 tahun	5.866.946	5.750.188	5.801.974	5.905.208	5.731.226
3.3.	Rasio (Per 10.000)	56	57	56	55	59

Sumber : Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur dan BPS Provinsi Jawa Timur

Rasio ketersediaan sekolah SD sederajat dan SLTP sederajat per 10.000 penduduk usia sekolah di Jawa Timur mulai tahun 2008 sampai tahun 2012 menunjukkan angka yang meningkat, ini berarti untuk rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar juga meningkat. Peningkatan rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar ini merupakan cerminan perhatian pemerintah dalam menyediakan sarana belajar bagi anak usia sekolah. Dengan terus bertambahnya jumlah penduduk tentunya juga harus diiringi penambahan fasilitas belajar berupa sekolah.

Tabel 2.25
Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Menurut
Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012

No	Kabupaten/kota	SD/MI Usia 7-12 Thn			SMP/MTs Usia 13-15 Thn			Pendidikan Dasar Sd/SMP usia 7 -15 Thn		
		Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 13-15 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 7-15 th	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Kab. Pacitan	522	47.988	109	107	25.517	42	629	73.505	86
2.	Kab. Ponorogo	680	79.295	86	163	38.394	42	843	117.688	72
3.	Kab. Trenggalek	550	62.142	89	98	28.470	34	648	90.612	72
4.	Kab. Tulungagung	775	101.659	76	109	43.927	25	884	145.586	61
5.	Kab. Blitar	911	125.058	73	148	48.615	30	1.059	173.673	61
6.	Kab. Kediri	874	166.139	53	189	65.817	29	1.063	231.956	46
7.	Kab. Malang	1.480	263.719	56	446	109.810	41	1.926	373.529	52
8.	Kab. Lumajang	752	113.179	66	206	40.851	50	958	154.030	62
9.	Kab. Jember	1.397	265.403	53	450	107.810	42	1.847	373.213	49
10.	Kab. Banyuwangi	1.042	171.573	61	244	68.367	36	1.286	239.940	54
11.	Kab. Bondowoso	607	75.409	80	193	28.476	68	800	103.885	77
12.	Kab. Situbondo	523	66.425	79	127	22.347	57	650	88.772	73
13.	Kab. Probolinggo	1.062	116.442	91	327	57.499	57	1.389	173.941	80
14.	Kab. Pasuruan	992	156.422	63	278	80.946	34	1.270	237.368	54
15.	Kab. Sidoarjo	771	216.774	36	207	96.205	22	978	312.979	31
16.	Kab. Mojokerto	694	101.821	68	182	45.896	40	876	147.717	59
17.	Kab. Jombang	822	131.830	62	235	54.497	43	1.057	186.327	57
18.	Kab. Nganjuk	769	106.285	72	130	50.544	26	899	156.829	57
19.	Kab. Madiun	503	62.764	80	77	29.398	26	580	92.161	63
20.	Kab. Magetan	569	57.404	99	86	30.342	28	655	87.746	75
21.	Kab. Ngawi	676	76.341	89	109	37.075	29	785	113.417	69
22.	Kab. Bojonegoro	1.027	124.048	83	206	50.790	41	1.233	174.839	71
23.	Kab. Tuban	793	110.070	72	169	57.048	30	962	167.118	58
24.	Kab. Lamongan	1.167	127.147	92	310	53.546	58	1.477	180.693	82
25.	Kab. Gresik	801	128.908	62	232	62.523	37	1.033	191.431	54
26.	Kab. Bangkalan	795	126.673	63	248	55.762	44	1.043	182.435	57
27.	Kab. Sampang	1.065	122.530	87	367	64.669	57	1.432	187.198	76
28.	Kab. Pamekasan	770	100.169	77	308	45.466	68	1.078	145.635	74
29.	Kab. Sumenep	1.215	102.963	118	381	44.301	86	1.596	147.265	108
30.	Kota Kediri	153	26.048	59	36	12.682	28	189	38.729	49
31.	Kota Blitar	73	13.718	53	26	6.583	39	99	20.301	49
32.	Kota Malang	316	82.602	38	115	34.702	33	431	117.303	37
33.	Kota Probolinggo	143	23.765	60	38	9.920	38	181	33.684	54
34.	Kota Pasuruan	84	21.619	39	34	9.114	37	118	30.733	38
35.	Kota Mojokerto	67	13.611	49	19	4.432	43	86	18.043	48
36.	Kota Madiun	83	16.349	51	24	8.295	29	107	24.644	43

37.	Kota Surabaya	946	258.165	37	343	108.138	32	1.289	366.303	35
38.	Kota Batu	85	20.841	41	29	9.156	32	114	29.998	38
Provinsi		26.554	3.983.295	67	6.996	1.747.931	40	33.550	5.731.226	59

Sumber : Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur dan BPS Provinsi Jawa Timur

b) Rasio Guru/Murid

Penunjang keberhasilan program pendidikan akan sangat tergantung ketersediaan tenaga pengajar/guru. Keterbandingan jumlah guru dan murid dapat dilihat dari besaran angka rasio guru terhadap murid. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.26
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 – 2012

NO	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	281.324	283.929	289.808	298.475	291.963
1.2.	Jumlah Murid (Pddk Usia 7-12 thn di Sedang Sekolah)	3.742.703	3.743.372	3.769.526	3.726.563	3.927.336
1.3.	Rasio (per 1.000)	75	76	77	80	74
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru	149.685	150.397	114.287	149.162	156.365
2.2.	Jumlah Murid (Pddk Usia 13-15 thn di Sedang Sekolah)	1.323.618	1.272.703	1.305.374	1.327.254	1.600.718
2.3.	Rasio (per 1.000)	113	118	88	112	98
3	Pendidikan Dasar SD/MI - SMP/MTs					
3.1.	Jumlah Guru	431.009	434.326	404.095	447.637	448.328
3.2.	Jumlah Murid (Pddk Usia 7-15 thn Sedang Sekolah)	5.066.321	5.016.075	5.074.900	5.053.817	5.528.054
33.	Rasio (per 1.000)	85	87	80	89	81

Sumber : Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur dan BPS Provinsi Jawa Timur

Rasio guru murid untuk sekolah SD sederajat pada tahun 2012 sebesar 74 per seribu ini memberikan gambaran setiap guru mengajar anak sekitar 14 murid, sedangkan pada sekolah setingkat

SLTP setiap guru mengajar anak sekitar 10. Secara umum pada jenjang pendidikan dasar setiap guru mengajar sekitar 12 murid.

Tabel 2.27
Perbandingan Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012

NO	Kabupaten/kota	SD/MI Usia 7-12 Thn			SMP/MTs Usia 13-15 Thn			Pendidikan Dasar SD-SMP usia 7-15 Thn		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid (Pddk Usia 7-12 sdg sekolah)	Rasio per 1.000	Jumlah Guru	Jumlah Murid (Pddk Usia 13-15 thn sdg sekolah)	Rasio per 1.000	Jumlah Guru	Jumlah Murid (Pddk Usia 7-15 thn sdg sekolah)	Rasio per 1.000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Kab. Pacitan	5.545	47.343	117	3.069	22.943	134	8.614	70.286	123
2.	Kab. Ponorogo	7.140	78.379	91	3.857	37.452	103	10.997	115.831	95
3.	Kab. Trenggalek	5.335	60.525	88	2.450	26.925	91	7.785	87.450	89
4.	Kab. Tulungagung	9.138	100.779	91	3.922	41.922	94	13.060	142.701	92
5.	Kab. Blitar	9.961	123.143	81	3.794	45.379	84	13.755	168.522	82
6.	Kab. Kediri	9.945	164.468	60	4.956	60.366	82	14.901	224.834	66
7.	Kab. Malang	15.544	260.767	60	8.846	96.449	92	24.390	357.215	68
8.	Kab. Lumajang	8.122	111.278	73	3.920	32.674	120	12.042	143.952	84
9.	Kab. Jember	16.369	261.820	63	10.445	90.279	116	26.814	352.099	76
10.	Kab. Banyuwangi	10.179	170.026	60	5.007	63.693	79	15.186	233.719	65
11.	Kab. Bondowoso	5.653	72.360	78	2.219	26.159	85	7.872	98.519	80
12.	Kab. Situbondo	6.989	64.480	108	2.282	19.053	120	9.271	83.533	111
13.	Kab. Probolinggo	10.915	114.069	96	5.723	50.449	113	16.638	164.518	101
14.	Kab. Pasuruan	9.877	153.126	65	5.760	72.260	80	15.637	225.386	69
15.	Kab. Sidoarjo	10.832	215.082	50	6.158	92.651	66	16.990	307.733	55
16.	Kab. Mojokerto	7.830	100.672	78	4.529	42.498	107	12.359	143.170	86
17.	Kab. Jombang	9.018	130.433	69	5.880	50.011	118	14.898	180.445	83
18.	Kab. Nganjuk	7.020	103.892	68	1.141	47.701	24	8.161	151.593	54
19.	Kab. Madiun	5.024	62.728	80	2.271	29.145	78	7.295	91.874	79
20.	Kab. Magetan	5.411	57.372	94	2.630	29.061	90	8.041	86.433	93
21.	Kab. Ngawi	6.804	75.646	90	2.918	35.070	83	9.722	110.716	88
22.	Kab. Bojonegoro	9.616	122.971	78	4.828	46.213	104	14.444	169.184	85
23.	Kab. Tuban	8.266	108.139	76	3.852	53.686	72	12.118	161.825	75
24.	Kab. Lamongan	12.916	124.450	104	7.687	52.569	146	20.603	177.019	116
25.	Kab. Gresik	9.801	128.069	77	5.944	60.814	98	15.745	188.883	83
26.	Kab. Bangkalan	4.652	123.948	38	3.691	47.115	78	8.343	171.062	49
27.	Kab. Sampang	10.519	119.394	88	5.364	52.894	101	15.883	172.289	92
28.	Kab. Pamekasan	10.372	98.980	105	6.224	42.080	148	16.596	141.060	118
29.	Kab. Sumenep	14.395	100.853	143	6.559	40.037	164	20.954	140.890	149
30.	Kota Kediri	1.869	25.873	72	1.271	12.666	100	3.140	38.539	81
31.	Kota Blitar	981	13.607	72	841	6.376	132	1.822	19.983	91
32.	Kota Malang	4.688	82.208	57	3.029	32.116	94	7.717	114.323	68
33.	Kota Probolinggo	1.510	23.349	65	914	9.306	98	2.424	32.655	74
34.	Kota Pasuruan	1.293	21.479	60	869	8.583	101	2.162	30.062	72
35.	Kota Mojokerto	950	13.512	70	648	4.240	153	1.598	17.752	90
36.	Kota Madiun	1.258	16.340	77	854	7.930	108	2.112	24.270	87
37.	Kota Surabaya	15.081	255.205	59	11.250	103.184	109	26.331	358.389	73
38.	Kota Batu	1.145	20.570	56	763	8.772	87	1.908	29.342	65
Provinsi		291.963	3.927.336	74	156.365	1.600.718	98	448.328	5.528.054	81

Sumber : Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur dan BPS Provinsi Jawa Timur

2) Pendidikan Menengah

a) Angka Partisipasi Sekolah

APS Pendidikan Menengah adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan menengah (16-19 tahun) yang masih menempuh pendidikan menengah per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah.

Angka partisipasi sekolah pendidikan menengah di Jawa Timur untuk anak usia 16-19 tahun dalam lima tahun terakhir (tahun 2008 - 2012) menunjukkan nilai yang terus meningkat. Meningkatnya APS pendidikan menengah ini merupakan gambaran semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Pada tahun 2008 APS usia 16-19 tahun sebesar 497 dan terus meningkat hingga pada tahun 2012 menjadi 551 per 1.000 penduduk usia 16-19 tahun. Walaupun APS pendidikan menengah terus meningkat namun capaian pada tahun 2012 masih rendah. Angka APS pendidikan menengah sebesar 539 ini berarti bahwa pada tahun 2012 sekitar 50 persen penduduk usia 16-19 tahun tidak bersekolah.

Tabel 2.28
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 – 2012

NO	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	SLTA sederajat (16-18 tahun)					
1.1.	Jumlah murid usia 16-19 thn	1.070.448	1.074.898	1.095.768	1.136.246	1.321.620
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-19 tahun	2.153.819	2.168.072	2.162.292	2.238.998	2.451.640
1.3.	APS Pendidikan Menengah (16-19 tahun) per 1.000	497	496	507	507	539

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, Susenas (Juni 2012)

Tabel 2.29
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Usia 16-19 Tahun
per Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2012

NO	Kabupaten/kota	SLTA 16-19 Tahun		
		Sedang Sekolah	Jumlah Penduduk	APS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kab. Pacitan	15.322	29.305	523
2.	Kab. Ponorogo	33.985	51.709	657
3.	Kab. Trenggalek	23.316	43.365	538
4.	Kab. Tulungagung	30.854	61.742	500
5.	Kab. Blitar	33.173	59.927	554
6.	Kab. Kediri	51.051	93.292	547

NO	Kabupaten/kota	SLTA 16-19 Tahun		
		Sedang Sekolah	Jumlah Penduduk	APS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	Kab. Malang	68.638	163.105	421
8.	Kab. Lumajang	24.872	59.355	419
9.	Kab. Jember	66.865	148.777	449
10.	Kab. Banyuwangi	47.805	92.885	515
11.	Kab. Bondowoso	23.349	42.954	544
12.	Kab. Situbondo	20.421	42.339	482
13.	Kab. Probolinggo	24.905	67.109	371
14.	Kab. Pasuruan	48.688	111.977	435
15.	Kab. Sidoarjo	79.553	115.818	687
16.	Kab. Mojokerto	44.147	80.619	548
17.	Kab. Jombang	52.301	85.042	615
18.	Kab. Nganjuk	35.323	60.392	585
19.	Kab. Madiun	27.540	40.277	684
20.	Kab. Magetan	21.159	30.559	692
21.	Kab. Ngawi	31.205	47.081	663
22.	Kab. Bojonegoro	34.697	79.920	434
23.	Kab. Tuban	38.552	72.543	531
24.	Kab. Lamongan	42.332	71.753	590
25.	Kab. Gresik	52.002	80.294	648
26.	Kab. Bangkalan	29.337	77.872	377
27.	Kab. Sampang	21.384	64.436	332
28.	Kab. Pamekasan	36.122	62.944	574
29.	Kab. Sumenep	37.761	67.946	556
30.	Kota Kediri	12.685	19.565	648
31.	Kota Blitar	6.248	9.225	677
32.	Kota Malang	43.151	62.374	692
33.	Kota Probolinggo	7.272	11.251	646
34.	Kota Pasuruan	9.855	13.808	714
35.	Kota Mojokerto	5.544	8.025	691
36.	Kota Madiun	7.457	10.652	700
37.	Kota Surabaya	125.375	199.341	629
38.	Kota Batu	7.377	12.065	611
Provinsi		1.321.620	2.451.640	539

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur (Juni 2012)

Kalau kita perhatikan capaian APS pendidikan menengah 16-19 tahun per kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2012, maka terlihat sangat berfluktuasi dan kesenjangannya sangat tinggi. APS pendidikan menengah yang terendah adalah Kabupaten Sampang sebesar 332 dan yang tertinggi adalah Kota Pasuruan yaitu sebesar 714 per 1.000 penduduk usia 16-19 tahun.

b) Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Rasio

ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah.

Dalam menunjang program wajib belajar 12 tahun pemerintah senantiasa meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan, salah satunya adalah pembangunan sekolah baru yang akan menampung anak usia 16-19 tahun. Pembangunan sekolah baru tentunya harus mempertimbangan keberadaan anak usia sekolah yang berada pada wilayah tersebut. Dalam melihat keterbandingan jumlah sekolah dengan penduduk dapat dilihat angka rasio sekolah terhadap penduduk.

Tabel 2.30
Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 -2012

NO	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pendidikan Menengah (SLTA)					
1.1.	Jumlah sekolah	3.247	3.299	3.482	3.615	5.345
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 16-19 tahun	2.153.819	2.168.072	2.162.292	2.238.998	2.451.640
1.3.	Rasio (per 10.000)	15	15	16	16	22

Sumber : Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur dan BPS Provinsi Jawa Timur (Juni 2012)

Tabel 2.31
Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Pendidikan Menengah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012

NO	Kabupaten/kota	SLTA 16-19 Tahun		
		Jumlah Sekolah	Jumlah Penduduk	Rasio per 10.000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kab. Pacitan	120	29.305	41
2.	Kab. Ponorogo	137	51.709	26
3.	Kab. Trenggalek	127	43.365	29
4.	Kab. Tulungagung	133	61.742	22
5.	Kab. Blitar	145	59.927	24
6.	Kab. Kediri	137	93.292	15
7.	Kab. Malang	179	163.105	11
8.	Kab. Lumajang	141	59.355	24
9.	Kab. Jember	172	148.777	12
10.	Kab. Banyuwangi	158	92.885	17
11.	Kab. Bondowoso	132	42.954	31
12.	Kab. Situbondo	125	42.339	30
13.	Kab. Probolinggo	149	67.109	22
14.	Kab. Pasuruan	144	111.977	13
15.	Kab. Sidoarjo	168	115.818	15
16.	Kab. Mojokerto	144	80.619	18

NO	Kabupaten/kota	SLTA 16-19 Tahun		
		Jumlah Sekolah	Jumlah Penduduk	Rasio per 10.000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17.	Kab. Jombang	157	85.042	18
18.	Kab. Nganjuk	138	60.392	23
19.	Kab. Madiun	123	40.277	31
20.	Kab. Magetan	123	30.559	40
21.	Kab. Ngawi	130	47.081	28
22.	Kab. Bojonegoro	158	79.920	20
23.	Kab. Tuban	146	72.543	20
24.	Kab. Lamongan	176	71.753	25
25.	Kab. Gresik	158	80.294	20
26.	Kab. Bangkalan	149	77.872	19
27.	Kab. Sampang	138	64.436	21
28.	Kab. Pamekasan	156	62.944	25
29.	Kab. Sumenep	155	67.946	23
30.	Kota Kediri	130	19.565	66
31.	Kota Blitar	118	9.225	128
32.	Kota Malang	152	62.374	24
33.	Kota Probolinggo	121	11.251	108
34.	Kota Pasuruan	119	13.808	86
35.	Kota Mojokerto	121	8.025	151
36.	Kota Madiun	123	10.652	115
37.	Kota Surabaya	244	199.341	12
38.	Kota Batu	119	12.065	99
Provinsi		5.345	2.451.640	22

Sumber : Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur dan BPS Provinsi Jawa Timur

Rasio ketersediaan sekolah SLTA sederajat per 10.000 penduduk usia sekolah di Jawa Timur mulai tahun 2008 sampai tahun 2012 menunjukkan angka yang meningkat ini berarti untuk rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah juga meningkat. Peningkatan rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah ini merupakan cerminan perhatian pemerintah dalam menyediakan sarana belajar bagi anak usia sekolah. Dengan terus bertambahnya jumlah penduduk tentunya juga harus diiringi penambahan fasilitas belajar berupa sekolah. Pada tahun 2008 setiap 10.000 penduduk usia 16-19 tahun tersedia 15 sekolah sedangkan pada tahun 2012 tersedia 22 sekolah ini berarti pada tahun 2008 setiap sekolah menampung sekitar 660 murid dan pada tahun 2012 menampung sekitar 455 murid.

c) Rasio Guru terhadap Murid

Seperti halnya pada pendidikan dasar jumlah ketersediaan guru pada jenjang pendidikan menengah juga akan sangat mempengaruhi kualitas dan mutu pendidikan. Keterbandingan jumlah guru dan murid dapat dilihat dari besaran angka rasio guru terhadap murid. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah murid pendidikan menengah (16-19 tahun). Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.32
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah
Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 – 2012

NO	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pendidikan Menengah (SLTA) usia 16-19 Tahun					
1.1.	Jumlah Guru	93.774	106.602	106.199	107.312	112.954
1.2.	Jumlah Murid	1.070.448	1.074.898	1.095.768	1.136.246	1.321.620
1.3.	Rasio (per 10.000)	876	992	969	944	855

Sumber : Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur dan BPS Provinsi Jawa Timur (Juni 2012)

Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah dalam lima tahun terakhir (tahun 2008-2012) menunjukkan kecenderungan yang terus menurun, Pada tahun 2008 rasio guru 876 dan pada tahun 2009 meningkat menjadi sebesar 992. Sejak tahun 2009 rasio guru terus menurun hingga tahun 2012, yaitu dari 992 menjadi 855, ini berarti bahwa pada tahun 2009 seorang guru membawahi sekitar 10 murid dan pada tahun 2012 seorang guru membawahi sekitar 12 murid. Penurunan rasio guru murid untuk pendidikan menengah ini ada indikasi jumlah pertumbuhan murid tidak diimbangi oleh pertambahan guru. Jika dibiarkan terus kondisi ini akan menjadikan mutu pendidikan berkurang, karena beban guru semakin besar. Rasio guru murid pada tahun 2012 per kabupaten/kota di Jawa Timur sangat beragam, yang tertinggi adalah Kota Madiun sebesar 2.245 dan yang terendah adalah Kabupaten Kediri yaitu sebesar 553 per 10.000 murid usia 16-19 tahun.

Tabel 2.33
Perbandingan Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012

NO	Kabupaten/kota	Pendidikan Menengah		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid (Pddk Usia 16-19 sdg sekolah)	Rasio per 10.000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kab. Pacitan	1.399	15.322	913
2.	Kab. Ponorogo	3.182	33.985	936
3.	Kab. Trenggalek	1.484	23.316	636
4.	Kab. Tulungagung	2.441	30.854	791
5.	Kab. Blitar	2.104	33.173	634
6.	Kab. Kediri	2.824	51.051	553
7.	Kab. Malang	5.597	68.638	815
8.	Kab. Lumajang	2.177	24.872	875
9.	Kab. Jember	5.839	66.865	873
10.	Kab. Banyuwangi	3.692	47.805	772
11.	Kab. Bondowoso	1.536	23.349	658
12.	Kab. Situbondo	1.799	20.421	881
13.	Kab. Probolinggo	2.562	24.905	1.029
14.	Kab. Pasuruan	3.952	48.688	812
15.	Kab. Sidoarjo	4.654	79.553	585
16.	Kab. Mojokerto	3.785	44.147	857
17.	Kab. Jombang	5.532	52.301	1.058
18.	Kab. Nganjuk	2.557	35.323	724
19.	Kab. Madiun	1.749	27.540	635
20.	Kab. Magetan	1.972	21.159	932
21.	Kab. Ngawi	2.137	31.205	685
22.	Kab. Bojonegoro	3.732	34.697	1.076
23.	Kab. Tuban	2.613	38.552	678
24.	Kab. Lamongan	6.146	42.332	1.452
25.	Kab. Gresik	4.574	52.002	880
26.	Kab. Bangkalan	2.027	29.337	691
27.	Kab. Sampang	2.240	21.384	1.047
28.	Kab. Pamekasan	4.102	36.122	1.136
29.	Kab. Sumenep	4.411	37.761	1.168
30.	Kota Kediri	2.255	12.685	1.778
31.	Kota Blitar	1.176	6.248	1.882
32.	Kota Malang	4.026	43.151	933
33.	Kota Probolinggo	1.192	7.272	1.639
34.	Kota Pasuruan	868	9.855	881
35.	Kota Mojokerto	940	5.544	1.696
36.	Kota Madiun	1.674	7.457	2.245
37.	Kota Surabaya	8.645	125.375	690
38.	Kota Batu	758	7.377	1.028
Provinsi		112.954	1.321.620	855

Sumber : Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur dan BPS Provinsi Jawa Timur (Juni 2012)

b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak tidak hanya pada sekolah formal seperti SD, SMP dan SMA namun pendidikan anak dimulai sejak anak usia balita (bawah lima tahun) bahkan batita (bawah tiga tahun). Diyakini bahwa masa balita seorang anak adalah masa keemasan pertumbuhan otaknya. Dimasa keemasan ini jika pertumbuhan anak dirangsang dengan

benar baik maka akan sangat berpengaruh saat mereka nantinya dewasa.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah salah satu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Di Jawa Timur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat digalakkan diberbagai daerah kabupaten maupun kota. Jumlah lembaga PAUD terus bertambah dari 15.459 pada tahun 2008 bertambah terus setiap tahunnya menjadi 17.691 pada tahun 2012. Begitu pula jumlah murid PAUD dari 752.573 pada tahun 2008 terus meningkat hingga menjadi sebanyak 754.094 pada tahun 2012. Pada tahun 2012 ini jumlah murid PAUD mengalami penurunan jika dibanding tahun 2011, salah satu penyebabnya adalah adanya perbedaan cakupan data yaitu murid PAUD selain di Taman Kanak Kanak tidak dimasukkan lagi.

Tabel 2.34
Jumlah Lembaga, Murid, Tenaga Pendidikan PAUD
di Jawa Timur Tahun 2008 – 2012

NO	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Lembaga PAUD	15.459	16.247	17.186	17.353	17.691
2	Jumlah Tenaga Pendidik PAUD	49.087	53.888	54.833	64.431	70.121
3	Jumlah Murid PAUD (4-6 Tahun)	752.573	761.476	767.224	808.947	754.094
4	Jumlah Anak Usia 4-6 Tahun	1.826.201	1.787.722	1.704.502	1.807.077	1.844.425
5	Angka Partisipasi PAUD	41,21	42,59	45,01	44,77	40,98
6	Rasio Tenaga Pendidik dan Murid	6,52	7,08	7,15	7,96	9,30

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan BPS Jawa Tmur

Pertambahan jumlah murid PAUD juga terus diiringi bertambahnya jumlah tenaga pendidik. Tenaga pendidik PAUD pada tahun 2008 sebanyak 49.087 terus bertambah hingga menjadi 70.121 pada tahun 2012 atau dengan kata lain rata-rata pertambahan tenaga pendidik per tahunnya

sekitar 5.000. Kalau kita lihat rasio tenaga pendidik dan murid PAUD dalam lima tahun terakhir (tahun 2008-2012) berkisar antara 6 hingga 9 per 100 murid, ini memberi gambaran bahwa seorang tenaga pendidik PAUD mendampingi sekitar 11 hingga 16 murid PAUD.

Jumlah lembaga pendidikan PAUD pada wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2012 terbanyak adalah Kota Surabaya yaitu sebesar 1.295 dan yang paing sedikit adalah Kota Mojokerto sebanyak 59. Jumlah lembaga pendidikan ini sebenarnya sangat tergantung pada jumlah penduduk usia 6 tahun kebawah semakin banyak penduduk usia 6 tahun kebawah tentunya semakin banyak pula jumlah lembaga pendidikannya.

Tabel 2.35
Jumlah Lembaga, Murid PAUD, Tenaga Pendidikan PAUD
Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2012

NO	Kabupaten/kota	Tahun 2012			
		Jumah Lembaga	Murid PAUD	Tenaga Pendidik	Rasio Tenaga pendidik per 100 murid
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kab. Pacitan	298	7.088	912	13
2.	Kab. Ponorogo	407	13.783	1.394	10
3.	Kab. Trenggalek	386	11.719	549	5
4.	Kab. Tulungagung	581	21.096	1.774	8
5.	Kab. Blitar	795	28.664	2.534	9
6.	Kab. Kediri	700	35.265	2.568	7
7.	Kab. Malang	1.093	62.399	4.056	7
8.	Kab. Lumajang	517	19.668	1.611	8
9.	Kab. Jember	818	45.436	3.348	7
10.	Kab. Banyuwangi	666	34.191	2.869	8
11.	Kab. Bondowoso	354	12.609	1.436	11
12.	Kab. Situbondo	243	10.490	965	9
13.	Kab. Probolinggo	482	20.542	1.768	9
14.	Kab. Pasuruan	589	28.979	2.212	8
15.	Kab. Sidoarjo	924	49.527	4.037	8
16.	Kab. Mojokerto	551	21.562	1.730	8
17.	Kab. Jombang	384	19.980	1.661	8
18.	Kab. Nganjuk	567	21.293	1.555	7
19.	Kab. Madiun	319	10.394	930	9
20.	Kab. Magetan	380	10.911	1.024	9
21.	Kab. Ngawi	445	10.688	1.300	12
22.	Kab. Bojonegoro	754	27.145	2.082	8
23.	Kab. Tuban	448	22.600	1.543	7
24.	Kab. Lamongan	942	31.069	3.314	11
25.	Kab. Gresik	705	30.505	2.456	8
26.	Kab. Bangkalan	283	7.848	784	10
27.	Kab. Sampang	201	8.156	894	11
28.	Kab. Pamekasan	246	9.500	1.283	14
29.	Kab. Sumenep	386	14.651	1.901	13
30.	Kota Kediri	116	7.991	667	8
31.	Kota Blitar	81	4.569	385	8
32.	Kota Malang	320	19.422	1.799	9
33.	Kota Probolinggo	88	4.938	451	9

34.	Kota Pasuruan	91	5.431	423	8
35.	Kota Mojokerto	59	4.240	314	7
36.	Kota Madiun	93	5.352	545	10
37.	Kota Surabaya	1.295	48.726	10.608	22
38.	Kota Batu	84	5.667	439	8
Provinsi		17.691	754.094	70.121	9

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Rasio tenaga pendidik terhadap murid jenjang PAUD pada wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur yang terendah adalah di Kabupaten Trenggalek yaitu sebesar 5 per 100 murid dan yang terbesar adalah pada Kota Surabaya yaitu 22 per 100 murid. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa di Kabupaten Trenggalek beban tenaga pendidik anak PAUD lebih berat dibanding di Kota Surabaya. Di Kabupaten Trenggalek seorang tenaga pendidik PAUD menangani sekitar 20 murid sedangkan di Kota Surabaya seorang tenaga pendidik menangani sekitar 5 murid.

c. Angka Putus Sekolah

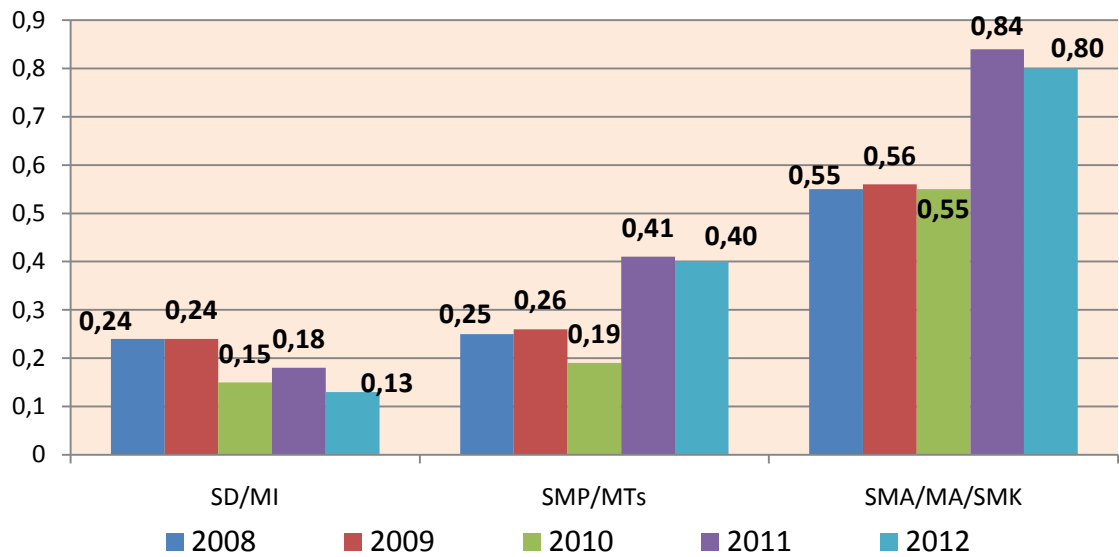
Berbagai program pemerintah dalam bidang pendidikan telah diberikan kepada masyarakat baik yang sifatnya umum seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan yang sifatnya khusus seperti Bantuan Siswa Miskin (BSM) disemua jenjang pendidikan mulai SD hingga SLTA dan juga ada Pogram Keluarga Harapan (PKH) yang diperuntukkan bagi masyarakat golongan sangat miskin. Salah satu tujuan dari program-program tersebut untuk mengurangi angka putus sekolah terutama bagi mereka yang kurang mampu. Namun pada kenyataannya masih juga terdapat siswa yang putus sekolah.

Angka putus sekolah penduduk usia 7-12 tahun SD/MI selama kurun waktu lima tahun terakhir (tahun 2008 - 2012) menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun. Pada tahun 2008 angka putus sekolah tingkat SD/MI sebesar 0,24 persen dan semakin menurun hingga mencapai sebesar 0,13 persen pada tahun 2012, dengan kata lain pada tahun 2012 dalam tiap 1000 anak usia 7-12 tahun terdapat 1 sampai 2 anak yang putus sekolah.

Untuk sekolah SMP/MTs angka putus sekolah penduduk usia 13-15 tahun dalam lima tahun terakhir (tahun 2008 -2012) menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Pada tahun 2008 angka putus sekolah tingkat SMP/MTs sebesar 0,25 persen dan meningkat hingga

pada tahun 2012 sebesar 0,40 persen, dengan kata lain pada tahun 2012 dalam tiap 1000 anak usia 13-15 tahun terdapat sekitar 4 anak yang putus sekolah.

Gambar 2.24
Angka Putus Sekolah Pada Jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
Jawa Timur Tahun 2008 – 2012



Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Sedangkan pada sekolah SMA/SMK/MA angka putus sekolah penduduk usia 16-18 tahun dalam lima tahun terakhir (tahun 2008 -2012) juga menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Pada tahun 2008 angka putus sekolah tingkat SMP/MTs sebesar 0,55 persen dan meningkat hingga sebesar 0,80 persen (2012), dengan kata lain dalam tiap 1000 anak usia 16-18 tahun terdapat sekitar 8 anak yang putus sekolah.

Jika dilihat per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, angka putus sekolah untuk jenjang sekolah setingkat SD tertinggi adalah Kabupaten Sampang yaitu sebesar 0,46 persen sedangkan terendah sebesar 0,03 persen yaitu di Kabupaten Madiun, Lamongan, Kota Mojekerto dan Kota Madiun.

Angka putus sekolah setingkat SLTP tertinggi adalah Kabupaten Sampang dengan capaian angka 0,79 persen dan terendah Kabupaten Lamongan sebesar 0,11 persen.

Sedangkan angka putus sekolah setingkat SLTA tertinggi juga Kabupaten Sampang yaitu sebesar 1,53 persen sementara terendah Kabupaten Lamongan sebesar 0,50 persen.

Tabel 2.36
Angka Putus Sekolah SD/MI (Usia 7-12 Tahun)
Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2011 – 2012

NO	Kabupaten/kota	Tahun	
		2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kab. Pacitan	0,06	0,05
2.	Kab. Ponorogo	0,09	0,08
3.	Kab. Trenggalek	0,17	0,16
4.	Kab. Tulungagung	0,21	0,12
5.	Kab. Blitar	0,22	0,18
6.	Kab. Kediri	0,15	0,06
7.	Kab. Malang	0,21	0,16
8.	Kab. Lumajang	0,17	0,12
9.	Kab. Jember	0,26	0,22
10.	Kab. Banyuwangi	0,16	0,11
11.	Kab. Bondowoso	0,35	0,28
12.	Kab. Situbondo	0,29	0,20
13.	Kab. Probolinggo	0,40	0,24
14.	Kab. Pasuruan	0,23	0,19
15.	Kab. Sidoarjo	0,05	0,04
16.	Kab. Mojokerto	0,07	0,06
17.	Kab. Jombang	0,08	0,05
18.	Kab. Nganjuk	0,08	0,07
19.	Kab. Madiun	0,05	0,03
20.	Kab. Magetan	0,08	0,06
21.	Kab. Ngawi	0,07	0,06
22.	Kab. Bojonegoro	0,06	0,05
23.	Kab. Tuban	0,15	0,10
24.	Kab. Lamongan	0,04	0,03
25.	Kab. Gresik	0,09	0,06
26.	Kab. Bangkalan	0,27	0,23
27.	Kab. Sampang	0,61	0,46
28.	Kab. Pamekasan	0,31	0,21
29.	Kab. Sumenep	0,41	0,32
30.	Kota Kediri	0,06	0,05
31.	Kota Blitar	0,07	0,04
32.	Kota Malang	0,12	0,08
33.	Kota Probolinggo	0,11	0,10
34.	Kota Pasuruan	0,21	0,14
35.	Kota Mojokerto	0,04	0,03
36.	Kota Madiun	0,05	0,03
37.	Kota Surabaya	0,06	0,04
38.	Kota Batu	0,13	0,11
Provinsi		0,18	0,13

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Tabel 2.37
Angka Putus Sekolah SMP/MTs (Usia 13-15 Tahun)
Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2011 – 2012

NO	Kabupaten/kota	Tahun	
		2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kab. Pacitan	0,44	0,43
2.	Kab. Ponorogo	0,37	0,36
3.	Kab. Trenggalek	0,50	0,49

NO	Kabupaten/kota	Tahun	
		2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Kab. Tulungagung	0,36	0,34
5.	Kab. Blitar	0,52	0,50
6.	Kab. Kediri	0,43	0,42
7.	Kab. Malang	0,55	0,54
8.	Kab. Lumajang	0,68	0,62
9.	Kab. Jember	0,57	0,56
10.	Kab. Banyuwangi	0,43	0,42
11.	Kab. Bondowoso	0,60	0,60
12.	Kab. Situbondo	0,71	0,69
13.	Kab. Probolinggo	0,75	0,74
14.	Kab. Pasuruan	0,44	0,43
15.	Kab. Sidoarjo	0,15	0,14
16.	Kab. Mojokerto	0,41	0,40
17.	Kab. Jombang	0,26	0,24
18.	Kab. Nganjuk	0,55	0,54
19.	Kab. Madiun	0,16	0,14
20.	Kab. Magetan	0,15	0,13
21.	Kab. Ngawi	0,13	0,12
22.	Kab. Bojonegoro	0,35	0,32
23.	Kab. Tuban	0,31	0,30
24.	Kab. Lamongan	0,12	0,11
25.	Kab. Gresik	0,25	0,24
26.	Kab. Bangkalan	0,56	0,55
27.	Kab. Sampang	0,80	0,79
28.	Kab. Pamekasan	0,61	0,61
29.	Kab. Sumenep	0,59	0,59
30.	Kota Kediri	0,37	0,36
31.	Kota Blitar	0,18	0,17
32.	Kota Malang	0,27	0,25
33.	Kota Probolinggo	0,33	0,32
34.	Kota Pasuruan	0,40	0,39
35.	Kota Mojokerto	0,15	0,14
36.	Kota Madiun	0,22	0,21
37.	Kota Surabaya	0,19	0,18
38.	Kota Batu	0,45	0,44
Provinsi		0,41	0,40

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Tabel 2.38
Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA (Usia 16-18 Tahun)
Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2011 – 2012

NO	Kabupaten/kota	Tahun	
		2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kab. Pacitan	0,61	0,59
2.	Kab. Ponorogo	0,86	0,82
3.	Kab. Trenggalek	0,86	0,80
4.	Kab. Tulungagung	0,97	0,91
5.	Kab. Blitar	0,98	0,93
6.	Kab. Kediri	0,92	0,87
7.	Kab. Malang	0,95	0,91
8.	Kab. Lumajang	0,97	0,95
9.	Kab. Jember	1,03	0,99

NO	Kabupaten/kota	Tahun	
		2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
10.	Kab. Banyuwangi	0,85	0,82
11.	Kab. Bondowoso	1,49	1,44
12.	Kab. Situbondo	1,20	1,18
13.	Kab. Probolinggo	1,24	1,22
14.	Kab. Pasuruan	0,63	0,56
15.	Kab. Sidoarjo	0,56	0,51
16.	Kab. Mojokerto	0,70	0,65
17.	Kab. Jombang	0,87	0,80
18.	Kab. Nganjuk	0,80	0,74
19.	Kab. Madiun	0,66	0,57
20.	Kab. Magetan	0,60	0,53
21.	Kab. Ngawi	0,70	0,61
22.	Kab. Bojonegoro	0,90	0,83
23.	Kab. Tuban	0,63	0,60
24.	Kab. Lamongan	0,58	0,50
25.	Kab. Gresik	0,58	0,51
26.	Kab. Bangkalan	1,12	1,08
27.	Kab. Sampang	1,54	1,53
28.	Kab. Pamekasan	1,28	1,27
29.	Kab. Sumenep	1,46	1,44
30.	Kota Kediri	0,75	0,69
31.	Kota Blitar	0,88	0,82
32.	Kota Malang	0,83	0,79
33.	Kota Probolinggo	0,89	0,81
34.	Kota Pasuruan	0,87	0,84
35.	Kota Mojokerto	0,92	0,90
36.	Kota Madiun	0,76	0,73
37.	Kota Surabaya	0,54	0,50
38.	Kota Batu	0,91	0,85
Provinsi		0,84	0,80

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

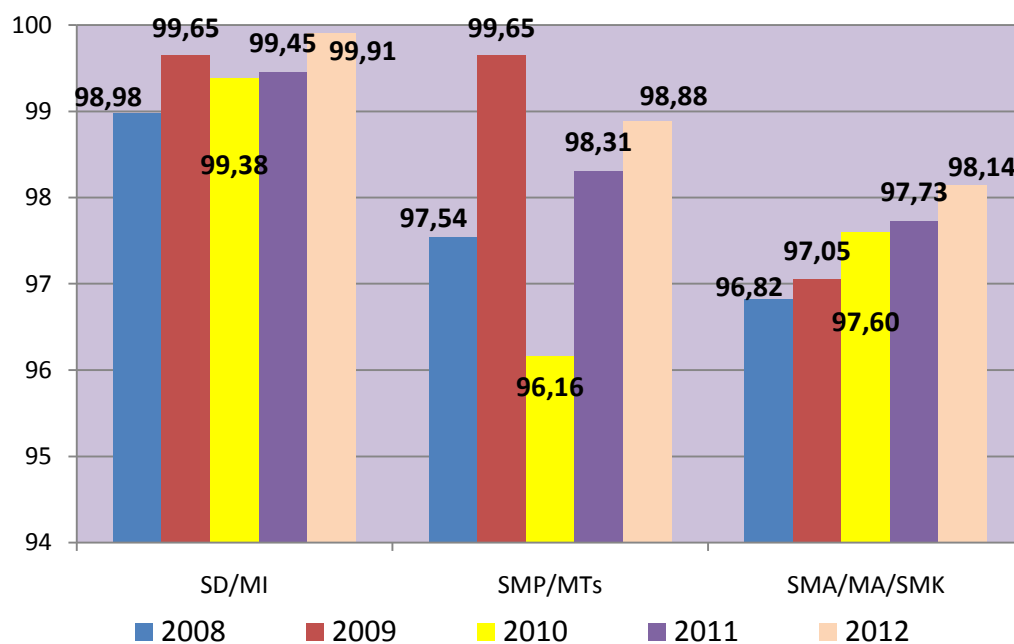
d. Angka Kelulusan

Pada setiap jenjang pendidikan sekolah formal sebagai syarat kelulusan bagi murid yang telah menduduki kelas tertinggi (kelas 6 untuk SD sederajat, kelas 3 untuk SLTP dan SLTA sederajat) diadakan ujian akhir atau Ujian Nasional (Unas). Siswa yang hasil nilai ujian akhirnya memenuhi standart kelulusan akan dinyatakan lulus.

Angka kelulusan mencerminkan tingkat kualitas dari pendidikan tersebut, jika suatu sekolah banyak siswanya yang lulus maka sekolah tersebut mempunyai kualitas yang lebih baik dibanding sekolah yang siswanya sedikit lulus.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir (tahun 2008 - 2012) kelulusan sekolah SD/MI angkanya berfluktuasi, namun dalam tiga tahun terakhir memperlihatkan kecenderungan yang semakin meningkat. Berbeda halnya dengan angka kelulusan sekolah SMP/MTs, dalam lima tahun terakhir sangat berfluktuasi bahkan pada tahun 2010 terjadi penurunan yang cukup tajam, tahun 2009 sebesar 99,65 persen menjadi 96,16 persen pada tahun 2010. Sedangkan angka kelulusan sekolah setingkat SMA/SMK/MA angka kelulusannya dalam lima tahun terakhir terus meningkat, tahun 2008 sebesar 96,82 persen terus meningkat menjadi 98,14 persen pada tahun 2012.

Gambar 2.25
Angka Kelulusan Pada Jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Jawa Timur Tahun 2008 – 2012

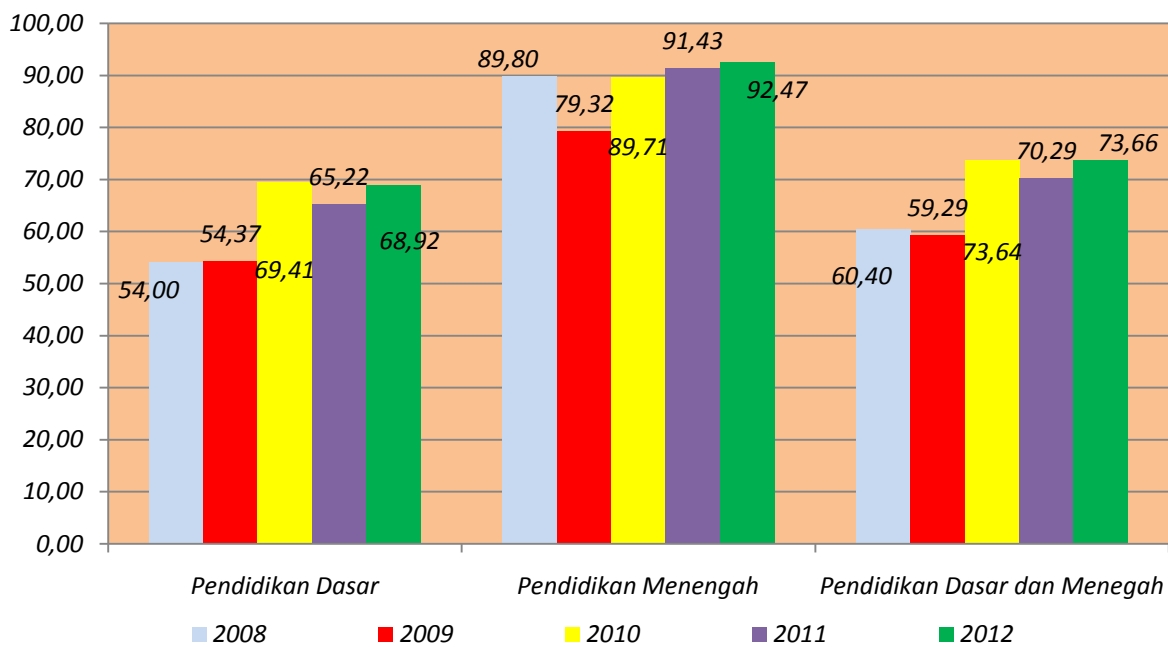


Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

e. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Kemampuan seorang tenaga pendidik/guru sangat dipengaruhi pendidikan yang ditamatkan, semakin tinggi pendidikan seorang guru maka dia akan mempunyai kemampuan lebih dibandingkan dengan yang pendidikannya rendah. Tingginya pendidikan seorang tenaga pendidik pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan.

Gambar 2.26
Peresentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1-DIV Pada Jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI dan SMP/MTs), Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA) dan Pendidikan Dasar dan Menengah di Jawa Timur Tahun 2008 – 2012



Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1-DIV pada jenjang Pendidikan Dasar dalam lima tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan, dari 54,00 persen pada tahun 2008 menjadi 68,92 persen pada tahun 2012. Begitu juga pada jenjang Pendidikan Menengah terjadi peningkatan, dari 89,80 persen pada tahun 2008 menjadi 92,47 persen pada tahun 2012. Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1-DIV pada jenjang Pendidikan Menengah jumlahnya lebih tinggi jika dibanding pada Pendidikan Dasar. Secara keseluruhan persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1-DIV terus mengalami peningkatan, hal ini merupakan tuntutan jaman serta adanya sistem sertifikasi guru sehingga mau tidak mau seorang guru harus meningkatkan tingkat pendidikannya.

Tabel 2.39
Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1- DIV Per Jenjang Pendidikan di Jawa Timur Tahun 2011 – 2012

NO	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pendidikan Dasar (SD/MI - SMP/MTs)					
1.1.	Jumlah Guru	431.009	434.326	404.095	447.637	448.328
1.2.	Jumlah Guru Memenuhi Kualifikasi S1 -DIV	232.752	236.162	280.493	291.938	308.983

NO	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.3.	Persentase	54,00	54,37	69,41	65,22	68,92
2	Pendidikan Menengah (SMA/MA/SMK)					
2.1.	Jumlah Guru	93.774	106.602	106.199	107.312	112.954
2.2.	Jumlah Guru Memenuhi Kualifikasi S1 -DIV	84.208	84.556	95.267	98.119	104.445
2.3.	Persentase	89,8	79,32	89,71	91,43	92,47
3	Semua Jenjang Pendidikan (SD/MI, SMO/MTs dan SMA/MA/SMK)					
3.1.	Jumlah Guru	524.783	540.928	510.294	554.949	561.282
3.2.	Jumlah Guru Memenuhi Kualifikasi S1 -DIV	316.960	320.718	375.760	390.057	413.428
33.	Persentase	60,40	59,29	73,64	70,29	73,66

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Jika dilihat secara keseluruhan persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1-DIV menurut kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2012 berkisar antara 47 hingga 88 persen. Persentase tertinggi adalah Kota Mojokerto 88,89 persen dan terendah Kabupaten Sampang 47,06 persen. Perbedaan persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1-DIV antar kabupaten/kota di Jawa Timur antara yang terendah dan tertinggi sangat besar (hampir dua kali lipatnya), kondisi ini memberikan gambaran adanya kesenjangan tingkat pendidikan guru.

Tabel 2.40
Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1- DIV (SD - SLTA)
Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2008 – 2012

NO	Kabupaten/kota	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kab. Pacitan	56,85	52,38	66,44	70,59	69,29
2.	Kab. Ponorogo	64,17	63,24	66,40	65,97	78,99
3.	Kab. Trenggalek	67,39	67,45	78,61	78,13	82,86
4.	Kab. Tulungagung	66,47	66,72	78,06	71,56	77,81
5.	Kab. Blitar	56,38	58,43	59,01	68,58	73,51
6.	Kab. Kediri	53,39	51,99	56,22	75,26	78,51
7.	Kab. Malang	67,80	66,07	82,48	72,15	70,88
8.	Kab. Lumajang	52,88	52,51	69,53	67,42	71,32
9.	Kab. Jember	47,62	47,47	77,42	64,60	70,69
10.	Kab. Banyuwangi	55,66	56,15	92,08	73,58	77,47
11.	Kab. Bondowoso	54,42	52,87	64,86	59,11	62,09
12.	Kab. Situbondo	49,34	49,97	72,56	58,94	61,22
13.	Kab. Probolinggo	51,63	51,64	60,11	60,14	60,24
14.	Kab. Pasuruan	57,07	56,06	74,51	70,88	72,67
15.	Kab. Sidoarjo	69,14	66,04	81,53	82,47	84,58
16.	Kab. Mojokerto	65,15	63,11	72,68	72,28	79,57
17.	Kab. Jombang	70,68	69,19	78,27	78,60	82,31
18.	Kab. Nganjuk	59,68	57,88	84,08	76,37	75,80
19.	Kab. Madiun	60,04	59,06	71,21	78,01	82,92
20.	Kab. Magetan	60,01	58,72	72,61	79,75	82,45
21.	Kab. Ngawi	55,29	53,56	62,64	61,98	61,73
22.	Kab. Bojonegoro	51,97	51,67	62,91	61,06	74,64
23.	Kab. Tuban	60,37	59,21	74,46	74,34	74,65

NO	Kabupaten/kota	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24.	Kab. Lamongan	63,77	63,03	80,26	81,39	84,78
25.	Kab. Gresik	62,24	61,05	89,93	83,52	86,18
26.	Kab. Bangkalan	61,02	60,97	69,87	69,26	65,89
27.	Kab. Sampang	34,65	34,75	40,78	40,76	47,06
28.	Kab. Pamekasan	57,56	54,60	56,41	54,07	59,84
29.	Kab. Sumenep	44,71	44,71	50,90	48,65	52,43
30.	Kota Kediri	75,98	71,60	97,40	84,11	86,82
31.	Kota Blitar	77,21	72,78	82,71	85,23	87,59
32.	Kota Malang	73,03	70,29	91,53	85,96	87,14
33.	Kota Probolinggo	68,86	68,02	76,43	77,23	80,25
34.	Kota Pasuruan	71,57	68,25	86,92	60,96	82,38
35.	Kota Mojokerto	81,52	72,31	84,85	90,65	88,89
36.	Kota Madiun	85,45	74,03	85,87	89,86	78,34
37.	Kota Surabaya	81,51	77,63	96,32	81,73	81,05
38.	Kota Batu	72,22	70,19	89,89	57,72	80,68
Provinsi		60,40	59,29	73,64	70,29	73,66

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Fenomena yang tidak dapat dikesampingkan dan memerlukan perhatian adalah semakin tingginya angka Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), meskipun tidak dapat dipastikan angkanya. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa *anak yang mengalami keterbatasan/keluarbiasaan (fisik, mental-intelektual, sosial, emosional, memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa) secara signifikan dalam proses pertumbuhan/ perkembangannya dibandingkan dengan anak-nak lain seusianya, sehingga Anak Berkebutuhan Khusus memerlukan pelayanan khusus*. Data terakhir menunjukkan Provinsi Jawa Timur mempunyai tingkat ABK yang tinggi, yaitu terdapat 179,344 penyandang cacat (sumber: Depsos 2010).

Salah satu hal penting terkait pendidikan ABK adalah bagaimana ABK mendapatkan perlakuan pendidikan yang setara dengan anak-anak pada umumnya. Layanan pendidikan untuk ABK dikenal dengan sekolah inklusi. Hingga saat ini, di seluruh Indonesia tercatat sudah ada sedikitnya 1.500 sekolah inklusi. Setelah keluar Permendiknas yang mengatur tentang Inklusi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 6 Tahun 2011 tentang Inklusi. Pendidikan inklusif sudah banyak dikembangkan di kabupaten/kota di Jatim, namun saat ini perkembangannya

belum secara keseluruhan, dari 38 kabupaten/kota yang ada, terdapat 19 kabupaten/kota yang secara legal formal telah menyelenggarakan sekolah inklusi, dan lainnya sedang dalam pengurusan pelaksanaannya. Berdasarkan data Dispendik Jatim jumlah sekolah inklusif tahun 2011 sebanyak 285, pada tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 418 lembaga atau bertambah sebanyak 133 lembaga yang tersebar di beberapa daerah.

2. Bidang Urusan Kesehatan

a. Rasio Posyandu Persatuan Balita

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat ditempuh dengan cara mendekatkan fasilitas kesehatan kepada masyarakatnya. Pendekatan akses ini diharapkan dapat memacu tingkat kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak serta perbaikan gizi. Garda terdepan dalam kemajuan tingkat kesehatan ibu dan anak tidak lepas dari keberadaan posyandu.

Selama tahun 2010-2012, jumlah posyandu mengalami peningkatan antara 0,07 persen sampai dengan 0,65 persen. Rasio posyandu per satuan balita selama 3 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010, rasio posyandu terhadap balita sebesar 15,6 dan mengalami penurunan menjadi 14,57 di tahun 2011. Pada tahun 2012, rasio posyandu terhadap balita mengalami peningkatan 0,15 poin dari tahun sebelumnya. Angka 14,72 menunjukkan setiap 1000 balita dilayani oleh 14,72 posyandu.

Tabel 2.41
Jumlah Posyandu dan Balita di Jawa Timur Tahun 2010-2012

Uraian	2010	2011	2012
Jumlah Posyandu	45.603	45.637	45.870
Jumlah Balita	2.923.910	3.132.404	3.116.861
Rasio Posyandu	15,60	14,57	14,72

Sumber: Dinas Kesehatan Prov Jatim dan BPS

b. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Persatuan Penduduk

Pelayanan kesehatan kepada masyarakat terkait erat dengan jumlah fasilitas kesehatan. Selama 4 tahun terakhir, rasio puskesmas, poliklinik dan pustu mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009, rasio tersebut sebesar 0,108 dan pada tahun 2011 mengalami peningkatan 0,002 poin. Sementara pada tahun 2012, rasio tersebut mengalami penurunan sebesar 0,002 poin atau menjadi 0,108. Penurunan ini didominasi akibat berkurangnya poliklinik di Kabupaten Jember, Jombang dan Kota Malang. Angka 0,108 menunjukkan bahwa setiap 0,108 unit (puskesmas, poliklinik dan pustu) melayani setiap 1.000 penduduk.

Tabel 2.42
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Jawa Timur
Tahun 2009-2012

Uraian	2009	2010	2011	2012
Puskesmas, Poliklinik dan Pustu	3.902	4.036	4.150	4.093
Jumlah Penduduk	36.015.370	37.476.757	37.687.622	38.052.950
Rasio	0.108	0,108	0,110	0,108

Sumber: Dinkes Kab/Kota dan BPS

c. Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk

Rumah sakit di Jawa Timur terbagi dalam 4 kategori pengelolaan yaitu Pemerintah (Kabupaten/Kota/Provinsi), TNI/Polri, BUMN dan Swasta. Jumlah rumah sakit pada tahun 2012 sebesar 346 rumah sakit atau bertambah sebesar 17 rumah sakit dalam kurun waktu setahun. Peningkatan tersebut terjadi pada rumah sakit pemerintah sebanyak 2 rumah sakit, 1 rumah sakit BUMN dan swasta 14 rumah sakit. Peningkatan jumlah rumah sakit tersebut menggambarkan adanya upaya pemenuhan fasilitas kesehatan sebagai bagian dari pemenuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

Tabel 2.43
Jumlah Rumah Sakit di Jawa Timur Tahun 2011-2012

Uraian	2011	2012
Rumah Sakit Pemerintah	64	66
Rumah Sakit TNI/Polri	28	28
Rumah Sakit BUMN	12	13
Rumah Sakit Swasta	226	240
Jumlah Rumah Sakit	330	347
Jumlah Penduduk	37.687.622	38.052.950
Rasio	0,0876	0,0912

Sumber: Dinas Kesehatan Prov Jatim dan BPS

Rasio rumah sakit terhadap penduduk pada tahun 2012 sebesar 0,0912 atau mengalami peningkatan sebesar 0,0036 poin dari tahun sebelumnya. Angka rasio tersebut menunjukkan setiap 10.000 penduduk akan dilayani 0,091 unit rumah sakit.

d. Rasio Dokter Persatuan Penduduk

Dimensi kualitas pelayanan kesehatan masyarakat sangat ditentukan oleh jumlah tenaga kesehatan. Kecukupan keterbandingan antara tenaga kesehatan dengan masyarakat yang dilayani akan memberikan tingkat kepuasan yang semakin tinggi. Tentunya kondisi tersebut memerlukan dukungan faktor lainnya misalkan kelengkapan sarana pelayanan kesehatan, birokrasi yang sederhana dan perilaku lingkungan pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan yang ada terdiri dari berbagai spesialisasi diantaranya dokter.

Pada tahun 2012, jumlah dokter yang ada di Jawa Timur sebanyak 11.412 orang atau mengalami peningkatan 0,96 persen dari tahun sebelumnya. Keterbandingan jumlah dokter terhadap jumlah penduduk atau rasio dokter sebesar 0,2999 di tahun 2011 dan turun 0,0001 poin pada tahun 2012 atau menjadi 0,2998. Angka 0,2999 menunjukkan setiap 0,2999 dokter akan melayani seribu penduduk atau 2,9 dokter akan melayani sepuluh ribu penduduk.

Tabel 2.44
Jumlah dan Rasio Dokter di Jawa Timur
Tahun 2011-2012

Uraian	2011	2012
Jumlah Dokter	11.303	11.412
Jumlah Penduduk	37.687.622	38.052.950
Rasio	0,2999	0,2998

Sumber: Dinas Kesehatan Kab/Kota dan BPS

e. Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk

Ketersediaan tenaga kesehatan merupakan faktor penentu dalam memberikan gambaran pelayanan kesehatan kepada penduduknya. Adapun tenaga medis yang dimaksud adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang dicakup dalam hal ini adalah tenaga dokter dan paramedis.

Jumlah tenaga kesehatan di Jawa Timur pada tahun 2012 sebanyak 46.731 orang atau mengalami penurunan sebanyak 0,83 persen dibanding tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya penurunan tenaga paramedis yang ada di rumah sakit swasta di Kabupaten Jember, Banyuwangi, Tuban dan Kota Surabaya. Penurunan yang terjadi di Kota Surabaya mencapai 80,42 persen dari total penurunan tenaga paramedis di rumah sakit swasta.

Sementara itu rasio tenaga medis sebesar 1,25 di tahun 2011 dan menjadi 1,23 pada tahun 2012. Angka ini menunjukkan pada tahun 2012 sebanyak 1,23 bidan akan melayani 1000 penduduk. Penurunan angka rasio ini diduga lebih disebabkan adanya laporan registrasi yang tidak kontinyu dari rumah sakit swasta ke pemerintah Kota Surabaya.

Tabel 2.45
Jumlah dan Rasio Tenaga Medis di Jawa Timur
Tahun 2011-2012

Uraian	2011	2012
Jumlah Tenaga Medis	47.120	46.731
Jumlah Penduduk	37.687.622	38.052.950
Rasio	1,25	1,23

Sumber: Dinas Kesehatan Kab/Kota dan BPS

f. Cakupan Puskesmas

Puskesmas (**Pusat Kesehatan Masyarakat**) adalah unit fungsional pelayanan kesehatan terdepan sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan kota atau kabupaten yang melaksanakan upaya penyuluhan, pencegahan dan penanganan kasus-kasus penyakit di wilayah kerjanya, secara terpadu dan terkoordinasi.

Jumlah puskesmas di Jawa Timur pada tahun 2012 sebanyak 960 puskesmas yang tersebar di 662 kecamatan. Angka cakupan puskesmas sebesar 145,02 persen atau setiap 100 kecamatan yang ada akan dilayani oleh 145 puskesmas. Angka cakupan ini meningkat 0,6 persen poin dibandingkan tahun 2011. Keberadaan puskesmas yang menjangkau semua kecamatan akan mendekatkan pelayanan kesehatan masyarakatnya. Kondisi ini akan memberikan dukungan terhadap pencapaian pelayanan kesehatan masyarakat yang menjangkau semua pelosok di Jawa Timur.

Tabel 2.46
Jumlah dan Cakupan Puskesmas di Jawa Timur
Tahun 2011-2012

Uraian	2011	2012
Jumlah Puskesmas	956	960
Jumlah Kecamatan	662	662
Cakupan Puskesmas (%)	144,41	145,02

Sumber: Dinas Kesehatan Kab/Kota dan BPS Provinsi Jawa Timur

g. Cakupan Puskesmas Pembantu

Upaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar. Peningkatan jaringan pelayanan dasar dalam hal ini puskesmas diupayakan dengan memperluas jangkauan puskesmas dengan mendirikan puskesmas pembantu. Puskesmas pembantu (pustu) adalah unit pelayanan kesehatan sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi

pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia.

Jumlah pustu yang ada di Jawa Timur sebanyak 2.279 unit di tahun 2011 dan menjadi 2.274 unit di tahun 2012. Keberadaan pustu ini belum tersebar di semua desa yang ada di Jawa Timur. Hal ini dapat ditunjukkan dari angka cakupan pembantu puskesmas yang mencapai 26,81 persen di tahun 2011 dan pada tahun 2012 mencapai 26,74 persen. Pada tahun 2012 angka cakupan pustu rata-rata di semua Kabupaten/Kota di bawah 50 persen kecuali 8 kabupaten kota yaitu Jember dan semua kota kecuali kota Surabaya dan Batu.

Tabel 2.47
Jumlah dan Cakupan Puskesmas Pembantu di Jawa Timur
Tahun 2011-2012

Uraian	2011	2012
Jumlah Puskesmas Pembantu	2.279	2.274
Jumlah Desa	8.502	8.503
Cakupan Pustu (%)	26,81	26,74

Sumber: Dinas Kesehatan Kab/Kota dan BPS

Puskesmas dipersiapkan untuk pelayanan kesehatan dasar terutama pelayanan rawat jalan, sedangkan Rumah Sakit di samping memberikan pelayanan pada kasus rujukan untuk rawat inap juga melayani kunjungan rawat jalan bagi masyarakat yang mendapat gangguan kesehatan ringan. Puskesmas rawat inap disediakan untuk pelayanan rawat inap bagi masyarakat yang mendapatkan gangguan kesehatan berat.

Peningkatan efektifitas dan efisiensi sistem rujukan antar Puskesmas dan Rumah Sakit bisa dilaksanakan dengan: (1) Penguatan sistem rujukan yang berfungsi secara optimal, (2) Meningkatkan peran serta masyarakat dan organisasi sosial kemasyarakatan dalam menjamin akuntabilitas dan kualitas tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan dan pemerintah daerah, (3) Meminimalkan hambatan keuangan kelompok miskin dan rentan, dalam mengakses dan memanfaatkan pelayanan kesehatan.

3. Bidang Urusan Perumahan dan Permukiman

Rumah merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia, namun pada kenyataannya di Jawa Timur masih banyak masyarakat yang belum mampu menikmati kehidupannya dalam rumah yang layak, sehat, aman dan berada pada lingkungan yang sehat dan layak huni. Sampai dengan saat ini kondisi kebutuhan rumah (*back log*) di Jawa Timur masih mencapai 530.000 unit, yang terdiri 318.000 unit di perdesaan dan 212.000 unit di perkotaan. Selain itu masih terdapat kondisi rumah tidak layak huni yang diperkirakan sebesar 262.321 unit rumah tersebar di 38 Kabupaten/Kota.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan perumahan, khususnya penyediaan Rumah Sederhana Sehat (RSH) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), maka dalam RPJMD 2009 s/d 2014 Pemerintah Provinsi Jawa Timur menempatkan Program Pengembangan Perumahan sebagai salah satu program prioritas yang perlu diupayakan pemenuhannya. Upaya-upaya yang dilakukan berupa komitmen Pemerintah Provinai untuk mendorong pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, mewujudkan kebijakan penyederhanaan prosedur perijinan serta telah membentuk Tim Percepatan Pembangunan RSH di Jawa Timur.

Sampai dengan Tahun 2012, hasil hasil pembangunan program pengembangan perumahan sebagai berikut :

- a. Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RSH) di Jawa Timur sampai dengan tahun 2012 telah mencapai 145.333 unit RSH dengan rincian target dan realisasi sebagai berikut :

Tabel 2.48
Pelaksanaan Pembangunan RSH

No.	TAHUN	TARGET (Unit)	REALISASI (Unit)	REALISASI s/d TAHUN (Unit)
1	2009	15.000	12.835	94.583
2	2010	15.000	14.000	108.583
3	2011	15.000	19.250	127.833
4	2012	25.000	17.500	145.333

Sumber : Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Prov. Jatim

- b. Untuk menyediakan hunian yang sehat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang berada di Kawasan Perkotaan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membangun Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) sebanyak 9 (sembilan) Blok terdiri dari 485 unit hunian.

Tabel 2.49
Pembangunan Rusunawa 2010 – 2012

No	Tahun	Rusunawa	Jumlah Blok	Jumlah Hunian
1.	2010/2011	Gunungsari Surabaya	3 Blok	268 hunian
2.	2011/2012	Jemundo Sidoarjo	4 Blok	152 hunian
		SIER Surabaya	2 Blok	65 hunian
	TOTAL		9 Blok	485 hunian

Sumber : Dinas PU CK Prov Jatim

Pada tahun 2010/2011 telah terbangun 3 (tiga) Blok Rusunawa Gunung Sari dengan jumlah hunian 268 Unit, dan pada tahun 2011/2012 telah dibangun 6 (enam) Blok terdiri dari Rusunawa Jemundo dengan 4 (empat) Blok dengan jumlah hunian 152 unit, serta Rusunawa SIER 2 (dua) Blok dengan jumlah hunian 65 unit, beserta sarana dan prasarana lingkungannya.

- c. Disamping itu dalam rangka mengupayakan rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat perdesaan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan KODAM V Brawijaya di 29 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Dan sampai dengan akhir tahun 2012 telah dilaksanakan renovasi terhadap 61.679 unit RTLH sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.50
Pelaksanaan Program Renovasi RTLH di Jawa Timur

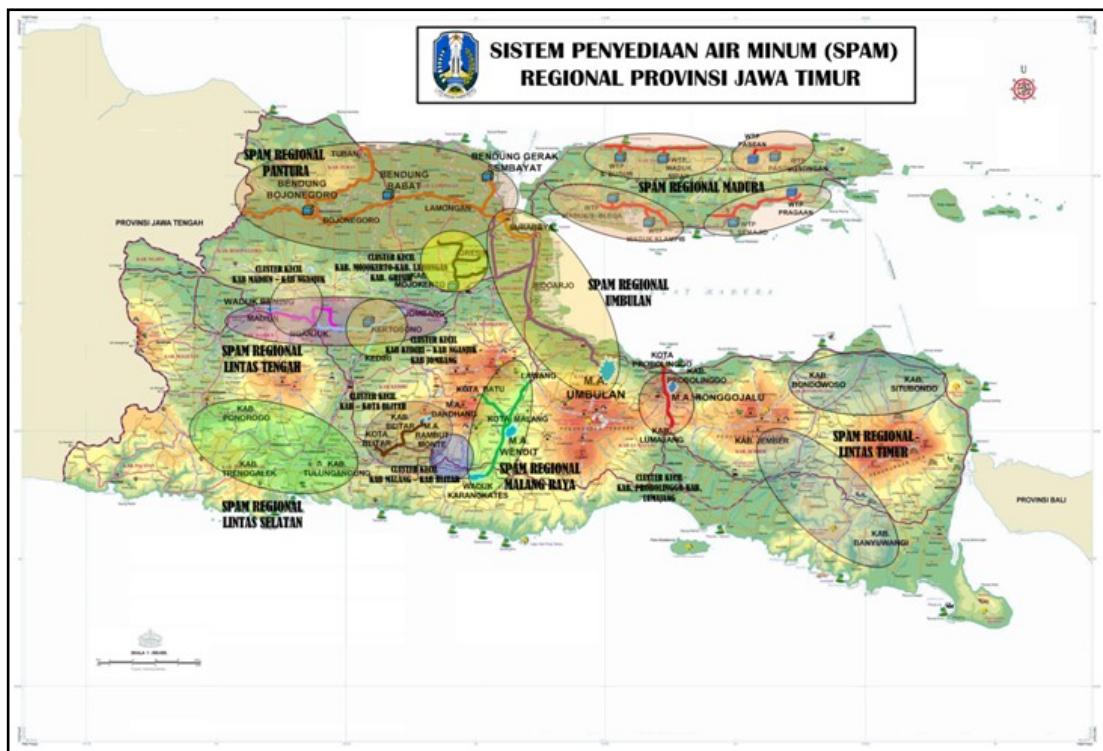
NO	K E G I A T A N	Jumlah kab/kota	Target Renovasi RTLH (unit)	Realisasi Renovasi RTLH (unit)
1.	Tahun 2009 (Tahap I & II)	20	20.000	20.000
2.	Tahun 2010 (Tahap III & IV)	20	15.000	15.075
3.	Tahun 2011 (Tahap V & VI)	20	15.000	15.106
4.	Tahun 2012 (Tahap VII & VIII)	14	11.400	11.498
TOTAL			61.400	61.679

Sedangkan untuk Pembangunan Infrastruktur permukiman sendiri yang meliputi sarana dan prasaranan Air Minum dan Sanitasi yang terdiri dari Air Limbah, Persampahan dan Drainase. Sampai dengan akhir tahun 2012 cakupan layanan air limbah perkotaan mencapai 75,8% dan di perdesaan mencapai 51,98% %. Sedangkan cakupan layanan persampahan khususnya di perkotaan kondisi rasio pelayanan mencapai 81,32% dan drainase perkotaan mencapai 80,52 %.

Adapun infrastruktur air minum sampai dengan tahun 2012 rasio pelayanannya untuk perkotaan mencapai 62,69 % dan perdesaan mencapai 57,04 %. Berbagai upaya telah dan sedang dilakukan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air minum antara lain dengan pengembangan pengelolaan air minum di masing-masing Kab/Kota (lokal) maupun lintas wilayah (regional).

Potensi Pengembangan SPAM Regional di Jawa Timur antara lain : (1) *SPAM Regional Pantura* memanfaatkan Sungai Bengawan Solo (Kab. Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik dan Bangkalan), (2) *SPAM Regional Lintas Tengah* memanfaatkan Sungai Brantas (Kab./Kota Kediri, Kab. Nganjuk, dan Jombang), (3) *SPAM Regional Malang Raya* memanfaatkan mata air Ngepoh, Wendit, Waduk Karangkates (Kab./Kota Malang dan Kota Batu), (4) *SPAM Regional Umbulan* memanfaatkan mata air Umbulan (Kab./Kota Pasuruan, Kab. Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Kab. Gresik), (5) *SPAM Regional Lintas Madura* memanfaatkan waduk dan sungai (Kab.Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep), (6) *SPAM Regional Timur* (Kab. Situbondo, Bondowoso, Jember dan Banyuwangi), dan (7) *SPAM Regional Selatan* (Kab. Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung) .

Gambar 2.27
Peta Potensi Pengembangan SPAM Regional Jawa Timur



Pemanfaatan dan pengelolaan mata air Umbulan (SPAM Regional Umbulan) akan dilaksanakan melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Swasta. Pemerintah Provinsi telah melakukan beberapa fasilitasi dalam rangka implementasi pemanfaatan dan pengelolaan Umbulan yang nantinya akan didistribusikan antara lain untuk pemenuhan kebutuhan air minum domestik maupun industri yang terdapat di Kab./Kota Pasuruan, Kab. Sidoarjo, Kota Surabaya dan Kab. Gresik.

Dalam hal pengelolaan persampahan sejalan dengan rencana penerapan sistem pengolahan persampahan regional, RTRWP Jawa Timur 2011-2021 telah mengakomodir rencana pengembangan TPA Regional di 8 (delapan) wilayah antara lain : (1) *Surabaya* (Kab Gresik-Sidoarjo dan Kota Surabaya), (2) *Malang* (Kab./Kota Malang dan Kota Batu), (3) *Mojokerto* (Kab./Kota Mojokerto), (4) *Madiun* (Kab./Kota Madiun), (5) *Kediri* (Kab./Kota Kediri), (6) *Blitar* (Kab./Kota Blitar), (7) *Pasuruan* (Kab./Kota Pasuruan), serta (8) *Probolinggo* (Kab./Kota Probolinggo).

Saat ini Pemerintah Provinsi sedang menginisiasi dan memfasilitasi pengelolaan sampah terpadu untuk Malang Raya yang terdiri dari Kab. Malang, Kota Malang dan Kota

Batu. Dalam pengelolaan sampah terpadu ini diperlukan kerjasama dengan pihak swasta/investor yang diharapkan dapat mengelola sampah dan memberikan nilai manfaat.

4. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

a. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Arah pengembangan prasarana transportasi jalan di Jawa Timur adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Panjang jalan yang terus bertambah yang diikuti dengan proporsi panjang jalan dalam kondisi baik, diduga keduanya bisa memberikan peran terhadap percepatan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Untuk itu proporsi panjang jalan dalam kondisi baik mempunyai andil besar terhadap tercapainya perkembangan antar daerah yang seimbang dalam pemerataan hasil pembangunan. Utamanya di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya.

Tabel 2.51
Panjang Jalan Menurut Status dan Kondisi Jalan di Jawa Timur
Tahun 2009 – 2012 (km)

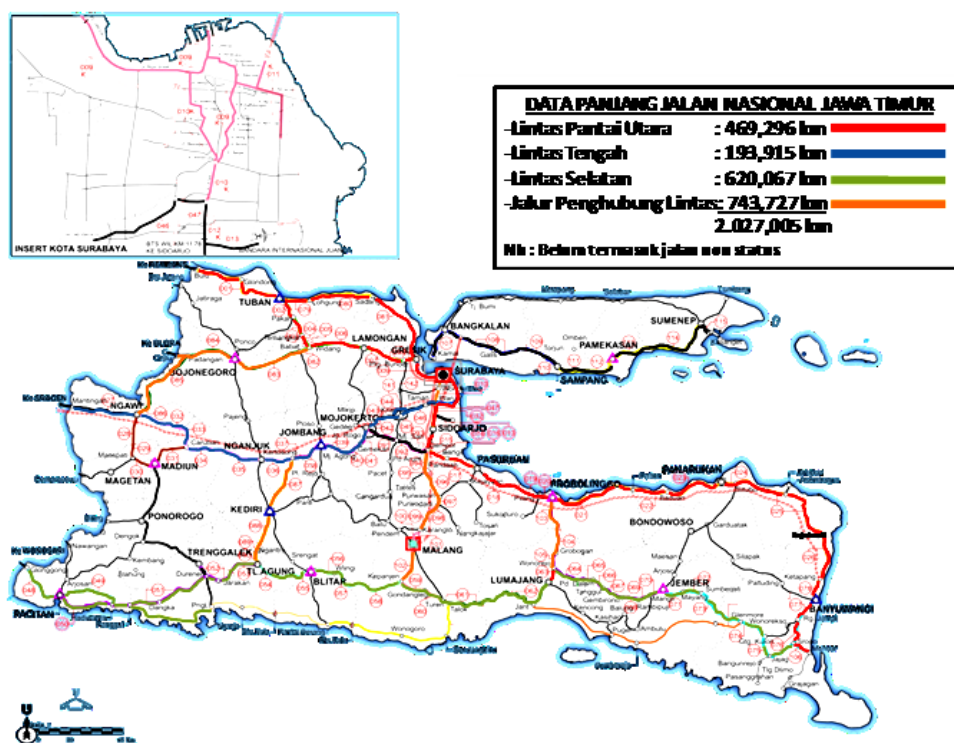
No.	Status Jalan	2009		2010		2011		2012	
		Panjang	Kondisi Baik	Panjang	Kondisi Baik	Panjang	Kondisi Baik	Panjang	Kondisi Baik
1.	Kab/Kota	31.593,30	17.486,03	33.938,03	23.411,91	34.183,46	27.759,70	34.183,46	27.027,21
2.	Provinsi	2.000.98	1.602.70	2.000.98	1.548.42	1.760.91	1.376.28	1.760.91	1.509.64
3.	Nasional	2.027.01	1.254.59	2.027.01	1.254.59	2.027.01	950.48	2.027.01	628.97
Jumlah		35.621,29	20.343,32	37.966,02	24.666,52	37.971,38	30.086,46	37.971,38	29.165,82

Sumber: 1. Dinas PU Bina Marga Kab/Kota
2. Dinas PU Bina Marga Prov. Jatim
3. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V

Pada tahun 2012 panjang jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Timur ada sekitar 37.971,38 km, dengan kondisi baik sepanjang 29.165,82 km atau sebesar 76,81 persen. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, perkembangan panjang jalan di Jawa Timur tidak ada perubahan. Sedangkan perkembangan panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2012 turun sebesar 3,06 poin yaitu dari 79,23 persen di tahun 2011 menjadi 76,81 persen di tahun 2012. Adapun untuk jalan nasional dalam kondisi baik sepanjang 628,97 km atau 31,03 persen

dari 2.027,01 km. Jalan provinsi dengan kondisi baik sepanjang 1.509,64 km atau 85,73 persen dari 1.760,91 km. Berdasarkan proporsi panjang jalan dalam kondisi baik yang masih relatif rendah tersebut, tentunya sangat diperlukan adanya upaya perbaikan jalan agar percepatan arah pengembangan prasarana transportasi jalan di Jawa Timur bisa terwujud sebagaimana yang diharapkan.

Gambar 2.28
Peta Kondisi Jalan Nasional Di Jawa Timur Tahun 2012



Perkembangan pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur yang secara fisik dimulai pada tahun 2002 dengan rencana total panjang jalan sepanjang 618 Km dan jembatan sepanjang 8.109 m, membutuhkan pembiayaan sebesar Rp.7,7 Triliun. Realisasi penanganan sampai dengan akhir tahun 2012, untuk pembangunan Jalan Aspal adalah sepanjang 143,71 Km atau sebesar 23% dan pembangunan Jembatan sepanjang 3.008 m atau sebesar 37% dan total sharing pendanaan mencapai Rp. 1.485,301 Milyar atau sebesar 19%.

Tabel 2.52
Realisasi Pembangunan Jalan Lintas Selatan
Provinsi Jawa Timur S/D TA. 2012

No.	Kabupaten	Program			Realisasi Fisik s/d 2012										Keterangan
		Panjang Jalan	Jembatan		Badan Jalan		Lapis Pondasi		Aspal		Jumlah Jembatan				
			Jml	Pjg											
		(Km)	(Buah)	(M)	(Km)	(%)	(Km)	(%)	(Km)	(%)	(buah)	(%)	(dlm Milyar Rp.)		
1	PACITAN	85,30	8	490	85,30	100,00	85,30	100,00	85,30	100,00	8	100	Kebutuhan Dana : 7.768,45		
2	TRENGGALEK	66,00	9	439	43,45	65,83	21,40	32,42	21,40	32,42	5	56			
3	TULUNGAGUNG	55,10	23	778	34,95	63,43	6,85	12,43	4,85	8,80	3	13	APBN :		
4	BLITAR	62,50	21	1080	25,60	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3	14	1.097,746		
5	MALANG	93,50	36	1622	61,63	65,91	8,90	9,52	6,00	6,42	11	31	APBD Prov :		
6	LUMAJANG	62,90	21	1211	50,10	79,65	12,50	19,87	4,70	7,47	18	86	328,307		
7	JEMBER	83,50	33	1546	51,90	62,16	6,50	7,78	5,30	6,35	7	21	APBD Kab. :		
8	BANYUWANGI	110,00	16	766	102,50	93,18	78,30	71,18	78,30	71,18	7	44	100,377		
Jumlah		618,80	167	7932	455,43	73,60	219,75	35,51	205,85	33,27	62	37	1.526,430		

Manfaat pembangunan JLS, selain untuk meningkatkan aksesibilitas menuju Wilayah Selatan adalah untuk :

- 1) Mendukung kelancaran distribusi Logistik Nasional dan mengurangi disparitas harga yang tinggi;
- 2) Memperpendek waktu tempuh;
- 3) Mengurangi penyelundupan barang maupun orang terutama narkoba yang sangat merugikan negara maupun masyarakat;
- 4) Menjaga Kedaulatan Bangsa dan Meningkatkan Pertahanan Keamanan Wilayah Selatan Jawa Timur yang berhadapan dengan Australia;
- 5) Mempermudah penanggulangan jika terjadi bencana alam, mengingat Wilayah Selatan berada pada Cincin Api Dunia atau “Ring of Fire” jalur rawan bencana gunung berapi dan gempa.

b. Rasio Jaringan Irigasi

Pengertian rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder, dan tersier. Rasio Jaringan Irigasi ini memberikan gambaran ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian. Data ini diperoleh dari dinas terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum yang menangani Pengairan di Kabupaten/ Kota se Jawa Timur dan dari dinas PU bidang pengairan Provinsi Jawa Timur.

Pada tahun 2012, panjang jaringan irigrasi primer sepanjang 283.375 km, panjang jalan irigasi sekunder 1329.023 km dan saluran tersier (pembuang) 129.297 km, sehingga total panjang jaringan irigasi adalah 1.741.695 km. Besarnya rasio jaringan irigasi adalah 32,45 persen yang diperoleh dari perbandingan total panjang jaringan irigrasi dengan total

luas wilayah Jawa Timur. Hal ini memberikan gambaran bahwa ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian sebesar 32,45 persen.

c. Persentase rumah tinggal bersanitasi

Pola hidup bersih bertujuan untuk mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan limbah berbahaya lainnya. Dengan pola hidup bersih akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Oleh karena itu keberadaan sanitasi menjadi sangat penting di dalam setiap rumah tangga. Bahan buangan (limbah) yang dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti tinja manusia atau binatang, dapat dicegah dengan menggunakan teknologi sederhana seperti membuat kakus dan tangki septik.

Tabel 2.53

Persentase Rumah tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar, Tahun 2010–2012

Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
Sendiri	63,81	61,63	64,31
Bersama	15,54	15,08	14,18
Umum	1,09	1,55	1,82
Tidak ada	19,56	21,74	19,69

Sumber : BPS Jawa Timur (Juni 2012)

Tabel 2.54

Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Akhir Pembuangan Tinja, Tahun 2009–2012

Tempat Akhir Pembuangan Tinja	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
Tangki/SPAL	56,87	57,73	60,91
Kolam/sawah/sungai/danau/laut	20,53	20,18	18,55
Lubang tanah	19,03	18,70	17,36
Pantai/tanah lapang/kebun/Lainnya	3,57	3,39	3,18

Sumber : BPS Jawa Timur (Juni 2012)

Pemerintah telah berupaya menyediakan sarana sanitasi, terutama jamban dalam rangka memperbaiki kualitas sanitasi masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat akan meningkat bila penyediaan sarana tersebut dibarengi dengan perbaikan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan sanitasi tersebut. Misalnya, penyediaan jamban oleh pemerintah yang didukung oleh kebiasaan buang air di tempat yang sudah disediakan, sehingga pencemaran air dan tanah oleh tinja bisa dikurangi. Berdasarkan data

Susenas 2012, rumah tangga di Jawa Timur yang menggunakan fasilitas tempat buang air besar sendiri sebesar 64,31 persen, mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Dengan demikian secara keseluruhan persentase rumah tinggal yang bersanitasi (mempunyai fasilitas tempat buang air besar sendiri, bersama, umum) ada peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dari 78,26 persen tahun 2011 menjadi 80,31 persen pada tahun 2012. Peningkatan persentase rumah tangga yang bersanitasi ini tentunya akan meningkatkan pula tingkat kesehatan masyarakat. Namun demikian masih ada beberapa daerah di Jawa Timur terutama pada wilayah tapal kuda seperti Situbondo, Bondowoso, Probolinggo yang merupakan daerah dengan persentase penggunaan jamban milik sendiri paling kecil dibandingkan dengan daerah lainnya di Jawa Timur.

Tempat pembuangan akhir tinja masyarakat di Jawa Timur tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 3.5. Dari tabel tersebut terlihat bahwa tempat pembuangan akhir tinja sebagian besar masyarakat adalah di tangki/SPAL yang mencapai 60,91 persen, yang tingkat kesehatan sanitasinya lebih baik daripada tempat akhir pembuangan tinja lainnya.

Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membangun rumah sehat dan kondisi lingkungan perumahan yang sehat ini tercermin dari semakin meningkatnya pengadaan fasilitas buang air besar meskipun masih ada sebagian masyarakat yang menggunakan lahan pekarangan atau lahan kosong lainnya sebagai tempat pembuangan akhir kotoran manusia.

Disisi lain menurut kabupaten/kota di Jawa Timur dari rumah tangga yang menggunakan jamban, tempat pembuangan akhir tinjanya belum semua menggunakan tangki septik. Bahkan di beberapa kabupaten seperti Pacitan dan wilayah Madura masih banyak yang pembuangan akhir tinjanya di lubang tanah. Sementara di Kabupaten Situbondo, Bondowoso dan Probolinggo lebih banyak yang menggunakan kolam/sawah dan sungai sebagai tempat pembuangan akhir tinja.

d. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam (Permen PU No 05/PRT/M/2008). Jenis-jenis RTH ada beberapa macam diantaranya pemakaman umum. Tempat pemakaman Umum (TPU) sebagai salah satu fasilitas sosial yang berfungsi sebagai tempat pemakaman bagi masyarakat yang meninggal dunia.

Jumlah TPU yang dilaporkan di Jawa Timur sebanyak 3.075 unit di tahun 2012. Sementara itu rasio TPU terhadap jumlah per 100.000 penduduk semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, rasio TPU mencapai 7,55 dan berturut-turut tahun 2011 dan 2012 mencapai 7,81 dan 8,08. Angka ini menunjukkan setiap 100.000 penduduk akan disediakan TPU sebanyak 8,08 unit di tahun 2012. Peningkatan angka rasio dari tahun ke tahun diduga semakin tertibnya registrasi keberadaan TPU di instansi pemerintahan otonom.

Tabel 2.55
Jumlah dan Rasio TPU di Jawa Timur Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah tempat pemakaman umum	2.140	2.143	3.147	2.947	3.075
2	Jumlah Penduduk	5,96	5,95	7,55	7,81 *)	8,08
3	Rasio TPU per 100.000 penduduk	5,96	5,95	7,55	7,81	8,08

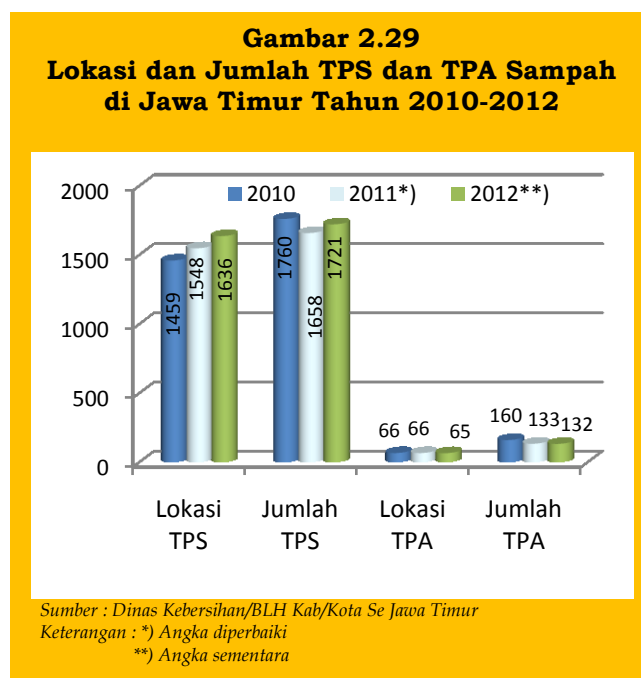
Keterangan *) = Angka perbaikan

e. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

Sampah adalah bahan-bahan atau material yang dibuang/sudah tidak dibutuhkan lagi oleh masyarakat dari berbagai lokasi di suatu daerah tertentu. Sampah dari rumah tangga/pemukiman, toko kecil, warung, pasar, dan jalan perumahan/jalan gang dikelola oleh RT/RW setempat dengan memanfaatkan jasa pasukan kuning sesuai daerah layanan masing-masing untuk pengumpulan dan

pengangkutan sampah ke TPS, kemudian sampah diangkut menggunakan armada angkutan ke TPA.

Menurut Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.



Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan dan Tata Kota serta Badan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se Jawa Timur, pada tahun 2011, tempat penampungan sampah

sementara di Jawa Timur berjumlah sekitar 1.658 TPS yang berada pada 1.548 lokasi. Pada tahun 2012 sedikit meningkat menjadi 1.721 TPS yang berada pada 1.636 lokasi. Sementara itu tempat pembuangan akhir sampah pada tahun 2012 mengalami penurunan dari 133 menjadi 132 TPA yang tersebar pada 66 dan 65 lokasi. Penurunan ini terjadi di Kota Mojokerto, hal ini karena adanya pengelolaan sampah swadaya oleh masyarakat atau kelompok masyarakat sehingga pengelolaan yang dilakukan oleh Pemda setempat berkurang.

Rasio TPS per satuan penduduk di Jawa Timur selama tahun 2011-2012 mengalami peningkatan dari 4,40 TPS

menjadi 4,52 TPS per 100.000. Angka ini menunjukkan, setiap 4 TPS yang ada diperuntukkan bagi 100.000 penduduk.

Pada tahun 2011-2012 tampak terjadi penurunan jumlah TPS/TPA bila dibandingkan data tahun 2010, hal ini antara lain diduga karena ada beberapa TPS maupun TPA yang lokasinya berdekatan digabung, karena letaknya berada di dekat pemukiman penduduk sehingga mengganggu masyarakat yang tinggal disekitarnya, selain itu ada beberapa kabupaten/kota yang merevisi datanya pada tahun 2011.

5. Bidang Urusan Perhubungan

a. Rasio Ijin Trayek

Sehubungan dengan sarana transportasi yang paling utama digunakan di Jawa Timur adalah transportasi darat, maka perkembangan rasio ijin trayek mempunyai peran yang cukup penting. Utamanya untuk menciptakan tertib berlalu lintas dan terjaminnya rasa nyaman serta keselamatan pengguna jasa transportasi darat.

Tabel 2.56
Rasio Ijin Trayek di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2008 – 2012

No.	Ijin Trayek	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Antar Kota Dalam Provinsi	4.005	4.021	4.032	3.732	3.700
2.	Antar Kota Antar Provinsi	1.843	1.632	1.860	1.749	1.673
3.	Jumlah Penduduk	36.972.282	37.236.149	37.476.757	37.687.622	38.052.950
Rasio Ijin Trayek		0,16	0,15	0,16	0,15	0,14

Sumber: Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan JalanProvinsi Jawa Timur

Perkembangan jumlah ijin trayek di Jawa Timur pada tahun 2012 tampak berkorelasi negatif terhadap perkembangan jumlah penduduk Jawa Timur, artinya ketika perkembangan jumlah penduduk Jawa Timur mengalami kenaikan di setiap tahunnya, tidak diikuti dengan bertambahnya jumlah ijin trayek, sehingga berdampak pada menurunnya angka rasio ijin trayek disetiap tahunnya. Hal ini diduga akan bisa memperlambat terciptanya tertib berlalu lintas dan terjaminnya rasa nyaman serta keselamatan pengguna jasa transportasi darat di Jawa Timur.

Sebagai sarana pengawasan dan pengendalian angkutan barang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki 20 lokasi Jembatan Timbang se-Jawa Timur sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.56

Tabel 2.57
Tabel Data Jembatan Timbang di Wilayah Jawa Timur
Tahun 2012

No	JembatanTimbang	Lokasi	Kabupaten/Kota
1	Lamongan	Kec.Babat	Kab.Lamongan
2	Trosobo	Kec.Gempol	Kab.Sidoarjo
3	Trowulan	DesaTrowulan	Kab.Mojokerto
4	Rejoso	Kec.Rejoso	Kab.Pasuruan
5	Sedarum	Kec.Nguling	Kab.Pasuruan
6	Besuki	Kec.Besuki	Kab.Probolinggo
7	Watudodol	Kec.Wongsorejo	Kab.Banyuwangi
8	Kalibaru Manis	Kec.Kalibaru	Kab.Banyuwangi
9	Rambigundam	Kec.Rambipuji	Kab.Jember
10	Klakah	Kec.Klakah	Kab.Lumajang
11	Singosari	Kec.Singosari	Kab.Malang
12	Pojok	Kec.Kras	KabupatenKediri
13	Guyangan	Kec.Bagor	Kab.Nganjuk
14	Widodaren	Kec.Widodaren	Kab.Ngawi
15	Mojoagung	Kec.Mojoagung	Kab.Jombang
16	Baureno	Kec.Baureno	Kab.Bojonegoro
17	Socah	Kec.Socah	Kab.Bangkalan
18	Talun	Kec.Sukorejo	KotaBlitar
19	Widang	Kec.Widang	Kab.Tuban
20	Jrengik	Kec.Jrengik	Kab.Sampang

Sumber : Dinas Perhubungan dan LLAJ Jawa Timur (2012)

b. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2012

Sebagaimana fungsi uji kir yang diarahkan untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan bagi kendaraan angkutan umum untuk beroperasi, diduga uji kir juga bisa menciptakan tertib berlalu lintas dan terjaminnya rasa nyaman serta keselamatan pengguna jasa transportasi darat. Pada tahun 2012 jumlah pengujian kendaraan bermotor/uji kir untuk seluruh angkutan umum di Jawa Timur mencapai 114.684 unit atau naik 30,16 persen dibanding tahun 2011 yang mencapai 88.109 unit. Jenis kendaraan yang memiliki uji kir terbanyak adalah mobil barang yang mencapai 80.388 unit (70,10 persen), di urutan kedua mobil bus sebanyak

22.416 unit (19,55 persen), diikuti jenis mobil penumpang umum (MPU) sebanyak 6.836 unit (5,96 persen). Sedangkan di urutan keempat dan kelima adalah jenis kereta gandengan sebanyak 4.363 unit (3,80 persen) dan jenis kereta tempelan sejumlah 682 unit (0,59 persen).

Tabel 2.58
Jumlah Uji Kir yang Dikeluarkan di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2008 – 2012

No.	Angkutan Umum	2008		2009		2010		2011		2012	
		Jumlah	Jumlah Kir	Jumlah	Jumlah Kir	Jumlah	Jumlah Kir	Jumlah	Jumlah Kir	Jumlah	Jumlah Kir
1.	MPU	12.886	19.988	12.780	18.680	11.657	17.098	5.621	6.032	14.027	6.835
2.	Mobil Bus	23.916	41.702	25.008	39.927	22.890	36.959	13.125	20.281	27.340	22.416
3.	Mobil Barang	45.248	80.695	52.680	88.161	46.780	99.109	34.742	58.354	63.467	80.388
4.	Krt. Gandengan	4.957	8.924	4.937	7.883	3.778	7.704	2.003	2.976	3.756	4.363
5.	Krt. Tempelan	2.714	5.899	4.921	4.573	4.473	4.748	331	466	815	682
Jumlah		89.721	157.208	100.326	159.224	89.578	165.618	55.822	88.109	109.405	114.684

Sumber : Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan JalanProvinsi Jawa Timur

c. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Jawa Timur Tahun 2012

Pada tahun 2008 hingga 2012 jumlah pelabuhan laut di Jawa Timur berdasarkan pengusahaannya yang terdiri dari pelabuhan laut diusahakan sebanyak 22 unit dan tidak diusahakan sebanyak 30 unit. Khusus untuk jumlah pelabuhan udara komersial pada tahun 2012 ada penambahan 1 unit, yaitu Bandara Blimbingsari Banyuwangi sehingga menjadi 3 unit. Adapun jumlah terminal bus sebanyak 59 unit. Berdasarkan jumlah pelabuhan laut, udara dan terminal tersebut, diharapkan para pengguna jasa transportasi di Jawa Timur bisa terlayani secara maksimal.

Tabel 2.59
Jumlah Pelabuhan Laut, Udara dan Terminal Bus di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2008 – 2012

No.	Jenis Pelabuhan	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Pelabuhan Laut					
	a. Diusahakan	22	22	22	22	22
	b. Tidak Diusahakan	30	30	30	30	30
2.	Pelabuhan Udara	2	2	2	2	3
3.	Terminal Bus	59	59	59	59	59

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota

d. Angkutan Darat

Angkutan darat meliputi angkutan jalan raya yang terdiri dari angkutan mobil penumpang umum (MPU) dan angkutan mobil bus. Pada tahun 2012 angkutan darat di Jawa Timur jumlahnya mencapai 41.367 unit kendaraan, atau naik 120,67 persen dari 18.746 unit kendaraan di tahun 2011. Kenaikan jumlah tersebut lebih disebabkan oleh naiknya jumlah MPU yang mencapai 152,75 persen atau dari 5.621 unit kendaraan di tahun 2011 menjadi 14.027 unit kendaraan di tahun 2012, sementara jenis angkutan mobil bus naik 108,30 persen dari 13.125 unit kendaraan di tahun 2011 menjadi 27.340 unit kendaraan di tahun 2012.

Tabel 2.60
Jumlah Angkutan Jalan Raya di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2008 – 2012

No.	Angkutan Jalan Raya	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Mobil Penumpang Umum	12.886	12.780	11.657	5.621	14.027
2.	Mobil Bus	23.916	25.008	22.890	13.125	27.340
Jumlah		36.802	37.788	34.547	18.746	41.367

Sumber: Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur

Sedangkan untuk angkutan Kereta Api di Jawa Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.61
Data Angkutan Penumpang Kereta Api di DAOP 7 Madiun, DAOP 8
Surabaya dan DAOP 9 Jember
Tahun 2009-2012

NO	JENIS KERETA API	JUMLAH PENUMPANG (ORANG/TAHUN)			
		2009	2010	2011	2012
1	DAOP 7 MADIUN				
	KA EKSEKUTIF	169,035	204,458	202,338	195,308
	KA BISNIS	227,587	223,406	213,974	151,397
	KA EKONOMI / LOKAL	2,938,567	3,077,492	3,030,733	2,667,016
	SUB TOTAL	3,335,189	3,505,356	3,447,045	3,013,721
2	DAOP 8 SURABAYA				
	KA EKSEKUTIF	306,758	807,673	687,523	769,103
	KA BISNIS	245,104	594,118	470,994	482,463
	KA EKONOMI	827,380	2,058,422	1,654,491	1,324,517
	KA LOKAL	2,462,215	9,257,265	8,194,395	6,606,633
	SUB TOTAL	3,841,457	12,717,478	11,007,403	9,182,716
3	DAOP 9 JEMBER				
	KA EKSEKUTIF	116,573	108,429	118,334	149,957
	KA BISNIS	209,587	165,736	161,117	135,042

	KA EKONOMI	732,835	792,614	776,320	790,778
	KA LOKAL	778,029	705,719	689,080	699,786
	SUB TOTAL	1,837,024	1,772,498	1,744,851	1,775,563
	TOTAL	9,013,670	17,995,332	16,199,299	13,972,000

Sumber: DAOP 7 Madiun, DAOP 8 Surabaya, DAOP 9 Jember

Karena itu, pembangunan transportasi diarahkan untuk meningkatkan pelayanan jasa transportasi secara efektif dan efisien. Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi sektor transportasi, telah dilakukan penyediaan sarana dan prasarana pada tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 2.61

Tabel 2.62
Penyediaan Prasarana Transportasi di Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012

ModaKA	JalurKA	<ul style="list-style-type: none">• Jalur Utara: Surabaya Pasar Turi – Lamongan – Babat – Bojonegoro - Cepu• Jalur Tengah: Surabaya Semut – Surabaya Gubeng – Surabaya Wonokromo–Jombang–Kertosono–Nganjuk–Madiun–Solo• Jalur Timur : Surabaya Semut – Surabaya Gubeng – Surabaya Wonokromo–Sidoarjo- Bangil–Pasuruan–Probolinggo–Jember–Banyuwangi• Jalur Lingkar: Surabaya Semut – Surabaya Gubeng – Surabaya Wonokromo–Sidoarjo- Bangil–Lawang–Malang–Blitar–Tulungagung–Kediri–Kertosono–Mojokerto–Surabaya.
Moda Penyebera ngan	Lintas Antar Provinsi	<ul style="list-style-type: none">• Pelabuhan Penyeberangan Ketapang Banyuwangi
	Lintas Dalam Provinsi	<ul style="list-style-type: none">• Pelabuhan Penyeberangan Ujung Surabaya.• Pelabuhan Penyeberangan Kamal Bangkalan.• Pelabuhan Penyeberangan Jangkar Situbondo.• Pelabuhan Penyeberangan Kalianget Sumenep
	Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota	<ul style="list-style-type: none">• Pelabuhan Penyeberangan Kalianget, Kangean dan Sapudi Sumenep• Pelabuhan Penyeberangan Gresik dan Pulau Bawean Gresik• Peabuhan Penyeberangan Raas Sumenep
ModaLaut	Pelabuhan Utama	Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya
	Pelabuhan Pengumpul	<ol style="list-style-type: none">1. Pelabuhan Gresik2. Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo3. Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi4. Pelabuhan Pasuruan5. Pelabuhan Kalbut Situbondo6. Pelabuhan Paiton Probolinggo7. Pelabuhan Bawean Gresik8. Pelabuhan Sapeken Sumenep9. Pelabuhan Kangean Sumenep

	Pelabuhan Pengumpan Regional	1. Pelabuhan Panarukan 2. Pelabuhan Kalianget 3. Pelabuhan Brondong 4. Pelabuhan Branta 5. Pelabuhan Telaga Biru 6. Pelabuhan Boom Banyuwangi 7. Pelabuhan Tuban
	Pelabuhan Pengumpan Lokal	1. Pelabuhan Besuki 2. Pelabuhan Jangkar 3. Pelabuhan Tanglok 4. Pelabuhan Masalembo 5. Pelabuhan Gayam Sapudi 6. Pelabuhan Sepulu
Moda Udara	Umum	<ul style="list-style-type: none">• Bandar Udara Pengumpul dengan skala pelayanan primer : Bandara Juanda – Sidoarjo• Bandara Udara Pengumpul dengan skala pelayanan sekunder : Bandara Abdul Rahman Saleh – Malang• Bandar Udara Pengumpan : Bandara Trunojoyo – Sumenep, Bandara Noto Hadinegoro – Jember, Bandara Blimbingsari – Banyuwangi
	Khusus	<ul style="list-style-type: none">• Bandar Udara Khusus Militer : Lanud TNI AU Iswahyudi – Magetan, Lanud TNI AU Pacitan – Pacitan, Lanud TNI AL Raci – Pasuruan, Lanud TNI AD Melik – Situbondo• Bandar Udara Khusus Sipil : Pagerungan Kabupaten Sumenep

Sumber: Dinas Perhubungan dan LLAJ-Provinsi Jawa Timur (2012)

e. Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) berfungsi menghubungkan jaringan transportasi jalan yang terputus dengan kegiatan mengangkut penumpang dan barang melalui wilayah perairan. Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan diperlukan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat, memberikan aksesibilitas yang lebih baik kepada masyarakat terutama di daerah terpencil. Jaringan lintas penyeberangan yang telah dibuka untuk kepentingan masyarakat sebagaimana yang terlihat pada tabel 2.62

Tabel 2.63
Tabel Lintasan Penyeberangan di Wilayah Jawa Timur Tahun 2012

No	Lintasan Penyeberangan	Kabupaten/Kota	Status
1	Ketapang – Gilimanuk	Banyuwangi - Bali	LintasProvinsi
2	Ujung-Kamal	Surabaya-Bangkalan	LintasKab/Kota
3	Jangkar- Kalianget	Situbondo-Sumenep	LintasKab/Kota
4	Jangkar-Branta	Situbondo-Pamekasan	LintasKab/Kota
5	Gresik-Bawean	Gresik	DalamKab/Kota
6	Kalianget -Kangean	Sumenep	DalamKab/Kota
7	Kalianget -Sapudi	Sumenep	DalamKab/Kota

Sumber : Dinas Perhubungan & LLAJ Jawa Timur (2012)

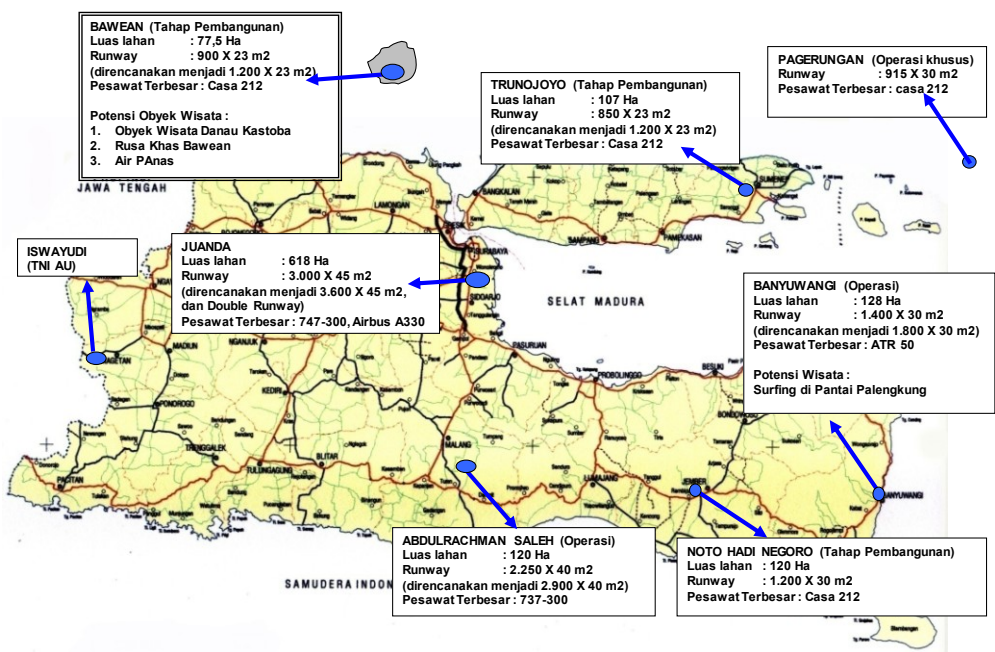
Sebagai penunjang penyelenggaraan ASDP diperlukan dukungan prasarana yang memadai melalui pembangunan dermaga penyeberangan di Pulau Raas dan penambahan kapasitas prasarana di pelabuhan penyeberangan Ketapang di Banyuwangi, Paciran di Lamongan.

Transportasi laut mempunyai peran sangat penting bagi perekonomian Jawa Timur. Hampir 99% kegiatan ekspor-impor menggunakan transportasi laut. Transportasi laut juga sangat penting bagi pergerakan perdagangan antar-pulau (dalam negeri) yang dilayani armada pelayaran nasional. Untuk menunjang kelancaran transportasi laut, pada tahun 2012 telah dilakukan perbaikan layanan infrastruktur di Pelabuhan Tanjung Wangi dan Pelabuhan Boom di Banyuwangi, Pelabuhan Tanjung Tembaga di Probolinggo, Pelabuhan Pasean di Pamekasan, Pelabuhan Giliraja, Pelabuhan Sapudi, Pelabuhan Keramaian di Sumenep, Pelabuhan Kalbut di Situbondo, Pelabuhan Gilimandagin, Pelabuhan Branta dan Pelabuhan Taddan di Sampang, Pelabuhan Telaga Biru di Bangkalan, Pelabuhan Panarukan dan Pelabuhan Kalbut di Situbondo, serta Pelabuhan Brondong di Lamongan.

f. Angkutan Udara

Transportasi udara memiliki keunggulan dari sisi efisiensi waktu dibanding moda transportasi lainnya, dengan efisiensi waktu akan meningkatkan arus perdagangan. Layanan angkutan udara di Jawa Timur dibedakan menjadi layanan domestik dan internasional. Berkaitan dengan hal tersebut fasilitas pelayanan keselamatan penerbangan perlu dikelola dengan standar penerbangan internasional. Sebagai upaya pemenuhan kebutuhan aspek kapasitas dan keselamatan penerbangan dilakukan peningkatan sarana dan prasarana : Bandara Blimbingsari di Banyuwangi, Bandara Abdurahman Saleh di Malang, Bandara Bawean di Gresik serta pengembangan terminal penumpang di Bandara Juanda Sidoarjo.

Gambar 2.30
Potensi Bandara Eksisting Di Jawa Timur



Tabel 2.64
Data Arus Perdagangan Melalui 2 (Dua) Bandara di Wilayah Jawa Timur
Tahun 2009 - 2012

Uraian	Satuan	2009	2010	2011	2012
Perdagangan Luar Negeri					
a. Impor					
Bandara Juanda	Kg	8.496.193	10.098.489	9.798.461	10.309.450
Bandara Abd. Saleh	Kg	-	-	-	-
Jumlah Impor	Kg	8.496.193	10.098.489	9.798.461	10.309.450
b. Ekspor					
Bandara Juanda	Kg	8.593.806	9.632.158	8.964.965	9.511.607
Bandara Abd. Saleh	Kg	-	-	-	-
Jumlah Ekspor	Kg	8.593.806	9.632.158	8.964.965	9.511.607
Jumlah Perdagangan Luar Negeri	Kg	17.089.999	19.730.647	18.763.426	19.821.057
Perdagangan Dalam Negeri					
a. Bongkar					
Bandara Juanda	Kg	22.112.574	26.460.270	37.465.395	35.063.411
Bandara Abd. Saleh	Kg	482.618	662.735	923.161	1.317.453
Jumlah Bongkar	Kg	22.595.192	27.123.005	38.388.556	36.380.864
b. Muat					
Bandara Juanda	Kg	25.687.688	30.230.231	49.186.810	51.344.021
Bandara Abd. Saleh	Kg	152.058	84.779	204.767	224.481
Jumlah Muat	Kg	25.839.746	30.315.010	49.391.557	51.568.502
Jumlah perdagangan Dalam Negeri	Kg	48.434.938	57.438.015	87.780.133	87.949.366
Jumlah Arus Perdagangan	Kg	65.524.937	77.168.662	106.543.559	107.770.423

Sumber : Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur

Kebutuhan infrastruktur bandara di beberapa daerah kabupaten/kota sebagai pendukung sektor pariwisata di Jawa Timur sangat dibutuhkan. Peningkatan infrastruktur dapat menunjang volume wisatawan mancanegara yang datang ke Jawa Timur, berikut data arus penumpang domestik maupun internasional yang melalui 2 (dua) bandara di Jawa Timur

Tabel 2.65
Data Arus Penumpang Melalui 2 (Dua) Bandara di Jawa Timur
Tahun 2009 – 2012

Uraian	Satuan	2009	2010	2011	2012
Arus Pesawat Penumpang (unit)					
a. Bandara Juanda					
Internasional	Unit	4.928	4.492	5.162	5.178
Domestik	Unit	42.266	45.417	50.824	62.094
b. Bandara Abd. Saleh					
Domestik	Unit	1.307	1.631	2.094	2.392
Jumlah Arus Pesawat Penumpang	Unit	48.501	51.540	58.080	69.664
Arus Penumpang Orang					
Debarkasi / Turun					
a. Bandara Juanda					
Internasional	Orang	568.531	647.685	722.039	771.502
Domestik	Orang	4.565.953	5.103.305	5.874.994	7.271.174
b. Bandara Abd. Saleh					
Domestik	Orang	132.457	184.473	211.565	255.999
Jumlah Debarkasi/Turun	Orang	5.266.941	5.935.463	6.808.598	8.298.675
Embarkasi / Naik					
a. Bandara Juanda					
Internasional	Orang	537.101	569.994	693.824	734.457
Domestik	Orang	4.257.754	4.877.541	5.570.504	6.527.452
b. Bandara Abd. Saleh					
Domestik	Orang	118.263	178.586	210.285	253.496
Jumlah Embarkasi/Naik	Orang	4.913.118	5.626.121	6.474.613	7.515.405
Jumlah Arus Penumpang	Orang	10.180.059	11.561.584	13.283.211	15.814.080

Sumber : Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur

g. Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Kepemilikan kir pada angkutan umum didefinisikan sebagai persentase jumlah angkutan umum yang tidak memiliki kir terhadap jumlah seluruh angkutan Umum. Pada tahun 2012 jumlah angkutan umum di Jawa Timur tercatat 109.405 unit kendaraan dengan jumlah kepemilikan uji kir sebanyak 114.684, dengan keterbandingan antara jumlah angkutan umum dan jumlah kir sebesar 1,00 dibanding 1,05. Artinya masih belum seluruhnya angkutan umum di Jawa Timur mengujikan kendaraannya secara berkala dua kali dalam setahun.

Tabel 2.66
Jumlah Kepemilikan Kir di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2008 – 2012

No.	Angkutan Jalan Raya	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Mobil Penumpang Umum	19.988	18.680	17.098	6.032	6.835
2.	Mobil Bus	41.702	39.927	36.959	20.281	22.416
3.	Mobil Barang	80.695	88.161	99.109	58.354	80.388
4.	Kereta Gandengan	8.924	7.883	7.704	2.976	4.363
5.	Kereta Tempelan	5.899	4.573	4.748	466	682
Jumlah		157.208	159.224	165.618	88.109	114.684

Sumber: Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur

h. Pemasangan Rambu-rambu

Seperti halnya uji kir dan ijin trayek, keberadaan rambu-rambu diduga mempunyai pengaruh terhadap terciptanya tertib berlalu lintas dan terjaminnya rasa nyaman serta keselamatan pengguna jasa transportasi darat. Pada tahun 2012 persentase rambu-rambu terpasang di Jawa Timur angkanya masih relatif rendah yaitu sebesar 8,62 persen. Atau turun 2,66 poin dibanding tahun sebelumnya, yaitu dari 11,28 persen di tahun 2011 menjadi 8,62 persen di tahun 2012.

Sebagai akibat dari rendahnya angka persentase rambu-rambu yang terpasang di Jawa Timur tersebut, akan berisiko terhadap terciptanya tertib berlalu lintas dan terjaminnya rasa nyaman serta keselamatan pengguna jasa transportasi darat. Untuk itu diminta kepada seluruh pengguna jalan raya di Jawa Timur agar lebih berhati-hati ketika berkendara di jalan raya.

Tabel 2.67
Jumlah Rambu-rambu Jalan Raya di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2008 – 2012

No.	Rambu-rambu	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah yang Terpasang	1.300	500	500	2.114	1.615
2.	Jumlah yang Seharusnya Tersedia	18.745	18.745	18.745	18.745	18.745
Persentase Terpasang		6,94	2,67	2,67	11,28	8,62

Sumber: Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan JalanProvinsi Jawa Timur

Sebagai bentuk peningkatan keselamatan dan keamanan pengguna jasa transportasi terutama di perlintasan sebidang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Alarm Early Warning Sistem pada perlintasan sebidang se-Jawa Timur yang jumlahnya mencapai 1.431 perlintasan sebidang dengan rincian sebagaimana pada tabel 2.66

Tabel 2.68
Jumlah Perlintasan Sebidang di Wilayah Jawa Timur
Tahun 2012

NO	WILAYAH DAOP	JUMLAH PERLINTASAN SEBIDANG (unit)			TOTAL
		DIJAGA	TIDAK DIJAGA	LIAR	
1	DAOP VII MADIUN	63	172	-	235
2	DAOP VIII SURABAYA	179	477	26	682
3	DAOP IX JEMBER	108	399	7	514
TOTAL		350	1,048	33	1,431

Sumber : Dinas Perhubungan & LLAJ Jawa Timur (2012)

6. Bidang Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral

Dalam rangka pelayanan umum bidang energy dan sumber daya mineral, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan energy dan sumber daya mineral. Adapun indicator yang menunjukkan hasil kinerja pembangunan energy dan sumber daya mineral adalah pengembangan energy yang meliputi pembangunan biogas, PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro), panas bumi, dan pembangunan sumber daya mineral meliputi pengembangan potensi geologi, pertambangan dan air tanah.

Pembangunan Unit Biogas dengan sumber energy dari kotoran ternak pada tahun 2011 sebanyak 8 unit di kab/kota Kediri, Tulungagung, Malang, Jombang dan tahun 2012 sebanyak 5 unit di kab/kota Blitar, sebagai pengganti gas elpiji/minyak tanah. Energi yang berasal dari 1 unit biogas dengan jumlah sapi antara 8 sampai 20 ekor, 2 (dua) digester, kapasitas 40 m3 dapat dipakai untuk menyalakan 7 sampai 10 buah kompor/KK atau setara dengan 35 sampai 50 orang. Pembangunan biogas dilaksanakan untuk para pemilik ternak, kemudian biogas dialirkan dan dimanfaatkan oleh rumah tangga miskin yang berada disekitarnya. Biogas juga dibangun dan diberikan untuk beberapa Kelompok Petani Ternak dan Pondok Pesantren di Jawa Timur.

Pembangunan (PLTMH) pada tahun 2011 sebanyak 1 unit di Desa Bareng, Kecamatan Sawahan Kab Nganjuk untuk memenuhi kebutuhan listrik 34 KK, selanjutnya tahun 2012 sebanyak 2 unit di Desa Klian, Kec. Krucil, Kab Probolinggo

dan Desa Kare, Kecamatan Kare, Kab. Madiun untuk 300 KK. Dengan adanya PLTMH tersebut selain untuk memenuhi kebutuhan penerangan masyarakat, listrik yang dihasilkan dapat juga dimanfaatkan untuk mengembangkan industri rumah tangga, seperti usaha pembuatan keripik pisang, pembuatan tempe, tahu dan lain-lain.

Selain itu juga telah dilakukan beberapa kajian yaitu Studi Kelayakan PLTMH, yaitu pada tahun 2011 sebanyak 3 lokasi yaitu Kab Mojokerto, Magetan dan Madiun, serta tahun 2012 untuk 2 lokasi yaitu Kab Tulungagung dan Trenggalek. Selanjutnya dari hasil inventarisasi sumber panas bumi yang ada di Jawa Timur diketahui antara lain : Ngebel-Wilis (165 MWe.), Blawan-Ijen (110 MWe.), Iyang-Argopuro (295 MWe.), Arjuno Welirang (280 MWe.) Songgoriti-Kawi (25 MWe.) Gn. Pandan (50 MWe.), Tiris-Gunung Lamongan (147 MWe.), Arjosari (25 MWe.), dan Melati (25 MWe.). Dari 9 (sembilan) lokasi panas bumi tersebut, 3 (tiga) diantaranya layak untuk dikembangkan yaitu potensi Panas bumi Ngebel-Wilis, Blawan-Ijen dan Iyang-Argopuro.

Pengembangan Potensi Geologi dilaksanakan melalui inventarisasi informasi dan data geologi, Kawasan karst dan Kawasan Lindung Geologi, untuk mengurangi resiko bencana geologi dan dapat dikembangkan sesuai peruntukannya, seperti keberadaan goa-goa/kawasan karst untuk wisata alam geologi (geowisata). Pada tahun 2011 dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek sedangkan tahun 2012 dilaksanakan di Kab Malang, Kota Malang dan Kota Batu. Disamping itu telah dilakukan pemasangan Radio Rig untuk mempermudah penyampaian berita informasi kegunungapian tahun 2011 jenis rambu peringatan bahaya tanah longsor di Kab. Ponorogo dan Pacitan dan rambu peringatan bahaya tsunami di Kab. Malang dan Jember, serta tahun 2012 rambu peringatan bahaya tanah longsor di Kab. Ponorogo dan alat deteksi longsor di Kab. Ponorogo dan Madiun

Selanjutnya penelitian teknis geolistrik untuk memperkirakan keberadaan air tanah dalam lapisan batuan telah dilakukan pada tahun 2011 di Kab. Situbondo dan tahun 2012 dilaksanakan di Kab Lamongan dan Kabupaten Kediri.

Selain itu pembangunan Sumur Bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di daerah sulit air pada tahun 2011 sebanyak 1 unit di Kab. Kediri untuk 200 KK dan tahun 2012 sebanyak 8 unit di Kab. Pamekasan, Sidoarjo, Tulungagung, Mojokerto, Bojonegoro, Lamongan, Tuban dan Lumajang yang dapat memenuhi kebutuhan air bersih untuk 800 KK.

Tabel 2.69
Pembangunan Energi Dan Sumber Daya Mineral Jawa Timur
Tahun 2011 – 2012

NO.	SASARAN/INDIKATOR	2011	2012
1.	Bertambahnya Rumah Tangga yang menggunakan Biogas (1 unit = 7 – 10 KK)	8 unit 56 - 80 KK	5 unit 35 – 50 KK
2.	Bertambahnya Rumah Tangga berlistrik non PLN dari PLTMH	34 KK	300 KK
3.	Bertambahnya jumlah sumur eksplorasi dan Rumah Tangga di daerah sulit air yang terpenuhi kebutuhan air bersih	1 unit 200 KK	8 unit 800 KK

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, 2012

7. Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada hakekatnya adalah prasarat mutlak untuk terselenggaranya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. sebagaimana telah ditetapkan didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah Pasal 27 ayat (1) huruf c adalah memelihara ketertiban dan ketentraman umum, oleh karena itu penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat dilaksanakan pemerintah bersama masyarakat melalui sarana prasarana penyediaan polisi pamong praja, pos siskamling.

Penyelenggaraan pembangunan Bidang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat selama periode 2003-2009 difokuskan pada terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat lingkungan masing-masing dan terwujudnya perlindungan masyarakat dari bencana, unjuk rasa maupun konflik horizontal.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencegahan setiap kegiatan masyarakat paling menonjol adalah kecenderungan pada masyarakat yang semakin individualistis dan kurang memiliki rasa kepekaan sosial serta wawasan kebangsaan yang menurun.

Disamping itu kurangnya regulasi atau aturan yang dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk tindakan preventif sebagai upaya pencegahan setiap kegiatan masyarakat atau kelompok yang mengarah kepada tindakan anarkis, baik secara non fisik (provokatif, brain washing) maupun secara fisik (destruktif).

Namun hal ini dapat dilihat dari kondisi iklim politik dan keamanan di wilayah Jawa Timur meskipun terdapat beberapa persoalan tetapi secara umum tetap kondusif. Ini karena telah dilaksanakannya suatu koordinasi dan kerjasama secara baik antara Pemerintah Provinsi dengan Instansi Vertikal terkait, terutama institusi pemangku kepentingan bidang Keamanan seperti TNI/POLRI maupun dengan Lembaga Non Pemerintah seperti Parpol dan Ormas. Dengan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik tersebut, segala persoalan yang terjadi dapat segera mendapat penanganan secara baik pula, sehingga tidak sampai berkembang menjadi permasalahan yang dapat mengganggu situasi keamanan wilayah atau iklim politik secara umum. Mengingat Jawa Timur merupakan salah satu barometer terpenting Nasional maka kondisi wilayah menjadi salah satu prioritas utama dalam Program Pembangunan Daerah di Jawa Timur.

Dalam rangka peningkatan keamanan dan ketertiban perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Peningkatan Peran Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)
- b. Menjaga dan memelihara efektifitas koordinasi antar pimpinan daerah melalui Forum Pimpinan Daerah dengan jajaran instansi terkait;
- c. Melaksanakan penggalangan kepada para tokoh/pimpinan informal, pemimpin Ormas dan Parpol;
- d. Pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban melalui forum-forum yang sudah dibentuk yaitu Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).

8. Bidang Urusan Pemerintahan umum

Pelayanan Publik sebagai usaha pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat merupakan salah satu fungsi penting pemerintah, selain fungsi distribusi, regulasi maupun proteksi.

Fungsi pelayanan publik tersebut merupakan aktualisasi riil kontrak sosial yang diberikan masyarakat kepada pemerintah. Pelayanan Publik sebagaimana diatur didalam Perda Nomor: 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik dirubah menjadi Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik

Implementasi dari Perda Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

- a. Setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- b. Menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- c. Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai penjabaran SPP;
- d. Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara periodik;
- e. Penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan tanggapan atas pengaduan masyarakat dan dilaporkan Gubernur secara periodik;
- f. Penanganan pengaduan oleh Komisi Pelayanan Publik (KPP) sebagai lembaga independen.

Best Practise Pelayanan Publik di Jawa Timur di antaranya adalah:

a. Provinsi Jawa Timur

- 1) Samsat drive thru, samsat corner, samsat payment point, samsat keliling, samsat delivery, samsat qick response (SQR);
- 2) Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Provinsi Jawa Timur terdiri dari : 17 (tujuh belas) sektor dan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) jenis izin, sebagai uapaya untuk memberikan jawaban terhadap tuntutan berkompetensi menarik investasi PMDN/PMA;
- 3) Pelayanan Rumah Sakit Provinsi:
 - a) Rumah Sakit Dr. Soedono, Madiun
Layanan khusus penyakit stroke, pelayanan tanpa loket dan komunikasi dengan radio khusus
 - b) Rumah Sakit Dr. Soetomo, Surabaya
Rawat inap graha amerta setara hotel bintang lima, layanan sport center khusus atlet, pusat bank jaringan (hanya 2 di Indonesia UI dan RSUD. Dr Soetomo)

- c) Rumah Sakit Haji, Surabaya;
Layanan kosmetik medik, bedah endoscopy, rujukan jemaah haji, cardio vascular invasif
 - d) Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang;
Poli onkologi terpadu, poli estetika, generai cek up, fiber optic diagnostic, pelayanan hemodialisa, pelayanan ESWL
 - e) Rumah Sakit Jiwa Menur, Surabaya
Pelayanan kesehatan jiwa, konsultasi kesehatan jiwa anak, remaja, dan keluarga, pelayanan terapi dan rehabilitasi NAPZA, terapi rumatan metadon.
- 4) Badan Perpustakaan dan Kearsipan
Pelayanan perpustakaan dan arsip berbasis ICT

b. Kabupaten/Kota

- 1) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di 38 Kabupaten/Kota terdiri dari:
- a. Berbentuk Badan : 12
 - b. Berbentuk Kantor : 22
 - c. Berbentuk Unit : 4
- 2) Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah di 38 Kabupaten/Kota sudah mengacu Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit;
- 3) Revitalisasi fungsi puskesmas menjadi pusat rujukan pertama kesehatan masyarakat terdiri dari:
- a. Puskesmas rawat jalan : 524 unit
 - b. Puskesmas rawat inap : 420 unit
 - c. Puskesmas pembantu : 2.297 unit

Tabel 2.70
Instansi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota yang telah memperoleh sertifikat ISO dan yang masih dalam proses sertifikat ISO

No	INSTANSI	Yang Telah Memperoleh sertifikat ISO	Yang masih dalam proses sertifikat ISO	JUMLAH
1	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	100	-	100
2	BUMN/BUMD Provinsi Jawa Timur	16	-	16
3	Pemerintah Kabupaten/Kota	186	25	201
	JUMLAH	292	25	317

Sumber data : Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur

Penghargaan yang diperoleh dalam Pelayananann Publik dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.71
Data Perkembangan Perolehan Penghargaan Percontohan
Unit-Unit Pelayanan Publik di Jatim Tahun 2010 – 2012

NO.	TAHUN	NAMA UNIT PELAYANAN	JENIS PENGHARGAAN	KET.
1	2	3	4	5
	2010 Terbaik	1) Kantor Bersama Samsat Kota Batu	Unit Kerja / Kantor Pelayanan Percontohan Jawa Timur	Instansi Provinsi
		2) SMKN 3 Kota Malang	Unit Kerja / Kantor Pelayanan Percontohan Jawa Timur	Instansi Kab/ Kota
		3) Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Suarabaya	Unit Kerja / Kantor Pelayanan Percontohan Jawa Timur	Instansi Kab/ Kota
		4) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur	Unit Kerja / Kantor Pelayanan Percontohan Jawa Timur	Instansi Provinsi
		5) PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo	Unit Kerja / Kantor Pelayanan Percontohan Jawa Timur	Instansi Kab/ Kota
	Baik	6) SMKN 1 Singosari Kabuapten Malang	Unit Kerja / Kantor Pelayanan Percontohan Jawa Timur	Instansi Kab/ Kota
		7) Puskesmas Pesantren II Kota Kediri	Unit Kerja / Kantor Pelayanan Percontohan Jawa Timur	Instansi Kab/ Kota
		8) SMKN Boyolangu Kabupaten Tulungagung	Unit Kerja / Kantor Pelayanan Percontohan Jawa Timur	Instansi Kab/ Kota
		9) SMAN 2 Kabupaten Lamongan	Unit Kerja / Kantor Pelayanan Percontohan Jawa Timur	Instansi Kab/ Kota
		10) Badan Pelayanan Perizinan Kota Probolinggo	Unit Kerja / Kantor Pelayanan Percontohan Jawa Timur	Instansi Kab/ Kota
		11) Puskesmas Arosbaya Kabupaten Bangkalan	Unit Kerja / Kantor Pelayanan Percontohan Jawa Timur	Instansi Kab/ Kota
		12) RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar	Unit Kerja / Kantor Pelayanan Percontohan Jawa Timur	Instansi Kab/ Kota
		13) PT. BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep	Unit Kerja / Kantor Pelayanan Percontohan Jawa Timur	Instansi Kab/ Kota
		14) Kantor Bersama Samsat Nganjuk	Unit Kerja / Kantor Pelayanan Percontohan Jawa Timur	Instansi Provinsi
		15) SMKN I Kabupaten Situbondo	Unit Kerja / Kantor Pelayanan Percontohan Jawa Timur	Instansi Kab/ Kota
	2011 Terbaik	1) Kantor Bersama Samsat Jember	Unit Kerja / Kantor Pelayanan Percontohan Jawa Timur	Instansi Provinsi

NO.	TAHUN	NAMA UNIT PELAYANAN	JENIS PENGHARGAAN	KET.
1	2	3	4	5
		2) P 2 T Provinsi Jawa Timur	Unit Kerja / Kantor Pelayanan Percontohan Jawa Timur	Instansi Provinsi
		3) Puskesmas Ngempit Kabupaten Pasuruan	Unit Kerja / Kantor Pelayanan Percontohan Jawa Timur	Instansi Kab/ Kota
		4) SMKN 2 Kota Malang	Unit Kerja / Kantor Pelayanan Percontohan Jawa Timur	Instansi Kab/ Kota
	Baik	5) Kantor Bersama Samsat Talangagung	Unit Kerja / Kantor Pelayanan Percontohan Jawa Timur	Instansi Provinsi
		6) UPT Terminal Purabaya Kota Surabaya	Unit Kerja / Kantor Pelayanan Percontohan Jawa Timur	Instansi Kab/ Kota
		7) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya	Unit Kerja / Kantor Pelayanan Percontohan Jawa Timur	Instansi Kab/ Kota
		8) Puskesmas Panekan Kabupaten Magetan	Unit Kerja / Kantor Pelayanan Percontohan Jawa Timur	Instansi Kab/ Kota
		9) Rumah Sakit Paru Jember	Unit Kerja / Kantor Pelayanan Percontohan Jawa Timur	Instansi Provinsi
		10) Puskesmas Banyuwangi Kabupaten Sampang	Unit Kerja / Kantor Pelayanan Percontohan Jawa Timur	Instansi Kab/ Kota
		11) Puskesmas Dau Kabupaten Malang	Unit Kerja / Kantor Pelayanan Percontohan Jawa Timur	Instansi Kab/ Kota
		12) UPTD SMAN 1 Kota Blitar	Unit Kerja / Kantor Pelayanan Percontohan Jawa Timur	Instansi Kab/ Kota
		13) UPTD SMPN 3 Kabupaten Tulungagung	Unit Kerja / Kantor Pelayanan Percontohan Jawa Timur	Instansi Kab/ Kota
		14) SMKN 1 Kabupaten Ngawi	Unit Kerja / Kantor Pelayanan Percontohan Jawa Timur	Instansi Kab/ Kota
		15) SMKN 3 Buduran Kabupaten Sidoarjo	Unit Kerja / Kantor Pelayanan Percontohan Jawa Timur	Instansi Kab/ Kota
	2012 TERBAIK	1) Kantor Bersama SAMSAT Banyuwangi Kota UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur	Unit Kerja / Kantor Pelayanan Percontohan Jawa Timur	Instansi Prov. Jatim
		2) UPT Puskesmas Dinoyo Kota Malang	Unit Kerja / Kantor Pelayanan Percontohan Jawa Timur	Instansi Kab/ Kota
		3) SMPN I Kabupaten Lamongan	Unit Kerja / Kantor Pelayanan Percontohan Jawa Timur	Instansi Kab/ Kota
		4) SMAN 1 Manyar Kabupaten Gresik	Unit Kerja / Kantor Pelayanan Percontohan Jawa Timur	Instansi Kab/ Kota
		5) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magetan	Unit Kerja / Kantor Pelayanan Percontohan Jawa Timur	Instansi Kab/ Kota

NO.	TAHUN	NAMA UNIT PELAYANAN	JENIS PENGHARGAAN	KET.
1	2	3	4	5
	BAIK	6) Kantor Bersama SAMSAT Wlingi UPT Dinas Pendapatan Pro.Jatim	Unit Kerja / Kantor Pelayanan Percontohan Jawa Timur	Instansi Prov. Jatim
		7) RSUD Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan	Unit Kerja / Kantor Pelayanan Percontohan Jawa Timur	Instansi Kab/ Kota
		8) UPT. Puskesmas Tumpang Kabupaten Malang	Unit Kerja / Kantor Pelayanan Percontohan Jawa Timur	Instansi Kab/ Kota
		9) RSUD Gambian Kota Kediri	Unit Kerja / Kantor Pelayanan Percontohan Jawa Timur	Instansi Kab/ Kota
		10) SMKN 1 Pogalan Kabupaten Trenggalek	Unit Kerja / Kantor Pelayanan Percontohan Jawa Timur	Instansi Kab/ Kota
		11) SMAN 2 Kabupaten Jombang	Unit Kerja / Kantor Pelayanan Percontohan Jawa Timur	Instansi Kab/ Kota
		12) UPT Pelatihan Kerja Pare Kediri Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur	Unit Kerja / Kantor Pelayanan Percontohan Jawa Timur	Instansi Kab/ Kota
		13) Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep	Unit Kerja / Kantor Pelayanan Percontohan Jawa Timur	Instansi Kab/ Kota
		14) UPTD Puskesmas Pagu Kabupaten Kediri	Unit Kerja / Kantor Pelayanan Percontohan Jawa Timur	Instansi Kab/ Kota
		15) SMKN 1 Kabupaten Banyuwangi	Unit Kerja / Kantor Pelayanan Percontohan Jawa Timur	Instansi Kab/ Kota
		16) Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo	Unit Kerja / Kantor Pelayanan Percontohan Jawa Timur	Instansi Kab/ Kota
		17) UPTD SMKN 2 Boyolangu Kabupaten Tulungagung	Unit Kerja / Kantor Pelayanan Percontohan Jawa Timur	Instansi Kab/ Kota
		18) RSUD dr.Moh.Saleh Kota Probolinggo	Unit Kerja / Kantor Pelayanan Percontohan Jawa Timur	Instansi Kab/ Kota
		19) SMKN 1 Pasirian Kabupaten Lumajang	Unit Kerja / Kantor Pelayanan Percontohan Jawa Timur	Instansi Kab/ Kota
		20) UPTD Puskesmas Tambakboyo Kabupaten Tuban	Unit Kerja / Kantor Pelayanan Percontohan Jawa Timur	Instansi Kab/ Kota

Sumber data : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

c. UPT P2T (Pelayanan Perizinan Terpadu)

Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) lingkup Provinsi Jawa Timur yang system dan prosedur pelayanan perizinannya menjadi satu pintu di UPT P2T Provinsi Jawa Timur. Cakupan pokok pelayanan yang diberikan sebanyak 177 izin terdiri dari 17 sektor, meliputi:

a. Perencanaan Pembangunan	=	1	izin
b. Penanaman Modal	=	7	izin
c. Kesehatan	=	26	izin
d. Bina Marga	=	1	izin
e. Pengairan	=	2	izin
f. Perhubungan & LLAJ	=	56	izin
g. Sosial	=	4	izin
h. Tenaga Kerja	=	2	izin
i. Koperasi & UMKM	=	6	izin
j. Kebudayaan & Pariwisata	=	5	izin
k. Pertanian	=	3	izin
l. Peternakan	=	14	izin
m. Perikanan & Kelautan	=	11	izin
n. Kehutanan	=	7	izin
o. Energy & Sumber Daya mineral	=	20	izin
p. Perindustrian & Perdagangan	=	10	izin
q. Lingkungan Hidup	=	4	izin
<hr/>			
Total	=	177	izin

Kinerja UPT P2T BPM Provinsi Jawa Timur

Kinerja UPT Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) BPM Provinsi Jawa Timur dalam proses pelayanan **Perizinan dan Non Perizinan** sejak terbentuk awal Maret 2010 hingga akhir Desember 2010, adalah:

- a. Jumlah Perizinan dan Non Perizinan = 25.231 izin
- b. Jumlah Investasi yang tercatat = Rp. 5.558.615.016.000
- c. Penyerapan Tenaga Kerja = 37.716 orang

Kinerja UPT Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) BPM Provinsi Jawa Timur, periode tahun Januari s/d Desember 2011 adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah Perizinan dan Non Perizinan = 28.522 izin
- b. Jumlah Investasi yang tercatat = Rp. 20.529.335.849.253
- c. Penyerapan Tenaga Kerja = 47.284 orang

Sedangkan kinerja UPT P2T Provinsi Jawa Timur, periode Januari s/d 30 Maret 2012, adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah Perizinan dan Non Perizinan = 8.399 izin
- b. Jumlah Investasi yang tercatat = Rp. 4.532.602.379.720
- c. Penyerapan Tenaga Kerja = 24.314 orang

Sertifikat dan Penghargaan/Prestasi UPT P2T yang telah diperoleh:

UPT P2T dengan tim Unit Reaksi Cepat (URC) telah mendapatkan Sertifikat Pelayanan dengan **Sistem Manajemen Mutu berstandart Internasional ISO 9001 - 2008** dari **WQA (Worldwide Quality Assurance)**.

Sedangkan penghargaan yang telah diperoleh:

- a. **Stand Pameran Berpenampilan Terbaik** pada Gelar Pameran Pelayanan Publik Jawa Timur 2010 di Malang tanggal 11 April 2010.
- b. **Invesment Award** pada Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal Terbaik Tahun 2010 tanggal 04 November 2010.
- c. **Stand Pameran dengan Predikat Sangat Memuaskan** pada Gelar Pameran Pelayanan Publik dan Budaya Kerja 2011 Provinsi Jawa Timur di Madiun tanggal 01 Oktober 2011.
- d. **Predikat Terbaik II Kategori Kelompok Pelayanan Administrasi dan Umum** pada Kegiatan Unit Pelayanan Percontohan Publik Tingkat Provinsi Jawa Timur tanggal 29 November 2011.

9. Bidang Urusan lingkungan hidup

Dalam rangka pelayanan umum bidang lingkungan hidup, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup guna pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup. Adapun indicator yang menunjukkan hasil kinerja pembangunan lingkungan hidup adalah Penurunan Beban Pencemaran Air Sungai Brantas untuk parameter BOD (Biological Oxygen Demand) pada tahun 2012 adalah sebesar 3,67 mg/l dari tahun 2011 sebesar 4,41 mg/l atau menurun sebesar 17,7% dan untuk parameter COD (Chemical Oxygen Demand) pada tahun 2012 adalah sebesar 9,5 mg/l dari tahun 2011 sebesar 15,47% atau menurun sebesar 39,98%. Berdasarkan hasil tersebut, capain hasil pada tahun 2012 telah mencapai target penurunan beban pencemaran air Sugai Brantas dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 15%.

Berdasarkan data hasil pengujian kualitas air Sungai Brantas yang dilaksanakan oleh Perum Jasa Tirta I Malang, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur pada ruas Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas Hulu, Tengah dan Hilir pada tahun 2011 dan 2012 telah disepakati bahwa hasil analisa kualitas Air Badan Air (ABA) pada titik pantau terlengkap dipergunakan sebagai acuan perhitungan rata-rata kualitas air.

Adapun perhitungan rata-rata kualitas air rata-rata tahunan sebagai indicator kinerja yang digunakan adalah parameter BOD (Biological Oxygen Demand) dan COD (Chemical Oxygen Demand) sebagai parameter kunci yang dihitung berdasarkan titik pantau sebagai berikut:

- a. Segmen Brantas Hulu
Lokasi waduk Lodooyo – Jembatan Pandem di Kab. Blitar, Malang, Kota Malang dan Kota Batu
- b. Segmen Brantas Tengah
Lokasi Jembatan Ngujang – Jembatan Padangan di Kab. Tulungagung, Nganjuk, Jombang, Kota Kediri dan Kota Mojokerto.
- c. Segmen Brantas Hilir
Lokasi Jembatan Cangu – Jagir di Kabupaten Mojokerto, Gresik dan Kota Surabaya.

Sesuai hasil perhitungan rata-rata kondisi kualitas air DAS Brantas yang telah disepakati bersama berdasarkan kondisi dan pertimbangan musim penghujan, kemarau, lokasi titik pantau, maka yang paling relevan diperoleh hasil rata-rata tahun 2011 – 2012 sebagai berikut :

Tabel 2.72
Kualitas Air Sungai Brantas Tahun 2011 – 2012

No	Segmen	Tahun 2011		Tahun 2012	
		Parameter (mg/l)		Parameter (mg/l)	
		BOD	COD	BOD	COD
1	DAS Brantas Hulu	3.96	10.71	3,50	9,28
2	DAS Brantas Tengah	3.89	12.39	3,46	8,95
3	DAS Brantas Hilir	5.38	23.30	4,06	10,34
	Rata-rata	4.41	15.47	3.67	9.5

Sumber : Badan Lingkungan Hidup, 2012

Terlihat bahwa kualitas air Sungai Brantas pada tahun 2012 di seluruh segmen yakni hulu, tengah dan hilir meningkat dari tahun sebelumnya. Namun kualitas air dimaksud belum memenuhi Baku Mutu Lingkungan (BML) sebagaimana dimuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, yaitu parameter BOD sebesar 2 mg/l dan COD sebesar 10 mg/l. Hal ini berarti bahwa upaya-upaya pengendalian pencemaran air yang berasal dari berbagai sumber pencemar, baik domestik (rumah tangga), kegiatan pertanian maupun industri, perlu terus dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas air Sungai Brantas pada masa yang akan datang.

10. Bidang Urusan Perpustakaan

Minat baca masyarakat adalah suatu cermin sikap dari masyarakat terhadap kemauan untuk mengetahui segala sesuatu informasi melalui media baca. Ditinjau dari segi pengamatan global tentang minat baca masyarakat, secara kasar sebenarnya masyarakat Jawa Timur minat bacanya cukup tinggi, Hal ini bisa dilihat dari antusias masyarakat terhadap pemanfaatan perpustakaan, taman bacaan, sudut baca, rumah baca dan sejenisnya selalu ramai dikunjungi masyarakat, akan tetapi kalau kita amati lebih seksama ternyata masyarakat tersebut memanfaatkan jasa perpustakaan hanyalah untuk mengisi waktu luang dan bacaanya isinya tentang info-info yang ringan saja, belum menyentuh kepada bacaan-bacaan yang membuat masyarakat menjadi kreatif dan inovatif, hanya kalangan masyarakat tertentu seperti akademisi, peneliti, pelajar dan mahasiswa yang mengkonsumsi bacaan-bacaan ilmiah. Oleh karena itu perlu adanya upaya dalam Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan yang bertujuan untuk mengembangkan, mempublikasikan dan mensosialisasikan minat dan budaya baca, dengan menyediakan bahan pustaka, pembinaan SDM Perpustakaan.

Tabel 2.73
Jumlah dan Jenis Perpustakaan di Jawa Timur Tahun 2012

No.	Perpustakaan	Jumlah
1	Perpustakaan Desa	1.889
2	Perpustakaan Sekolah Dasar (SD)	12.450
3	Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama (SLTP)	3.333
4	Perpustakaan Sekolah Menengah Atas (SLTA)	2.163
5	Perpustakaan Perguruan Tinggi (PT)	305
6	Perpustakaan Umum	39
7	Perpustakaan Keliling	92

Sumber : Badan Perpustakaan dan Kearsipan Prov Jatim

11. Bidang Urusan Penataan ruang

Tingkat kualitas hidup suatu kota, pada dasarnya dapat ditentukan berdasarkan ketersediaan fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Tercukupinya fasilitas umum yang dapat dijangkau oleh semua masyarakat, mengindikasikan bahwa semakin baik kualitas hidup masyarakat di perkotaan tersebut. Salah satu fasilitas umum perkotaan yang digunakan sebagai indikator dalam mengetahui kualitas hidup perkotaan adalah ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH). Perkotaan dengan kualitas hidup baik adalah perkotaan yang menyediakan RTH sesuai dengan kebutuhan penduduknya, atau minimal sesuai dengan standar minimum tertentu, agar setiap penduduk dapat memanfaatkan fasilitas tersebut dengan mudah.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan telah menetapkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% dari total luas kota, dengan komposisi 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Ruang Terbuka Hijau di Provinsi Jawa Timur tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Kebutuhan RTH kawasan perkotaan di wilayah Jawa Timur adalah paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan, yang diisi oleh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Distribusi RTH kawasan perkotaan disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah.

Tabel 2.74
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah
Tahun 2011 s.d 2012 Provinsi Jawa Timur

No	Uraian	Tahun 2011 (Ha)	Tahun 2012* (Ha)
1.	Luas Ruang Terbuka Hijau	103.545,50	106.131.07
2.	Luas Kawasan Perkotaan	542.770,48	542.770,48
3.	Luas Wilayah	4.779.975	4.779.975
4.	Rasio Ruang Terbuka Hijau (1:2)	0,1907	0,1955

Sumber: Rekapitulasi RTRW Kabupaten/ Kota Se Jatim (*Angka bersifat sementara)

Kebutuhan RTH 30 % merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota/kawasan perkotaan, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem mikroklimat, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota/ kawasan perkotaan. Pembagian luasan RTH publik seluas minimal 20 % dan privat 10 % yang disediakan dimaksudkan agar pembagian luasan RTH minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya, sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat.

Tabel 2.75
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah
Tahun 2012 Provinsi Jawa Timur

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah	Luas Kawasan Perkotaan	Luas RTH	Rasio RTH* 6=5/4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pacitan	138,992.00	7,710.80	2,290.53	0.2971
2	Ponorogo	130,570.00	5,119.91	463.00	0.0904
3	Trenggalek	114,722.00	6,116.00	1,313.00	0.2147
4	Tulungagung	105,565.00	29,934.00	2,410.00	0.0805
5	Blitar	133,648.00	29,790.00	3,276.00	0.1100
6	Kediri	138,605.00	15,090.00	2,115.00	0.1402
7	Malang	353,065.00	14,440.92	3,277.00	0.2269
8	Lumajang	179,090.00	5,728.01	32.49	0.0057
9	Jember	309,234.00	73,038.00	8,034.68	0.1100
10	Banyuwangi	578,240.00	15,323.33	1,839.00	0.1200
11	Bondowoso	152,597.00	2,315.80	2,157.50	0.9316
12	Situbondo	166,987.00	17,672.00	1,591.00	0.0900
13	Probolinggo	169,621.00	3,779.75	255.00	0.0675
14	Pasuruan	147,402.00	19,086.00	5,725.94	0.3000
15	Sidoarjo	63,438.00	14,425.30	2,452.75	0.1700
16	Mojokerto	71,783.00	2,665.00	725.00	0.2720
17	Jombang	111,509.00	3,640.00	585.00	0.1607
18	Nganjuk	122,425.00	7,140.00	2,345.20	0.3285
19	Madiun	103,758.00	2,026.40	1,381.00	0.6815
20	Magetan	68,884.00	17,407.10	5,222.13	0.3000
21	Ngawi	129,598.00	40,472.00	12,142.50	0.3000
22	Bojonegoro	219,879.00	10,362.71	3,108.83	0.3000
23	Tuban	183,415.00	12,439.49	4,882.52	0.3925
24	Lamongan	178,205.00	2,951.00	183.00	0.0620
25	Gresik	119,125.00	554.29	166.45	0.3003
26	Bangkalan	100,144.00	8,885.00	1,988.67	0.2238

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah	Luas Kawasan Perkotaan	Luas RTH	Rasio RTH* 6=5/4
27	Sampang	123,308.00	26,568.00	7,879.50	0.2966
28	Pamekasan	79,224.00	25,035.00	7,736.00	0.3090
29	Sumenep	199,854.00	35,966.67	10,790.00	0.3000
30	Kota Kediri	6,340.00	6,340.00	820.00	0.1293
31	Kota Blitar	3,257.00	3,257.00	836.00	0.2567
32	Kota Malang	14,528.00	14,528.00	224.52	0.0155
33	Kota Probolinggo	5,667.00	5,667.00	173.00	0.0305
34	Kota Pasuruan	3,529.00	3,529.00	274.64	0.0778
35	Kota Mojokerto	1,647.00	1,647.00	329.60	0.2001
36	Kota Madiun	3,392.00	3,392.00	350.00	0.1032
37	Kota Surabaya	35,054.00	35,054.00	6,610.00	0.1886
38	Kota Batu	13,674.00	13,674.00	144.62	0.0106
TOTAL		4.779.975	542.770,48	106.131.07	0,1955

Sumber: Rekapitulasi RTRW Kabupaten/Kota Se Jatim (*Angka bersifat sementara)

Kondisi ruang terbuka hijau di Jawa Timur pada tahun 2012 mencapai 19,55% dan mengalami kenaikan 19,07% dibandingkan tahun 2011. Perwujudan RTH perkotaan bukan sebatas kegiatan yang hanya menunjang keindahan kota tetapi diharapkan dengan menambah luasan RTH eksisting dapat menunjang kualitas lingkungan hidup perkotaan, karena itu tidak diperkenankan untuk menggunakan lokasi peruntukan RTH yang sudah ada. Keberadaan luasan kawasan RTH yang sudah ada diharapkan dapat menjadi stimulus munculnya RTH-RTH baru dikawasan perkotaan lainnya, oleh karena itu maka lokasi RTH baru dipersyaratkan tersebar pada lahan strategis dikawasan perkotaan.

12. Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan

Dari data yang telah dihimpun sebanyak 30 Kabupaten/Kota di Jawa Timur atau sebanyak 78,95 persen telah mempunyai RPJPD yang telah ditetapkan Perda sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.76
Ketersediaan Dokumen RPJPD

Kabupaten/Kota	Tersedia	Tidak tersedia
(1)	(2)	(3)
Kabupaten		
1 Pacitan	√	
2 Ponorogo	√	
3 Trenggalek	√	
4 Tulungagung	√	
5 Blitar	√	
6 Kediri		√
7 Malang	√	
8 Lumajang		√
9 Jember		√

Kabupaten/Kota	Tersedia	Tidak tersedia
10 Banyuwangi	√	
11 Bondowoso	√	
12 Situbondo		√
13 Probolinggo	√	
14 Pasuruan	√	
15 Sidoarjo	√	
16 Mojokerto	√	
17 Jombang	√	
18 Nganjuk	√	
19 Madiun	√	
20 Magetan	√	
21 Ngawi		√
22 Bojonegoro	√	
23 Tuban		√
24 Lamongan	√	
25 Gresik	√	
26 Bangkalan	√	
27 Sampang	√	
28 Pamekasan		√
29 Sumenep	√	
Kota		
71 Kediri		√
72 Blitar	√	
73 Malang	√	
74 Probolinggo	√	
75 Pasuruan	√	
76 Mojokerto	√	
77 Madiun	√	
78 Surabaya	√	
79 Batu	√	
Jawa Timur	√	

Dan untuk ketersediaan Dokumen Perencanaan RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA Dari data yang telah dihimpun sebanyak 36 Kabupaten/Kota di Jawa Timur atau sebanyak 94,74 persen telah mempunyai RPJMD yang telah ditetapkan Perda sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.77
Ketersediaan Dokumen RPJMD

Kabupaten/Kota	Tersedia	Tidak tersedia
(1)	(2)	(3)
Kabupaten		
1 Pacitan	√	
2 Ponorogo	√	
3 Trenggalek	√	
4 Tulungagung	√	
5 Blitar	√	
6 Kediri	√	
7 Malang	√	
8 Lumajang	√	
9 Jember		√
10 Banyuwangi	√	
11 Bondowoso	√	
12 Situbondo	√	
13 Probolinggo	√	
14 Pasuruan	√	
15 Sidoarjo	√	

Kabupaten/Kota	Tersedia	Tidak tersedia
16 Mojokerto	√	
17 Jombang	√	
18 Nganjuk	√	
19 Madiun	√	
20 Magetan	√	
21 Ngawi	√	
22 Bojonegoro	√	
23 Tuban	√	
24 Lamongan	√	
25 Gresik	√	
26 Bangkalan	√	
27 Sampang	√	
28 Pamekasan	√	
29 Sumenep	√	
Kota		
71 Kediri	√	
72 Blitar	√	
73 Malang	√	
74 Probolinggo	√	
75 Pasuruan	√	
76 Mojokerto	√	
77 Madiun	√	
78 Surabaya	√	
79 Batu	√	
Jawa Timur	√	

Sebagai catatan, Provinsi Jawa Timur sudah mempunyai RPJMD yang ditetapkan Pergub/Perkada karena pada saat pengesahannya masih belum mengacu pada Permendagri No 54 Tahun 2010.

Kemudian untuk Ketersediaan Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA, dari data yang telah dihimpun sebanyak 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur atau sebanyak 100 persen telah mempunyai RKPD yang telah ditetapkan Perkada sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.78
Ketersediaan Dokumen RKPD

Kabupaten/Kota	Tersedia	Tidak tersedia
(1)	(2)	(3)
Kabupaten		
1 Pacitan	√	
2 Ponorogo	√	
3 Trenggalek	√	
4 Tulungagung	√	
5 Blitar	√	
6 Kediri	√	
7 Malang	√	
8 Lumajang	√	
9 Jember	√	
10 Banyuwangi	√	
11 Bondowoso	√	
12 Situbondo	√	
13 Probolinggo	√	
14 Pasuruan	√	
15 Sidoarjo	√	
16 Mojokerto	√	

Kabupaten/Kota	Tersedia	Tidak tersedia
17 Jombang	√	
18 Nganjuk	√	
19 Madiun	√	
20 Magetan	√	
21 Ngawi	√	
22 Bojonegoro	√	
23 Tuban	√	
24 Lamongan	√	
25 Gresik	√	
26 Bangkalan	√	
27 Sampang	√	
28 Pamekasan	√	
29 Sumenep	√	
Kota		
71 Kediri	√	
72 Blitar	√	
73 Malang	√	
74 Probolinggo	√	
75 Pasuruan	√	
76 Mojokerto	√	
77 Madiun	√	
78 Surabaya	√	
79 Batu	√	
Jawa Timur	√	

13. **Penanaman modal**
a. Perkembangan I C O R

Apabila produksinya ingin dapat berjalan lancar, maka suatu perusahaan harus memperhatikan kondisi perekonomian secara makro dengan membuat keputusan mengenai stok berdasarkan kondisi tersebut. Misalnya : dengan adanya kenaikan bahan baku maka perusahaan melakukan penimbunan bahan baku.

Tabel 2.79
ICOR Jawa Timur
Tahun 2008-2012

Tahun	ICOR
(1)	(2)
2008	3,03
2009	3,59
2010	3,28
2011*	3,01
2012**	2,92

Jika hal tersebut dilakukan, maka perubahan stok dapat dimasukkan sebagai komponen pembentukan modal (investasi). Dalam pendekatan mikro, diasumsikan, perusahaan tidak melakukan penimbunan atau akumulasi stok baik untuk bahan baku, barang setengah jadi maupun barang jadi untuk kelancaran produksi.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, hasil penghitungan ICOR (tabel 4.13.) tahun 2008 mencapai angka 3,03. Sementara dari tahun 2009 sampai tahun 2011 masing-masing angka ICOR sebesar 3,59; 3,28 dan 3,01.

Sedangkan pada tahun 2012 ICOR Jawa Timur mencapai 2,92. Secara umum ICOR negara-negara sedang berkembang berkisar antara 2,0 sampai 5,0. Sementara 5 (lima) tahun terakhir ini ICOR Jawa Timur rata-rata per tahun sebesar 3,07. Angka tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata investasi yang ditanamkan cukup efisien.

Pada tahun 2012 angka ICOR Jawa Timur sebesar 2,92, artinya untuk mendapatkan tambahan output sebesar 1 unit diperlukan investasi sekitar 2,92 unit. Dibandingkan dengan ICOR tahun sebelumnya yang mencapai 3,01, maka dapat dikatakan bahwa setiap penambahan 1 unit output memerlukan investasi sebesar kurang lebih 3,01 unit. Pernyataan di atas dapat diartikan untuk meningkatkan PDRB ADHK sebesar 1 milyar rupiah pada tahun 2011 diperlukan investasi sebesar 3,01 milyar rupiah. Sedangkan untuk meningkatkan PDRB ADHK sebesar 1 milyar rupiah pada tahun 2012 diperlukan investasi sebesar 2,92 milyar rupiah. Hal ini juga dapat diartikan bahwa efisiensi permodalan 2012 relatif lebih baik dibanding tahun 2011. Dimungkinkan salah satu penyebabnya adalah dampak tidak langsung akibat dari semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2012 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

b. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Dari tahun ke tahun jumlah investor yang menanamkan modalnya di Jawa Timur semakin meningkat baik dari penanam modal dalam negeri (PMDN) maupun penanam modal asing (PMA). Seperti halnya dengan tahun-tahun sebelumnya, dalam paparan ini banyaknya investor juga diukur berdasarkan jumlah proyek yang disetujui oleh pemerintah Jawa Timur.

Proyek yang disetujui pemerintah Jawa Timur selama tahun 2008 sebanyak 127 buah yang terdiri dari PMDN 34 perusahaan dan PMA 93 perusahaan. Untuk perusahaan PMA terbanyak bergerak di bidang usaha Perdagangan dan Reparasi, sedangkan PMDN lebih cenderung di bidang usaha industri Logam, Mesin dan Elektronik. Pada tahun

2009 jumlah proyek yang disetujui atau dengan kata lain jumlah investor yang proyeknya disetujui di Jawa Timur mengalami peningkatan menjadi 132 perusahaan yang terdiri dari PMDN 36 perusahaan dan PMA 96 perusahaan. Sama dengan tahun sebelumnya sebanyak 43 perusahaan PMA menanamkan modalnya di bidang usaha Perdagangan dan Reparasi, sementara PMDN lebih cenderung berusaha di bidang industri Kimia dan Farmasi dengan jumlah 10 perusahaan.

Tabel 2.80
Perkembangan Jumlah Investor (Perusahaan)
Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Tahun 2008-2012

Tahun	Sumber Modal					
	PMDN		PMA		TOTAL	
	Jumlah	Pertumbuhan (%)	Jumlah	Pertumbuhan (%)	Jumlah	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2008	34	61,90	93	10,71	127	20,95
2009	36	5,88	96	3,23	132	3,94
2010	88	144,44	114	18,75	202	53,03
2011	115	30,68	174	52,63	289	43,07
2012	355	208,70	195	12,07	550	90,31

Sumber : Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur

Tahun 2010 jumlah investor yang berminat menanamkan modalnya di Jawa Timur semakin meningkat. Kenaikan jumlah investor tahun ini mencapai lebih dari 50 persen bila dibanding tahun sebelumnya (2009) yang mengalami kenaikan hanya sebesar 3,94 persen. Banyaknya proyek yang disetujui oleh pemerintah Jawa Timur di tahun 2010 sebanyak 202 perusahaan yang juga tetap di dominasi oleh penanam modal asing (PMA) dengan capaian 114 perusahaan, penanam modal dalam negeri (PMDN) 88 perusahaan. Di tahun ini baik PMA maupun PMDN lebih mempercayakan modalnya pada bidang usaha yang sama yaitu industri Makanan dengan besaran masing-masing sebanyak 25 perusahaan. Pada tahun 2011 jumlah investor mengalami peningkatan yang cukup signifikan, ada sekitar 289 perusahaan yang berminat menanamkan modalnya di Jawa Timur baik PMA maupun PMDN yang terdiri dari 115 perusahaan PMDN dan

PMA 174 perusahaan. Jika dibanding dengan jumlah investor tahun sebelumnya, tahun ini lebih besar sekitar 87 perusahaan. Dari jumlah investor tersebut sebagian besar lebih cenderung menanamkan modalnya di sektor yang sama dengan tahun 2010 yaitu industri Makanan dengan jumlah 34 perusahaan PMDN dan 47 perusahaan PMA. Sedangkan pada tahun 2012 jumlah investor yang proyeknya disetujui pemerintah Jawa Timur mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu hampir dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya sehingga mencapai 550 perusahaan atau naik sebesar 90,31 persen dengan rincian PMDN 355 perusahaan dan PMA 195 perusahaan. Dari investor-investor tersebut baik PMDN maupun PMA pada tahun ini lebih cenderung bergerak di sektor industri Makanan yaitu masing-masing sebesar 46 perusahaan PMDN dan 44 perusahaan PMA. Sementara posisi kedua terbanyak untuk PMDN lebih dominan bergerak di sektor industri Karet dan Plastik yang mencapai 45 perusahaan, sedangkan PMA lebih cenderung di sektor Perdagangan dan Reparasi yang jumlahnya sekitar 29 perusahaan. Jumlah investor yang dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat dimungkinkan dipicu dengan adanya kemudahan-kemudahan di dalam proses perijinan dan sebagainya dari pemerintah Jawa Timur sehingga membuat investor menjadi tertarik untuk menanamkan modalnya.

c. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA) besaran nilai investasinya menunjukkan angka yang variatif. Pada tahun 2008 nilai investasi dari modal dalam negeri maupun modal asing mengalami peningkatan yang sangat signifikan terutama PMA yaitu masing-masing sebesar 19,20 persen (PMDN) dan 203,76 persen (PMA) dibanding tahun 2007. Kemudian di tahun 2009 nilai investasi mengalami peningkatan sebesar 19,86 persen. Jika dilihat sumbernya maka peningkatan nilai investasi tersebut hanya terjadi pada perusahaan PMDN dengan kenaikan sebesar 27,58 persen sehingga nilai investasi menjadi Rp.25.495.226 juta, sementara PMA nilai

investasinya justru terjadi sebaliknya yaitu mengalami penurunan sekitar 39,60 persen sehingga nilai investasinya menjadi 1.561.787 ribu US\$. Setahun kemudian tepatnya pada tahun 2010 PMDN maupun PMA mengalami peningkatan yang cukup berarti, dimana PMDN naik hampir dua kali lipat dari kenaikan PMA. Untuk PMDN kenaikannyatembus ke angka 61,42persen, sedangkan PMA naik sebesar 31,50 persen. Tahun 2011 angka realisasi penanam modal dalam negeri mengalami penurunan sebesar 36,02 persen jika dibanding tahun sebelumnya, dilain sisi untuk penanam modal asing justru meningkat cukup signifikan hingga mencapai tiga digit yaitu naik sebesar 141,77 persen. Setahun kemudian (2012) nilai investasi yang bersumber dari Penanam Modal Dalam Negeri mengalami peningkatan yang sangat berarti hingga mencapai 76,49 persen, namun untuk nilai investasi yang bersumber dari Modal Asing justru mengalami kontraksi sebesar 31,96 persen. Turun naiknya nilai investasi tersebut menggambarkan aktivitas investasi di Jawa Timur, walaupun terjadi pelemahan terutama bagi Penanam Modal Dalam Negeri namun dilain sisi terjadi sebaliknya bagi Penanam Modal Asing. Begitu pula sebaliknya, jika terjadi pelemahan bagi Penanam Modal Asing maka akan terjadi sebaliknya bagi Penanam Modal Dalam Negeri. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna meningkatkan investasi, yaitu jaminan permasalahan tanah, buruh, energi listrik dan kemudahan perijinan. Selain itu, Gubernur Jawa Timur telah menetapkan percepatan infrastruktur yang difokuskan pada peningkatan kapasitas Pelabuhan Tanjung Perak, penambahan runway Bandara Internasional Juanda dan mempercepat pembangunan jalan tol pengganti di wilayah Porong Sidoarjo. Bagi investor dalam negeri, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berusaha memfasilitasi kerjasama perdagangan, investasi dan pariwisata dengan pengembangan sisters-province dalam dan luar negeri, yang ditunjang dengan penyediaan layanan informasi online di website dan melakukan pelayanan perijinan investasi

antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
(Kajian Ekonomi Regional Jawa Timur).

Tabel 2.81
Perkembangan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Tahun 2008-2012

Tahun	Sumber Modal			
	PMDN (000 000 Rp)		PMA (000 US \$)	
	Abs	%	Abs	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2008	19.912.810	19,20	2.585.906	203,76
2009	25.405.226	27,58	1.561.787	-39,60
2010	41.009.462	61,42	2.053.716	31,50
2011	26.239.621	-36,06	4.965.233	141,77
2012	46.310.912	76,49	3.378.129	-31,96

Sumber : Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Pertanian

a. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal

Lainnya per Hektar

Pertanian adalah sektor yang paling strategis, terutama sub sektor tanaman pangan, karena disamping paling banyak menyerap tenaga kerja juga merupakan sumber makanan pokok penduduk Indonesia. Dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sektor pertanian memberikan sumbangan yang besar. Pemerintah cukup banyak membuat kebijakan di sektor ini, dalam rangka mendukung kemajuan pembangunan sektor ini dalam hal peningkatan produksi, karena keberhasilan pembangunan sektor pertanian akan memberikan dampak yang sangat besar untuk seluruh masyarakat. Untuk mengamati perkembangan sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan dibutuhkan informasi yang berupa data tentang hasil produksi tanaman pangan.

Di Jawa Timur, beras adalah bahan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk. Oleh karenanya, beras menjadi komoditas strategis dan politis dalam pembangunan nasional secara umum, khususnya dalam pembangunan

sektor pertanian di Jawa Timur. Keberadaannya menjadi suatu keharusan sehingga pemerintah senantiasa menitikberatkan perhatiannya pada jenis komoditas ini.

Angka Sementara (ASEM) produksi padi Provinsi Jawa Timur tahun 2012 sebesar 12,20 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) naik sebesar 1,62 juta ton (15,34 persen) dibanding Angka Tetap (ATAP) produksi Padi tahun 2011 yang sebesar 10,58 juta ton GKG. Kenaikan produksi ini disebabkan naiknya luas panen seluas 48,92 ribu hektar (2,54 persen) dan naiknya produktivitas sebesar 6,85 kuintal/hektar (12,48 persen). Tahun 2011 dibandingkan dengan tahun sebelumnya produksi mengalami penurunan yang cukup tinggi yaitu sekitar 9,17 persen yang semula meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 3,4 persen dengan produksi padi sebesar 11.643.773 ton pada tahun 2010 sedangkan produksi padi pada tahun 2011 hanya mencapai 10.576.543 ton. Pada periode 2008-2011 produksi padi mampu melebihi 10 juta ton GKG per tahunnya, bahkan peningkatan produksi padi pada tahun 2008 sangat fantastis bila dibandingkan dengan kenaikan produksi tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan produksi pada tahun tersebut berkat kebijakan pemerintah pusat yang mencanangkan program P2BN (Peningkatan Produksi Beras Nasional). Propinsi Jawa Timur dalam program P2BN tersebut ditargetkan untuk mencapai produksi beras mencapai 1 juta ton, atau separuh dari target peningkatan produksi yang ditargetkan secara nasional sebesar 2 juta ton. Secara umum tahun 2008-2012 produksi padi cenderung meningkat hanya di tahun 2011 yang mengalami penurunan.

Tabel 2.82
Luas panen, Produktivitas, dan Produksi Padi
Di Jawa Timur Menurut Subround , Tahun 2008 – 2012

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012 (ASEM)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Luas Panen (ha)					
- Januari – April	942.290	1.015.125	954.592	1.020.369	1.016.682
- Mei – Agustus	607.504	649.564	677.127	651.657	692.942

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012 (ASEM)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
- September - Desember	225.090	240.141	332.264	254.770	266.095
- Januari - Desember	1.774.884	1.904.830	1.963.983	1.926.796	1.975.719
2. Produktivitas (ku/ha)					
- Januari – April	61,09	60,00	60,93	55,89	62,04
- Mei – Agustus	57,56	58,34	56,28	48,82	59,52
- September - Desember	54,29	57,45	60,71	66,44	66,4
- Januari - Desember	59,02	59,11	59,29	54,89	61,74
3. Produksi (ton)					
- Januari - April	5.756.024	6.090.264	5.815.944	5.702.413	6.307.444
- Mei - Agustus	3.496.843	3.789.296	3.810.657	3.181.432	4.124.461
- September - Desember	1.221.906	1.379.526	2.017.172	1.692.698	1.766.802
- Januari - Desember	10.474.773	11.259.086	11.643.773	10.576.543	12.198.707

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

b. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Sektor pertanian mencakup sub sektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Dari hasil penghitungan tahun 2012 total nilai PDRB sektor pertanian sebesar Rp. 154,46 triliun atau dengan kontribusi sebesar 15,42 persen terhadap total nilai PDRB Jawa Timur. Apabila dilihat pada masing-masing subsektor, penyumbang terbesar adalah subsektor tanaman bahan makanan sebesar 8,05 persen, disusul subsektor peternakan 3,01 persen dan subsektor perkebunan 2,03 persen.

Tabel 2.83
Struktur Perekonomian Jawa Timur
Tahun 2008 – 2012 (%)

Sektor/Subsektor	2008	2009	2010	2011*)	2012**)
1. Pertanian	16,55	16,34	15,75	15,39	15,42
1.1. Tanaman Bahan Makanan	8,89	8,73	8,37	8,08	8,05
1.2. Tanaman Perkebunan	2,20	2,18	2,07	2,04	2,03
1.3. Peternakan	3,07	3,07	2,99	3,00	3,01

Sektor/Subsektor	2008	2009	2010	2011*)	2012**)
1.4. Kehutanan	0,29	0,29	0,33	0,35	0,41
1.5. Perikanan	2,09	2,07	1,99	1,92	1,92
2. Pertambangan Dan Penggalian	2,22	2,22	2,19	2,24	2,08
3. Industri Pengolahan	28,47	28,14	27,49	27,13	27,11
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	1,58	1,55	1,51	1,44	1,35
5. Konstruksi	3,89	4,01	4,49	4,67	4,55
6. Perdagangan, Hotel Dan Restoran	28,49	28,42	29,47	30,00	30,40
7. Pengangkutan Dan Komunikasi	5,25	5,5	5,52	5,66	5,7
8. Keuangan, Persewaan Dan Jasa Perusahaan	4,79	4,83	4,9	4,93	5,05
9. Jasa - Jasa	8,77	9	8,68	8,54	8,34
PDRB Jawa Timur	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Keterangan: *) Angka Diperbaiki

**) Angka Sementara

Apabila diikuti perkembangannya selama lima tahun terakhir, tampak bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB atau perekonomian Jawa Timur semakin menurun. Hal ini lebih disebabkan karena sektor pertanian khususnya subektor tanaman bahan makanan dan subsektor tanaman perkebunan sangat tergantung pada ketersediaan luas lahan pertanian yang semakin menurun akibat alih fungsi lahan untuk perluasan kawasan industri dan pemukiman penduduk.

c. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB Sektor Pertanian

Tanaman bahan makanan (tabama) meliputi komoditi : padi, palawija (jagung, kacang hijau, kacang tanah, kedele, ubi kayu, ubi jalar), buah-buahan dan sayuran. Dari hasil penghitungan tahun 2012 total nilai subsektor tabama di Jawa Timur atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 80,61 triliun atau dengan kontribusi sebesar 8,05 persen terhadap total nilai PDRB. Dari total nilai tabama tersebut, kontribusi tanaman palawija sebesar 38,41 persen.

Apabila dilihat perkembangannya selama lima tahun terakhir kontribusi tanaman palawija terhadap tabama cukup fluktuatif. Secara berurutan kontribusinya tahun 2008 sebesar 36,81 persen, tahun 2009 sebesar 38,02 persen, tahun 2010 sebesar 34,96 persen, tahun 2011

sebesar 36,68 persen, dan tahun 2012 sebesar 38,41 persen

d. Kontribusi Subsektor Perkebunan Terhadap PDRB Sektor Pertanian

Tanaman perkebunan terbagi menjadi tanaman perkebunan rakyat dan tanaman perkebunan besar. Tanaman perkebunan rakyat mencakup hasil tanaman perkebunan yang diusahakan oleh rakyat seperti jambu mete, kelapa, kopi, kapok, kapas, tebu, tembakau, cengkeh, tanaman obat-obatan, dan tanaman perkebunan lainnya. Sedangkan perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan besar seperti karet, teh, kopi, coklat, minyak sawit, inti sawit, tebu, rami, serat manila dan tanaman lainnya.

Hasil penghitungan PDRB tahun 2012 atas dasar harga berlaku total nilai sub sektor perkebunan di Jawa Timur sebesar Rp. 20,33 triliun atau dengan kontribusi sebesar 2,03 persen terhadap total nilai PDRB. Apabila dilihat perkembangannya selama lima tahun terakhir kontribusi subsektor perkebunan tidak mengalami perubahan berarti bahkan cenderung menurun. Secara berurutan kontribusinya tahun 2008 sebesar 2,20 persen, tahun 2009 sebesar 2,18 persen, tahun 2010 sebesar 2,07 persen, tahun 2011 sebesar 2,04 persen, dan tahun 2012 sebesar 2,03 persen.

2. Kehutanan

Kontribusi Subsektor Kehutanan Terhadap PDRB

Subsektor kehutanan mencakup kegiatan yang dilakukan di areal hutan oleh perorangan dan badan usaha, yang mencakup usaha penanaman, pemeliharaan dan penebangan kayu, serta pengambilan hasil hutan lainnya. Dari hasil penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2012 telah diketahui bahwa nilai PDRB subsektor kehutanan sebesar Rp. 4,10 triliun atau sebesar 0,41 persen terhadap total PDRB Jawa Timur.

Apabila diikuti perkembangannya selama lima tahun terakhir, kontribusi subsektor ini cenderung meningkat. Secara berurutan kontribusinya tahun 2008 sebesar 0,29 persen, tahun 2009 sebesar 0,29 persen, tahun 2010 sebesar 0,33 persen, tahun 2011 sebesar 0,35 persen, dan tahun 2012 sebesar 0,41 persen. Meningkatnya kontribusi subsektor kehutanan tiga tahun terakhir tersebut lebih disebabkan karena meningkatnya produksi kayu khususnya kayu sengon (*Albizia chinensis*).

3. Energi dan Sumberdaya Mineral

Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB

Sektor pertambangan dan penggalian terdiri dari subsektor pertambangan migas, pertambangan non migas dan subsektor penggalian. Hasil penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2012 diketahui bahwa nilai PDRB sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp. 20,80 triliun atau sebesar 2,08 persen terhadap total PDRB Jawa Timur.

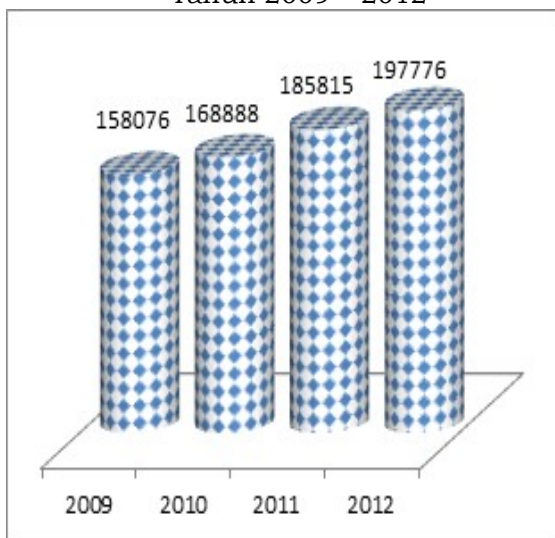
Apabila diikuti perkembangannya selama lima tahun terakhir, kontribusi sektor ini tidak mengalami perubahan yang berarti bahkan cenderung stagnan. Secara berurutan kontribusinya tahun 2008 sebesar 2,22 persen, tahun 2009 sebesar 2,22 persen, tahun 2010 sebesar 2,19 persen, tahun 2011 sebesar 2,24 persen, dan tahun 2012 sebesar 2,03 persen.

4. Pariwisata

Kunjungan Wisata

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu dari daerah tujuan wisata di Indonesia, khususnya untuk wisatawan manca negara (wisman). Dalam setiap tahunnya jumlah wisman yang datang ke Jawa Timur terus meningkat. Pada tahun 2012

Gambar 2.31
Jumlah Kunjungan Wisman ke Jawa Timur
Tahun 2009 – 2012



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

kenaikan wisman yang berkunjung ke Jawa Timur mencapai 6,44 persen, yaitu dari 185.815 wisman di tahun 2011 menjadi 197.776 wisman di tahun 2012.

Dengan terus meningkatnya jumlah kunjungan wisman ke Jawa Timur tersebut, sudah barang tentu akan membawa dampak yang positif terhadap perekonomian Jawa Timur. Untuk itu, bagi pengambil kebijakan dan para pelaku penyedia jasa pariwisata baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta harus tetap bisa menjalankan fungsinya masing-masing, agar setiap wisman yang datang ke Jawa Timur tetap merasa nyaman.

5. Kelautan dan Perikanan

a. Produksi Perikanan

Produksi perikanan terdiri dari produksi di perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan Tangkap terdiri dari perikanan tangkap di laut dan perikanan tangkap di perairan umum, sedangkan Perikanan Budidaya terdiri dari budidaya laut, tambak, kolam, sawah tambak, mina padi, karamba, dan japung. Produksi perikanan pada tahun 2008 mencapai 790.994 ton, kemudian meningkat sebesar 15,56 persen pada tahun 2009 menjadi 914.088,4 ton, meningkat lagi pada tahun 2010 sebesar 21,80 persen menjadi 1.113.393,5 ton, kemudian dua tahun terakhir meningkat sebesar 9,48 persen dan 7,52 persen atau sebesar 1.218.897,8 ton pada tahun 2011, dan sebesar 1.310.604,2 ton pada tahun 2012.

Kontribusi perikanan tangkap terhadap total produksi perikanan dalam tiap tahunnya semakin menurun. Dalam lima tahun terakhir, tahun 2008 merupakan share yang terbesar mencapai 79,79 persen atau produksinya mencapai 631.105 ton, kemudian menurun terus seperti terjun bebas hanya 29 persen kontribusinya pada tahun 2012 atau produksinya hanya 380.037,7 ton atau hanya naik 1,12 persen terhadap produksi perikanan tangkap tahun 2011.

b. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Produksi Perikanan Kelompok Nelayan dianalogikan dengan produksi Perikanan Tangkap di laut, dimana kelompok ini kontribusinya terhadap produksi perikanan total juga semakin menurun. Dalam lima tahun terakhir, kontribusi produksi kelompok ini tahun 2008 mencapai puncaknya hingga mencapai 74,67 persen, kemudian menurun kontribusinya tahun 2009 menjadi 43,27 persen, 30,44 persen tahun 2010, tahun 2011 29,75 persen, dan 27,86 persen tahun 2012.

Tabel 2.84
Persentase Produksi Perikanan Laut terhadap Produksi Total
2008-2012

Tahun	Volume (Ton)		%
	Perikanan Laut	Produksi Total	
(1)	(2)	(3)	(4)
2008	590.634,0	790.994,0	74,67
2009	395.511,0	914.088,4	43,27
2010	338.915,2	1.113.393,5	30,44
2011	362.621,6	1.218.897,8	29,75
2012	365.162,6	1.310.604,2	27,86

Sumber: Dinas Perikanan Provinsi Jawa Timur

6. Perdagangan

a. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

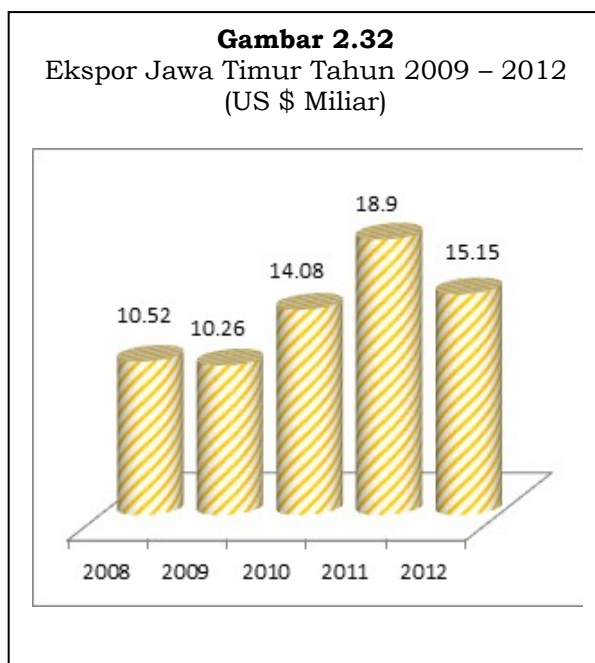
Secara geografis Jawa Timur memiliki posisi yang sangat strategis sebagai transit antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur, sehingga tidak mengherankan jika sektor perdagangan, hotel dan restoran menjadi sektor yang memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Jawa Timur. Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan tulang punggung utama bagi perekonomian Jawa Timur. Dari hasil penghitungan PDRB telah diketahui bahwa nilai tambah sektor perdagangan, hotel dan restoran atas dasar harga berlaku tahun 2012 sebesar Rp 304,50 triliun, atau setara dengan 30,40 persen dari total nilai PDRB Jawa Timur. Pertumbuhan sektor ini tahun 2012 sebesar 10,06 persen, lebih besar dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,81 persen.

Apabila dilihat peranannya pada masing-masing subsektor, maka subsektor perdagangan merupakan penyumbang terbesar terhadap sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi sebesar 80,02 persen, disusul subsektor restoran dengan kontribusi sebesar 18,14 persen, sedangkan peranan subsektor hotel hanya 1,84 persen. Pada tahun 2011 subsektor perdagangan mengalami pertumbuhan sebesar 9,50 persen, lebih kecil dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 10,82 persen. Subsektor restoran juga memiliki peranan cukup besar (18,14 persen), dengan pertumbuhan sebesar 11,57 persen, lebih besar dibanding tahun 2010 yang tumbuh 9,49 persen.

b. Ekspor Bersih Perdagangan

semakin

Timur yang angka ekonomi yang nasional, mempunyai cukup pertumbuhan Termasuk di dampak dari Jawa Timur



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Dengan memperhatikan meningkatnya perekonomian Jawa ditandai dengan pertumbuhan berada di atas angka sektor perdagangan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi tersebut. dalamnya adalah perkembangan ekspor ke luar negeri.

Berdasarkan perkembangannya, dari tahun 2009 hingga 2010 nilai ekspor Jawa Timur menunjukkan peningkatan yang signifikan. Namun memasuki tahun 2012 nilai ekspor Jawa Timur tampak menurun dibanding tahun 2011, yaitu sebesar 19,86 persen atau dari US \$ 18,90 miliar di tahun 2011 menjadi US \$ 15,15 miliar di tahun 2012.

c. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Data Kadin menyebutkan bahwa jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat mendominasi struktur ekonomi di Indonesia, yakni sekitar 99,9 persen. Di samping itu, jumlah Usaha Mikro yang sangat kecil mencapai 98,8 persen.

Usaha skala mikro ini umumnya merupakan usaha informal yang dikelola oleh wirausahawan informal, yang menjadi penyangga penyerapan tenaga kerja, menurut Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto dalam paparan Proyeksi Ekonomi 2013 Kadin. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus lebih serius mengatasi masalah sektor informal, karena sektor ini harus dijadikan basis wirausahawan mandiri informal untuk ditransformasikan menjadi formal.

Pemerintah perlu melakukan konsolidasi kelembagaan, investasi teknologi terapan tepat guna dan mendorong kewirausahaan UMKM melalui pendidikan.

Tabel 2.85
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal
Tahun 2008 - 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha Informal yang mendapat bantuan Binaan Pemda	39,510	44,956	43,087	44,533	44,173
2.	Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha Informal	111,341	118,740	122,599	130,338	139,398
3.	Rasio ½	35.49	37.86	35.14	34.17	31.69

Sumber data : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi dan Kab/Kota

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) semakin menjamur di Provinsi Jawa Timur. Akan tetapi, banyak dari mereka yang sifatnya masih usaha informal. Untuk itu, pemerintah perlu membantu usaha informal untuk berkembang menjadi formal.

Berdasarkan tabel cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal selama tahun 2008 sampai dengan 2012, terlihat bahwa upaya Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Timur, dalam upaya membantu para pedagang maupun usaha informal berkisar sebesar 32 persen sampai dengan 35 persen dari jumlah populasi usaha informal/pedagang yang di ketahui. Kendala Pemerintah Kabupaten/Kota atau Provinsi di Jawa Timur tidak mempunyai data yang akurat jumlah populasi pedagang/usaha informal, sehingga sulit menentukan target atau sasaran usaha informal yang perlu di bantu.

7. Perindustrian

a. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Sektor industri pengolahan merupakan sektor strategis, disamping diharapkan mampu menyerap tenaga kerja sangat besar, sektor ini juga dapat dilakukan ekspansi secara cepat. Hasil penghitungan tahun 2012 total nilai PDRB sektor industri pengolahan atas dasar harga berlaku sebesar Rp

271,60 triliun, atau setara dengan 27,11 persen dari total nilai PDRB Jawa Timur.

Apabila dilihat perkembangannya selama lima tahun terakhir, kontribusi sektor industri di Jawa Timur cenderung menurun. Secara berurutan kontribusinya tahun 2008 sebesar 28,47 persen, tahun 2009 sebesar 28,14 persen, tahun 2010 sebesar 27,49 persen, tahun 2011 sebesar 27,12 persen, dan tahun 2012 sebesar 27,11persen.

Apabila dilihat peranannya pada masing-masing subsektor, kontribusi terbesar terjadi pada subsektor industri makanan, minuman dan tembakau sebesar 15,31 persen terhadap total nilai PDRB Jawa Timur, dengan pertumbuhan sebesar 7,34 persen, lebih besar dibanding tahun 2011 yang tumbuh 6,26 persen. Kontribusi subsektor kertas dan barang cetakan dan subsektor pupuk, kimia dan barang dari karet masing-masing sebesar 3,58 persen dan 2,28 persen dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 4,14 persen dan 9,96 persen. Pada periode yang sama subsektor logam dasar besi dan baja juga mengalami pertumbuhan cukup tinggi sebesar 8,95 persen, lebih besar dibanding tahun 2011 yang tumbuh 5,65 persen.

b. Pertumbuhan Industri

Sektor industri mempunyai peran yang sangat penting baik sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi maupun dalam pemerataan hasil-hasil pembangunan. Tujuan pembangunan industri diarahkan pada upaya untuk memperkuat struktur ekonomi Jawa Timur dengan keterkaitan yang kuat dan saling mendukung antar sektor, mampu meningkatkan daya tahan perekonomian Jawa Timur, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta sekaligus mendorong berkembangnya kegiatan berbagai sektor pembangunan lainnya.

Pembangunan industri diarahkan pelaksanaannya melalui pengembangan industri-industri yang bertumpu pada upaya pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan kehidupan rakyat, industri yang berorientasi pada ekspor, industri yang menggunakan sumber daya nasional, industri yang memiliki nilai strategis serta berdampak pada pengembangan industri

lainnya, dan industri yang dapat mengembangkan kegiatan ekonomi.

Jumlah perusahaan industri di Jawa Timur mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,69 persen selama kurun waktu 2008-2012, dimana pada tahun 2008 sebanyak 702.379 perusahaan meningkat menjadi 796.515 perusahaan pada tahun 2012. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada kurun waktu 2010-2011, yaitu sebesar 5,56 persen.

Peningkatan jumlah perusahaan industri setiap tahun mengindikasikan bahwa Jawa Timur merupakan wilayah yang sangat menarik bagi investor untuk berinvestasi.

Tabel 2.86
Jumlah Perusahaan Industri di Jawa Timur Tahun 2008-2012

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
Perusahaan	702.379	716.441	742.671	783.955	761.515
Pertumbuhan (%)	0,63	2,00	3,66	5,56	1,60

Sumber: Dinas Perindag Provinsi Jatim

8. Ketramigrasian

Transmigran Swakarsa

Program transmigrasi pada dasarnya merupakan suatu kebijakan pemerintah yang antara lain bertujuan untuk memecahkan masalah kependudukan dan meningkatkan pembangunan daerah. Transmigrasi tidak hanya memindahkan penduduk saja tetapi juga berusaha meningkatkan pembangunan daerah tujuan dan kesejahteraan individu/transmigran yang bersangkutan.

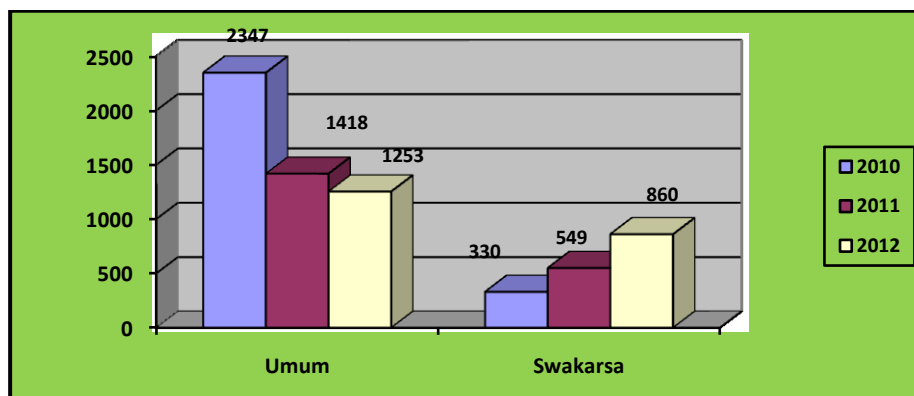
Transmigrasi di Indonesia biasanya diatur dan didanai oleh pemerintah kepada warga yang umumnya golongan menengah ke bawah. Sampai di tempat tujuan transmigrasi para transmigran akan diberikan sebidang tanah, rumah sederhana dan perangkat lain untuk penunjang hidup di lokasi tempat tinggal yang baru. Ada 3 (tiga) jenis/macam Transmigrasi yaitu :

- a. Transmigrasi Umum adalah program transmigrasi yang disponsori dan dibiayai secara keseluruhan oleh pihak pemerintah melalui Kemenakertrans (Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi).

- b. Transmigrasi Spontan/ Swakarsa adalah perpindahan penduduk dari daerah padat ke pulau baru sepi penduduk yang didorong oleh keinginan diri sendiri namun masih mendapatkan bimbingan serta fasilitas penunjang dari pemerintah.
- c. Transmigrasi Bedol Desa adalah transmigrasi yang dilakukan secara masal dan kolektif terhadap satu atau beberapa desa beserta aparatur desanya pindah ke pulau yang jarang penduduk. Biasanya transmigrasi bedol desa terjadi karena bencana alam yang merusak desa tempat asalnya.

Jumlah transmigrasi dari Jawa Timur pada tahun 2012 sebanyak 672 KK atau 2.113 jiwa. Dari sejumlah itu, 860 jiwa (40,70 persen) diantaranya termasuk transmigran swakarsa. Transmigrasi Swakarsa adalah persentase jumlah transmigran swakarsa terhadap jumlah transmigrasi. Berdasarkan perkembangannya, dari tahun 2010 – 2012, persentase jumlah transmigrasi swakarsa menunjukkan peningkatan yaitu dari 12,33 persen tahun 2010 menjadi 27,91 pada tahun 2011 dan 40,70 persen pada tahun 2012.

Gambar 2.33
Perkembangan Jumlah Transmigrasi (jiwa) Menurut Jenisnya
Di Jawa Timur Tahun 2010 – 2012



Sumber : Disnakerduktrans Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Trasmigrasi Provinsi Jawa Timur, diketahui bahwa Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah merupakan dua propinsi yang menempatkan transmigran terbanyak dibandingkan provinsi lainnya. Untuk mempermudah evaluasi transmigrasi, pemerintah seharusnya menetapkan kriteria daerah tujuan dan tolok ukur keberhasilan transmigrasi dengan lebih

jelas. Berkaitan dengan adanya otonomi daerah di Indonesia pelaksanaannya harus mengkomodasikan program ini yang antara lain dengan mengedepankan peran pemerintah daerah dalam menetapkan kebijaksanaan penempatan transmigran.

2.1.4 Aspek Daya Saing

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2010-2012 di Jawa Timur, dalam tiga tahun terakhir rata-rata konsumsi per kapita di Jawa Timur mengalami peningkatan, yang semula Rp. 408.038 per kapita sebulan di tahun 2010,

Tabel 2.87
Rata-rata Konsumsi per Kapita menurut Kelompok Konsumsi dan Status Wilayah di Jawa Timur Tahun 2010-2012 (Rupiah per Bulan)

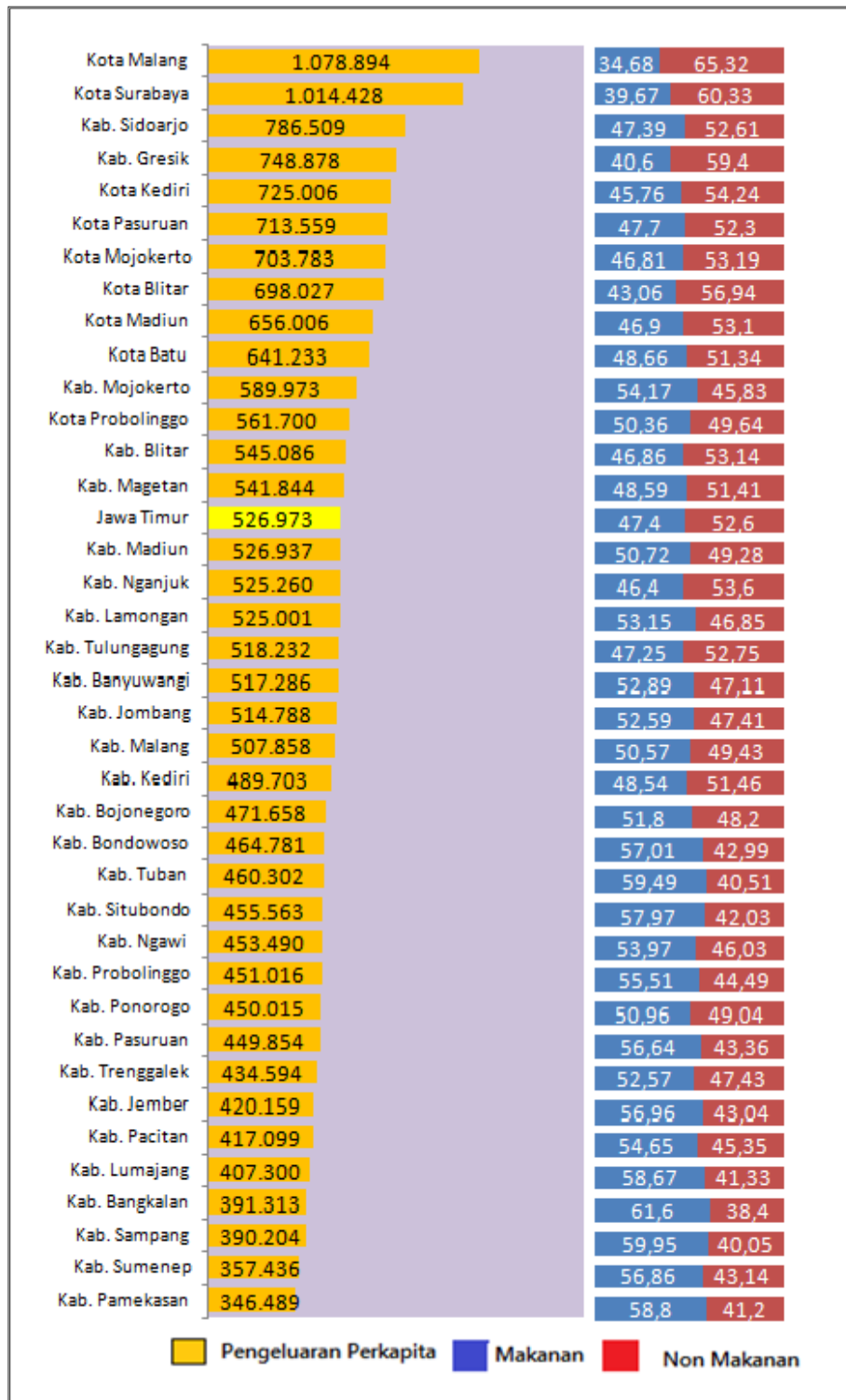
Tahun/ Status Wilayah		Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)		(2)	(3)	(4)
2010	Kota	244.457	224.564	469.021
	Desa	189.000	118.345	307.345
	Kota+Desa	223.539	184.499	408.038
2011	Kota	281.107	316.024	597.131
	Desa	208.082	164.619	372.701
	Kota+Desa	242.829	236.661	479.490
2012	Kota	296.389	376.200	672.589
	Desa	207.479	187.305	394.784
	Kota+Desa	249.785	277.187	526.973

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Keterangan : *) Angka Sementara

menjadi Rp. 479.490 per kapita sebulan di tahun 2011 dan di tahun 2012 meningkat besarannya menjadi Rp. 526.973 per kapita sebulan. Peningkatan pada tahun 2011-2012 sebesar 9,90 persen, lebih rendah bila dibandingkan dengan periode 2010-2011 yang mengalami peningkatan sebesar 17,51 persen. Namun demikian, perlu kehati-hatian dalam menafsirkan peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita ini, karena

belum tentu menjadi gambaran peningkatan kesejahteraan. Mengingat terjadinya peningkatan konsumsi bisa dipengaruhi oleh terjadinya peningkatan harga yang terukur melalui inflasi, bukan karena pendapatan yang meningkat.

Gambar 2.34
Sebaran Rata-rata Konsumsi per Kapita Sebulan (Rupiah) dan
Persentase Pengeluaran Untuk Makanan dan Non Makanan
menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2012



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Sementara itu, pada tahun 2012 persentase konsumsi pada kelompok makanan di Jawa Timur mengalami penurunan dari 50.64 persen tahun 2011, menjadi 47,40 persen tahun 2012. Sedangkan pengeluaran untuk non makanan terjadi peningkatan dari 49,36 persen pada tahun 2011 menjadi 52,60 persen pada tahun 2012. Kondisi ini memberikan gambaran adanya peningkatan ekonomi penduduk di Jawa Timur, karena

secara umum persentase pengeluaran untuk non makanan lebih tinggi dari pengeluaran untuk makanan.

Berdasarkan besaran rata-rata konsumsi per kapita penduduk selama sebulan menurut kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2012, Kota Malang merupakan wilayah yang tertinggi diikuti Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo (tiga wilayah tertinggi).

Untuk rata-rata konsumsi per kapita terendah di Jawa Timur tahun 2012, adalah Kabupaten

Tabel 2.88
Rata-rata Konsumsi per Kapita menurut Kelompok Konsumsi dan Status Wilayah di Jawa Timur Tahun 2012

Status Wilayah	Makanan		Bukan Makanan		Total	
	Jumlah (Rp)	Persen	Jumlah (Rp)	Persen	Jumlah (Rp)	Persen
Kota	296.389	44,07	376.200	55,93	672.589	100.00
Desa	207.479	52,56	187.305	47,44	394.784	100.00
Kota+Desa	249.785	47,40	277.187	52,60	526.973	100.00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Pamekasan, diikuti Sumenep dan Sampang (tiga wilayah terendah). Namun demikian, tidak selalu rata-rata konsumsi per kapita sebulan yang lebih tinggi atau rendah, menjadi cerminan tinggi atau rendah pula kondisi tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Perlu kehati-hatian dalam menerjemahkan situasi ini, mengingat tingkat kemahalan antar wilayah sangat bervariasi. Cerminan perbedaan kemahalan wilayah ini dapat tercermin dari keberadaan wilayah-wilayah kota pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan wilayah Kabupaten. Secara umum memang pada wilayah kota cenderung memiliki tingkat kemahalan yang lebih tinggi dibanding wilayah di kabupaten. Selain itu, deviasi yang ada antar wilayah kabupaten dan kota di Jawa Timur diindikasikan cukup lebar, karena rata-rata konsumsi provinsi yang berada pada posisi moderat, memisahkan 14 wilayah di atas dan 24 wilayah di bawah rata-rata konsumsi per kapita provinsi.

Rata-rata konsumsi perkapita jika dilihat perbandingan antar wilayah perkotaan dan perdesaan, memberikan gambaran bahwa di daerah perkotaan pada tahun 2012 ini tingkat pendapatan penduduknya lebih tinggi dan juga

kesejahteraannya lebih baik dibandingkan daerah perdesaan. Hal ini terlihat dari persentase konsumsi untuk bukan makanan pada daerah perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan.

2. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita

Kebutuhan dasar manusia untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya terhadap barang dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu kelompok makanan dan non makanan. Pada batas tertentu kebutuhan akan makanan bisa mencapai titik maksimal, namun untuk kebutuhan non makanan tidak terbatas.

Tabel 2.89
Persentase Pengeluaran Rumahtangga
dirinci Menurut Pengeluaran Makanan & Non Makanan
Jawa Timur Tahun 2008-2012

Tahun	Persentase		
	Makanan	Non Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
2008	48,36	51,64	100,00
2009	52,73	47,27	100,00
2010	54,78	45,22	100,00
2011	50,52	49,48	100,00
2012	47,40	52,60	100,00

Sumber : Hasil Susenas 2008-2012 (diolah)

Semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, namun sebaliknya pengeluaran untuk non makanan proporsinya akan semakin meningkat (Hukum Engel/Engel law).

Pada tahun 2012 proporsi pengeluaran non makanan sebesar 52,60 persen, lebih besar 3,12 persen dibanding tahun 2011. Sedangkan selama tahun 2008 – 2012 rata-rata pengeluaran penduduk Jawa Timur untuk kebutuhan non makanan proporsinya relatif stabil yaitu kisaran 49 persen, sedangkan proporsi kebutuhan makanan sekitar 51 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun secara umum tingkat pendapatan semakin meningkat, namun pada kenyataannya belum mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk. Keadaan ini mungkin dikarenakan makin tidak

terkendalinya perubahan harga-harga barang yang tidak sebanding dengan perkembangan pendapatan. Hal ini tercermin dari pola konsumsi penduduk seperti lebih besarnya proporsi pengeluaran untuk kebutuhan makanan dibandingkan pengeluaran untuk kebutuhan non makanan.

3. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani dapat dihitung dengan membandingkan faktor produksi dengan produk, yaitu perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib).

NTP dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Indeks yang diterima petani (It)}}{\text{Indeks yang dibayar petani (Ib)}} \times 100$$

Rata-rata NTP Provinsi Jawa Timur tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 0,50 persen dibanding tahun 2011 yaitu dari 101,65 menjadi 102,16. Kenaikan tersebut disebabkan kenaikan indeks harga yang diterima petani (5,76 persen), lebih besar dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani (5,23 persen). Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai tukar produk pertanian terhadap barang/jasa konsumsi rumah tangga petani serta biaya produksi dan pembentukan barang modal tahun 2012, secara umum masih lebih tinggi dibanding kondisi tahun 2011.

Tabel 2.90
Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Timur
Tahun 2008-2012 (2007=100)

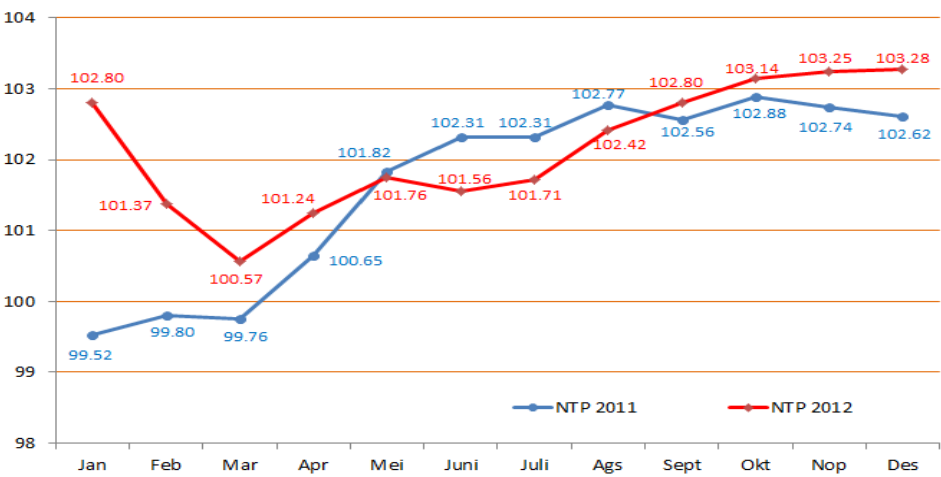
No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Indeks yang diterima petani (It)	113.08	118.88	127.78	139.26	147.28
2.	Indeks yang dibayar petani (Ib)	112.57	121.04	129.40	136.99	144.15
3.	NTP	100.47	98.19	98.74	101.65	102.16

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Gambar Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2012 (2007=100) menunjukkan bahwa selama tahun 2012, NTP Jawa Timur dari bulan Januari sampai dengan Desember mengalami fluktuasi mengikuti pola musiman komoditas pertanian. Pada bulan Februari, Maret, dan Juni, NTP mengalami penurunan sedangkan pada 9 bulan lainnya mengalami kenaikan. Penurunan NTP terbesar terjadi pada bulan Februari sebesar -1,39 persen dari 102,80 menjadi 101,37. Hal ini disebabkan semua sub sektor pertanian

mengalami penurunan NTP. Sub sektor tanaman pangan mengalami penurunan 2,30 persen, sub sektor perikanan turun 0,84 persen, sub sektor tanaman perkebunan rakyat turun 0,80, sub sektor peternakan turun 0,07 persen dan sub sektor tanaman hortikultura turun 0,03 persen. Sementara kenaikan NTP tertinggi tahun 2012 terjadi pada bulan Agustus sebesar 0,69 persen dari 101,71 menjadi 102,42, yang disebabkan karena 4 sub sektor pertanian mengalami kenaikan NTP dan hanya 1 sub sektor pertanian yang mengalami penurunan. Kenaikan NTP pada bulan Agustus 2012 terjadi pada sub sektor tanaman pangan sebesar 1,06 persen, sub sektor tanaman perkebunan rakyat naik 0,53 persen, sub sektor tanaman hortikultura naik 0,29 persen dan sub sektor peternakan naik 0,21 persen, sementara sub sektor perikanan turun 0,02 persen.

Gambar 2.35
Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Timur
Periode Tahun 2011-2012 (2007=100)



Tabel 2.91
Rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Timur
Menurut Sektor Pertanian Tahun 2008-2012 (2007=100)

No.	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	NTP Jawa Timur	100,47	98,19	98,74	101,65	102,16
2	NTP Tanaman Pangan	98,98	92,56	94,60	101,13	102,34
3	NTP Tanaman Hortikultura	98,68	106,46	110,60	111,03	109,93
4	NTP Tanaman Perkebunan	110,42	100,31	92,51	97,59	96,62
5	NTP Peternakan	101,22	106,90	103,43	97,61	98,07
6	NTP Perikanan	101,96	101,07	101,75	101,54	99,53

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Jika dilihat NTP masing-masing sub sektor pada tahun 2012, NTP tertinggi terjadi pada sub sektor hortikultura sebesar 109,93, sedangkan NTP terendah terjadi pada sub sektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 96,62. Jika dilihat perkembangannya, kenaikan NTP terbesar terjadi pada sub sektor tanaman pangan sebesar 1,20 persen dari 101,13 menjadi 102,34 sedangkan penurunan terbesar terjadi pada sub sektor perikanan sebesar 1,98 persen dari 101,54 menjadi 99,53.

a. Indeks Harga Yang Diterima Petani

Rata-rata indeks harga yang diterima petani pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 5,76 persen dari 139,26 menjadi 147,28. Kenaikan indeks ini disebabkan oleh naiknya indeks harga yang diterima petani pada semua sub sektor. Kenaikan tertinggi terjadi pada sub sektor tanaman bahan makanan sebesar 6,79 persen dari 139,79 menjadi 149,29, diikuti tanaman perkebunan rakyat naik 6,29 persen dari 130,10 menjadi 138,29, peternakan naik 4,90 persen dari 132,40 menjadi 138,88, tanaman hortikultura naik 4,32 persen dari 152,93 menjadi 159,53 dan perikanan naik 2,34 persen dari 132,39 menjadi 135,48.

Tabel 2.92
Rata-rata Indeks Harga Yang Diterima Petani Provinsi Jawa Timur
Menurut Sub Sektor Pertanian Tahun 2008–2012 (2007=100)

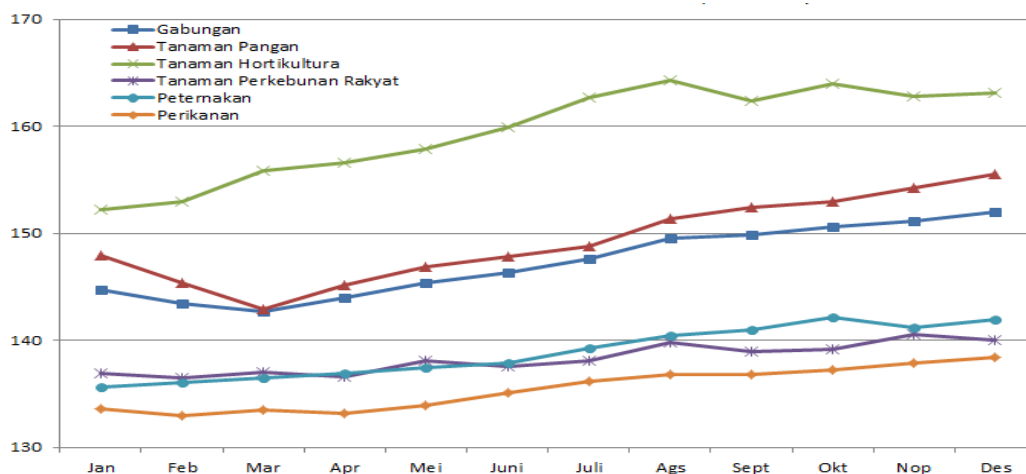
No.	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks harga diterima petani (It)	113,08	118,88	127,78	139,26	147,28
2	Tanaman Bahan Makanan	111,72	112,37	123,14	139,79	149,29
3	Tanaman Perkebunan Rakyat	112,93	121,62	119,20	130,10	138,29
4	Peternakan	113,39	129,83	133,36	132,40	138,88
5	Perikanan	113,25	118,85	126,47	132,39	135,48
6	Tanaman Hortikultura	110,89	128,77	131,60	152,93	159,53

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Gambar Indeks Harga yang Diterima Petani Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 menunjukkan selama bulan Januari sampai dengan Desember 2012 indeks harga yang diterima petani sub sektor hortikultura lebih tinggi dibanding sub sektor lainnya maupun indeks gabungannya,

sementara sub sektor perikanan paling rendah. Jika dilihat fluktuasinya, indeks harga yang diterima petani tanaman bahan makanan mengalami penurunan pada Bulan Februari dan mencapai titik terendah pada bulan Maret, kemudian meningkat terus sampai bulan Desember. Indeks harga yang diterima petani sub sektor tanaman hortikultura memiliki fluktuasi yang relatif lebih tajam dibanding sub sektor lain karena pengaruh faktor musiman dan iklim yang cukup dominan. Sementara indeks harga yang diterima petani sub sektor tanaman perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan mengalami fluktuasi harga yang relatif kecil.

Gambar 2.36
Indeks Harga Yang Diterima Petani Provinsi Jawa Timur
Tahun 2012 (2007=100)



b. Indeks Harga Yang Dibayar Petani

Rata-rata Indeks harga yang dibayar petani tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 5,23 persen dibanding indeks tahun 2011 dari 136,99 menjadi 144,15. Kenaikan tersebut disebabkan naiknya indeks harga kelompok konsumsi rumah tangga serta indeks biaya produksi dan pembentukan barang modal.

Rata-rata indeks harga kelompok konsumsi rumah tangga mengalami kenaikan sebesar 5,71 persen dari 139,69 pada tahun 2011 menjadi 147,67 pada tahun 2012. Kenaikan indeks kelompok ini disebabkan naiknya indeks harga sub kelompok bahan makanan sebesar 6,43 persen, makanan jadi naik 5,85 persen, perumahan naik 6,25 persen, sandang naik 4,96 persen, kesehatan naik 4,34

persen, pendidikan, rekreasi dan olahraga naik 2,91 persen, serta transportasi dan komunikasi naik 1,44 persen.

Tabel 2.93
Rata-rata Indeks Harga Yang Dibayar Petani Provinsi Jawa Timur
Menurut Kelompok/Jenis Komoditi Tahun 2008-2012 (2007=100)

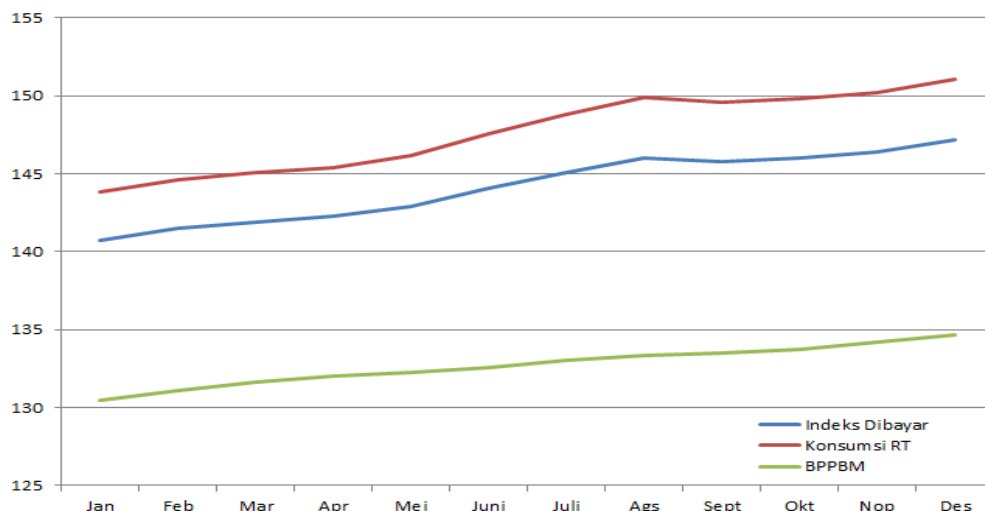
No.	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indeks harga dibayar petani (Ib)		112,57	121,04	129,40	136,99	147,28
1	Konsumsi Rumah tangga	112,90	121,67	131,22	139,69	147,67
	- Bahan Makanan	116,53	125,60	137,53	147,93	157,45
	- Makanan Jadi	106,78	118,84	129,33	136,64	114,64
	- Perumahan	112,06	121,84	131,31	140,32	149,09
	- Pakaian	109,82	120,39	128,09	137,95	144,79
	- Kesehatan	108,87	116,32	120,54	125,54	130,98
	- Pendidikan	106,78	117,60	121,26	126,12	129,78
	- Transportasi	113,89	110,72	111,12	112,74	114,37
2	BPPBM	111,15	118,72	123,11	127,96	132,72
	- Bibit	117,46	130,57	136,05	141,50	148,81
	- Obat-obatan dan Pupuk	107,25	113,75	117,90	123,50	126,80
	- Sewa, Pajak dan lainnya	110,07	118,08	122,76	127,14	131,75
	- Transportasi	116,02	118,20	121,27	124,52	128,04
	- Penanaman Barang Modal	112,10	121,04	125,31	130,66	134,82
	- Upah Buruh Tani	111,05	117,78	122,52	127,51	133,18

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Indeks biaya produksi dan pembentukan barang modal (BPPBM) mengalami kenaikan sebesar 3,72 persen dari 127,96 pada tahun 2011 menjadi 132,72 pada tahun 2012. Kenaikan indeks ini disebabkan oleh naiknya indeks harga bibit sebesar 5,17 persen, upah buruh tani naik 4,45 persen, sewa lahan, pajak dan lainnya naik 3,62 persen, penambahan barang modal naik 3,18 persen, transportasi naik 2,83 persen, serta obat-obatan dan pupuk naik 2,68 persen.

Gambar Indeks Harga Yang Dibayar Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 (2007=100) menunjukkan indeks yang dibayar petani selama periode bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2012. Indeks biaya konsumsi rumah tangga selalu lebih tinggi dibanding indeks biaya produksi dan pembentukan barang modal. Indeks konsumsi rumah tangga berfluktuasi sepanjang tahun sedangkan indeks biaya produksi dan pembentukan barang modal mengalami kenaikan sepanjang tahun.

Gambar 2.37
Indeks Harga yang Dibayar Petani Provinsi Jawa Timur
Tahun 2012 (2007=100)



4. Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan tangkap di laut, dengan mengukur kemampuan tukar hasil tangkapan dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan nelayan, baik untuk proses usaha penangkapan di laut maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTN pada periode tertentu lebih besar dari 100 berarti kondisi nelayan pada periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar dan sebaliknya jika NTN lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli nelayan.

Metode Penghitungan NTN sama dengan metode penghitungan NTP yaitu membandingkan antara indeks harga yang diterima nelayan (It) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (Ib). Nilai Tukar Nelayan hitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Indeks harga yang diterima nelayan (It)}}{\text{Indeks harga yang dibayar nelayan (Ib)}} \times 100$$

Rata-rata NTN Provinsi Jawa Timur tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 1,81 persen dibanding tahun 2011 yaitu dari 148,46 menjadi 151,15. Kenaikan NTN tersebut disebabkan indeks harga yang diterima nelayan mengalami kenaikan sebesar 6,45 persen, sementara indeks yang dibayar nelayan hanya naik 4,54 persen. Hal ini bahwa kondisi nelayan pada tahun 2012 sedikit lebih baik dibanding dengan keadaan pada tahun 2011.

Tabel 2.94
Nilai Tukar Nelayan (NTN) Provinsi Jawa Timur
Tahun 2008-2012 (2005=100)

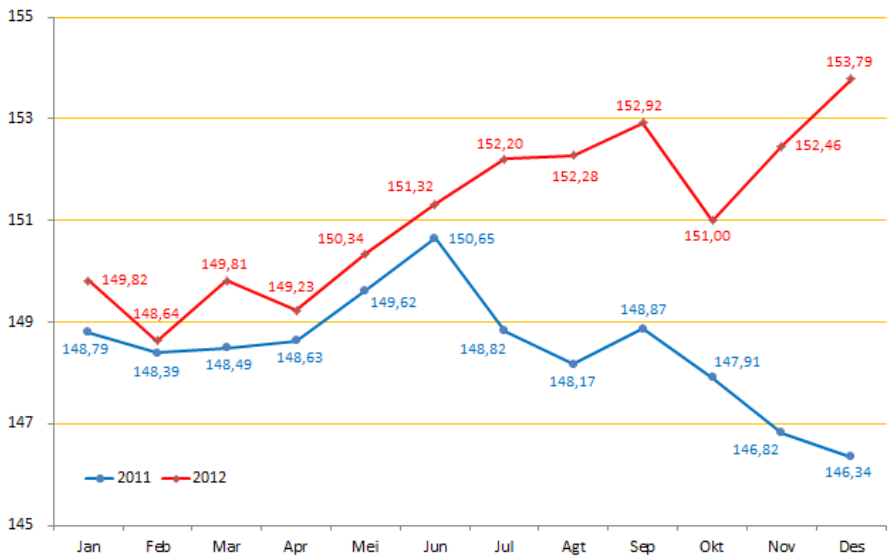
No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Indeks yang diterima nelayan (It)	171,75	182,85	196,29	215,88	229,81
2.	Indeks yang dibayar nelayan (Ib)	128,51	129,44	136,79	145,42	152,02
3.	Nilai Tukar Nelayan (NTP)	139,97	141,26	143,27	148,46	151,15

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Nilai Tukar Nelayan selama tahun 2012 mengalami fluktuasi yang relatif tajam karena dipengaruhi oleh pola musiman ikan dan kondisi cuaca. Selama tahun 2012 NTN mengalami penurunan sebanyak 3 kali sedangkan 9 bulan yang lainnya mengalami kenaikan. Penurunan NTN terbesar terjadi pada bulan Oktober 2012 sebesar 1,25 persen, diikuti Februari turun 0,79 persen dan April turun 0,39 persen. Sementara kenaikan NTN terbesar terjadi pada bulan Januari sebesar 2,38 persen, diikuti bulan November naik 0,97 persen, Desember naik 0,87 persen dan kenaikan terkecil terjadi pada bulan Agustus sebesar 0,05 persen.

Jika dilihat perkembangan NTN perbulan selama setahun, pada bulan yang sama NTN tahun 2012 selalu lebih tinggi dibanding dengan 2011. Pada tahun 2012 NTN tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 153,79 sedangkan NTN terendah terjadi pada bulan Februari sebesar 148,64.

Gambar 2.38
Nilai Tukar Nelayan (NTN) Provinsi Jawa Timur
Tahun 2011-2012 (2005=100)



5. Rasio PDRB UMKM Terhadap Total PDRB

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan yang cukup signifikan terhadap perekonomian Jawa Timur, selain karena pelaku ekonominya adalah masyarakat lokal, kegiatan UMKM juga menggunakan bahan baku lokal, tenaga kerja yang dipakai juga tenaga kerja lokal dan hasil produksinya banyak dikonsumsi masyarakat. Selain itu, semakin banyak kegiatan UMKM yang produksinya berorientasi ekspor, sehingga dinamika UMKM mampu menggeliatkan perekonomian daerah.

Tabel 2.95
Rasio PDRB UMKM Terhadap Total PDRB Jawa Timur
Tahun 2010 – 2012

No.	Uraian	2010	2011	2012
1.	Total PDRB adhb (Miliar Rp.)	778.564,24	884.502,65	1.001.720,88
2.	PDRB UMKM adhb (Miliar Rp.)	418.991,36	480.640,47	545.765,74
Rasio (%)		53,82	54,34	54,48

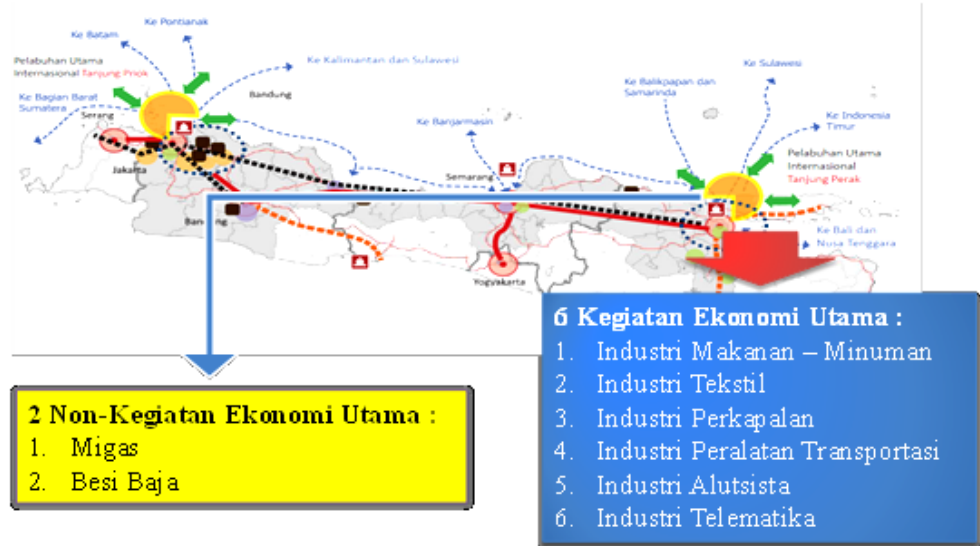
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Berbagai upaya telah ditempuh Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna mendorong berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah, diantaranya Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelatihan kewirausahaan, revitalisasi pasar tradisional dan sebagainya. Selama tahun 2010-2012, nilai tambah yang dihasilkan dari kegiatan UMKM terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 nilai tambah yang dihasilkan sebesar Rp. 418.991,36 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp. 480.640,47 miliar pada tahun 2011, dan kembali meningkat pada tahun 2012 mencapai Rp. 545.765,74 miliar. Rasio PDRB UMKM terhadap total PDRB Jawa Timur Tahun 2012 mencapai 54,48 persen, meningkat dibanding tahun 2011 yang mencapai 54,34 persen.

6. MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia)

TEMA PEMBANGUNAN:

" Pendorong Industri dan Jasa Nasional "



MP3EI merupakan langkah awal untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju dan termasuk 10 negara besar di dunia pada tahun 2025 dan 6 negara besar dunia pada tahun 2050 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, diharapkan pertumbuhan ekonomi riil rata-rata 7%-8% per tahun secara berkelanjutan.

Tujuan dari pelaksanaan MP3EI adalah untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi melalui pengembangan 8 program utama yang meliputi sektor industri manufaktur, pertambangan, pertanian, kelautan, pariwisata, telekomunikasi, energi, dan pengembangan kawasan strategis nasional. Program percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia diperkirakan membutuhkan banyak modal. Salah satu sumber pendanaan yang diharapkan pemerintah adalah berasal dari luar negeri.

Sejak MP3EI diluncurkan sampai akhir Desember 2011, di Jawa Timur telah dilaksanakan sejumlah Proyek Peralatan Transportasi dan Permesinan dengan total Proyek 27 dengan investasi 48.355 Milyar. Jumlah proyek yang sudah groundbreaking 8 proyek dengan nilai investasi 16.073 Milyar. Sehingga progress jumlah Proyek groundbreaking sebesar 30% dan progress jumlah nilai investasi sebesar 33%. Sedangkan untuk Sektor Riil Perkapalan, total jumlah 3 Proyek dengan

Investasi 1.135 Milyar, jumlah proyek yang sudah groundbreaking 2 proyek dengan nilai Investasi 800 Milyar, sehingga progress jumlah groundbreaking sebesar 67% dan progress jumlah nilai Investasi sebesar 70%.

Jawa Timur sangat berpotensi besar untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonominya, hal ini didukung oleh 70 BUMN yang berada di Jawa Timur, yang terdiri dari : Sektor Agro Kimia berjumlah 14 BUMN, Sektor Jasa dan Infrastruktur berjumlah 26 BUMN, Sektor Perbankan dan Keuangan berjumlah 17 BUMN dan Sektor Pertambangan dan Energi berjumlah 3 BUMN.

Untuk Dapat Melihat Peluang Pembangunan Infrastuktur Transportasi Dibutuhkan Visi Yang Kuat dalam mencermati Kerangka Rencana Induk MP3EI pada tahun 2015 yang memasuki fase ke-2, yaitu memperkuat basis ekonomi dan investasi. Daftar proyek industri yang masuk list MP3EI di Jawa Timur :

Tabel 2.96
Proyek Sentra Produksi Pada Program Prioritas MP3EI Jawa Timur

No	Proyek Sentra Produksi	Kegiatan Ekonomi	Nilai Investasi	Keterangan
1	Menambah kapasitas untuk pasokan gas di Jawa Timur dalam rangka memenuhi kebutuhan gas bagi industri-industri di Jawa Timur	Industri		
2	Pengembangan industri bleaching earth (Gresik) GB.2012 selesai 2014	Industri	USD 6 Jt	
3	Proyek EPC Pabrik Asam Fosfat	Industri	1.900 M	
4	(Gresik) PT Petrokimia Gresik (PKG) dengan JPMC Jordan GB 2012 selesai 2014			
5	Pembangunan Galangan Kapal	Industri	400 M	
6	Pembangunan Pelabuhan Panarukan, Jatim	Ditjen Hubla Kemenhub (Rp. 200 M)	2008 s.d. 2014	GB 2011
7	Pembangunan Rel KA Semarang – Bojonegoro – Surabaya 280 KM	Ditjen Perkeretaapian (Rp. 6.433)	2011 s.d 2014	GB 2011
8	Pengembangan Adpel Probolinggo	Kemenhub (Rp. 415 M)	2008 s.d 2014	GB.2011
9	Pembangunan Jalan Tol Gempol – Pandaan (13,61 km) Pemegang Saham : PT Margabumi Matraraya	-	Rp. 1.167 T	Progres Tanah 99,87% Permasalahan : Terdapat 114 bidang tanah yang masih di Konsinyasi di

No	Proyek Sentra Produksi	Kegiatan Ekonomi	Nilai Investasi	Keterangan
	(20.57%), Perusda Pasuruan (25.42%), PT Entrada Utama (1.96%), PT Jasa Marga Tbk (52.05%)			PN Bangil. (Seksi 1) Proses tanah pengganti wakaf (Seksi1
10	Pembangunan Jalan Tol Surabaya – Mojokerto 36,27 KM Pemegang Saham : PT Jasa Marga (Persero) Tbk (55%), PT Moeladi (25%), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (20%)	-	Rp. 3,4 T	Progres Tanah Seksi IA (Waru - Sepanjang), 2,30 Km : 99,35%, Seksi IB(Sepanjang - Western Ring Road), 4,30 Km : 17,41%, Seksi II (Western Ring Road - Driyorejo), 5,10 Km : 36,29%, Seksi III (Driyorejo - Krian), 6,10 Km : 50,22%, Seksi IV (Krian - Mojokerto), 18,47 Km : 64,99%
11	Pembangunan Water Conveyance Umbulan (Kapasitas 4000 ltr/s)	1900	2011 s.d 2014	Kendala berupa pola pengelolaan Provinsi dan Kabupaten serta peran serta SMI.
12	Pembangunan Jalan Tol Kertosono – Mojokerto (41 Km)	-	Rp. 3,48 T	Proggres Konstruksi Seksi I (SS Bandar – SS Jombang) 49.74%, Seksi II (SS Jombang – SS Mojokerto) 32,65%, Seksi II (Jembatan Brantas) 23,08% Permasalahan Usulan perubahan/penambahan Bangunan Perlintasan Overpass/Box, Underpass yg belum tercover dalam desain pada Seksi 2 (Kedunglosari, dll), Usulan Perubahan Mekanisme Sistem Transaksi, terkait dengan BUJT Ngawi-Kertosono dan Surabaya-Mojokerto, Pembebasan Tanah
13	Pembangunan Jalan Tol Gempol – Pasuruan (34 Km) Pemegang Saham : PT Jasa Marga Tbk (80%) PT Jatim Margautama (20%)	-	Rp. 2,769 T	Proggres Tanah Seksi I(Gempol - Rembang), 13,02 Km: 86,07% Seksi II(Rembang - Pasuruan), 7,59 Km: sosialisasi&inventarisasi Seksi III (Pasuruan - Grati), 11,39 Km: sosialisasi&inventarisasi Total: 35,86% Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedia zoning yang sesuai

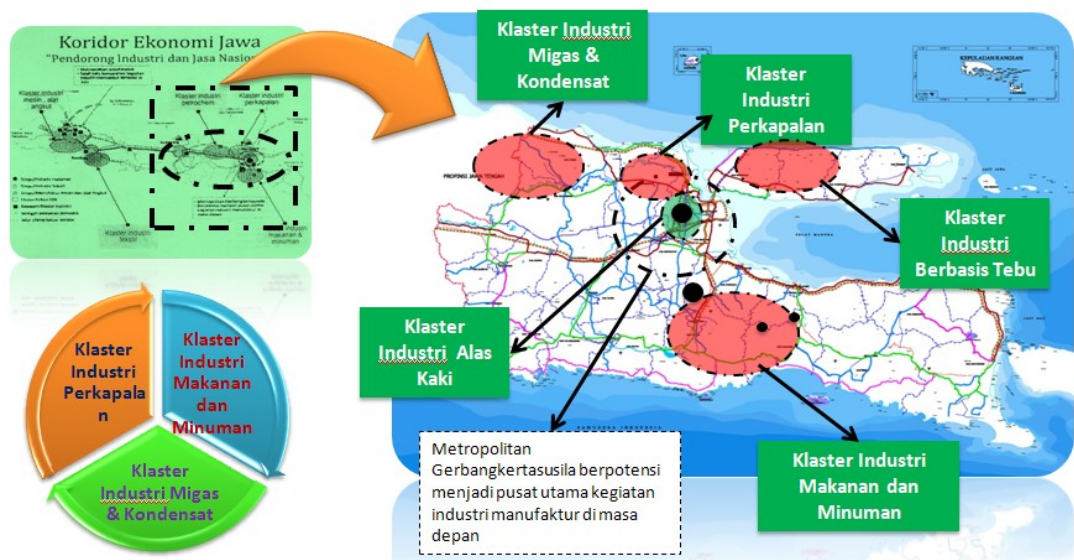
No	Proyek Sentra Produksi	Kegiatan Ekonomi	Nilai Investasi	Keterangan
				dengan lapang <ul style="list-style-type: none">• Pengukuran bidang yang salah sehingga pembayaran salah• Perubahan Overpass menjadi Underpass di beberapa desa karena menyebabkan banjir• Proses sewa menyewa tanah PT KA
14	Pembangunan Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo (31 Km). Pemegang Saham : PT Bukaka Teknik Utama (20%), PT Wahana Multi Insani (47.5%), PT Sembilan Benua Makmur (32.5%)	-	2011 s.d 2014	Permasalahan : Persiapan Pengadaan Tanah (Pembentukan TPT)
15	Pembangunan Jalan Tol Waru (Aloha) – Wonokromo – Tanjung Perak (18 Km) Pemegang Saham : PT Dharma Surya Mandiri (73.87%),PT Tridaya Esta (4.95%),PT Elnusa (16.69%) PT Jasa Marga Tbk (2.45%),PT Lintas Expres Sedaya (1.02%), PT Duta Graha Indah Tbk (1.02%)	-	Rp. 3.551 T	Permasalahan : Belum ada kesepakatan trase antara Pemerintah dengan Pemkot Surabaya
16	Pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang	1102	2011 s.d 2014	-
17	Pembangunan intake dan saluran air baku Mojokerto (100 l/s)	-	2011 s.d 2014	-
18	Pembangunan intake dan saluran air baku Lamongan (200 l/s)	9,5	2011 s.d 2014	-
19	Pembangunan Bendungan Gerak Sembayat	360,5	2011 s.d 2014	-

Visi Nasional tahun 2025 ialah “Mengangkat Indonesia Menjadi Negara Maju dan Merupakan Kekuatan 12 Besar Dunia di Tahun 2025 dan 8 Besar Dunia Pada Tahun 2045 Melalui Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Jawa Timur dengan visi tahun 2025 “Pusat Agrobisnis (Industri) Terkemuka di Asia, Berdaya Saing Global dan Berkelanjutan Menuju Jawa Timur Makmur dan Berakhlak” masuk dalam Koridor Jawa dengan Tema “Pendorong Industri dan Jasa Nasional”.

Jawa Timur sangat berpotensi besar untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonominya, hal ini didukung oleh 70 BUMN yang berada di Jawa Timur, yang terdiri dari : Sektor Agro Kimia berjumlah 14 BUMN, Sektor Jasa dan Infrastruktur berjumlah 26 BUMN, Sektor Perbankan dan Keuangan berjumlah 17 BUMN dan Sektor Pertambangan dan Energi berjumlah 3 BUMN.

Koridor Ekonomi Jawa sebagai **Pendorong Industri dan Jasa Nasional**, mampu memberikan sumbangan yang besar bagi nasional untuk mencapai Visi Negara Indonesia menjadi negara terkuat ke 12 dunia pada tahun 2025.

Gambar 2.39
Koridor Ekonomi Jawa Timur Sebagai Pendorong Industri dan Jasa Nasional



Tabel 2.97
Program Prioritas MP3EI Jawa Timur

No.	PROGRAM PRIORITAS MP3EI JAWA TIMUR	BUMN/Swasta	UPAYA SOLUTIF
1.	<p>Pengembangan Cluster Industri Berbasis Tebu / Gula</p> <ul style="list-style-type: none">❑ Produksi tebu sebesar 15.506.586 Ton❑ Produktivitas tebu mencapai 6,32 ton/ hektar❑ Rendemen rata-rata 6,76 %❑ Produksi gula sebanyak 1.048.735 ton❑ Produksi gula Jawa Timur memberikan kontribusi 47 % terhadap produksi gula nasional❑ Kebutuhan konsumsi gula masyarakat Jawa Timur sebesar 537.810 ton atau Jawa Timur surplus sebesar 510.925 ton❑ Industri Gula di Jawa Timur <p>Estimasi Biaya : 4 Trilyun</p>	PTPN X dan PTPN XI BUMN PERBANKAN DUNIA USAHA / SWASTA BUMN LAINNYA	Revitalisasi Pabrik Gula melalui Peremajaan Mesin Produksi
2.	<p>Pengembangan Cluster Industri Perkapalan</p> <ul style="list-style-type: none">❑ Mendirikan Perusahaan Industri Galangan Kapal di Kabupaten Tuban dan Lamongan <p>Estimasi Biaya : 1,5 Trilyun</p>	PT. PELINDO III KLASTER INDUSTRI PERKAPALAN SURABAYA (KIKAS) NATIONAL SHIP DESIGN & ENGINEERING CENTER (NASDEC) BUMN PERBANKAN DUNIA USAHA/SWASTA BUMN LAINNYA	Pembangunan Perusahaan Galangan Kapal

3.	<div>Pengembangan Cluster Industri Perhiasan</div> <div><div><div></div></div><div>Pertumbuhan industri perhiasan di Jawa Timur sebanyak 1.519 IKM</div><div><div></div></div><div>Pembangunan Perusahaan Perhiasan</div></div> <div>Estimasi Biaya : 1, 5 Trilyun</div>	<div>- PERUSAHAAN INDUSTRI PERHIASAN</div> <div>- DEWAN EMAS DUNIA</div> <div>- ASOSIASI PERHIASAN EMAS DAN PERMATA INDONESIA (APEPI)</div> <div>- BUMN PERBANKAN DUNIA</div> <div>- USAHA/SWAST</div> <div>- BUMN LAINNYA</div>	Pembangunan Cluster Industri Perhiasan
4.	Pengembangan Cluster Industri Otomotif	<div>• PT. INKA MADIUN</div> <div>• BUMN PERBANKAN DUNIA</div> <div>• USAHA/SWAST</div> <div>• BUMN LAINNYA</div>	Pendirian Perusahaan Produk Produk Supprting Industries Yang Terstandard

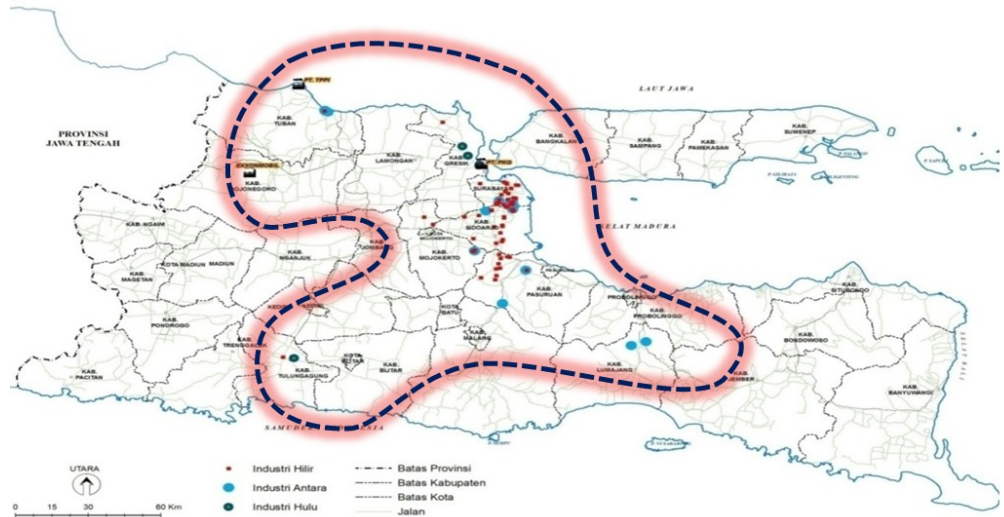
a. Master Plan Klaster Industri Migas dan Kondensat

Jawa Timur memiliki 126 industri berbasis petrokimia yang berada di 10 Kabupaten/kota, yang terdiri dari 7 Industri Hulu, 26 Industri Antara dan 96 Industri Hilir. Dengan jumlah industry berbasis petrokimia yang relatif besar, dibutuhkan Pasokan Gas dan Refinery dengan rincian pasokan gas sebesar 488 MMSCFD, sedangkan kebutuhan gas sebesar 893 MMSCFD, sehingga masih kekurangan 405 MMSCFD.

Tabel 2.98
Master Plan Kluster Industri

Wilayah	Potensi	Permasalahan	Upaya Solutif
Lamongan, Tuban, Bojonegoro dan Ngawi	Pupuk, Holcin, Semen Gresik, Etanol dan turunanya, industri perikanan, industri baja, Docking kapal, dan Migas	<div><div>Terjadi Lack Investasi</div><div>UU Investasi, Sering Kontra Produktif Dengan Keinginan Daerah (Golden Share, PI)</div><div>Pola Hubungan Yang Semula B to B, menjadi B to G</div></div>	<div><div>Revisi Kerangka Regulasi Investasi;</div><div>Membangun Industri Hilir (Baja, Dock Kapal, Migas, Dll) Untuk Mencukupi Kebutuhan Intenal maupun Ekspor</div></div>
Mojokerto dan Jombang	Panas Bumi, Industri Kertas, Industri Asam Amino, Industri Tebu, Pabrik Gula	<div><div>Industri Tabu “ Peralatan Kuno “</div></div>	<div><div>Revitalisasi Pabrik Gula dan Bidang Budidaya Tebu (On Farm)</div></div>
Nganjuk, Madiun, Ponorogo , Trenggalek dan Pacitan	Panas Bumi, Industri Berbasis Perikanan, Perkebunan dan Pertanian	<div><div>Ketergantungan Bahan Baku Import Casseva, dan Jagung,</div></div>	<div><div>Membangun Industri Casava dan Pabrik Jagung</div></div>
Surabaya, Sidoarjo, Bangkalan dan Gresik	Kawasan Industri Sedayu,, Industrik Perinakan dan Kelautan	<div><div>SDM dan Peralatan Masih Tradisional</div><div>Alih Teknologi Sangat Mahan</div></div>	<div><div>Pembangunan Alih Teknologi dan Infrastruktur Penunjang</div><div>Perlu Kebijakan Strategis Dalam Fasilitasi Daerah Pesisir</div></div>

Gambar 2.40
Master Plan Kluster Industri



b. Master Plan Klaster Industri Makanan dan Minuman

Industri Gula dengan total pabrik gula yang berdiri di Jawa Timur sebanyak 31 pabrik atau 43,66 % dari total 71 pabrik gula di Indonesia. Ketersediaan gula sampai dengan Agustus 2010 adalah sebesar 296.536 ton dan tambahan produksi bulan September 2010 sebesar 217.070 ton, sedangkan konsumsi gula sebesar 28.317 ton, sehingga terdapat surplus sebesar 485.289 ton.

c. Master Plan Klaster Industri Perkapalan

Jumlah industri menengah-besar perkapalan di Jawa Timur berjumlah 27 unit usaha dengan kapasitas terpasang 170.000 GT atau setara 255.000 DWT ($\pm 30\%$ dari kapasitas terpasang nasional). Adapun industri perbaikan kapal berjumlah 2 unit floating dock, 15 unit dry dock dan 3 unit slipway. Jumlah industri kecil menengah kapal rakyat berjumlah 52 perusahaan yang tersebar di 11 kabupaten (meningkat 33% dari tahun 2009 yang berjumlah 39 perusahaan).

Sejak MP3EI diluncurkan sampai akhir Desember 2011, di Jawa Timur telah dilaksanakan sejumlah Proyek Peralatan Transportasi dan Permesinan dengan total Proyek 27 dengan investasi 48.355 Milyar. Jumlah proyek yang sudah groundbreaking 8 proyek dengan nilai investasi 16.073 Milyar. Sehingga progress jumlah Proyek groundbreaking sebesar 30% dan progress jumlah nilai investasi sebesar 33%. Sedangkan untuk Sektor Riil Perkapalan, total jumlah 3 Proyek dengan Investasi 1.135 Milyar, jumlah proyek yang

sudah groundbreaking 2 proyek dengan nilai Investasi 800 Milyar, sehingga progress jumlah groundbreaking sebesar 67% dan progress jumlah nilai Investasi sebesar 70%.

Dibutuhkan Visi Yang Kuat Untuk Dapat Melihat Peluang Pembangunan Infrastruktur Transportasi dari Kerangka Rencana Induk MP3EI pada tahun 2015 yang memasuki fase ke-2, yaitu memperkuat basis ekonomi dan investasi.

1) Proyek Tertunda 2011

- a) Pengembangan panas bumi sebesar 1.342 megawatt yang dikelola PT Pertamina Geothermal Energi. Proyek ini tertunda hingga 2018 karena lokasinya berada di hutan Konservasi. Jika proyek tetap dikerjakan, maka Pertamina melanggar Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, dan Undang-Undang No 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi. Termasuk wilayah kerja panas bumi Argopuro di Probolinggo, Jawa Timur yang memiliki potensi 100 megawatt belum bisa dikembangkan karena berada di zona inti hutan konservasi.
- b) Pembangunan Umbulan Water Supply, estimasi nilai proyek USD 204,20 Juta.

2) Proyek Prioritas 2011

Proyek prioritas yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut : (i) Termasuk dalam Rencana Proyek PPP potensial atau yang diusulkan oleh kontraktor sebagai unsolicited project; (ii) Berdasarkan pra-kelayakan, proyek ini layak dari aspek hukum, teknis, dan keuangan; (iii) Identifikasi risiko dan alokasi telah diidentifikasi; (iv) Modus KPS telah ditetapkan; (v) Dukungan pemerintah telah diidentifikasi (untuk proyek marjinal) yaitu : Jalan Tol Pandaan-Malang (37,62 km), estimasi nilai proyek USD 293,20 Juta, Solicated, rencana operasi 2015.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Ketaatan Terhadap RTRW

Berdasarkan Permendagri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Raperda RTRW Provinsi dan

Kabupaten/Kota, dimana dalam proses evaluasi raperda RTRW Kabupaten/Kota harus melalui evaluasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Perkembangan jumlah Kabupaten/Kota yang telah melalui proses evaluasi yang dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Timur di gambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.99
Rasio Progress Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota
Tahun 2010 s.d 2012 Provinsi Jawa Timur

No	Uraian	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
1.	Jumlah Perda RTRW	11	16	33
2.	Jumlah Kabupaten/Kota	38	38	38
3.	Rasio (1/2)	0,2894	0,4210	0,8684

Pada tahun 2012 jumlah RTRW Kabupaten/kota di Jawa Timur yang telah diperdakan adalah 33 Kabupaten/Kota dengan rasio 0,8684 atau 86,84%. Kinerja evaluasi raperda RTRW kabupaten/kota oleh pemerintah provinsi jawa timur ditunjukkan dengan capaian yang nyata karena dari tahun 2010 hingga 2012 terjadi pertambahan jumlah perda RTRW untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

2. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Untuk mengantisipasi resiko terkecil dalam rangka menciptakan keselamatan pengguna jasa transportasi darat, peran *ratio* panjang jalan per jumlah kendaran menjadi salah satu ukuran yang sangat obyektif untuk digunakan sebagai indikator keamanan di jalan. Dengan asumsi bahwa semakin pendek *ratio* panjang jalan per jumlah kendaraan, akan semakin berisiko atau tingkat kenyamanan dan keselamatan di jalan akan semakin berkurang.

Pada tahun 2012 rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Jawa Timur tercatat 3,29 km untuk setiap 1000 kendaraan bermotor, lebih padat bila dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 3,57 km per 1000 kendaraan bermotor. *Ratio* ini mencerminkan tingkat padatnya arus lalu lintas di Jawa Timur. Kepadatan ini disebabkan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor lebih cepat bila dibandingkan dengan perkembangan panjang jalan yang ada. Hal ini juga dapat mengurangi tingkat kenyamanan

berkendara dan ikut memberikan andil bagi keselamatan berkendara.

Tabel 2.100
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2009 – 2012

No.	Uraian	2009	2010	2011	2012
1.	Panjang Jalan Negara, Prov, Kab/Kota	35.621,29	37.966,02	37.971,38	37.971,38
2.	Jumlah Kendaran Bermotor	8.809.434	9.554.530	10.645.817	11.529.441
Rasio (km/1000 kendaraan)		4,04	3,97	3,57	3,29

Sumber : Dinas PU Bina Marga Kab/Kota dan Dinas Perhubungan Kab/Kota

3. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Sejak tahun 2009 hingga tahun 2011 perkembangan jumlah orang yang menggunakan angkutan umum menunjukkan adanya peningkatan. Namun ketika memasuki tahun 2012 perkembangan jumlah orang yang menggunakan angkutan umum mengalami penurunan sebesar 0,13 persen, yaitu dari 226.139.427 orang di tahun 2011 menjadi 225.851.395 orang di tahun 2012. Hal ini diduga sebagai akibat dari bertambahnya jumlah kendaraan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, utamanya bagi kendaraan pribadi yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan transportasi.

Tabel 2.101
Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum di Jawa Timur
Tahun 2009 – 2012

No.	Jumlah	2009	2010	2011	2012
1.	Orang	217.843.701	220.120.287	226.139.427	225.851.395

Sumber: Dinas Perhubungan Kab/Kota

4. Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga/Bandara/Terminal per Tahun

Peningkatan jumlah orang melalui dermaga, bandara dan terminal dalam setahun bisa digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengkaji tingkat perkembangan pengguna jasa prasarana transportasi. Indikasinya semakin meningkat perkembangan pengguna jasa prasarana transportasi, semakin meningkat pula tuntutan akan ketersediaan dermaga, bandara dan terminal yang

merupakan bagian dari upaya percepatan pembangunan suatu daerah.

Tabel 2.102
Jumlah Orang Melalui Dermaga, Bandara dan Terminal di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2012

No.	Tempat	2009		2010		2011		2012	
		Berangkat	Datang	Berangkat	Datang	Berangkat	Datang	Berangkat	Datang
1.	Dermaga	103.769	102.288	121.304	114.584	641.503	620.693	622.407	611.284
2.	Bandara	5.643.243	5.454.068	5.554.970	6.632.618	6.448.921	7.523.050	6.884.211	7.664.324
3.	Terminal	86.988.589	119.551.744	87.811.639	119.885.172	88.684.088	122.221.172	88.548.401	121.520.768

Sumber: 1. Dinas Perhubungan Kabupaten Kota
2. PT. Pelindo III
3. PT. Angkasa Pura

Pada tahun 2012 jumlah orang yang berangkat dan datang melalui dermaga di Jawa Timur mengalami penurunan masing-masing sebesar 2,98 persen dan 1,52 persen, atau dari 641.503 orang yang berangkat di tahun 2011 menjadi 622.407 orang ditahun 2012 dan dari 620.693 orang yang datang di tahun 2011 menjadi 611.284 orang di tahun 2012.

Untuk jumlah orang yang berangkat dan datang melalui bandara tampak mengalami kenaikan yaitu sebesar 6,75 persen dan 1,88 persen, atau dari 6.448.921 orang yang berangkat di tahun 2011 menjadi 6.884.211 orang ditahun 2012 dan dari 7.523.050 orang yang datang di tahun 2011 menjadi 7.664.324 orang di tahun 2012.

Perkembangan jumlah orang yang berangkat dan datang melalui terminal telah mengalami penurunan yaitu sebesar 0,15 persen dan 0,57 persen, atau dari 88.684.088 orang yang berangkat di tahun 2011 menjadi 88.548.401 orang ditahun 2012 dan dari 122.221.172 orang yang datang di tahun 2011 menjadi 121.520.768 orang di tahun 2012.

Secara umum pada tahun 2012 pengguna jasa prasarana transportasi melalui bandar udara di Jawa Timur jumlahnya tampak meningkat dari tahun ke tahun. Namun sebaliknya untuk jumlah orang yang melalui dermaga dan terminal tampak menurun bila dibandingkan dengan tahun 2011.

5. Luas Wilayah Industri

Luas wilayah industri adalah persentase realisasi luas kawasan industri terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Kawasan industri di Provinsi Jawa Timur terdiri dari kawasan industri, kawasan peruntukan industri di luar kawasan industri, dan sentra industri. Adapun realisasi rasio luas kawasan industri di Jawa Timur dapat dilihat pada tabel:

Tabel 2.103
Persentase luas wilayah industri Tahun 2012

No	Uraian	Tahun 2012*
1.	Luas wilayah industri	69,286.25
2.	Luas seluruh wilayah budidaya	4,644,146.99
3.	Rasio (1/2)	0,01492

Sumber: Rekapitulasi RTRW Kabupaten/ Kota Se Jatim (*Angka bersifat sementara)

Untuk rasio luasan kawasan industri per masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.104
Persentase Luas Wilayah Industri Tahun 2012 Provinsi Jawa Timur

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Industri	Luas Seluruh Wilayah Budidaya	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1.	Pacitan	10.00	137,733.00	0.0001
2.	Ponorogo	8.00	118,576.00	0.0001
3.	Trenggalek	145.35	104,520.04	0.0014
4.	Tulungagung	250.00	128,573.90	0.0019
5.	Blitar	30.00	136,924.52	0.0002
6.	Kediri	1,692.31	128,356.25	0.0132
7.	Malang	3,700.00	268,274.60	0.0138
8.	Lumajang	9.00	323,346.00	0.0000
9.	Jember	1,130.00	171,903.00	0.0066
10.	Banyuwangi	50.00	229,164.00	0.0002
11.	Bondowoso	712.76	119,870.00	0.0059
12.	Situbondo	671.00	148,886.00	0.0045
13.	Probolinggo	1,282.33	246,302.15	0.0052
14.	Pasuruan	6,200.00	128,871.88	0.0481
15.	Sidoarjo	6,934.86	63,045.41	0.1100
16.	Mojokerto	12,337.92	479,145.00	0.0257
17.	Jombang	1,166.27	103,612.65	0.0113
18.	Nganjuk	1,209.20	110,962.88	0.0109
19.	Madiun	495.97	93,378.97	0.0053
20.	Magetan	10.00	58,168.00	0.0002
21.	Ngawi	1,428.27	102,597.58	0.0139
22.	Bojonegoro	3,397.00	227,040.82	0.0150
23.	Tuban	1,308.94	183,994.62	0.0071
24.	Lamongan	6,085.00	181,280.00	0.0336

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Industri	Luas Seluruh Wilayah Budidaya	Rasio
25.	Gresik	11,000.59	97,994.83	0.1123
26.	Bangkalan	3,240.00	118,452.98	0.0274
27.	Sampang	210.00	126,748.00	0.0017
28.	Pamekasan	127.21	70,551.23	0.0018
29.	Sumenep	250.00	160,077.50	0.0016
30.	Kota Kediri	305.01	6,117.08	0.0499
31.	Kota Blitar	69.00	2,720.00	0.0254
32.	Kota Malang	6.00	11,006.00	0.0005
33.	Kota Probolinggo	367.54	5,450.60	0.0674
34.	Kota Pasuruan	6.00	3,363.76	0.0018
35.	Kota Mojokerto	91.30	975.10	0.0936
36.	Kota Madiun	66.80	3,205.20	0.0208
37.	Kota Surabaya	3,255.92	33,306.00	0.0978
38.	Kota Batu	26.70	9,225.20	0.0029
TOTAL		69.286,25	4,643,720.75	0.0149

Luasan wilayah industri merupakan jumlah dari luasan kawasan industri, kawasan peruntukan industri diluar kawasan industri, dan sentra industri di Kabupaten/Kota. Dari jumlah rekapitulasi luas wilayah industri di Jawa Timur diperoleh rasio 0,0149 atau 1,49% dari luasan wilayah budidaya yang berada di Jawa Timur.

Sedangkan untuk Pembangunan Kawasan Industri atau sering pula disebut industrial estate adalah suatu kawasan atau tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana seperti lahan dan lokasi yang strategis serta fasilitas penunjang lainnya, seperti listrik, air, telepon, jalan, tempat pembuangan limbah, yang telah disediakan oleh perusahaan pengelola kawasan industri. Semula, perusahaan pengelola kawasan industri tersebut hanya dikuasai oleh pemerintah (BUMN), tetapi sekarang perusahaan swasta pun telah banyak diberi izin untuk membuka atau mengelola kawasan industri tersebut.

Adapun tujuan dibentuknya kawasan industri, adalah sebagai berikut:

- a. mempercepat pertumbuhan industri;
- b. memberikan kemudahan bagi kegiatan industri, terutama yang terkait dengan lokasi, perizinan, sarana dan prasarana;

- c. mendorong kegiatan industri agar terpusat dan berlokasi di kawasan industri;
- d. menyediakan fasilitas lokasi industri yang berwawasan lingkungan.

Tabel 2.105
Luas Kawasan Industri yang telah Dikembangkan di Jawa Timur Tahun 2012

No.	Kabupaten/Kota	Nama Kawasan Industri	Luas yang Dikembangkan (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Surabaya	Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER)	245
2	Sidoarjo	Sidoarjo Industrial Estate Berbek (SIEB)	87
3	Pasuruan	Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER)	500
4	Mojokerto	Ngoro Industrial Park 1 (NIP)	220
5	Mojokerto	Ngoro Industrial Park 2 (NIP)	230
6	Gresik	Maspion Industrial Estate	341
7	Gresik	Kawasan Indutri Gresik (KIG)	135
Jumlah			1.758

Sumber : Pengelola Kawasan Industri (PT. SIER, NIP, Maspion, KIG)

Perkembangan luas kawasan industri di Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir tidak mengalami perubahan, bahkan sebagian kawasan industri sudah tidak memungkinkan lagi untuk diperluas karena keterbatasan lahan yang tersedia. Sampai tahun 2012, realisasi luas kawasan industri yang dikembangkan di Jawa Timur baru mencapai 1.758 Ha, atau baru mencapai 0,05 persen dari yang direncanakan sebesar 0,21 persen untuk menampung seluruh industri di Jawa Timur. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk pembangunan kawasan industri baru yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang yang memadai agar menjadi pilihan investor untuk menanamkan investasi di wilayah tersebut.

6. Luas Wilayah Perkotaan

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Untuk menghitung luas wilayah perkotaan adalah persentase realisasi luas wilayah perkotaan terhadap luas rencana wilayah budidaya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Kawasan perkotaan akan diatur lebih lanjut dengan rencana rinci tata ruang berupa rencana detail tata ruang kota (RDTRK) dan Peraturan Zonasi (PZ). Sesuai ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, setiap Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota harus menetapkan bagian dari wilayah kabupaten/kota yang perlu disusun RDTR-nya. Bagian dari wilayah yang akan disusun RDTR tersebut merupakan kawasan perkotaan. Luas kawasan perkotaan pada kabupaten/kota di Jawa Timur dapat dilihat berdasarkan tabel berikut.

Tabel 2.106
Persentase luas wilayah perkotaan Tahun 2012
Provinsi Jawa Timur

No	Uraian	Tahun 2012*
1	Luas wilayah perkotaan	542,770.48
2	Luas seluruh wilayah budidaya	4,643,720.75
3	Rasio (1/2)	0.1169

Sumber: Rekapitulasi RTRW Kabupaten/Kota Se Jatim (*Angka bersifat sementara)

Sedangkan untuk luasan kawasan perkotaan di kabupaten/kota berdasarkan rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.107
Persentase luas wilayah perkotaan
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012 Provinsi Jawa Timur

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Perkotaan	Luas Seluruh Wilayah Budidaya	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1.	Pacitan	7,710.80	137,733.00	0.0560
2.	Ponorogo	5,119.91	118,576.00	0.0432
3.	Trenggalek	6,116.00	104,520.04	0.0585

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Perkotaan	Luas Seluruh Wilayah Budidaya	Rasio
4.	Tulungagung	29,934.00	128,573.90	0.2328
5.	Blitar	29,790.00	136,924.52	0.2176
6.	Kediri	15,090.00	128,356.25	0.1176
7.	Malang	14,440.92	268,274.60	0.0538
8.	Lumajang	5,728.01	323,346.00	0.0177
9.	Jember	73,038.00	171,903.00	0.4249
10.	Banyuwangi	15,323.33	229,164.00	0.0669
11.	Bondowoso	2,315.80	119,870.00	0.0193
12.	Situbondo	17,672.00	148,886.00	0.1187
13.	Probolinggo	3,779.75	246,302.15	0.0153
14.	Pasuruan	19,086.00	128,871.88	0.1481
15.	Sidoarjo	14,425.30	63,045.41	0.2288
16.	Mojokerto	2,665.00	479,145.00	0.0056
17.	Jombang	3,640.00	103,612.65	0.0351
18.	Nganjuk	7,140.00	110,962.88	0.0643
19.	Madiun	2,026.40	93,378.97	0.0217
20.	Magetan	17,407.10	58,168.00	0.2993
21.	Ngawi	40,472.00	102,597.58	0.3945
22.	Bojonegoro	10,362.71	227,040.82	0.0456
23.	Tuban	12,439.49	183,994.62	0.0676
24.	Lamongan	2,951.00	181,280.00	0.0163
25.	Gresik	554.29	97,994.83	0.0057
26.	Bangkalan	8,885.00	118,452.98	0.0750
27.	Sampang	26,568.00	126,748.00	0.2096
28.	Pamekasan	25,035.00	70,551.23	0.3548
29.	Sumenep	35,966.67	160,077.50	0.2247
30.	Kota Kediri	6,340.00	6,117.08	1.0364
31.	Kota Blitar	3,257.00	2,720.00	1.1974
32.	Kota Malang	14,528.00	11,006.00	1.3200
33.	Kota Probolinggo	5,667.00	5,450.60	1.0397
34.	Kota Pasuruan	3,529.00	3,363.76	1.0491
35.	Kota Mojokerto	1,647.00	975.10	1.6891
36.	Kota Madiun	3,392.00	3,205.20	1.0583
37.	Kota Surabaya	35,054.00	33,306.00	1.0525
38.	Kota Batu	13,674.00	9,225.20	1.4822
TOTAL		542,770.48	4,643,720.75	0.1169

Luas wilayah perkotaan diperoleh berdasarkan kawasan perkotaan yang telah ditetapkan didalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Kawasan perkotaan yang berada di wilayah administrasi kabupaten dihitung berdasarkan bagian/wilayah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan. Sedangkan untuk kawasan perkotaan pada wilayah administrasi kota dihitung secara utuh. Rasio kawasan perkotaan yang berada di Jawa Timur pada tahun 2012 mencapai 0,1169 atau 11,69 persen. Kawasan perkotaan menunjukkan wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat

permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

7. Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah produktif adalah persentase realisasi luas wilayah produktif terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Data ini diperoleh dari dinas terkait diantaranya Bappeprov dan instansi lain yang terkait seperti BPN dan Dinas Pertanian.

Data mengenai perubahan luas wilayah menurut penggunaannya seharusnya selalu dilakukan pemutakhiran setiap tahun dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pergeseran/perubahannya, mengingat perkembangan pemukiman atau perumahan di Jawa Timur sangat cepat, sehingga luas wilayah produktif dari tahun ke tahun relatif semakin berkurang. Pada kenyataan yang ada bahwa ketersediaan data mengenai perubahan luas wilayah menurut penggunaannya sangatlah sulit diperoleh.

Dari data yang diperoleh dari Bappeprov Jawa Timur yang tertuang dalam RTRW Luas wilayah produktif adalah persentase realisasi luas wilayah produktif terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Data ini diperoleh dari dinas terkait di antaranya Bappeprop dan dinas instansi lain yang terkait seperti BPN dan Dinas Pertanian. Luas wilayah produktif terkait dengan penyusunan RTRW yang telah disusun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Data mengenai perubahan luas wilayah menurut penggunaannya seharusnya selalu dilakukan pemutakhiran setiap tahun untuk mengetahui seberapa besar pergeseran/perubahannya, mengingat perkembangan pemukiman atau perumahan sangatlah pesat, sehingga luas wilayah produktif dari tahun ke tahun relatif semakin berkurang. Pada kenyataan yang ada bahwa ketersediaan data mengenai perubahan luas wilayah menurut penggunaannya sangatlah sulit diperoleh.

Dari data yang diperoleh dari Bappeprop Jawa Timur yang tertuang dalam RTRW maka rasio Luas Wilayah Produktif adalah sebesar 2.191.817 hektar atau 60,45 persen dari total luas kawasan budidaya. Angka ini menunjukkan bahwa dari luas lahan kawasan budidaya yang ada dalam RTRW hampir 61 persen yang diusahakan sebagai lahan produktif.

8. Luas Wilayah Kebanjiran

Cuaca dan iklim selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan sangat berpengaruh terhadap aktifitas kehidupan sehari-hari, serta bisa membawa dampak negatif bila terjadi banjir, sehingga bisa mengakibatkan banyaknya kerusakan dan kerugian yang terjadi. Terjadinya banjir juga berakibat terganggunya masyarakat dan dunia usaha dalam menghasilkan suatu barang/ jasa. Terjadinya banjir bahkan juga berakibat terhadap terganggunya perekonomian karena areal/ lahan untuk usaha pertanian atau usaha terganggu.

Luas wilayah banjir adalah persentase luas wilayah yang terkena banjir terhadap luas rencana kawasan yang telah diatur sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Luas wilayah banjir yang dimaksud disini adalah luas areal yang terkena banjir dibandingkan dengan luas wilayah yang digunakan untuk budi daya. Data ini diperoleh dari beberapa dinas instansi dari Kabupaten/Kota yang menangani seperti, dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, BPN, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Banjir adalah keadaan sungai, dimana aliran sungai tidak tertampung oleh palung sungai, sehingga terjadi limpahan dan atau genangan pada lahan yang semestinya kering. Untuk negara tropis, berdasarkan sumber airnya, air yang berlebihan tersebut dapat dikategorikan dalam empat kategori (bersumber dari RTRW) antara lain :

- 1) Banjir yang disebabkan oleh hujan lebat yang melebihi kapasitas penyaluran sistem pengaliran air yang terdiri dari sistem sungai alamiah dan sistem drainase buatan manusia.
- 2) Banjir yang disebabkan meningkatnya muka air di sungai sebagai akibat pasang laut maupun meningginya gelombang laut akibat badai.

- 3) Banjir yang disebabkan oleh kegagalan bangunan air buatan manusia seperti bendungan, tanggul, dan bangunan pengendalian banjir.
- 4) Banjir akibat kegagalan bendungan alam atau penyumbatan aliran sungai akibat runtuhnya/longsornya tebing sungai. Ketika sumbatan/bendungan tidak dapat menahan tekanan air maka bendungan akan hancur, air sungai yang terbendung mengalir deras sebagai banjir bandang.

Rasio luas wilayah kebanjiran di Jawa Timur adalah sebesar 1,43 persen dari luas kawasan budidaya yang ada atau seluas 518.54 ha. Luas Kebanjiran yang terjadi selama tahun 2012 diantaranya di beberapa Kabupaten Gresik, Bojonegoro, Lamongan, Tuban, Mojokerto, Kabupaten Situbondo, Pasuruan, Nganjuk, Bangkalan, Sampang, Tuban dengan luas areal genangan air yang bervariasi.

9. Luas Wilayah Kekeringan

Masalah kekeringan sering menjadi perbincangan yang tiada habisnya dan menjadi masalah yang cukup penting untuk dikoordinasikan bersama, karena terkait dengan upaya penanganan, pencegahan dan penanggulangannya. Masalah kekeringan yang belum bisa terselesaikan dari waktu ke waktu terus menjadi masalah berkepanjangan yang tidak terselesaikan, bahkan terus berulang dan semakin menyebar ke daerah-daerah yang tadinya tidak berpotensi terjadi kekeringan.

Demikian halnya di beberapa wilayah di Jawa Timur tidaklah terlepas pula dari masalah kekeringan yang terjadi. Kekeringan di beberapa wilayah terjadi yang diakibatkan oleh datangnya musim kemarau. Walaupun belum berpengaruh terhadap produksi pangan di Jawa Timur, akan tetapi perlu terus diwaspadai luas wilayah kekeringan yang terjadi, sehingga bisa dipantau terus dan tidak berpengaruh terhadap akibat yang ditimbulkan, seperti kelaparan, turunnya produksi pertanian, berkurangnya mata pencaharian dan sebagainya.

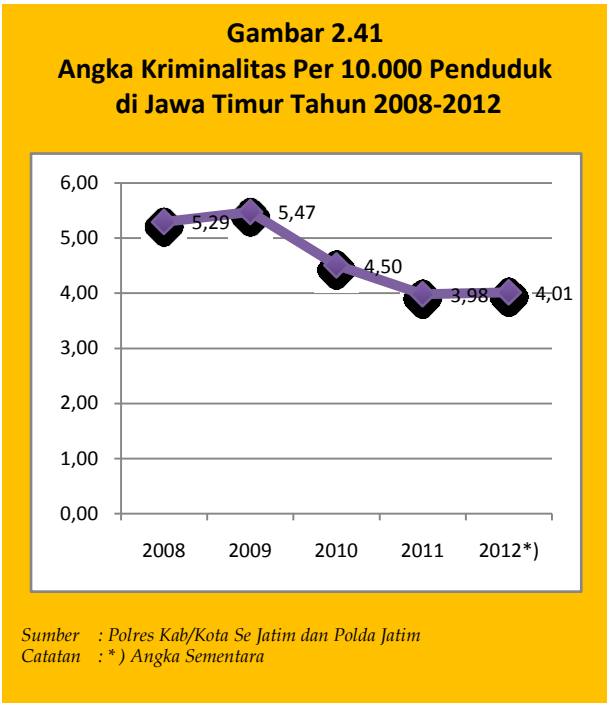
Sistem pemantauan dan peramalan produksi pangan, seperti luas tanam dan luas panen, estimasi produksi dan penyebarannya, kekeringan atau banjir, merupakan hal yang

penting dalam menentukan kebijakan pengadaan pangan. Oleh karena itu, sistem informasi pertanian perlu didukung oleh data yang mampu menyajikan data spasial yang objektif, tepat waktu, dan berkesinambungan, seperti citra satelit.

Daerah yang peluang terjadinya kekeringan cukup tinggi karena curah hujan rendah dan sumber air tanah terbatas, atau daerah yang mempunyai faktor fisik lahan/tanah yang dapat mempercepat timbulnya kekeringan dikategorikan sebagai wilayah rawan kekeringan. Rasio wilayah kekeringan di Jawa Timur sebesar 0,7 persen dari luas kawasan budidaya yang ada, atau sekitar 25.542 ha yang tersebar di beberapa wilayah kekeringan, seperti Kabupaten Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, Trenggalek, Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Situbondo, dan sebagian wilayah Madura yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Pamekasan.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

1. Angka Kriminalitas



Kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku serta norma-norma sosial dan agama. Angka kriminalitas merupakan suatu

angka yang menunjukkan kejadian kriminalitas yang terjadi pada suatu waktu dan daerah tertentu. Tindak kejahatan/kriminalitas dapat terjadi karena adanya kepincangan sosial, tekanan mental, dan kebencian. Selain itu juga karena adanya perubahan masyarakat dan kebudayaan

yang cepat tetapi tidak dapat diikuti oleh seluruh anggota masyarakat, sehingga tidak terjadi penyesuaian yang sempurna.

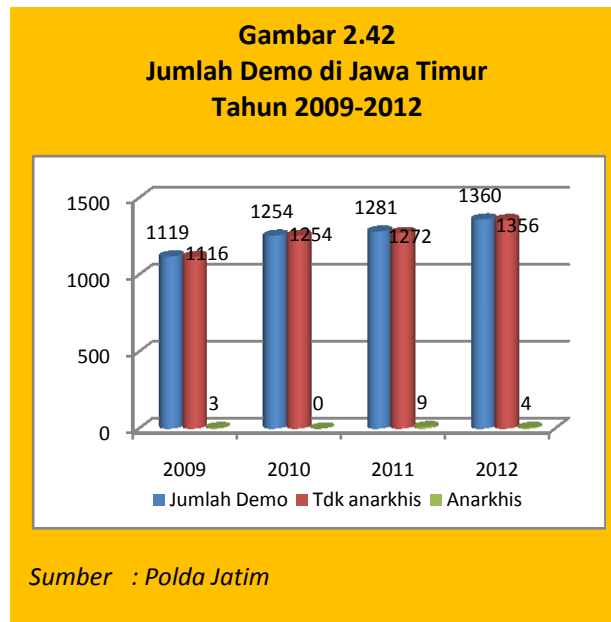
Tabel 2.108
Jumlah Tindak Kejahatan Menurut Jenisnya
Jawa Timur, Tahun 2010-2012

Jenis Kejahatan	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pembunuhan	118	137	160
2. Pemerkosaan	187	154	151
3. Penganiayaan Ringan	1.032	1.313	1.252
4. Penganiayaan Berat	1.911	1.661	1.586
5. Penculikan	30	19	17
6. KDRT	834	817	854
7. Kebakaran	256	320	332
8. Pencurian dengan Pemberatan	6.026	5.250	5.170
9. Pencurian dengan Kekerasan	1.490	1.087	1.134
10. Pencurian Kendaraan Bermotor	4.556	3.827	4.359
11. Pencurian Kawat Telepon	170	188	104
12. Pencurian Hewan	269	218	151
J u m l a h	16.879	14.991	15.270

Sumber : Polda Jatim

Berdasarkan data Polda Jatim, angka kriminalitas ditunjukkan melalui jumlah tindak kriminal yang terjadi selama 1 tahun per 10.000 penduduk. Pada tahun 2011 angka kriminalitas sekitar 3,98 dan pada tahun 2012 angka kriminalitas sekitar 4,01, ini berarti selama 2 tahun terakhir terjadi 3 tindak kriminal di antara 10.000 penduduk per tahunnya.

Jumlah Demo



Unjuk rasa atau demonstrasi (“demo”) adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau

penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Di Indonesia, unjuk rasa menjadi hal yang umum sejak jatuhnya rezim kekuasaan Soeharto pada tahun 1998, dan unjuk rasa menjadi simbol kebebasan berekspresi di negara ini.

Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya. Di Jawa Timur, kejadian unjuk rasa disebabkan karena adanya beberapa isu-isu seperti isu-isu pengupahan, kebebasan berserikat, pelaksanaan outsourcing, beberapa masalah masyarakat seperti isu kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan BBM, dan sebagainya.

2. Lama Proses Perijinan

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), kualitas aparatur pemerintah di semua sektor pelayanan publik harus senantiasa ditingkatkan. Peningkatan kualitas pelayanan menyangkut berbagai aspek meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sistem dan prosedur pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan serta SDM pelayanan.

Proses perijinan bila dipandang dari sisi pelaku bisnis hanya terdiri dari tiga hal yaitu “syaratnya apa, bayarnya berapa dan jadinya kapan”, namun seringkali menjadi pelik di lapangan. Oleh sebab itu maka perizinan yang sudah terbangun, apalagi online perlu selalu dievaluasi untuk ke arah kesempurnaan system perijinan tersebut bagi semua pihak.

Di Propinsi Jawa Timur, lama waktu untuk memproses perijinan menurut Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) bisa diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

3. Perkembangan Jumlah Dan Macam Pajak Dan Retribusi Daerah

Salah satu perubahan mendasar dari perubahan paradigma dengan adanya reformasi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan memberikan kewenangan lebih besar dalam bidang politik, pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan sumber-sumber daya daerah untuk kepentingan masyarakat lokal, yang bermuara pada terciptanya dinamika serta corak pembangunan baru di daerah. Salah satu aspek penting kebijakan di bidang keuangan daerah adalah kebijakan di bidang penerimaan/pendapatan daerah. Pendapatan daerah (langsung) pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya, yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam melakukan pungutan terhadap pos-pos pajak dan retribusi daerah melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi dengan berprinsip pada pelayanan yang optimal serta tidak memberatkan masyarakat.

Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat mendorong pemerintah daerah untuk mengupayakan peningkatan daerah dengan memberi perhatian kepada pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Secara konsep, PAD adalah salah satu sumber penerimaan yang harus dioptimalkan peranannya agar mampu memberikan kompensasi kepada masyarakat berupa pelayanan yang baik dan perbaikan fasilitas umum. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD yang memadai akan menentukan tingkat kemandirian provinsi dalam pembangunan daerahnya sehingga tidak selalu tergantung kepada bantuan dari pemerintah pusat. Salah satu

langkah yang bisa ditempuh pemerintah daerah adalah memberikan kemudahan dalam investasi bagi sektor swasta sehingga akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh tumbuhnya sektor swasta. Sumber-sumber PAD diantaranya adalah hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah. Komponen PAD tersebut secara penuh harus dapat dikelola daerah agar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah agar dalam upaya penggalan sumber pendapatannya pemerintah tidak mendistorsi perekonomian. Otonomi daerah yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah harus dimanfaatkan dalam konteks memberikan pelayanan yang lebih baik, bukan dengan pembebanan pajak yang semakin meningkat yang bisa memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan gambaran langkah konkret pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Disamping itu, pemerintah daerah masih perlu melakukan penanganan gejolak ekonomi dan politik yang masih terjadi beberapa tahun terakhir. Pemerintah dituntut menjadi motor utama dalam menggerakkan perekonomian yang lesu agar dapat kembali ke posisi sebelum krisis.

Tabel tentang jenis dan jumlah pajak yang diberlakukan di Jawa Timur informasi datanya diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sebelumnya bernama Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk data jenis dan nilai retribusi dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pada tahun 2008, penerimaan pajak dan retribusi Jawa Timur mengalami peningkatan sebesar 19,93 persen atau bisa dikatakan penerimaan pajak dan retribusi tahun 2008 mencapai Rp. 4.790,64 milyar sedangkan tahun 2007 hanya sebesar Rp. 3.835,99 milyar sehingga ada kenaikan sebesar Rp. 954,66 milyar selama setahun tersebut . Kemudian pada tahun 2009 nilai pajak dan retribusi mengalami peningkatan lagi jika dibanding tahun sebelumnya dengan capaian hanya sebesar 3,57 persen atau naik sebesar Rp. 177,13 milyar. Peningkatan terjadi lagi di tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 1.005,78 milyar atau naik 16,84 persen. Sementara pada tahun 2011 nilai pajak dan

retribusi mengalami kenaikan yang cukup berarti yaitu sebesar 18,89 persen atau dari Rp. 5.973,56 milyar tahun 2010 menjadi Rp. 7.364,60 milyar pada tahun 2011. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 2012, nilai pajak dan retribusi mengalami kenaikan lagi yaitu sebesar 7,20 persen atau naik sebesar Rp. 571,38 milyar. Nilai Pajak dan retribusi dari tahun ke tahun yang terus mengalami peningkatan walaupun kenaikannya fluktuatif dimungkinkan karena semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat Jawa Timur terhadap kewajiban pajak yang harus dibayarkan serta semakin tinggi pula tingkat kepercayaannya terhadap pemerintah.

Jika ditinjau lebih rinci lagi antara nilai penerimaan pajak dan retribusi, maka terlihat dari tahun ke tahun penerimaan pajak Jawa Timur nilainya selalu lebih besar dibanding penerimaan retribusinya. Pada tahun 2008 dari penerimaan pajak dan retribusi, sebesar 93,55 persen merupakan penerimaan pajak sedangkan retribusi hanya 6,45 persen. Kemudian pada tahun 2009 nilai penerimaan pajak mengalami peningkatan sebesar 9,15 persen sehingga total pajak menjadi 98,47 persen dari total pajak dan retribusi, sedangkan untuk retribusi secara nominal terjadi kontraksi dan persentasenya juga mengalami penurunan sehingga peranannya menjadi 1,53 persen dari total penerimaan pajak dan retribusi di tahun yang sama. Setahun kemudian (2010), penerimaan pajak meningkat lagi secara berarti baik secara nominal maupun persentase yaitu sebesar Rp. 1.015,50 milyar atau naik sekitar 20,76 persen sehingga peranan pajak menjadi 98,89 persen sementara retribusi peranannya mengalami penurunan sangat drastis menjadi 1,11 persen. Secara nominal pajak pada tahun 2011 juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya, namun hanya berperan sebesar 99,10 persen, sebaliknya retribusi peranannya mengalami penurunan lagi menjadi 0,90 persen. Demikian pula pada tahun 2012 walaupun secara nominal nilai pajak naik walaupun kenaikannya tidak sebesar dibanding tahun sebelumnya sehingga peranan pajak hanya sebesar 98,50 persen, sementara itu untuk retribusi secara nominal mengalami kenaikan yang cukup signifikan yakni sebesar 79,91 persen dibanding nilai

retribusi tahun sebelumnya sehingga mampu meningkatkan peranannya menjadi sebesar 1,50 persen.

Tabel 2.109
Jenis dan Nilai Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2008-2012 (Milyar Rp)

Jenis Pajak/Retribusi	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jenis Pajak	4.481,79	4.891,82	5.907,32	7.298,24	7.816,59
Pajak Kendaraan Bermotor	1.697,83	2.068,03	2.269,94	2.692,58	3.287,11
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.722,67	1.789,32	2.513,49	3.366,06	3.138,04
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.024,22	996,92	1.081,27	1.217,23	1.365,52
Pajak Air Permukaan	18,83	18,65	21,42	22,37	25,91
Pajak Air Bawah Tanah	18,24	18,90	21,19	-	-
Jenis Retribusi	308,85	75,95	66,24	66,36	119,39
Retribusi Jasa Umum	259,84	22,38	12,10	7,35	60,99
Restribusi Jasa Usaha	33,40	34,77	37,35	43,17	57,69
Restribusi Perijinan Tertentu	15,61	18,80	16,79	15,84	0,71
Jumlah	4.790,64	4.967,77	5.973,56	7.364,60	7.935,98

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur & DinasPendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

Apabila diperhatikan per jenis pajak, ternyata penerimaan pajak terbesar (\pm 99 persen) berasal dari jenis pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Keadaan ini diduga karena semakin besarnya minat masyarakat Jawa Timur yang menggunakan kendaraan pribadi daripada angkutan umum terutama jenis kendaraan roda dua. Kondisi tersebut dapat dilihat dari padatnya lalu lintas di jalan terutama di kota-kota besar yang ada di Jawa Timur. Pada tahun 2008, nilai ketiga jenis pajak tersebut sebesar Rp. 4.444,72 milyar artinya 99,17 persen pajak yang diterima berasal dari ke tiga jenis pajak tersebut di atas. Kemudian pada tahun 2009, pajak yang berkaitan dengan kendaraan bermotor naik lagi menjadi Rp. 4.854,26 milyar atau naik sebesar 9,21 persen atau dapat dikatakan pajak yang diterima oleh pemerintah Jawa Timur mendapat sumbangan sebesar 99,23 persen dari pajak yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Sementara pada tahun 2010 pajak ini

mengalami peningkatan yang sangat berarti yaitu sebesar 20,82 persen, tahun 2011 naik lebih signifikan lagi dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 24,06 persen, dan tahun 2012 meningkat lagi sebesar 7,08 persen.

Dilihat per jenis retribusi, penerimaan retribusi terbesar dari tahun ke tahun bervariasi sumbernya. Pada tahun 2008 penerimaan retribusi terbesar bersumber dari retribusi jasa umum yang menyumbang sebesar 84,13 persen dari total retribusi yang diterima. Namun pada tahun 2009 sampai 2011 peranan retribusi Jasa Umum mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu hanya sebesar 29,46 persen, 18,27 persen dan 11,07 persen, sebaliknya retribusi Jasa Usaha mempunyai peranan yang amat besar di tahun-tahun tersebut. Pada tahun 2008 peranan retribusi Jasa Usaha hanya berkisar sebesar 10,82 persen, kemudian tahun 2009 sampai dengan 2011 peranannya meningkat tajam menjadi 45,78 persen, 56,38 persen dan 65,05 persen. Sedangkan untuk retribusi Perijinan tertentu pada tahun 2008 berperan sekitar 5 persen, namun pada tahun 2009 hingga 2011 meningkat menjadi sekitar 25 persen. Kemudian pada tahun 2012 penerimaan retribusi terbesar bersumber dari retribusi jasa umum yang mempunyai peranan sebesar 51,08 persen dari total penerimaan retribusi. Menurut informasi yang didapat dari Dispenda Provinsi Jawa Timur kondisi ini terjadi semenjak tahun 2008 karena penerimaan kas pada Restribusi Jasa Umum mengalami penurunan seperti dari RS. Dr. Sutomo Surabaya, RS. Haji Surabaya, RS. Soedono Madiun dan RS. Saiful Anwar Malang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Namun pada tahun 2012 penerimaan retribusi jasa umum kembali mengalami peningkatan.

4. Perkembangan Realisasi Investasi

Jumlah realisasi investasi di Jawa Timur dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 semakin meningkat baik dari penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing.

Tabel 2.110
Perkembangan Realisasi Nvestasi Tahun 2009 – 2012
(Trilyun Rupiah)

TAHUN	NON FASILITAS	PMDN	PMA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)
2009	38,77	4,29	3,80	46,86
2010	56,26	9,59	16,73	82,58
2011	70,07	20,33	20,07	110,4
2012	79,57	28,73	25,13	133,43

Sumber: Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur

Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 proyek invstasi yang disetujui pemerintah Jawa Timur terus mengalami peningkatan. Kenaikan jumlah realisasi investasi tahun 2012 dibanding tahun 2011 mencapai lebih dari 17 persen yaitu meningkat sebanyak Rp. 23,03 trilyun, dari total investasi tersebut berasal dari PMDN sebanyak Rp. 28,73 trilyun, PMA sebanyak Rp. 25,13 Trilyun dan non fasilitas sebanyak Rp. 79,57 trilyun. Kenaikan ini dipicu oleh adanya kemudahan-kemudahan di dalam proses perizinan dan sebagainya dari pemerintah Jawa Timur sehingga membuat investor menjadi tertarik untuk menanamkan modalnya. Jenis proyek

Berdasarkan bidang usaha, Investasi tahun 2012 didominasi oleh industri makanan sebanyak Rp. 20,93 trilyun (39 %), listrik gas dan air sebesar Rp. 7,77 trilyun (14%) dan yang ketiga industri logam mesin dan elektronika dengan total investasi sebanyak Rp.5,76 trilyun (11%).

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam menunjang kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga

kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

Dalam lampiran PP No 6 tahun 2008 dijelaskan bahwa indikator ini digunakan untuk mengukur kualitas penduduk. Karena produktifitas penduduk di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Harapannya semakin tinggi kualitas penduduk yang tercermin dari rasio lulusan S1/S2/S3, maka akan semakin baik kualitas tenaga kerja. Output dari kondisi ini akan menguatkan kemampuan ekonomi penduduk di suatu wilayah.

Tabel 2.111
Rasio Lulusan D4/S1/S2/S3
Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 -2012

NO	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Laki-Laki	18.134.904	18.241.264	18.532.256	18.639.561	18.740.054
	Perempuan	18.837.378	18.994.885	18.944.501	19.048.061	19.312.896
	Jumlah Penduduk	36.972.282	37.236.149	37.476.757	37.687.622	38.052.950
2.	Laki-Laki Lulusan D4/S1/S2/S3	461.896	614.395	625.422	628.292	723.525
	Perempuan Lulusan D4/S1/S2/S3	427.507	511.371	535.910	558.760	615.711
	Jumlah Lulusan D4/S1/S2/S3	889.403	1.125.766	1.161.332	1.187.052	1.339.236
3	Rasio Lulusan D4/S1/S2/S3Laki-Laki	255	337	337	337	386
	Rasio Lulusan D4/S1/S2/S3Perempuan	227	269	283	293	319
	Rasio Lulusan D4/S1/S2/S3	241	302	310	315	352
	Sex rasio Lulusan D4/S1/S2/S3	108	120	117	112	118

Sumb er : BPS Provinsi Jawa Timur (Juni 2012)

Rasio lulusan S1/S2/S3 selama 2008-2012 berkisar pada angka 300 per 10.000 penduduk, dan angkanya menunjukkan adanya kecenderungan terus meningkat. Pada tahun 2008 rasio lulusan S1/S2/S3 sebesar 241 dan pada tahun 2012 menjadi 352 lulusan S1/S2/S3 per 10.000 penduduk.

Kalau dilihat menurut jenis kelamin, dalam rentang 2008-2012, lulusan S1/S2/S3 penduduk laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan, hal ini terlihat dari angka sex rasio lulusan S1/S2/S3 nilainya diatas 100 persen. Sex ratio lulusan S1/S2/S3 pada tahun 2008 sebesar 108 persen menjadi 118 persen di tahun 2012.

Kondisi ini memberikan gambaran masih adanya ketimpangan gender pada bidang pendidikan.

Kalau dilihat menurut kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2012 Kabupaten Sampang merupakan wilayah yang paling rendah penduduknya lulusan S1/S2/S3 yaitu sebesar 81 per 10.000 penduduk sedangkan Kota Malang merupakan wilayah yang paling tinggi penduduknya lulusan S1/S2/S3 yaitu sebesar 1.118 per 10.000 penduduk.

Tabel 2.112
Rasio Lulusan DIV/S1/S2/S3 Menurut Kabupaten/Kota
Di Jawa Timur Tahun 2012

NO	Kabupaten/kota	Jumlah Penduduk	Lulusan D4/S1/S2/S3	Rasio Lulusan D4/S1/S2/S3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kab. Pacitan	543.391	12.036	222
2.	Kab. Ponorogo	857.623	27.357	319
3.	Kab. Trenggalek	678.876	18.069	266
4.	Kab. Tulungagung	1.002.113	29.948	299
5.	Kab. Blitar	1.126.556	24.517	218
6.	Kab. Kediri	1.518.121	37.330	246
7.	Kab. Malang	2.487.120	68.766	276
8.	Kab. Lumajang	1.014.575	18.410	181
9.	Kab. Jember	2.362.179	61.246	259
10.	Kab. Banyuwangi	1.568.898	51.826	330
11.	Kab. Bondowoso	745.948	20.435	274
12.	Kab. Situbondo	656.691	15.525	236
13.	Kab. Probolinggo	1.115.267	24.109	216
14.	Kab. Pasuruan	1.542.837	19.262	125
15.	Kab. Sidoarjo	2.024.678	131.771	651
16.	Kab. Mojokerto	1.049.967	27.758	264
17.	Kab. Jombang	1.217.560	32.392	266
18.	Kab. Nganjuk	1.025.515	35.152	343
19.	Kab. Madiun	666.373	16.170	243
20.	Kab. Magetan	621.273	20.704	333
21.	Kab. Ngawi	818.871	20.970	256
22.	Kab. Bojonegoro	1.218.457	19.830	163
23.	Kab. Tuban	1.131.892	23.394	207
24.	Kab. Lamongan	1.193.725	49.442	414
25.	Kab. Gresik	1.213.449	52.053	429
26.	Kab. Bangkalan	927.433	18.356	198
27.	Kab. Sampang	904.314	7.292	81
28.	Kab. Pamekasan	818.662	16.455	201
29.	Kab. Sumenep	1.053.640	17.565	167
30.	Kota Kediri	273.679	19.096	698
31.	Kota Blitar	134.554	8.758	651
32.	Kota Malang	835.082	93.325	1.118
33.	Kota Probolinggo	222.413	10.073	453
34.	Kota Pasuruan	190.045	10.607	558
35.	Kota Mojokerto	122.550	10.264	837
36.	Kota Madiun	172.421	13.508	783
37.	Kota Surabaya	2.801.409	247.346	883

NO	Kabupaten/kota	Jumlah Penduduk	Lulusan D4/S1/S2/S3	Rasio Lulusan D4/S1/S2/S3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
38.	Kota Batu	194.793	8.118	417
	Provinsi	38.052.950	1.339.236	352

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur (Juni 2012)

2. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Yang termasuk penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun, sedangkan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 tahun (karena umunya sudah melewati masa pensiun. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio ketergantungan dapat dihitung dengan perbandingan jumlah penduduk usia < 15 tahun dan > 64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun.

Tabel 2.113
Rasio Ketergantungan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010 - 2012
Provinsi Jawa Timur

No	Uraian	Jumlah Penduduk Berusia			Rasio Ketergantungan
		< 15 tahun	> 64 tahun	15 – 64 Tahun	
1.	2010				
	Laki	4.709.724	1.088.905	12.655.350	45,82
	Perempuan	4.501.629	1.515.520	13.030.855	46,18
	Laki+Perempuan	9.211.353	2.604.425	25.686.205	46,00
2.	2011				
	Laki	4.681.923	1.120.984	12.796.401	45,35
	Perempuan	4.475.868	1.537.198	13.169.225	45,66
	Laki+Perempuan	9.157.791	2.658.182	25.965.626	45,51
3.	2012				
	Laki	4.645.520	1.151.197	12.943.337	44,79
	Perempuan	4.443.769	1.558.943	13.310.184	45,10
	Laki+Perempuan	9.089.289	2.710.140	26.253.521	44,94

Rasio ketergantungan atau Dependency ratio (DR) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Pada tahun 2012, angka DR untuk Jawa Timur sebesar 44,94 yang artinya bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sebanyak 45 orang penduduk usia non produktif. Dari tahun ke tahun, angka DR menunjukkan penurunan, yang berarti bahwa semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Dari Tabel 1.2.1 dapat ditunjukkan angka DR laki-laki lebih rendah dibandingkan angka DR perempuan, yang berarti bahwa beban tanggungan penduduk perempuan usia produktif lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

3. Indeks Pembangunan Manusia

a) Status Pembangunan Manusia

Keberhasilan pemerintah daerah dalam upaya membangun kualitas hidup penduduknya terpotret dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dari angka IPM diketahui keterbandingan/posisi pembangunan manusia antar kabupaten/kota di Jawa Timur dari sisi kesehatan, pendidikan dan daya beli. Data IPM ini menginspirasi Pemerintah Daerah untuk menentukan prioritas program pembangunan manusia di wilayahnya.

Secara umum angka IPM di Jawa Timur selama periode 2008-2012 menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2008 nilainya 70,38, dan selanjutnya meningkat terus menjadi 71,06 (2009); 71,62 (2010); 72,18 (2011) dan pada tahun 2012 mencapai 72,54. Dari hasil penghitungan IPM tahun 2012, diperoleh gambaran bahwa 19 Kabupaten/Kota mempunyai IPM lebih tinggi daripada IPM Jawa Timur, sedangkan 19 kabupaten lainnya memiliki nilai IPM lebih rendah daripada angka IPM Jawa Timur. Nilai IPM tertinggi dicapai oleh Kota Blitar sebesar 78,14 sedangkan urutan kedua ditempati Kota Surabaya dengan angka IPM 78,08 dan urutan ketiga adalah Kota Malang sebesar 77,99. Urutan

terendah IPM adalah Kabupaten Sampang dengan nilai 61,03, namun angka ini lebih baik jika dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang sebesar 60,78.

Tabel 2.114
Perkembangan Angka IPM Selama di Jawa Timur
Tahun 2008-2012

No.	Tahun	IPM	Angka IPM Tertinggi	Angka IPM Terendah	Jml. Kab dengan IPM di bawah rata-rata Jatim	Jml. Kab dengan IPM di atas rata-rata Jatim
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	2008	70,38	76,60	57,66	19	19
2.	2009	71,06	76,98	58,68	19	19
3.	2010	71,62	77,42	59,70	19	19
4.	2011*	72,18	77,89	60,78	19	19
5.	2012**	72,54	78,14	61,03	19	19

Sumber : BPS RI

Keterangan : *) Angka Diperbaiki

Selama tahun 2008 – 2012, IPM kabupaten/kota mengalami kenaikan walaupun tidak menunjukkan kenaikan yang drastis. Kenaikan IPM ini tidak terlepas dari adanya berbagai program yang digulirkan oleh Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk meningkatkan pembangunan manusianya, seperti program di bidang kesehatan, pendidikan maupun ekonomi dan peningkatan kualitas sarana prasarana masyarakat lainnya. Keberhasilan program tersebut juga tergantung pada pola pikir masyarakat setempat dalam pemanfaatan sarana tersebut.

b) Kecepatan Pencapaian Pembangunan Manusia

Kecepatan peningkatan pencapaian pembangunan manusia dapat diukur dengan reduksi shortfall per tahun, yang selama periode 2008-2012 besaran reduksi shortfall Jawa Timur adalah 1,64. Semakin besar angka reduksi shortfall semakin cepat pembangunan manusianya. Dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, terdapat 6 kabupaten/kota yang memiliki reduksi shortfall dan angka IPM yang lebih tinggi dari angka IPM Jawa Timur. Kemudian pada kuadran II hanya terdapat 4 kabupaten/kota yang memiliki shortfall lebih tinggi dari shortfall Jawa Timur tetapi mempunyai IPM yang lebih rendah daripada Jawa Timur.

Sedangkan 15 kabupaten/kota yang memiliki reduksi shortfall lebih rendah dan IPM yang lebih rendah daripada Jawa Timur berada di kuadran III. Kabupaten/kota yang berada di kuadran IV atau memiliki IPM lebih tinggi dari

Jawa Timur tetapi mempunyai reduksi shortfall rendah sebanyak 13 daerah. Daerah yang memiliki shortfall terendah adalah Kabupaten Bangkalan sebesar 1,53.

Dilihat dari komponen indeks kesehatan yang dicerminkan oleh besaran angka harapan hidup, angka tertinggi berhasil dicapai Kota Blitar yaitu sebesar 79,51 dan angka terendah sebesar 60,87 dicapai oleh Kabupaten Probolinggo. Sebanyak 17 kabupaten/kota berada pada kuadran I yang memiliki nilai IPM dan indeks kesehatan yang lebih tinggi dari angka Jawa Timur. Hanya 2 kabupaten yang menempati kuadran II yaitu Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Ngawi. Pada kuadran III terdapat 17 kabupaten yang memiliki nilai IPM dan indeks kesehatan yang lebih rendah daripada angka Jawa Timur, termasuk di dalamnya sebagian daerah tapal kuda. Kuadran IV ditempati oleh Kota Pasuruan dan Kota Batu.

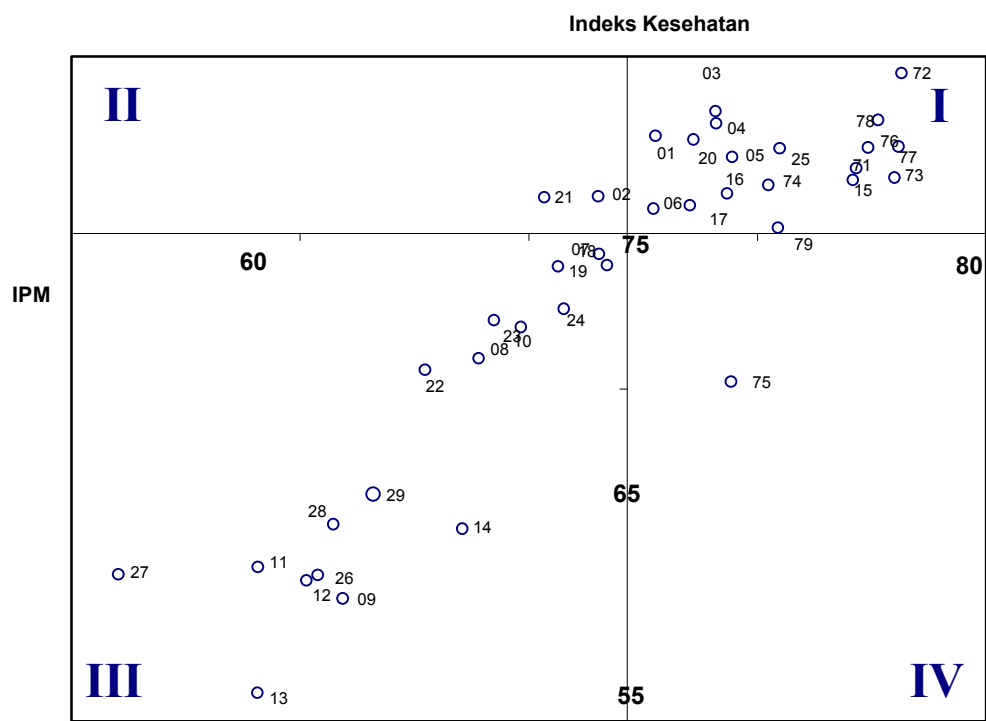
Dalam perspektif peningkatan derajat kesehatan, karena komponen indeks kesehatan pada penghitungan IPM dicerminkan oleh besaran angka harapan hidup, maka untuk memaksimalkan peningkatan angka harapan hidup yaitu dengan usaha menurunkan tingkat kematian bayi dan kematian ibu melahirkan harus terus menjadi prioritas. Beberapa faktor yang cukup sensitif terhadap perubahan angka kematian bayi dan ibu seperti pola makanan yang bergizi dan penolong kelahiran/persalinan, perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak terkait. Dalam usaha meningkatkan nilai indeks kesehatan ini, pemerintah daerah perlu memperhatikan wilayah yang memiliki indeks kesehatan yang masih rendah, antara lain dengan mengupayakan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses sarana kesehatan, peningkatan kualitas dan pembangunan sarana kesehatan yang memadai.

Sementara itu, dari penghitungan komponen kedua pendukung IPM yaitu indeks pendidikan, pada tahun 2012 tercatat tertinggi dicapai Kota Malang sedangkan nilai terendah dicapai Kabupaten Sampang dengan nilai masing-masing sebesar 89,33 dan 54,47. Kuadran I atau mempunyai IPM dan indeks pendidikan tinggi ditempati 19 kabupaten/kota yang mencakup seluruh wilayah kota. Pada kuadran II terdapat 3 kabupaten/kota yang memiliki IPM lebih rendah dari Jawa Timur, tetapi mempunyai indeks pendidikan yang lebih tinggi dari indeks Jawa Timur yaitu Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun dan Kabupaten

Lamongan. Sebanyak 16 Kabupaten berada di kuadran III dan tidak ada kabupaten/kota yang menempati kuadran IV.

Hasil penghitungan indeks kesehatan dan indeks pendidikan menunjukkan korelasi bahwa sebagian besar wilayah dengan indeks kesehatan rendah juga merupakan daerah yang memiliki indeks pendidikan rendah. Hal ini sesuai dengan teori yang ada yaitu semakin rendah tingkat pendidikan yang dimiliki di suatu wilayah maka tingkat kesehatan masyarakat pun juga semakin rendah.

Gambar 2.43
Pengelompokan Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Berdasarkan IPM dan Indeks Kesehatan Tahun 2012



Kabupaten				Kota			
01	Pacitan	11	Bondowoso	21	Ngawi	71	Kediri
02	Ponorogo	12	Situbondo	22	Bojonegoro	72	Blitar
03	Trenggalek	13	Probolinggo	23	Tuban	73	Malang
04	Tulungagung	14	Pasuruan	24	Lamongan	74	Probolinggo
05	Blitar	15	Sidoarjo	25	Gresik	75	Pasuruan
06	Kediri	16	Mojokerto	26	Bangkalan	76	Mojokerto
07	Malang	17	Jombang	27	Sampang	77	Madiun
08	Lumajang	18	Nganjuk	28	Pamekasan	78	Surabaya
09	Jember	19	Madiun	29	Sumenep	79	Batu
10	Banyuwangi	20	Magetan				

Sumber : BPS RI

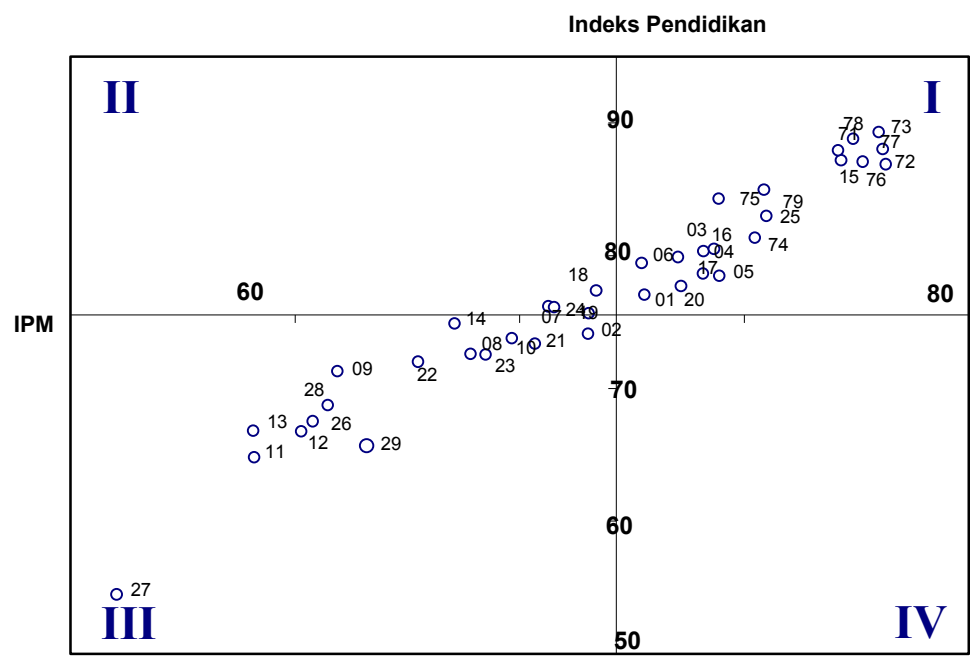
Indeks kesehatan dan pendidikan penduduk yang tinggal di sebagian besar wilayah tapal kuda relatif rendah dibandingkan rata-rata kabupaten/kota di Jawa Timur. Hal ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap rendahnya nilai pembangunan manusia di wilayah tapal kuda. Rendahnya kedua komponen tersebut, diduga karena pengaruh kultur yang cukup melekat pada masyarakat terhadap kemampuan memanfaatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Hal ini juga dapat diartikan bahwa usaha dalam meningkatkan IPM akan mengalami kesulitan jika dilihat dari segi kesehatan maupun pendidikan, karena kedua komponen tersebut berkaitan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang tidak mudah mengalami perubahan.

Komponen ketiga pendukung angka IPM yang perlu dievaluasi adalah indeks daya beli atau PPP (Purchasing Power Parity / daya beli). Variabel ini cukup berpengaruh, karena identik dengan capaian kesejahteraan masyarakat secara ekonomi. Kontribusi PPP ini akan tercapai seiring peningkatan kesejahteraan penduduk sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Pada kuadran I atau daerah dengan IPM dan indeks daya beli tinggi sebanyak 9 kabupaten/kota dengan 2 daerah di antaranya adalah Kabupaten Blitar dan Kabupaten Sidoarjo, sedangkan sisanya adalah daerah perkotaan. Kuadran II hanya ditempati oleh kabupaten Sumenep. Sementara pada kuadran III ditempati oleh 18 kabupaten yang sebagian besar wilayahnya juga merupakan daerah tapal kuda, sedangkan pada kuadran IV terdapat 10 kabupaten. Sebaran PPP tertinggi pada tahun 2012 dicapai oleh Kota Surabaya sebesar 68,91 sedangkan untuk PPP terendah adalah Kabupaten Bojonegoro sebesar 60,61.

Selama lima tahun terakhir indeks daya beli kabupaten/kota di Jawa Timur mengalami perbaikan meskipun mengalami beberapa kendala akibat faktor intern dan ekstern. Seiring menggeliatnya ekonomi di daerah yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat pada tahun 2012 di seluruh kabupaten/kota

juga mengalami peningkatan, sehingga mampu mendongkrak IPM.

Gambar 2.44
Pengelompokan Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Berdasarkan IPM dan Indeks Pendidikan Tahun 2012

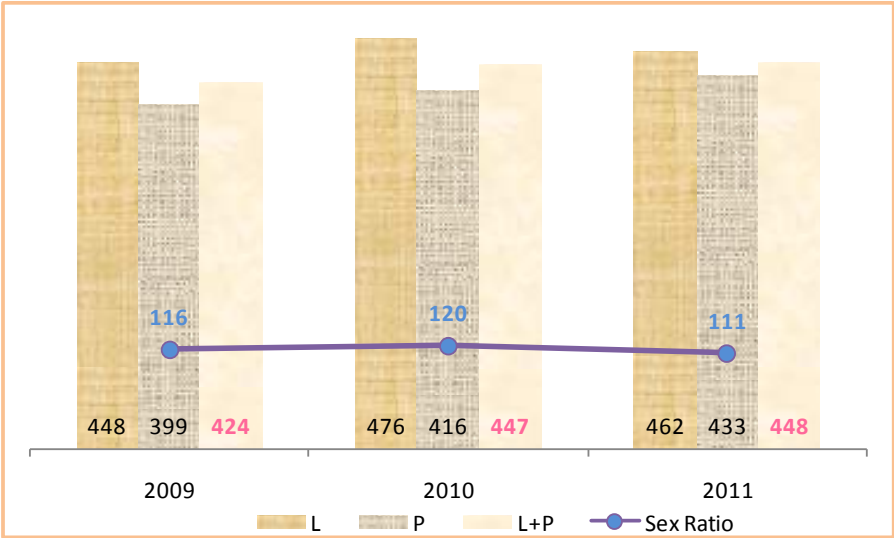


Kabupaten				Kota		
01 Pacitan	11 Bondowoso	21 Ngawi	71 Kediri			
02 Ponorogo	12 Situbondo	22 Bojonegoro	72 Blitar			
03 Trenggalek	13 Probolinggo	23 Tuban	73 Malang			
04 Tulungagung	14 Pasuruan	24 Lamongan	74 Probolinggo			
05 Blitar	15 Sidoarjo	25 Gresik	75 Pasuruan			
06 Kediri	16 Mojokerto	26 Bangkalan	76 Mojokerto			
07 Malang	17 Jombang	27 Sampang	77 Madiun			
08 Lumajang	18 Nganjuk	28 Pamekasan	78 Surabaya			
09 Jember	19 Madiun	29 Sumenep	79 Batu			
10 Banyuwangi	20 Magetan					

Sumber : BPS RI

Dalam lampiran PP No 6 tahun 2008 dijelaskan bahwa indikator ini digunakan untuk mengukur kualitas penduduk. Karena produktifitas penduduk di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin akan baik kualitas tenaga kerjanya.

Gambar 2.45
Rasio Lulusan S1/S2/S3 menurut Jenis Kelamin (per 10.000) dan Sex Ratio
Lulusan S1/S2/S3 (Persen) di Jawa Timur 2009-2011



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD
SAMPAI DENGAN TAHUN 2012 DAN REALISASI RPJMD

2.2.1 Evaluasi Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2009 tentang RPJMD 2009-2014, kinerja pembangunan Jawa Timur tahun 2012 diukur berdasarkan pada 5 (lima) indikator kinerja utama yaitu : Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Disparitas Wilayah, serta Indeks Pembangunan Manusia.

Tabel 2.115
Matrik Penetapan Indikator Utama

No	Indikator Kinerja Utama		Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Target	
							2013	2014
1	Tingkat Pengangguran Terbuka/ TPT (%)	Target	6,20-6,40	6,00-6,20	5,80 – 6,00	5,60 - 5,80	5,40 - 5,50	5,20 - 5,40
		Capaian	5.08	4.25	4.16	4.12		
2	Persentase Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk (%)	Target	16,5-16,9	15,5-16,5	15,0-15,5	14,5-15,0	14,0-14,5	13,5-14,0
		Capaian	16.68	15.26	13.85	13.08		
3	Pertumbuhan Ekonomi ADHK Tahun 2000 (%)	Target	4,00-4,50	4,00-4,50%	5,00-5,50%	5,00-5,50	5,50-6,00	5,50-6,00
		Capaian	5.01	6.68	7.22	7.27*		
4	Indeks Disparitas Wilayah	Target	115,10-115,30	114,70-115,10	114,40-114,70	114,10-114,40	113,80-114,10	113,50-113,80
		Capaian	114.46	115.14	112.53	112.92		
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) :	Target	68,90-69,00	69,00-69,50	69,50-70,10	69,90-70,10	70,10-70,50	70,50-71,00
		Capaian	71.06	71.62	72.18	72.54		
			Komponen : 1. Kesehatan : 73.92 2. Pendidikan : 74.53 3. Daya Beli (PPP) : 64.74	Komponen : 1. Kesehatan : 74.34 2. Pendidikan : 74.98 3. Daya Beli (PPP) : 65,54	Komponen : 1. Kesehatan : 74.77 2. Pendidikan : 75.33 3. Daya Beli (PPP) : 66,44	Komponen : 1. Kesehatan : 75.15 2. Pendidikan : 75.73 3. Daya Beli (PPP) : 66.73		

Sumber : BPS Prov Jatim

Kelima indikator tersebut merupakan representasi dari kinerja 9 (sembilan) agenda pembangunan yang akan dicapai secara bertahap dan berkelanjutan. Evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur Tahun 2009-2012

Indikator utama ketenagakerjaan yang sering digunakan sebagai indikasi keberhasilan dalam menangani masalah pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang merupakan perbandingan antara jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja, dengan perkembangan seperti berikut.

Tabel 2.116
Indikator Ketenagakerjaan Di Jawa Timur,
Bulan Agustus 2009 - Agustus 2012

Uraian	2009	2010	2011	2012
Penduduk 15 Tahun +	27.618.000	28.268.825	28.440.143	28.585.978
Angkatan Kerja	20.178.590	19.527.051	19.761.886	19.901.558
Bekerja/Kesempatan kerja.	19.305.056	18.698.108	18.940.340	19.081.995
Jumlah Pengangguran	1.082.221	828.943	821.546	819.563
TPT	5,08	4,25	4,16	4,12
TPAK	69,25	69,08	69,49	69,62

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

pada Agustus 2012 mencapai 19.081.995 orang, bertambah sekitar 141.655 orang dibanding keadaan Agustus 2011 sebesar 18.940.340 orang. Sektor pertanian masih mendominasi penyerapan tenaga kerja, pada bulan Agustus 2012 sebanyak 7.472.197 orang (39,16 persen) dan kedua sektor perdagangan menyerap tenaga kerja sebanyak 3.834.307 orang (20,09 persen). Jumlah penduduk pencari kerja/pengangguran pada bulan Agustus tahun 2011 sebanyak 821.546 orang turun menjadi 819.563 orang pada bulan Agustus tahun 2012.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur Agustus 2011 sebesar 4,16 persen mengalami penurunan yang cukup lambat yaitu sebesar 0,04 persen point/angka hingga keadaan Agustus 2012 menjadi 4,12 persen. Sejalan dengan hal tersebut, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan sejak Agustus 2011 hingga Agustus 2012.

Ketenagakerjaan di Jawa Timur penduduk dikelompokkan menjadi 2 (dua) golongan yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk Usia Kerja (15 tahun keatas) yang dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu penduduk yang termasuk dalam kelompok angkatan kerja dan penduduk bukan angkatan kerja. Angkatan kerja itu sendiri dibagi lagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu Bekerja dan Pengangguran. Perkembangan angkatan kerja menurut kelompok umur di Jawa Timur pada rincian berikut:

Tabel 2.117
Angkatan Kerja menurut Kelompok Umur di Jatim

Golongan Umur	2009	2010	2011	2012**
15 - 19 Tahun	1.121.966	952.206	996.438	978.862
20 - 24 Tahun	2.019.665	1.717.624	1.809.479	1.779.107
25 - 29 Tahun	2.468.931	2.272.310	2.328.570	2.334.926
30 - 34 Tahun	2.424.566	2.382.327	2.418.765	2.422.151
25-34 Tahun	4.893.497	4.654.637	4.747.335	4.757.077
35 - 39 Tahun	2.437.515	2.418.751	2.430.764	2.429.029
40 - 44 Tahun	2.538.201	2.446.749	2.478.146	2.462.111
35 - 44 Tahun	4.975.716	4.865.500	4.908.910	4.891.140
45 - 49 Tahun	2.202.293	2.170.885	2.195.644	2.161.792
50 - 54 Tahun	1.862.881	1.853.228	1.835.215	2.307.597
45 - 54 Tahun	4.065.174	4.024.113	4.030.859	4.469.389
55 - 59 Tahun	1.285.612	1.321.375	1.289.098	1.200.241
60 - 64 Tahun	822.719	861.413	848.836	703.453
55 - 64 Tahun	2.108.331	2.182.788	2.137.934	1.903.694
65 Tahun +	1.154.219	1.130.183	1.130.931	1.122.288
Jumlah Angkatan Kerja	20.178.590	19.527.051	19.761.886	19.901.558

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

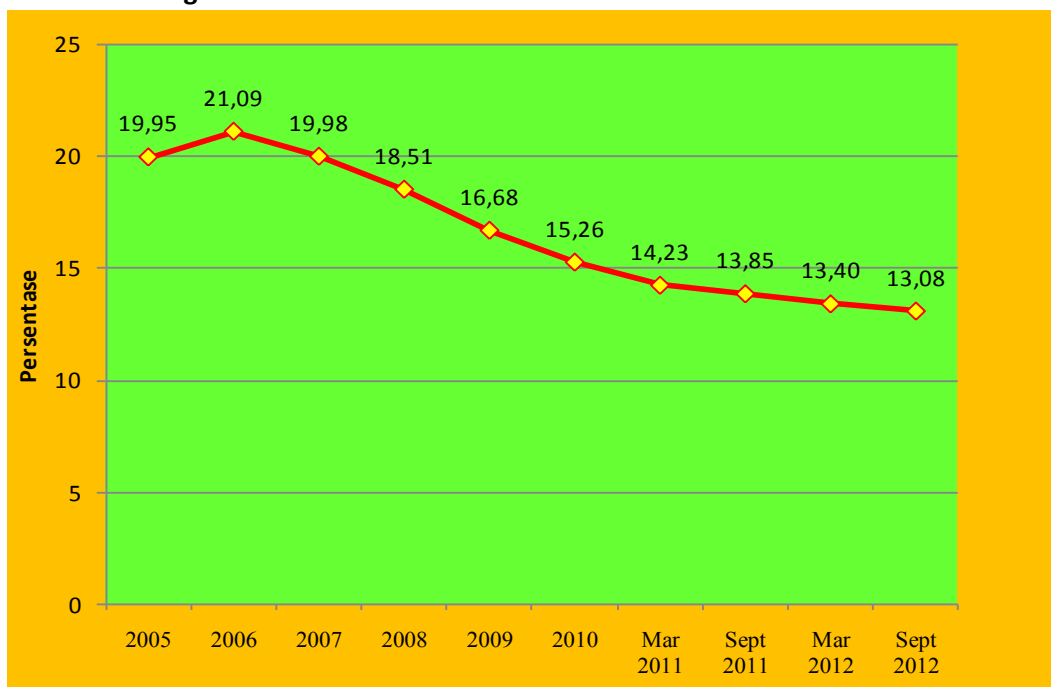
Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada Agustus 2012 mencapai 19.901.558 orang, bertambah sekitar 139.672 orang dibanding angkatan kerja Agustus 2011 sebesar 19.761.886 orang.

2. Persentase Penduduk Miskin Terhadap Jumlah Penduduk Di Jawa Timur Tahun 2009 – 2012

Pembangunan adalah proses mewujudkan masyarakat sejahtera adil dan merata. Indikasi tersebut ditunjukkan dari meningkatnya kemakmuran masyarakat yang akan berkorelasi dengantingkat konsumsi sebagai akibat meningkatnya pendapatan masyarakat. Berbagai iupaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya baik dari peningkatan kinerja perekonomiannya maupun penciptaan pemerataan kue pembangunan. Upaya tersebut diantaranya mengurangi penduduk miskin dengan meningkatkan tingkat kesejahteraannya

Jumlah dan persentase penduduk miskin di Jawa Timur pada periode 2009-2011 dari tahun ke tahun menurun. Jumlah penduduk miskin nampak terjadi penurunan dari 16,68 persen pada tahun 2009 turun menjadi 15,26 persen pada tahun 2010. Kemudian Dalam jngka waktu September 2011 s.d. September 2012, persentase penduduk miskin Jawa Timur turun sebesar 0,77 poin persen atau menjadi 13,08 persen pada Tahun 2012. Selama satu semester (Maret 2012 s.d. September 2012), persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 0,32 poin persen. Penurunan selama setahun tersebut menunjukkan penduduk miskin pada tahun 2011 sebanyak 5.070,98 ribu jiwa menjadi sebanyak 4.960,54 ribu jiwa pada tahun 2012 atau turun sebesar 110,44.

Gambar 2.46
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di JawaTimur Tahun 2005 – 2012



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Susenas 2005-2012

Dilihat secara spasial, keberadaan penduduk miskin dapat dijumpai di perdesaan maupun di perkotaan. Penduduk miskin di perkotaan September 2012 sebesar 32,37 persen dari total penduduk miskin atau mencapai 1.605,96 ribu jiwa. Selama satu semester (Maret 2012 s.d. September 2012), penurunan persentase penduduk miskin di perdesaan lebih besar daripada perkotaan yaitu 0,16 poin persen untuk daerah perkotaan dan 0,47 poin persen untuk dari perdesaan.

Tabel 2.118
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2008 s/d September 2012

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)			Jumlahpendudukmiskin (ribu)	Persentase pendudukmiskin	PerubahanPersentasePendudukMiskin (%)
	Makanan	Bukan Makanan	Total			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<u>Perkotaan</u>						
Maret 2008	131.487	51.921	183.408	2.438,76	13,15	
Maret 2009	145.676	56.948	202.624	2.148,51	12,17	-0,98
Maret 2010	152.965	60.418	213.383	1.873,55	10,58	-1,59
Maret 2011	169.242	65.303	234.546	1.768,23	9,87	-0,71
Sept 2011	174.210	68.193	242.403	1.734,32	9,66	-0,21
Maret 2012	175.806	69.499	245.305	1.630,63	9,06	-0,81
Sept 2012	182.073	71.874	253.947	1.605,96	8,90	-0,16
<u>Perdesaan</u>						
Maret 2008	118.971	36.461	155.432	4.581,19	23,64	
Maret 2009	131.522	43.106	174.628	3.874,07	21,00	-2,64
Maret 2010	139.806	46.073	185.879	3.655,76	19,74	-1,26
Maret 2011	155.457	50.818	206.275	3.587,98	18,19	-1,55
Sept 2011	161.141	53.025	214.166	3.492,99	17,66	-0,53
Maret 2012	167.352	54.864	222.216	3.440,34	17,35	-0,84
Sept 2012	176.674	57.882	234.556	3.354,58	16,88	-0,47
<u>Kota+Desa</u>						
Maret 2008	125.091	44.020	169.112	7.019,95	18,51	-1,47
Maret 2009	138.442	49.874	188.317	6.022,59	16,68	-1,83
Maret 2010	146.240	53.087	199.327	5.529,30	15,26	-1,42
Maret 2011	162.017	57.711	219.727	5.356,21	14,23	-1,03
Sept 2011	167.360	60.243	227.602	5.227,31	13,85	-0,38
Maret 2012	171.375	61.827	233.202	5.070,98	13,40	-0,83
Sept 2012	179.244	64.540	243.783	4.960,54	13,08	-0,32

Sumber: BPS, Diolah dari data Susenas Panel Maret 2008 s/d September 2012

Berdasarkan hasil Susenas September 2012, garis kemiskinan sebesar Rp. 243.783 atau meningkat sebesar 4,54 persen dari garis kemiskinan Maret 2012. Kenaikan garis kemiskinan sebesar Rp. 10.581 perkapita/bulan dan sebanyak 74,37 persen diantaranya merupakan kontribusi garis kemiskinan makanan. Garis kemiskinan merupakan harga yang dibayar oleh kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan non-pangan esensial seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi dan lainnya

Kenaikan garis kemiskinan di perdesaan lebih tinggi daripada di perkotaan. Garis kemiskinan meningkat besar 5,55 persen untuk perdesaan dan 3,52 persen untuk wilayah perkotaan. Tingginya kenaikan garis kemiskinan tersebut juga meliputi garis kemiskinan makanan (5,57 persen untuk perdesaan dan 3,56 persen untuk perkotaan) dan garis kemiskinan bukan makanan (5,50 persen untuk perdesaan dan 3,52 persen untuk perkotaan)

3. Pertumbuhan Ekonomi ADHK Tahun 2000 Jawa Timur Tahun 2007-2012

Secara umum kondisi perekonomian Jawa Timur sampai dengan akhir tahun 2012 cukup baik, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Jawa Timur cenderung lebih tinggi yaitu pada tahun 2010 ekonomi tumbuh 6,68 persen, kemudian meningkat menjadi 7,22 persen tahun 2011 dan terus meningkat hingga tahun 2012 tumbuh menjadi 7,27 persen. Capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di atas pertumbuhan Nasional (fluktuasinya searah dengan pertumbuhan ekonomi nasional).

Tabel 2.119
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Terhadap Nasional

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	
	Nasional	Jawa Timur
2009	4,63	5,01
2010	6,20	6,68
2011	6,50	7,22
2012*	6,30	7,27

Sumber : BPS Provinsi Jatim

Perekonomian Jawa Timur pada tahun 2012 terjadi pertumbuhan disemua sektor ekonomi, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 10,06 persen dengan sumber pertumbuhan sebesar 3,20 persen. Kedua sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 9,65 persen dengan sumber pertumbuhan sebesar 0,73 persen. Sektor berikutnya yang mengalami pertumbuhan tinggi adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 8,01 persen dengan sumber pertumbuhan 0,44 persen. Sementara sektor industri pengolahan dan sektor pertanian walau hanya mampu tumbuh masing-masing sebesar 6,34 persen dan 3,49 persen, tetapi keduanya memberikan sumbangan pertumbuhan.

Tabel 2.120
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor Usaha (%)

Sektor		2009	2010	2011*)	2012**)
1.	Pertanian	3,92	2,23	2,53	3,49
2.	Pertambangan & Penggalian	6,92	9,18	6,08	2,10
3.	Industri Pengolahan	2,80	4,32	6,06	6,34
4.	Listrik,Gas & Air Bersih	2,72	6,43	6,25	6,21
5.	Konstruksi	4,25	6,64	9,12	7,05
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	5,58	10,67	9,81	10,06
7.	Pengangkutan & Komunikasi	12,98	10,07	11,44	9,65
8.	Keuangan, Sewa, & Jasa Perusahaan	5,30	7,27	8,18	8,08
9.	Jasa-jasa	5,76	4,34	5,08	5,07
PDRB		5,01	6,68	7,22	7,27

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur.

Keterangan : *) Angka Diperbaiki **) Angka Sementara

Selanjutnya perekonomian Jawa Timur yang diukur dengan besaran PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2012 mencapai Rp 1.001,72 Trilyun dan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 mencapai 393,67 Trilyun. Capaian di atas lebih tinggi dibanding tahun 2011 yaitu PDRB ADHB sebesar 884,50 Trilyun dan ADHK sebesar 366,98 Trilyun.

Dari angka PDRB tersebut, nampak bahwa Jawa Timur terus mengalami peningkatan, hal ini sejalan dengan proses membaiknya kondisi ekonomi Jawa Timur.

Tabel 2.121
Perkembangan PRDB Per Kapita Jawa Timur

No.	U r a i a n	2009	2010	2011*	2012**
1.	PDRB ADHB (Trilyun Rp)	686,85	778,57	884,50	1.001,72
2.	PDRB ADHK 2000 (Trilyun Rp)	320,86	342,28	366,98	393,67
3.	PDRB Per Kapita (Juta Rp)	18,42	20,77	23,46	26,32

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jatim
Keterangan : *) Angka Diperbaiki ***) Angka Sementara

Struktur perekonomian Jawa Timur tahun 2012 didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor industri pengolahan dan sektor pertanian yang kontribusi ketiganya sebesar 72,93 persen, meningkat dibanding dengan periode yang sama tahun 2011 yang mencapai 72,49 persen. Peningkatan kontribusi ketiga sektor tersebut, terutama disebabkan meningkatnya kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 0,41 persen dan sektor pertanian sebesar 0,04 persen sedangkan kontribusi beberapa sektor lain menurun. Kontribusi sektor konstruksi turun dari 4,67 persen menjadi 4,55 persen; sektor listrik, gas dan air bersih turun dari 1,43 persen menjadi 1,35 persen; dan sektor jasa-jasa turun dari 8,55 persen menjadi 8,35 persen. Perkembangan sektor-sektor yang bergerak pada layanan jasa tersebut sangat dibutuhkan guna mendukung sektor riil baik dalam berproduksi, distribusi, maupun pemasaran sehingga sektor-sektor *non tradable goods* seiring dengan perkembangan sektor-sektor riil.

4. Indeks Disparitas Wilayah Jawa Timur

Salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk adalah dengan memacu kegiatan ekonomi di seluruh sektor. Hasil kegiatan ekonomi tersebut diharapkan nantinya terjadi pertumbuhan ekonomi (atau yang disebut program *pro growth*), dan selanjutnya dapat menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya kepada masyarakat (*pro job*). Melalui kesempatan kerja itu diharapkan dapat dinikmati hasilnya oleh

masyarakat dengan bertambahnya pendapatan mereka sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, tidak terkecuali bertambahnya pendapatan pada masyarakat yang bergolongan pendapatan rendah (pro poor). Tetapi paradogs muncul, saat dikatakan percepatan pembangunan digalakkan di masing-masing daerah timbul ketimbangan antar daerah akibat perbedaan sumber daya yang mendukung pembangunan tersebut. Diduga perbedaan itu secara tidak langsung juga menciptakan perbedaan kesejahteraan dari sisi kewilayahan. Untuk menyempitkan disparitas antar wilayah ini perlu kerja keras, inisiatif dan kreatifitas Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan segala potensi yang ada untuk meningkatkan ekonominya.

Salah satu indikator yang bisa membaca seberapa jauh tingkat disparitas antar wilayah yaitu Indeks Williamson. Rumus menghitung Indeks ketimpangan Williamson :

$$IW = \frac{\sqrt{(Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

dimana:

- Yi = PDRB perkapita di kab/kota i
- Y = PDRB perkapita rata-rata provinsi
- fi = jumlah penduduk di kab/kota i
- n = jumlah penduduk di provinsi

Tabel 2.122
Indeks Williamson Jawa Timur
Tahun 2008-2012

Tahun	Indeks Williamson	Perubahan
(1)	(2)	(3)
2008	113,93	-0,18398
2009	114,46	0,46520
2010	115,14	0,59409
2011*	112,68	-2,13653
2012**	112,60	-0,07100

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Keterangan: *) Angka Diperbaiki

**) Angka Sementara

Semakin besar angka yang ditunjukkan oleh Indeks Williamson berarti semakin melebar kesenjangan yang terjadi di wilayah tersebut. Sebaliknya, semakin kecil indeks ini, semakin mengecil kesenjangan antar wilayahnya.

Pencapaian Indeks Williamson di Jawa Timur pada lima tahun terakhir relatif berfluktuatif, tetapi ada kecenderungan semakin membaik dalam kurun dua

tahun terakhir. Pada tahun 2008 indeks ini tercatat sebesar 113,93 selanjutnya melebar pada tahun 2009 – 2010. Selanjutnya indeks ini semakin mengecil pada tahun 2011 dan 2012 yang

pencapaiannya masing-masing 112,68 dan 112,60. Adanya jembatan Suramadu yang membuat Madura yang dulu seolah-olah masih terpisah dengan pulau Jawa, menjadikan Madura seakan-akan sudah menyatu, sehingga arus perekonomian dan transfer sosial budaya semakin cepat dibanding kondisi sebelum adanya jembatan Suramadu. Selain itu Jalur Lintas Selatan sangat mendukung perekonomian pada wilayah selatan yang dulunya masih terkendala. Demikian pula daerah-daerah yang ekonominya transportasinya bergantung pada Tol Porong yang semula terkendala dengan adanya luapan lumpur Sidoarjo, dengan adanya jalur alteleri Porong perekonomiannya kembali normal. Pada Tahun 2012 Indeks Williamson kembali mengecil -0,071 persen dibanding tahun 2011 atau mencapai 112,60. Revitalisasi sarana transportasi terutama jalan tol diduga pendorong menyempitnya disparitas wilayah di Jawa Timur, selain pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dimasing-masing daerah. Pemerintah perlu menjaga kondisi ini agar di tahun mendatang dengan lebih memperhatikan perbaikan sarana dan prasarana daerah-daerah perdesaan sehingga pertumbuhan ekonominya bisa ditingkatkan dan kalau itu terjadi tidak mustahil Indeks Williamson akan mengecil.

5. Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur Tahun 2007 – 2012

a. Status pembangunan manusia

Keberhasilan pemerintah daerah dalam upaya membangun kualitas hidup penduduknya terpotret dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dari angka IPM diketahui keterbandingan/posisi pembangunan manusia antar kabupaten/kota di Jawa Timur dari sisi kesehatan, pendidikan dan daya beli. Data IPM ini menginspirasi Pemerintah Daerah untuk menentukan prioritas program pembangunan manusia di wilayahnya.

Secara umum angka IPM di Jawa Timur selama periode 2008-2012 menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2008 nilainya 70,38, dan selanjutnya meningkat terus menjadi 71,06 (2009); 71,62 (2010); 72,18 (2011) dan pada tahun 2012 mencapai 72,54. Dari hasil penghitungan IPM tahun 2012, diperoleh gambaran bahwa 19 Kabupaten/Kota mempunyai IPM lebih tinggi daripada IPM Jawa Timur, sedangkan 19 kabupaten

lainnya memiliki nilai IPM lebih rendah daripada angka IPM Jawa Timur. Nilai IPM tertinggi dicapai oleh Kota Blitar sebesar 78,14 sedangkan urutan kedua ditempati Kota Surabaya dengan angka IPM 78,08 dan urutan ketiga adalah Kota Malang sebesar 77,99. Urutan terendah IPM adalah Kabupaten Sampang dengan nilai 61,03, namun angka ini lebih baik jika dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang sebesar 60,78.

Tabel 2.123
Perkembangan Angka IPM Selama di Jawa Timur
Tahun 2008-2012

No.	Tahun	IPM	Angka IPM Tertinggi	Angka IPM Terendah	Jml. Kab dengan IPM di bawah rata-rata Jatim	Jml. Kab dengan IPM di atas rata-rata Jatim
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	2008	70,38	76,60	57,66	19	19
2.	2009	71,06	76,98	58,68	19	19
3.	2010	71,62	77,42	59,70	19	19
4.	2011*	72,18	77,89	60,78	19	19
5.	2012**	72,54	78,14	61,03	19	19

Sumber : BPS RI

Keterangan : *) Angka Diperbaiki

**) Angka Sementara

Selama tahun 2008 – 2012, IPM kabupaten/kota mengalami kenaikan walaupun tidak menunjukkan kenaikan yang drastis. Kenaikan IPM ini tidak terlepas dari adanya berbagai program yang digulirkan oleh Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk meningkatkan pembangunan manusianya, seperti program di bidang kesehatan, pendidikan maupun ekonomi dan peningkatan kualitas sarana prasarana masyarakat lainnya. Keberhasilan program tersebut juga tergantung pada pola pikir masyarakat setempat dalam pemanfaatan sarana tersebut.

b. Kecepatan Pencapaian Pembangunan Manusia

Kecepatan peningkatan pencapaian pembangunan manusia dapat diukur dengan reduksi shortfall per tahun, yang selama periode 2008-2012 besaran reduksi shortfall Jawa Timur adalah 1,64. Semakin besar angka reduksi shortfall semakin cepat pembangunan manusianya. Dari 38

kabupaten/kota di Jawa Timur, terdapat 6 kabupaten/kota yang memiliki reduksi shortfall dan angka IPM yang lebih tinggi dari angka IPM Jawa Timur. Kemudian pada kuadran II hanya terdapat 4 kabupaten/kota yang memiliki shortfall lebih tinggi dari shortfall Jawa Timur tetapi mempunyai IPM yang lebih rendah daripada Jawa Timur.

Sedangkan 15 kabupaten/kota yang memiliki reduksi shortfall lebih rendah dan IPM yang lebih rendah daripada Jawa Timur berada di kuadran III. Kabupaten/kota yang berada di kuadran IV atau memiliki IPM lebih tinggi dari Jawa Timur tetapi mempunyai reduksi shortfall rendah sebanyak 13 daerah. Daerah yang memiliki shortfall terendah adalah Kabupaten Bangkalan sebesar 1,53.

Dilihat dari komponen indeks kesehatan yang dicerminkan oleh besaran angka harapan hidup, angka tertinggi berhasil dicapai Kota Blitar yaitu sebesar 79,51 dan angka terendah sebesar 60,87 dicapai oleh Kabupaten Probolinggo. Sebanyak 17 kabupaten/kota berada pada kuadran I yang memiliki nilai IPM dan indeks kesehatan yang lebih tinggi dari angka Jawa Timur. Hanya 2 kabupaten yang menempati kuadran II yaitu Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Ngawi. Pada kuadran III terdapat 17 kabupaten yang memiliki nilai IPM dan indeks kesehatan yang lebih rendah daripada angka Jawa Timur, termasuk di dalamnya sebagian daerah tapal kuda. Kuadran IV ditempati oleh Kota Pasuruan dan Kota Batu.

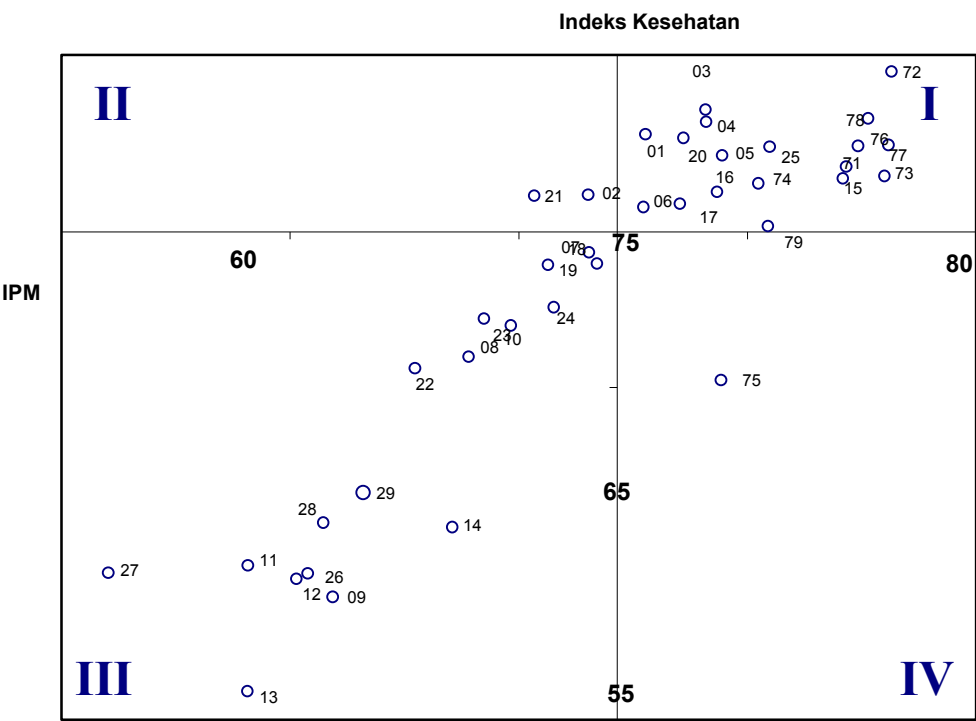
Dalam perspektif peningkatan derajat kesehatan, karena komponen indeks kesehatan pada penghitungan IPM dicerminkan oleh besaran angka harapan hidup, maka untuk memaksimalkan peningkatan angka harapan hidup yaitu dengan usaha menurunkan tingkat kematian bayi dan kematian ibu melahirkan harus terus menjadi prioritas. Beberapa faktor yang cukup sensitif terhadap perubahan angka kematian bayi dan ibu seperti pola makanan yang bergizi dan penolong kelahiran/persalinan, perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak terkait. Dalam usaha meningkatkan nilai indeks kesehatan ini, pemerintah daerah perlu memperhatikan wilayah yang memiliki indeks kesehatan yang masih rendah,

antara lain dengan mengupayakan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses sarana kesehatan, peningkatan kualitas dan pembangunan sarana kesehatan yang memadai.

Sementara itu, dari penghitungan komponen kedua pendukung IPM yaitu indeks pendidikan, pada tahun 2012 tercatat tertinggi dicapai Kota Malang sedangkan nilai terendah dicapai Kabupaten Sampang dengan nilai masing-masing sebesar 89,33 dan 54,47. Kuadran I atau mempunyai IPM dan indeks pendidikan tinggi ditempati 19 kabupaten/kota yang mencakup seluruh wilayah kota. Pada kuadran II terdapat 3 kabupaten/kota yang memiliki IPM lebih rendah dari Jawa Timur, tetapi mempunyai indeks pendidikan yang lebih tinggi dari indeks Jawa Timur yaitu Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Lamongan. Sebanyak 16 Kabupaten berada di kuadran III dan tidak ada kabupaten/kota yang menempati kuadran IV.

Hasil penghitungan indeks kesehatan dan indeks pendidikan menunjukkan korelasi bahwa sebagian besar wilayah dengan indeks kesehatan rendah juga merupakan daerah yang memiliki indeks pendidikan rendah. Hal ini sesuai dengan teori yang ada yaitu semakin rendah tingkat pendidikan yang dimiliki di suatu wilayah maka tingkat kesehatan masyarakat pun juga semakin rendah.

Gambar 2.47
Pengelompokan Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Berdasarkan IPM dan Indeks Kesehatan Tahun 2012



Kabupaten					Kota	
01	Pacitan	11	Bondowoso	21	Ngawi	71 Kediri
02	Ponorogo	12	Situbondo	22	Bojonegoro	72 Blitar
03	Trenggalek	13	Probolinggo	23	Tuban	73 Malang
04	Tulungagung	14	Pasuruan	24	Lamongan	74 Probolinggo
05	Blitar	15	Sidoarjo	25	Gresik	75 Pasuruan
06	Kediri	16	Mojokerto	26	Bangkalan	76 Mojokerto
07	Malang	17	Jombang	27	Sampang	77 Madiun
08	Lumajang	18	Nganjuk	28	Pamekasan	78 Surabaya
09	Jember	19	Madiun	29	Sumenep	79 Batu
10	Banyuwangi	20	Magetan			

Sumber : BPS RI

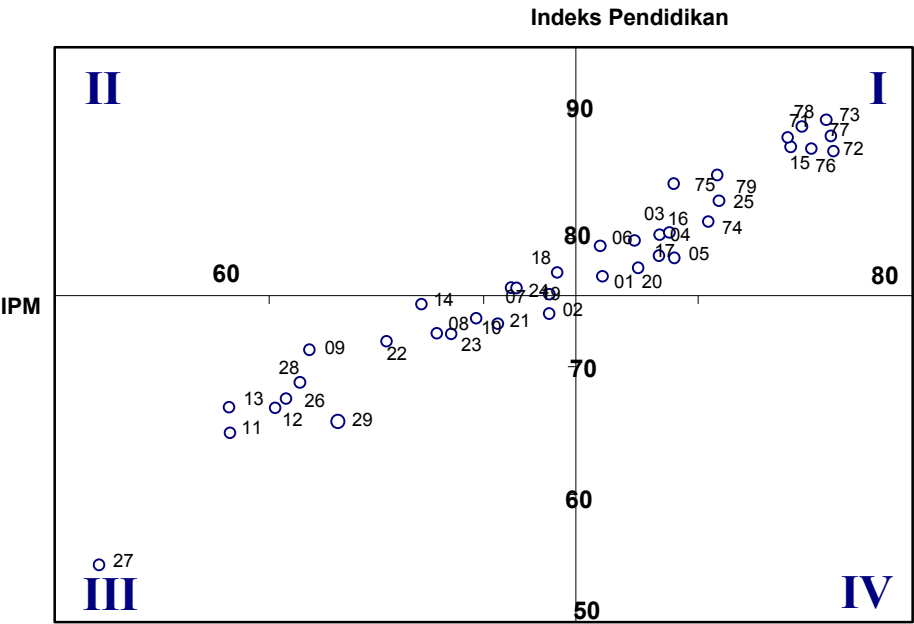
Indeks kesehatan dan pendidikan penduduk yang tinggal di sebagian besar wilayah tapal kupa relatif rendah dibandingkan rata-rata kabupaten/kota di Jawa Timur. Hal ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap rendahnya nilai pembangunan manusia di wilayah tapal kuda. Rendahnya kedua komponen tersebut, diduga karena pengaruh kultur yang cukup melekat pada masyarakat

terhadap kemampuan memanfaatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Hal ini juga dapat diartikan bahwa usaha dalam meningkatkan IPM akan mengalami kesulitan jika dilihat dari segi kesehatan maupun pendidikan, karena kedua komponen tersebut berkaitan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang tidak mudah mengalami perubahan.

Komponen ketiga pendukung angka IPM yang perlu dievaluasi adalah indeks daya beli atau PPP (Purchasing Power Parity / daya beli). Variabel ini cukup berpengaruh, karena identik dengan capaian kesejahteraan masyarakat secara ekonomi. Kontribusi PPP ini akan tercapai seiring peningkatan kesejahteraan penduduk sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Pada kuadran I atau daerah dengan IPM dan indeks daya beli tinggi sebanyak 9 kabupaten/kota dengan 2 daerah di antaranya adalah Kabupaten Blitar dan Kabupaten Sidoarjo, sedangkan sisanya adalah daerah perkotaan. Kuadran II hanya ditempati oleh kabupaten Sumenep. Sementara pada kuadran III ditempati oleh 18 kabupaten yang sebagian besar wilayahnya juga merupakan daerah tapal kuda, sedangkan pada kuadran IV terdapat 10 kabupaten. Sebaran PPP tertinggi pada tahun 2012 dicapai oleh Kota Surabaya sebesar 68,91 sedangkan untuk PPP terendah adalah Kabupaten Bojonegoro sebesar 60,61.

Selama lima tahun terakhir indeks daya beli kabupaten/kota di Jawa Timur mengalami perbaikan meskipun mengalami beberapa kendala akibat faktor intern dan ekstern. Seiring menggeliatnya ekonomi di daerah yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat pada tahun 2012 di seluruh kabupaten/kota juga mengalami peningkatan, sehingga mampu mendongkrak IPM.

Gambar 2.48
Pengelompokan Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Berdasarkan IPM dan Indeks Pendidikan Tahun 2012

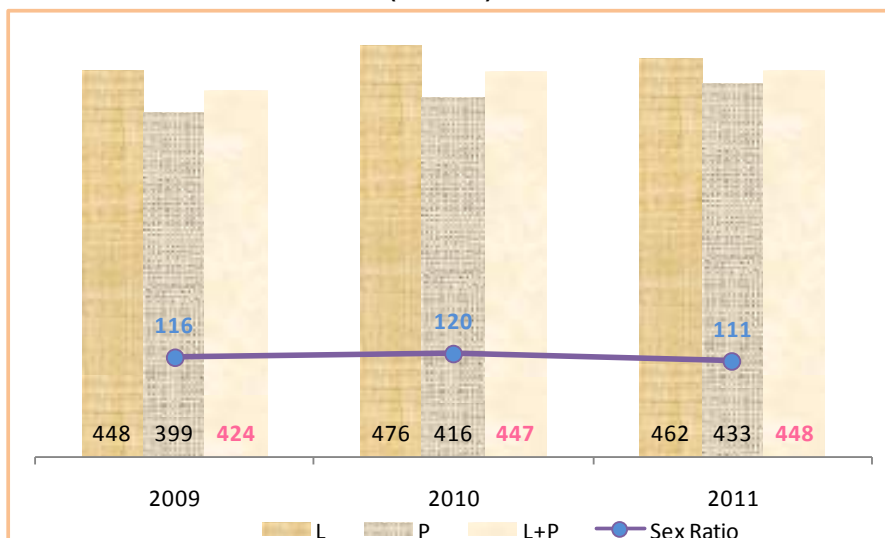


Kabupaten					Kota	
01 Pacitan	11 Bondowoso	21 Ngawi	71 Kediri			
02 Ponorogo	12 Situbondo	22 Bojonegoro	72 Blitar			
03 Trenggalek	13 Probolinggo	23 Tuban	73 Malang			
04 Tulungagung	14 Pasuruan	24 Lamongan	74 Probolinggo			
05 Blitar	15 Sidoarjo	25 Gresik	75 Pasuruan			
06 Kediri	16 Mojokerto	26 Bangkalan	76 Mojokerto			
07 Malang	17 Jombang	27 Sampang	77 Madiun			
08 Lumajang	18 Nganjuk	28 Pamekasan	78 Surabaya			
09 Jember	19 Madiun	29 Sumenep	79 Batu			
10 Banyuwangi	20 Magetan					

Sumber : BPS RI

Dalam lampiran PP No 6 tahun 2008 dijelaskan bahwa indikator ini digunakan untuk mengukur kualitas penduduk. Karena produktifitas penduduk di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin akan baik kualitas tenaga kerjanya.

Gambar 2.49
Rasio Lulusan S1/S2/S3 menurut Jenis Kelamin (per 10.000) dan Sex Ratio Lulusan S1/S2/S3 (Persen) di Jawa Timur 2009-2011



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan target-target yang telah direncanakan. Oleh karena itu dan permasalahan pembangunan di Jawa Timur sampai dengan tahun 2012 ini adalah sebagai berikut :

1. Bidang Urusan Pendidikan

- Jumlah angka buta huruf masih tinggi
- Masih adanya masyarakat buta huruf yang sudah dientaskan menjadi buta huruf kembali;
- Rendahnya APK di tingkat pendidikan menengah kejuruan
- Kurangnya sarana prasarana pendidikan menengah kejuruan;
- Belum setaranya pendidikan diniyah dan pesantren salafiyah dengan pendidikan umum

2. Bidang Urusan Kesehatan

- Belum terlindunginya masyarakat dari beban pembiayaan kesehatan
- Masih rendahnya aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama bagi kelompok penduduk miskin, tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular
- Angka kematian ibu dan anak (AKI dan AKB) masih relatif tinggi

3. Bidang Urusan Lingkungan Hidup

- a. Tingginya pencemaran dan kerusakan lingkungan, terutama pada media air sungai utama Jawa Timur, yaitu Sungai Brantas, yang ditunjukkan oleh hasil pemantauan kualitas air Sungai Brantas pada Tahun 2012, khususnya pada parameter BOD yakni sebesar 3,67 mg/l yang berarti masih belum memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan sebagaimana dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan pengendalian pencemaran Air yakni sebesar 2 mg/l.
- b. Rusaknya kawasan konservasi Tahura R. Soeryo dan sekitar sumber air S. Brantas, termasuk keanekaragaman hayati yang berada di dalamnya, yang ditunjukkan oleh luas lahan kritis Tahura R. Soeryo yang sampai dengan awal Tahun 2012 masih sekitar 2.675 Ha. Selain itu kondisi DAS Brantas yang semula memiliki 1.577 sumber air dan yang berada di Malang Raya sejumlah 467, saat ini yang berfungsi hanya 230, serta yang berada di Kota Batu 118 yang berfungsi hanya 57 sumber air.
- c. Selain itu juga rusaknya beberapa kawasan hutan karena pembalakan liar dan alih fungsi yang mengakibatkan lahan kritis, yang ditunjukkan oleh luas lahan kritis di luar kawasan hutan sampai dengan awal tahun 2012 masih sekitar 213.086 Ha, dan mengakibatkan banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah Jawa Timur.
- d. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan perubahan iklim, pada berbagai kegiatan yang berpotensi sebagai sumber Emisi GRK, yaitu pertanian, kehutanan, transportasi, energy, industry dan limbah. Sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK, maka Provinsi Jawa Timur telah menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) GRK 2011 – 2020. Fokus utama RAD GRK Provinsi Jawa Timur adalah inisiatif lokal, kesesuaian konteks, dan tindakan. Proses penyusunan RAD GRK dilakukan dengan berdasar kepada basis teknis dan ilmiah yang kuat dengan pengayaan dari *stakeholder* pembangunan. Pelibatan pelaku-pelaku pembangunan ini dimaksudkan agar substansi RAD

GRK yang dihasilkan kemudian dapat didukung implementasinya. Penyusunan RAD GRK berdasarkan kesesuaian dengan RPJP, RPJM Provinsi Jawa Timur dan juga RAN-GRK yang merupakan proses *bottom-up* dan menggambarkan langkah yang akan ditempuh dalam mengurangi emisi gas rumah kaca untuk masing-masing sektor (pertanian, kehutanan, energi, transportasi, industri dan pengelolaan limbah) melalui perhitungan seberapa besar emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dan target pengurangannya.

e. Bencana Alam

- 1) Belum Berkembangnya Sistem Mitigasi Bencana Alam; Banyak wilayah Jawa Timur yang rentan terhadap bencana alam. Apabila tidak disikapi dengan pengembangan sistem kewaspadaan dini (early warning system), maka bencana alam tersebut akan mengancam kehidupan manusia, flora, fauna, dan infrastruktur prasarana publik yang telah dibangun. Pengembangan kebijakan sistem mitigasi bencana alam menjadi sangat penting dan dukungan pemahaman akan “kawasan rawan bencana geologi” (Geological Hazards Mapping) perlu dipetakan secara baik sehingga rencana tata ruang yang disusun dan pola pembangunan kota disesuaikan daya dukung lingkungan lokal;
- 2) Banyaknya desa rawan bencana yang masih belum dibentuk sebagai Desa Tangguh, karena pihak Kab/Kota belum peduli;
- 3) Masih rendahnya pengetahuan di sekolahan akan Penanggulangan bencana, karena masih banyak sekolah yg belum dilatih dan keterbatasan pendanaan.

4. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

a. Sumber Daya Air

- 1) Ketidakseimbangan antara Pasokan dan Kebutuhan air
- 2) Meningkatnya Ancaman terhadap Keberlanjutan Daya Dukung Sumber Daya Air
- 3) Menurunnya Kemampuan Penyediaan Air
- 4) Meningkatnya Potensi Konflik Air
- 5) Kurang Optimalnya Tingkat Layanan Jaringan Irigasi

- 6) Lemahnya Koordinasi, Kelembagaan
- 7) Kerusakan Prasarana Akibat Bencana Alam

b. Kebinamargaan

- 1) Konsistensi alokasi pendanaan APBN pada Pembangunan Jalan dan Jembatan Lintas Selatan maupun proyek sharing lainnya;
- 2) Penambahan panjang Ruas Jalan Nasional di Jawa Timur, meliputi Pelebaran Jalan, Peningkatan Struktur Jalan, Pembangunan Jalan Baru, Pembangunan Jalan dan Jembatan Lintas Selatan serta penggantian Jembatan;
- 3) Kemampuan alokasi pendanaan dibatasi oleh kemampuan PAD, sehingga saat ini, penambahan PAD merupakan kebutuhan prioritas yang sangat mendesak, tidak hanya untuk membiayai pembangunan jalan, melainkan juga untuk penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah provinsi Jawa Timur. Kemampuan pembiayaan yang lemah, justru akan mengakibatkan high cost, menurunkan daya saing dan Pertumbuhan Ekonomi wilayah serta berdampak pada lokal-nasional. Perbandingan antara kebutuhan dan realisasi alokasi belanja infrastruktur jalan dan jembatan yang cenderung menurun, jika dibanding tahun 2011 maupun tahun 2010. GAB antara kebutuhan dengan kemampuan pembiayaan semakin membesar. Tahun 2013, terjadi peningkatan kebutuhan Belanja Langsung penanganan Jalan dan Jembatan Provinsi menjadi Rp. 2,2 Trilyun, namun alokasi pembiayaan tidak banyak bertambah, yaitu Rp. 459 Milyar atau hanya 20%-nya saja. Jika minimnya pembiayaan tersebut berlangsung lama dan terus menerus, hingga melampaui perencanaan umur teknis kondisi mantap jalan, maka pada tahun-tahun berikutnya justru akan membebani APBD, karena jumlah panjang jalan yang tidak tertangani kondisinya akan semakin rusak. Semakin lama tidak tertangani berarti kerusakan semakin parah dan biaya penanganannya menjadi semakin besar. Jika kemampuan pembiayaan tetap, sementara inflasi terus meningkat, maka tidak akan ada pertambahan panjang / pembangunan jalan provinsi baru, karena alokasi dana yang

(Sesuai surat Gubernur kepada Presiden No. 620/24617/110/2012 tanggal 28 Desember 2012). Kebutuhan untuk dana APBD 2014 difokuskan pada Pembangunan Jembatan untuk JLS : Jembatan sepanjang 395 M (11 buah jembatan) dengan biaya Rp 96,45 Milyar).

2) Realisasi Pembangunan Jalan Tembus Lawang-Batu

- a) Pembangunan jalan tembus Lawang-Batu sepanjang 25 Km adalah untuk memberikan alternatif para pengguna jalan menuju Kawasan Wisata Kota Batu dengan waktu tempuh yang lebih singkat. Keberadaan jalan tembus Lawang-Batu sudah sangat mendesak, karena dibutuhkan untuk kepentingan umum dan telah mendapat dukungan kepala daerah beserta stakeholder masing-masing kawasan yang dilalui rencana pembangunan jalan tersebut. Dampak negative kemacetan Lawang-Kota Malang-Batu sangat besar, karena menimbulkan berbagai kerugian sosial dan ekonomi. Pembangunan jalan tembus Lawang-Batu membawa dampak positive, karena selain bisa mengurangi kemacetan dan meningkatkan kenyamanan pengguna jalan juga menghubungkan desa-desa tujuan wisata sehingga akan menarik masuknya investasi disekitar jalan tersebut yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing kawasan tersebut.
- b) Sebagai alternatif untuk memecah kemacetan Lawang-Kota Malang-Batu, adalah realisasi pembangunan jalan alternatif Purwosari-Batu, sepanjang 41 Km.

3) Peningkatan Panjang Jalan Nasional di Jawa Timur

Pada akhir Tahun 2012, kemantapan jalan Nasional telah mencapai 90,85%, berarti pada tahun 2014 kemantapan jalan Nasional akan mendekati 100%. Berarti sudah saatnya panjang Jalan Nasional di Jawa Timur diusulkan untuk ditambah, agar in-effisiensi kemacetan yang memperlambat kelancaran distribusi logistik nasional di Jawa Timur, dapat segera ditangani.

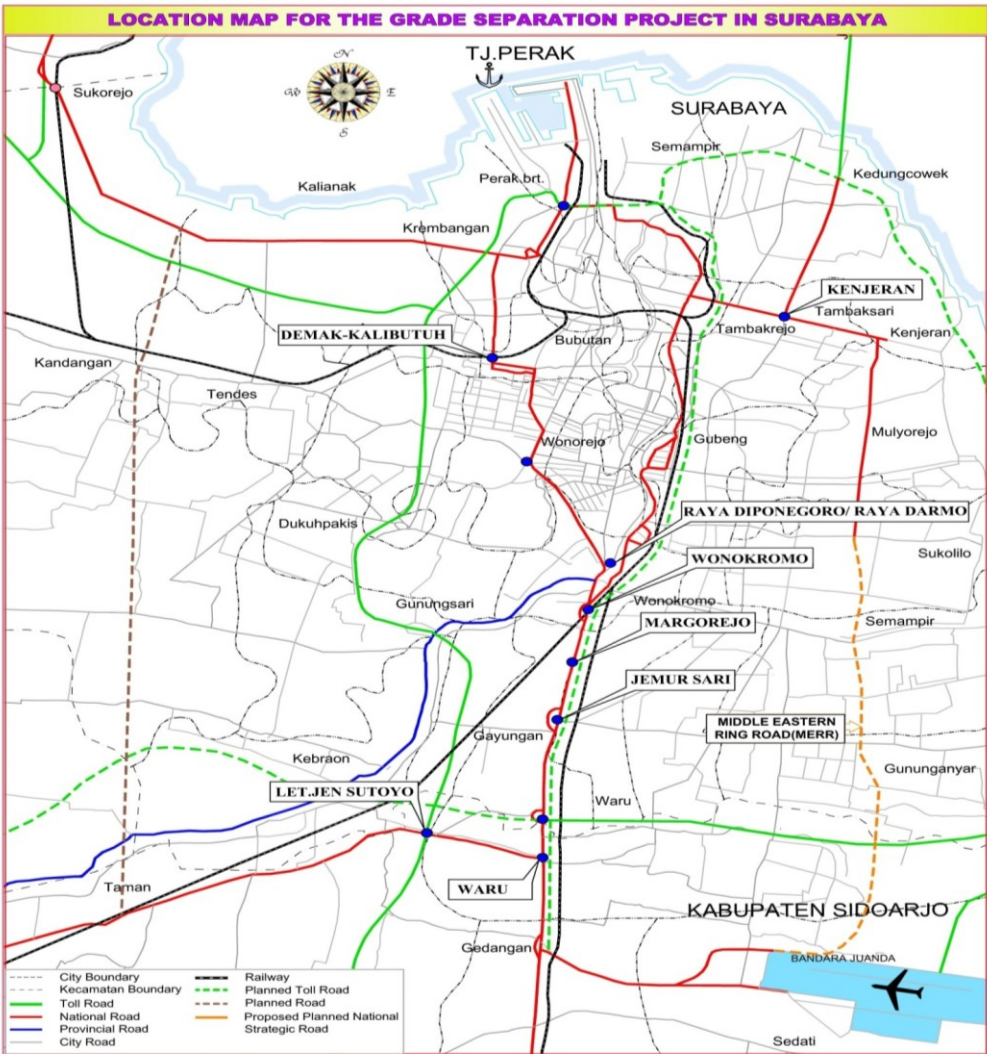
Gambar 2.51
Peta Rencana Pengembangan Jalan Nasional



Penambahan Panjang Jalan Nasional dimaksud adalah pada :

- a) Pengembangan Jalan Nasional Radius 100 Km dari Surabaya menjadi 4 lajur;
- b) Pembangunan Jalan Tembus Lawang-Batu sepanjang 25 Km;
- c) Pembangunan Jalan Purwosari-Batu, sepanjang 41 Km;
- d) Jalan Lintas Utara Pulau Madura dari jalan provinsi menjadi jalan nasional;
- e) Jalan akses menuju Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo;
- f) Realisasi Percepatan Pembangunan Flyover untuk mengatasi kemacetan.

Gambar 2.52
Peta Penambahan Panjang Jalan Nasional



- g) Penanganan debottlenecking pada jalan Nasional sangat dibutuhkan terutama pada ruas Jalan Raya Surabaya-Gresik yang berpotensi tinggi terjadikemacetan dan kecelakaan. Jalan Raya Surabaya-Gresik merupakan Jalan Nasional yang sangat penting peranannya bagi perekonomian Jawa-Timur danjuga Nasional, karena menghubungkan beberapa Kota Besar di Utara Pulau Jawa denganpusat aktivitas berada di Pelabuhan Tanjung Perak.
- h) Percepatan pembebasan lahan Pembangunan Jalan Tol di Jawa Timur.

Tabel 2.124
Progres Pembangunan Jalan Tol di Jawa Timur

NO	RUAS	PENGADAAN TANAH		PROGRES KONSTRUKSI	RENC. OPERASI
		JADWAL	PROGRESS		
1	Solo-Ngawi (PT Solo Ngawi Jaya)	Januari 2011-Juni 2011	I (62,38%) II (61,57%) III (61,55%) IV (78,20%) Total(80,03%)	APBN (48%) BUJT: (0%) Total (11,98%)	Okt-14
2	Ngawi-Kertosono (PT Ngawi Kertosono Jaya)	Januari 2011-Juni 2011	I (74,60%) II (42,75%) III (37,13%) IV (23,06%) Total(43,46%)		Okt-14
3	Kertosono-Mojokerto (PT Marga Harjaya Infrastruktur)	Seksi I (s.d Juni'11), Seksi II (s.d. Agst'11), Seksi III (s.d. Des'11), Seksi IV (s.d. Mei'11)	I (100%) II (76,67%) III (39,63%) IV (79,41%) Total (82,38%)	I (49,74%) II(32,65%) III (0%) IV (0%) Total (36,38%)	Nov 2012 (S-I) Jan 2013 (S-II) Juli 2012 (S-III) April 2014 (S-IV)
4	Mojokerto-Surabaya	1. Desember 2006-Fe 2. Desember 2006-Jun	IA (99,35%) IB (17,41%) II (36,29%) III (50,22%) IV (64,99%) Total (50,62%)	IA (88,69%) IA-1 (100%) II (0%) III(0%) IV (40,52%) IV-3 (66,57) Total (28,76%)	Jun 2012 (S-IA) Feb 2014 (S-IB) Des 2013 (S-II) Des 2013 (S-III) Mei 2014 (S-IV)

Pengembangan Infrastruktur Jalan Wilayah Madura

Jembatan Nasional Surabaya-Madura adalah Jembatan Tol Pertama di Nusantara yang dibangun diatas laut. Jembatan Tol berikutnya yang akan dibangun diatas laut adalah tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Tanjung Benoa Bali dan Tol Selat Sunda. Berbeda dengan jalan tol pada umumnya yang hanya diperuntukkan untuk kendaraan roda empat atau lebih, jembatan tol Suramadu dapat diakses oleh kendaraan roda dua atau sepeda motor. Tujuan Pembangunan Jembatan Tol Suramadu adalah untuk mendorong percepatan pengembangan di 3 (tiga) Kawasan yaitu :

- 1) Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Surabaya / KKJSS;
- 2) Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura / KKJSM;
- 3) Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan Kepulauan Madura / KKM.

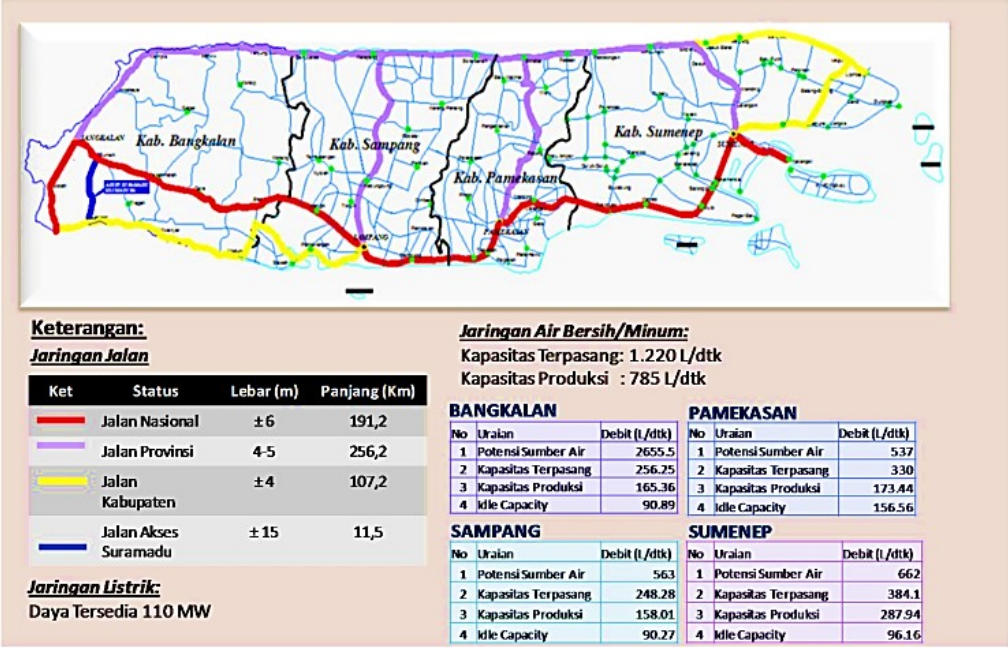
Dalam upaya percepatan Pembangunan Infrastruktur di KKJSS tersebut, Pemerintah Provinsi berupaya :

- 1) Mendorong upaya percepatan pembentukan badan usaha Jembatan Tol Suramadu dan Jalan Tol Lingkar Timur (Simpang Juanda - Tanjung Perak) melalui kerja sama dengan badan usaha pemenang pelelangan pengusahaan jembatan tol dan jalan tol dimaksud;

- 2) Mendorong upaya percepatan pembangunan infrastruktur pendukung untuk memperkuat interaksi antar kawasan;
- 3) Mendorong realisasi rencana Pengembangan Jalan Nasional dan peningkatan Jaringan Propinsi agar sistem jaringan jalan agar kawasan – kawasan potensial tersebut dapat saling terkait, termasuk mendorong percepatan pembangunan Jalan Akses menuju Pelabuhan Socah serta realisasi Pengembangan Pelabuhan Madura Industrial Seaport City (MISI);
- 4) Mendorong realisasi pengembangan pelabuhan nasional untuk melancarkan arus barang antar kawasan dan wilayah kepulauan;
- 5) Mendorong realisasi percepatan pembangunan rencana program lainnya sesuai Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2008 tentang Badan pengembangan Wilayah Suramadu untuk untuk memperkuat interaksi antar Pulau Madura dengan kawasan pusat pertumbuhan ekonomi Wilayah di Jawa Timur.

Pendanaan BPWS untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat Madura lebih baik melibatkan sepenuhnya perangkat Pemerintah Kabupaten, agar BPWS dapat berkonsentrasi penuh dalam pengembangan pembangunan infrastruktur di Madura. Untuk percepatan pembangunan di Madura diperlukan peningkatan koordinasi dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten di Madura dalam pelaksanaan pembebasan tanah untuk pembangunan Jalan Lintas Utara dan Lintas Selatan Madura.

Gambar 2.53
Kondisi Infrastruktur Pulau Madura



c. Infrastruktur Permukiman

Permasalahan dalam pembangunan infrastruktur permukiman antara lain :

- 1) **Air Bersih;** masih terdapatnya daerah rawan air, belum optimalnya pelayanan air minum di perkotaan dan perdesaan, belum optimalnya pengelolaan Air Minum Berbasis Masyarakat, menurunnya kualitas dan kuantitas sumber air di musim kemarau, munculnya konflik kepentingan antar wilayah terkait dengan air baku, serta belum optimalnya inisiasi pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Regional.
- 2) **Air Limbah;** belum optimalnya cakupan layanan air limbah perkotaan dan perdesaan, belum berkembangnya pengolahan sistim air limbah terpusat (sistim sewerage), keterbatasan lahan untuk pengembangan IPAL Komunal, terbatasnya Kab./Kota yang memiliki IPLT, rendahnya peran serta masyarakat dalam pemeliharaan dan pengelolaan pasca pembangunan.
- 3) **Persampahan;** permasalahan pokok persampahan antara lain meliputi masih rendahnya tingkat capaian pelayanan sampah di perkotaan, terbatasnya Kab./Kota yang memiliki TPA sanitary landfill, terbatas dan sulitnya lahan untuk TPA, kurangnya peran serta masyarakat dalam 3R, belum optimalnya pengembangan TPA Regional.

- 4) **Drainase;** masih terdapatnya daerah genangan dan banjir di kawasan perkotaan, kurang sinkronnya pengembangan drainase antar wilayah, terbatasnya kab./kota yang memiliki masterplan drainase, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan drainase sehingga mengakibatkan tidak optimalnya fungsi drainase.

5. Bidang Urusan Penataan ruang

a. Kesenjangan Wilayah

Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berbeda pada masing-masing daerah serta terpusatnya pembangunan pada suatu daerah dapat menciptakan ketidakmerataan pendapatan masyarakat, yang menjadi salah satu indikasi adanya kesenjangan wilayah.

b. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Semakin pesatnya perkembangan pembangunan perkotaan, maka diperlukan instrumen pengendalian khususnya pada kawasan perkotaan yang diindikasikan mengalami banyak alih fungsi lahan. Dengan adanya alih fungsi lahan yang tidak terkontrol, maka akan menyebabkan ketidak sesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

6. Bidang Urusan Perumahan

Pembangunan perumahan telah dilaksanakan dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait, namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan tindak lanjut antara lain masih adanya back log rumah dan kondisi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), terbatasnya pemenuhan kebutuhan rumah yang terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, mahalnnya harga lahan dan terbatasnya untuk permukiman di perkotaan, menurunnya kualitas permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan, terbatasnya akses dan prasarana utilitas permukiman permukiman perdesaan, serta keterbatasan database perumahan.

7. Bidang Urusan Kepemudaan dan olah raga

- a. Masih rendahnya kualitas pemuda.
- b. Minimnya sarana dan kesempatan bagi pemuda untuk menampilkan hasil karya dan kreatifitasnya.
- c. Masih kuranya sarana prasarana olah raga di daerah.
- d. Masih rendahnya kualitas atlit.

8. Bidang Urusan Penanaman Modal

Permasalahan urusan Penanaman Modal antara lain:

- a. Belum optimalnya promosi investasi,
- b. Belum optimalnya sistim jaringan informasi investasi kabupaten / kota se Jawa Timur,
- c. Masih lambatnya realisasi investasi; dan
- d. Masih sedikitnya investasi di industri hilir.

9. Bidang Urusan Koperasi dan UMKM

Permasalahan urusan Koperasi dan UMKM antara lain :

- a. Terbatasnya kemampuan dan akses permodalan bagi koperasi dan UMKM. (Existing : dari 8.506 kopwan telah 3.000 Kopwan berprestasi diperkuat permodalannya, 1.521 Koppontren telah terfasilitasi 400 koppontren, dan dari 1.274 Kopkar telah terfasilitasi 20 Kopkar).
- b. Belum optimalnya kelembagaan koperasi (dari 29.145 koperasi 3.966 (13,7%) tidak aktif).
- c. Terbatasnya peran KUD dalam pengadaan pangan. (Dari 709 KUD, hanya sebagian kecil yang berperan dalam pengadaan pangan belum maksimal).
- d. Masih rendahnya daya saing produk UMKM.

10. Bidang Urusan Kependudukan dan catatan sipil

- a. Belum optimalnya pelaksanaan E-KTP sehingga belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.
- b. Masih perlunya menekan angka pertumbuhan penduduk agar tercipta kualitas penduduk yang memadai sebagai generasi penerus bangsa.

11. Bidang Urusan Ketenagakerjaan

- a. Rendahnya kualitas tenaga kerja dan terbatasnya sarana prasarana pelatihan di BLK.
- b. Tingginya konflik ketenagakerjaan dalam penentuan UMK dan masih rendahnya perlindungan bagi tenaga kerja.

12. Bidang Urusan Ketahanan Pangan

Masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan beras (88,6 Kg/kapita/tahun), pola konsumsi masyarakat belum berimbang (skor PPH 79), fluktuasi harga bahan pangan, masih adanya daerah / desa rawan pangan, dan masih adanya bahan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.

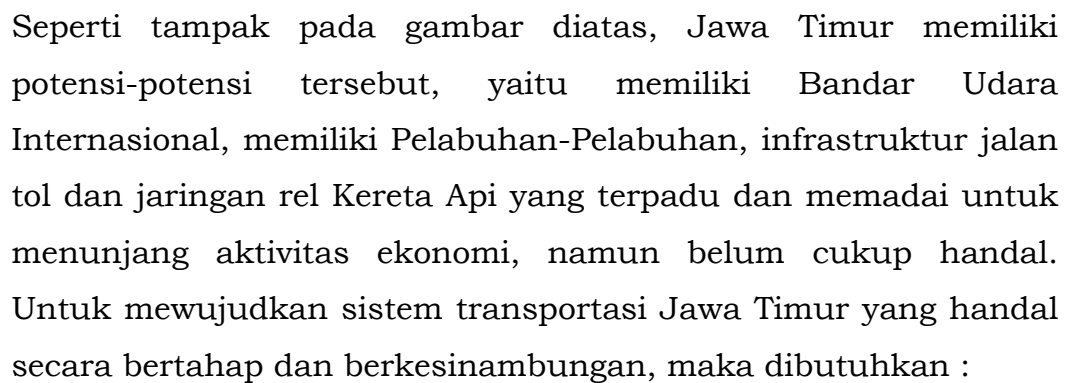
13. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

- a. Masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan;
- b. Masih rendahnya tingkat kesadaran menjadi akseptor KB bagi kaum laki-laki;
- c. Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan banyaknya peraturan perundangan yang bias gender;
- d. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan KDRT;
- e. Belum maksimalnya pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender;

14. Bidang Urusan Perhubungan

Transportasi jalan merupakan moda transportasi utama yang berperan penting dalam mendukung pembangunan Nasional serta mempunyai kontribusi terbesar dalam pangsa angkutan dibandingkan dengan moda lain. Hampir 90% kegiatan barang dan penumpang bertumpu pada moda jalan raya dibandingkan dengan moda transportasi yang lain karena moda jalan memiliki keistimewaan door to door service. Namun dalam pelaksanaan untuk mencapai dan menciptakan kondisi transportasi yang handal, berkemampuan tinggi serta dapat meningkatkan mobilitas manusia dan barang masih sangat sulit, disebabkan banyaknya kompleksitas yang terjadi, antara lain:

- a. Rendahnya kondisi pelayanan prasarana jalan akibat kerusakan struktural sehingga sulit tercapai keterpaduan pembangunan prasarana jalan dengan sistem jaringan transportasi jalan, penataan kelas jalan dan terminal serta pola pelayanan distribusi angkutan jalan antar kota, perkotaan dan perdesaan
- b. Kondisi kualitas dan kuantitas sarana dan pelayanan angkutan umum masih terbatas, walaupun setiap tahun terjadi peningkatan ijin trayek angkutan umum, tetapi tingkat kelaikan armada angkutan umum masih rendah
- c. Rendahnya kelancaran distribusi angkutan jalan disebabkan terbatasnya perkembangan kapasitas prasarana jalan dibandingkan dengan perkembangan armada di jalan.



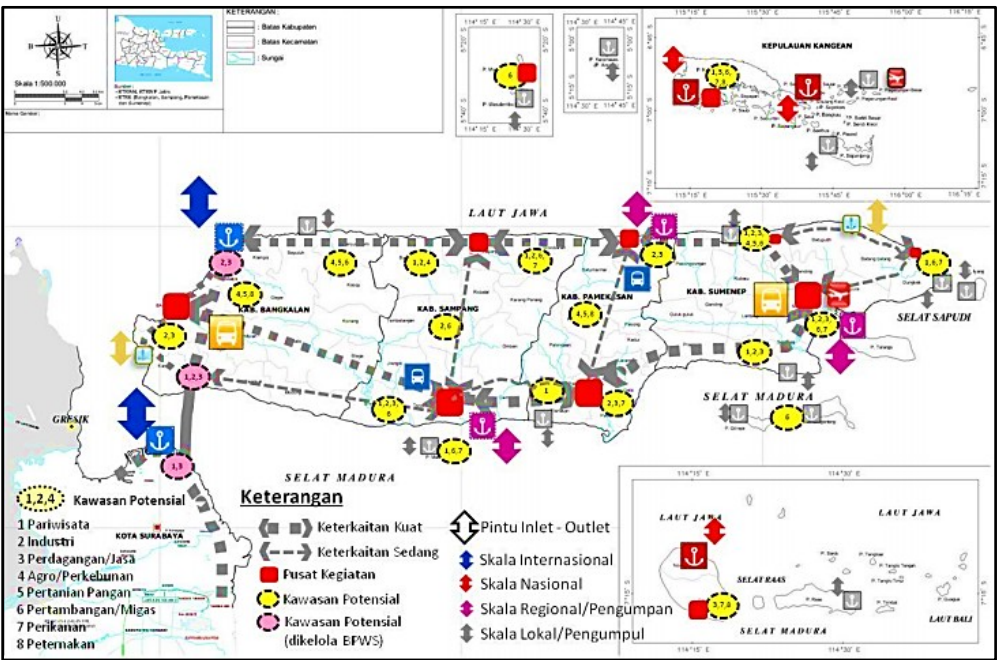
- a. Penanganan segera Overcapacity Pelabuhan Tanjung Perak, termasuk pengembangan jaringan jalan nasional dan penanganan tingginya kepadatan lalu lintas jaringan jalan nasional;
- b. Penanganan segera Overcapacity Bandara Juanda;
- c. Pengembangan segera jaringan transportasi Kereta Api dan Dryport;
- d. Pengembangan jaringan penyeberangan;
- e. Pengembangan jaringan transportasi laut;
- f. Pengembangan jaringan transportasi udara;
- g. Pengembangan keterpaduan antarmoda.

Pengembangan Infrastruktur Transportasi Wilayah Madura

Jembatan Tol Suramadu telah menjadi transportasi utama dari dan ke Pulau Madura karena hanya membutuhkan waktu tempuh kurang lebih 9 menit dari semula 2 jam dengan moda transportasi laut menggunakan kapal ferry. Untuk menarik investasi di Pulau Madura pada Rencana Induk BPWS, telah termuat beberapa rencana pengembangan infrastruktur untuk mendukung sektor pada kawasan-kawasan dan untuk mendukung kelancaran arus barang antar kawasan.

Sesuai dengan kerangka dasar pengembangan wilayah Suramadu, Kawasan Kepulauan Madura merupakan kawasan yang berperan sebagai simpul transportasi infrastruktur regional Pulau Madura untuk mendukung pengembangan kawasan Utara Pulau Madura dan mendukung pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak.

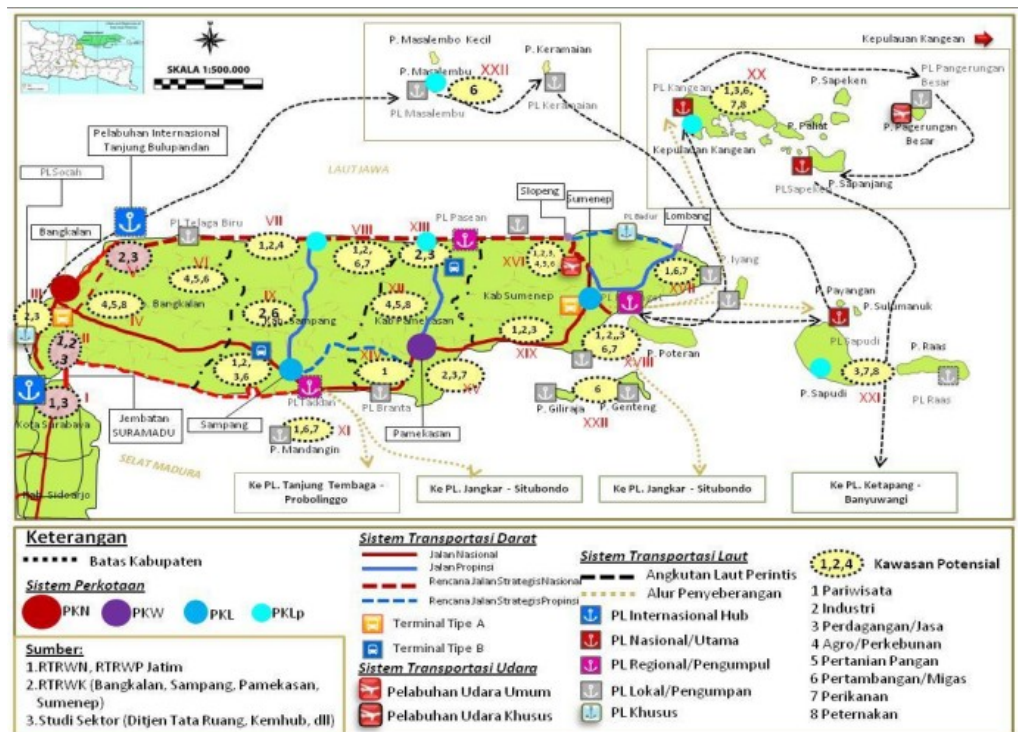
Gambar 2.55
Kerangka Dasar Pengembangan Infrastruktur Wilayah Suramadu



Selain itu, dalam mengoptimalkan perkembangan ekonomi wilayah Madura, pada kawasan ini selain menata simpul transportasi juga dilakukan pengembangan untuk mendukung peran Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Modung Buluh Pandan diarahkan untuk kegiatan industri, pergudangan, perdagangan jasa dan permukiman. Rencana Pengembangan Wilayah Madura, adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Pelabuhan Laut Gilimandagin di Kabupaten Sampang Laut Pelabuhan Laut Giliraja di Kabupaten Sumenep;
- 2) Pembangunan sarana dan prasarana jembatan Timbang di kab Sampang;
- 3) Mendorong realisasi rencana Pengembangan Jalan :
 - a) Lintas Utara untuk mendukung perkembangan kawasan wisata dan industri di Pantai Utara serta untuk menghubungkan kawasan di pantai Utara dengan Pelabuhan Peti Kemas;
 - b) Lintas Tengah-Selatan untuk mendukung pusat – pusat permukiman utama;
 - c) Lintas Selatan (Sampang – Bangkalan) untuk mendukung kawasan pantai Selatan;
 - d) Penghubung lintas Utara dengan lintas Selatan di Kabupaten Sampang, Pamekasan dan Sumenep untuk meningkatkan keterkaitan kawasan – kawasan di pantai Utara dan pantai Selatan.
- 4) Pengembangan RSUD dr. SOETOMO di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu;
- 5) Mendorong realisasi rencana Pembangunan Terminal Type A di Kabupaten Bangkalan;
- 6) Mendorong realisasi rencana Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Kalianget di Kab. Sumenep, Pelabuhan Penyeberangan Tarebung Sapudi di Kab. Sumenep, Pelabuhan Penyeberangan Kangean di Kabupaten Sumenep;
- 7) Mendorong realisasi rencana Pembangunan Dermaga Dungkek di Kabupaten di Sumenep;
- 8) Pembangunan Pelabuhan Nung Gunung di Kabupaten Sumenep;
- 9) Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Taddan di Kabupaten Sampang, Pelabuhan Keramaian di Kabupaten Sumenep, Pelabuhan sapudi di Kabupaten Sumenep, Pelabuhan Pelabuhan Sapeken di Kab. Sumenep.

Gambar 2.56
Rencana Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu



15. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan bentang geografis Jawa Timur yang luas dan tingkat heterogenitas masyarakatnya mengakibatkan adanya kesenjangan (*digital device*) dalam bidang komunikasi dan informatika antara masyarakat yang tinggal di kota dan pedesaan, karena media massa tidak menjangkau sampai pelosok desa (terpencil) khususnya wilayah miskin/blank spot teknologi informasi komunikasi (TIK). Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang belum sadar terhadap pemanfaatan TIK/gagap teknologi (gaptek) karena masih belum adanya persepsi yang sama terhadap masalah pengelolaan dan arti penting komunikasi dan informatika serta masih terbatasnya sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang tersedia.

Selanjutnya terkait dengan media elektronik yang ada di Jawa Timur, Pengawasan Isi Siaran yang dilakukan masih pada lembaga penyiaran televisi sehingga masih belum bisa melakukan pengawasan terhadap seluruh media elektronik termasuk pengawasan terhadap radio yang masih belum optimal. Disamping itu sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan utama (Monitoring Isi Siaran) masih terbatas dan sangat sederhana;

16. Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- a. Belum optimalnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa dan pemahaman wawasan kebangsaan
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi dan serta pemahaman dalam proses politik
- c. Belum semua Kecamatan, Kelurahan/Desa membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
- d. Masih rendahnya tingkat koordinasi dan konsultasi antar berbagai pihak terkait dalam penanganan keamanan dan keteriban

17. Bidang Urusan Pemerintahan Umum

- a. Belum keseluruhan batas antara Jawa Timur dan Jawa Tengah dilakukan perapatan pilar untuk memastikan batas daerah
- b. pengumpulan data agregasi pada LPPD abupaten/Kota tidak sinkron dengan data yang ada pada SKPD Provinsi Jawa Timur pelaksanaan urusan wajib dan pilihan
- c. Terlambatnya permasalahan administrasi yang menghambat proses fasilitasi pilkada;
- d. Belum semua Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan Anggaran untuk mendukung penerapan pengembangan Administrasi Desa berbasis Ilmu Teknologi (IT);
- e. Program kerja sama antar SKPD antar Provinsi yang disepati dalam MPU kurang berjalan optimal;
- f. Banyak kasus-kasus pelanggaran kepegawaian (Disiplin, pidana/gratifikasi/tipikor) di Kabupaten/Kota yang penjatuhan hukumannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Pelaksanaan pendistribusian dan penataan pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi dan hasil analisis kebutuhan jabatan;
- h. Belum adanya standar penilaian kinerja pejabat struktural dan PNS;
- i. Belum semua pelaksana atau pengelola kepegawaian memahami ketentuan dan peraturan perundangan-undangan di bidang kepegawaian.

18. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa

- a. Belum optimalnya peran kader pemberdayaan masyarakat yang telah dilatih dan belum terakreditasinya pelatihat pemberdayaan masyarakat;
- b. Belum terintegrasinya program pemberdayaan masyarakat dengan program pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan;
- c. Kurangnya komitmen penentu kebijakan terhadap penggunaan basis data terpadu dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi.

19. Bidang Urusan Sosial

- a. Masih terbatasnya akses pelayanan sosial dasar bagi PMKS, tingginya angka penyalagunaan narkoba dan makin meningkatnya jumlah penderita HIV/ AIDS;
- b. Masih rendahnya manajemen pelayanan kesejahteraan sosial bidang penanganan korban bencana alam dan bencana sosial.

20. Bidang Urusan Kebudayaan

- a. Semakin lunturnya nilai-nilai budaya di masyarakat;
- b. Semakin turunnya minat generasi muda terhadap budaya daerah.

21. Bidang Urusan Arsip

Kurangnya sosialisasi serta bimbingan teknik teknik tentang kearsipan.

22. Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan pembangunan kelautan dan perikanan yaitu:

- a. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
- b. Terbatasnya sarana prasarana alat tangkap nelayan;
- c. Menurunnya potensi Sumberdaya ikan di wilayah Pantai Utara Jawa Timur,
- d. Masih rendahnya Kualitas benih dan induk;
- e. Tingginya Harga pakan ikan pabrikan;
- f. Masih rendahnya Mutu dan hasil tangkapan kualitas mutu komoditas ekspor dengan *Cold Chain System (CCS)* belum optimal;
- g. Tingginya tingkat abrasi pantai.

23. Bidang Urusan Pertanian

Permasalahan pada bidang urusan pertanian antara lain:

- a. Belum optimalnya produksi dan produktivitas lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan;
- b. Masih tingginya alih fungsi lahan pertanian produktif;
- c. Masih rendahnya daya saing produk pertanian;
- d. Belum optimalnya peran kelembagaan petani dan penyuluh pertanian;
- e. Rendahnya kemampuan petani dalam akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan;
- f. Rendahnya kandungan bahan organik tanah;
- g. Terbatasnya ketersediaan pakan dan teknologi;
- h. Masih terbatasnya RPH modern yang berstandar SNI;
- i. Jatuhnya harga gabah pada saat panen;
- j. Kesulitan bahan pangan pada saat paceklik;
- k. Peningkatan kebutuhan dan konsumsi pangan yang beragam, seimbang dan aman;
- l. Kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya hutan dan penataan kawasan Tahura R. Soerjo;
- m. Masih adanya lahan kritis di dalam kawasan Tahura dan di Luar Tahura R. Soerjo.

24. Bidang Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral

- a. Ketergantungan akan bahan bakar fosil mengakibatkan menipisnya pasokan energi dan perlunya pengembangan Energi Baru dan Terbarukan seperti biogas, air, panas bumi, surya, dan angin. Tingkat elektrifikasi di Jawa Timur masih rendah yaitu 75,56 %, sehingga masih 24,44 % penduduk di Jawa Timur yang belum berlistrik, sedang untuk pengembangan listrik dengan pembangkit energi alternatif memerlukan biaya cukup besar.
- b. Keterbatasan suplai energy dari jaringan listrik PLN, mengakibatkan beberapa desa/dusun di daerah pedesaan, terpencil dan kepulauan. di Jawa Timur belum berlistrik. Hal ini disebabkan karena beberapa wilayah permukiman tersebut jauh dari jangkauan infrastruktur/jaringan PLN dan jumlah calon pelanggan tidak signifikan atau terlampaui sedikit.
- c. Masih belum ditetapkannya Wilayah Pertambangan (WP) oleh

Pemerintah Pusat dan adanya surat edaran dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral perihal penghentian sementara penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru.

- d. Terdapat kegiatan pertambangan dan pengambilan air tanah yang belum berijin dan tidak sesuai dengan ketentuan teknik/tata cara penambangan yang tepat, serta indikasi meningkatnya intensitas pengambilan air tanah., yang dikhawatirkan akan menyebabkan kerusakan lingkungan.
- e. Berdasarkan karakteristik geologi, geografi dan morfologi wilayah, terdapat wilayah-wilayah tertentu di Jawa Timur yang sulit air karena dari sisi jumlah dan penyebarannya kurang memiliki potensi air tanah.
- f. Berdasarkan pada kerangka geologi secara regional dan sifat litologinya serta faktor lainnya, Jawa Timur Jawa Timur memiliki beberapa gunung berapi aktif, seperti Gunung Kelud, Bromo, Semeru dan Raung, yang berpotensi menimbulkan bencana alam geologi seperti gempa bumi gerakan tanah, gunung meletus dan tsunami. Namun data geologi lingkungan belum lengkap dan terdapat kerusakan situs geologi.

25. Bidang Urusan Industri

Permasalahan pada urusan industri antara lain:

- a. Masih tingginya impor bahan baku/penolong (dimana pada tahun 2011 : 84,15% sedang pada tahun 2012 meningkat menjadi 86,34%),
- b. Kurangnya keterkaitan Struktur Industri, antara Industri Hulu, Antara dan Hilir, yang terindikasi dari kecilnya (23,63%) komoditas unggulan daerah dengan daya penyebaran dan daya kepekaan tinggi.
- c. Relatif lemahnya daya saing IKM & Industri Kreatif.
- d. Ancaman penurunan produksi dan penutupan pabrik rokok (kontributor tertinggi sub sektor Industri Pengolahan di Jatim) akibat penerapan PP 109/2012,
- e. Kurangnya sinergitas input pendorong industri dan jasa nasional (MP3EI) di Jawa Timur.

26. Bidang Urusan Perdagangan

Permasalahan pada urusan perdagangan antara lain:

- a. Kurang lancarnya logistik ekspor-impor;

- b. Turunnya kinerja ekspor non-migas (-16,3 % dibanding tahun 2011) sebagai akibat krisis finansial global di Uni Eropa dan Amerika;
- c. Antisipasi struktur pasar yang cenderung berpihak kepada pemodal besar (kartel pada komoditas tertentu) sebagai dampak importasi;
- d. Kurang memadainya infrastruktur rantai pasok perdagangan regional;
- e. Fluktuasi harga komoditas bahan makanan pokok yang cenderung ekstrem pada hari besar keagamaan tertentu;
- f. Rendahnya harga jual komoditas tertentu di saat over supply ketika panen raya;
- g. Inefisiensi konektivitas perdagangan antar pulau dan asimetri informasi pada wilayah mitra dagang antar provinsi (24 Kantor Perwakilan Dagang).

27. Bidang Urusan Ketrasmigrasian

- a. Kurangnya Minat masyarakat Jawa Timur untuk memperbaiki perekonomian melalui program transmigrasi;
- b. Masih ditemukan kendala terkait kesiapan daerah penempatan transmigrasi yang menyebabkan keterlambatan pemberangkatan transmigran.